



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TA. 2021
(Audited)**



DAFTAR ISI

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) Surat Representasi Manajemen Pernyataan Tanggung Jawab

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	i
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	iii
3. Neraca	iv
4. Laporan Operasional	vi
5. Laporan Arus Kas	ix
6. Laporan Perubahan Ekuitas.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II.....	5
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	5
2.1 Ekonomi Makro	5
2.1.1 Tingkat Kemiskinan.....	5
2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	6
2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio).....	7
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	8
2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi	8
2.1.6 Inflasi	9
2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat	10
2.2 Kebijakan Keuangan.....	10
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	10
2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah	14
2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	19
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	20
BAB III.....	22
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	22
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	22
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	23
3.2.1 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Pendapatan	23
3.2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Belanja	31
BAB IV	56
KEBIJAKAN AKUNTANSI	56
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	56
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	57
4.2.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan	57
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	58
4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO	58
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban	58
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	59

4.3.4	Kebijakan Akuntansi Aset	59
4.3.5	Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas.....	60
4.3.6	Kebijakan Akuntansi Konsolidasi	61
4.3.7	Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas.....	62
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	63
BAB V.....		67
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....		67
5.1	Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	67
5.1.1	Pendapatan-LRA.....	67
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah.....	67
	1) Pendapatan Pajak Daerah.....	68
	2) Pendapatan Retribusi Daerah	69
	3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	71
	4) Lain-lain PAD yang Sah	71
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	72
	1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	73
	a. Dana Perimbangan	73
	b. Dana Desa	76
	c. Dana Penyesuaian (DID dan DID Tambahan).....	76
	2) Pendapatan Transfer Antar Daerah	76
	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76
	b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	77
5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	77
5.1.2	Belanja	77
5.1.2.1	Belanja Operasi.....	78
	1) Belanja Pegawai.....	78
	2) Belanja Barang dan Jasa	80
	3) Belanja Bunga.....	82
	4) Belanja Hibah.....	82
	5) Belanja Bantuan Sosial	83
5.1.2.2	Belanja Modal.....	83
	1) Belanja Modal Tanah	84
	2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84
	3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86
	4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	87
	5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	87
	6) Belanja Modal Aset Lainnya.....	88
5.1.2.3	Belanja Tidak Terduga.....	88
5.1.2.4	Belanja Transfer.....	89
	1) Belanja Bagi Hasil	89
	2) Belanja Bantuan Keuangan	89
5.1.3	Pembiayaan Netto.....	90
5.1.3.1	Penerimaan Pembiayaan	90
	a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.....	91
	b) Penerimaan Pinjaman Daerah	91
	c) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	91
5.1.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	91
	a) Penyertaan Modal Daerah.....	92
	b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	92

5.1.4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).....	92
5.2	Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	94
5.3	Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca	95
5.3.1	Aset.....	95
5.3.1.1	Aset Lancar.....	95
	1) Kas di Kas Daerah.....	96
	2) Kas di Bendahara Pengeluaran.....	96
	3) Kas di Bendahara Penerimaan	97
	4) Kas JKN	97
	5) Kas BLUD.....	98
	6) Kas BOS.....	98
	7) Piutang Pajak.....	99
	8) Piutang Retribusi.....	100
	9) Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi.....	101
	10) Piutang Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21	102
	11) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	103
	12) Piutang Lainnya	103
	13) Penyisihan Piutang Lainnya	103
	14) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	103
	15) Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.....	103
	16) Beban Dibayar Di Muka	104
	17) Persediaan	104
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	106
	1) Investasi Non Permanen.....	106
	2) Investasi Permanen	107
5.3.1.3	Aset Tetap.....	109
	1) Tanah.....	109
	2) Peralatan dan Mesin	115
	3) Gedung dan Bangunan	120
	4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	126
	5) Aset Tetap Lainnya	130
	6) Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	133
	7) Akumulasi Penyusutan.....	135
5.3.1.4	Aset Lainnya.....	137
	1) Tagihan Lainnya	138
	2) Aset yang Dibatasi Penggunaannya	139
	3) Aset Tak Berwujud	139
	4) Amortisasi	141
	5) Aset Lain-lain.....	142
	6) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	146
5.3.2	Kewajiban.....	147
	1) Pendapatan Diterima Di Muka.....	147
	2) Utang Belanja.....	147
	3) Utang Jangka Pendek Lainnya	149
5.3.3	Ekuitas	149
5.4	Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	150
5.4.1	Pendapatan – LO.....	150
5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah-LO	150

1)	Pendapatan Pajak Daerah-LO	150
2)	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	151
3)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	153
4)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	153
5.4.1.2	Pendapatan Transfer-LO	154
5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	158
5.4.2	Beban – LO	160
5.4.2.1	Beban Operasi	161
1)	Beban Pegawai	161
2)	Beban Barang dan Jasa	163
a.	Beban Barang/Persediaan	163
b.	Beban Jasa	164
c.	Beban Pemeliharaan	166
d.	Beban Perjalanan Dinas	167
e.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	168
3)	Beban Bunga	169
4)	Beban Hibah	169
5)	Beban Bantuan Sosial	170
6)	Beban Penyusutan	171
7)	Beban Amortisasi	173
8)	Beban Penyisihan Piutang	171
5.4.2.2	Beban Transfer	174
5.4.2.3	Beban Tak Terduga	175
5.4.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	175
5.4.4	Surplus Non-Operasional	175
5.4.5	Defisit Non-Operasional	175
5.4.6	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional	176
5.4.7	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	176
5.4.8	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	176
5.4.9	Surplus/(Defisit) – LO	176
5.5	Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas	177
5.5.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	177
5.5.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	178
5.5.3	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	178
5.5.4	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	179
5.5.5	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	179
5.5.6	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	180
5.5.7	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	180
5.5.8	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	180
5.5.9	Saldo Akhir Kas	180
5.6	Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	182
BAB VI	187
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	187
BAB VII	188
PENUTUP	188

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat	6
Tabel 2.3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat	6
Tabel 2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat	7
Tabel 2.5	Gini Ratio Kabupaten Kotawaringin Barat.....	7
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia	8
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat	9
Tabel 2.8	Tingkat Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat.....	10
Tabel 2.9	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam Miliar Rupiah)	10
Tabel 3.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat	22
Tabel 5.1	Rincian Pendapatan-LRA	67
Tabel 5.2	Rincian Pendapatan Asli Daerah	68
Tabel 5.3	Rincian Pendapatan Pajak Daerah.....	69
Tabel 5.4	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah	69
Tabel 5.5	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah pada SKPD.....	70
Tabel 5.6	Rincian Lain-lain PAD yang Sah	71
Tabel 5.7	Rincian Lain-lain PAD yang Sah pada SKPD.....	72
Tabel 5.8	Rincian Pendapatan Transfer	72
Tabel 5.9	Rincian Dana Perimbangan	73
Tabel 5.10	Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.....	74
Tabel 5.11	Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.....	75
Tabel 5.12	Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak.....	77
Tabel 5.13	Rincian Belanja.....	78
Tabel 5.14	Rincian Belanja Operasi	78
Tabel 5.15	Rincian Belanja Pegawai	79
Tabel 5.16	Rincian Belanja Pegawai pada SKPD	79
Tabel 5.17	Rincian Belanja Barang dan Jasa.....	80
Tabel 5.18	Rincian Belanja Barang dan Jasa pada SKPD	81
Tabel 5.19	Rincian Belanja Hibah.....	83
Tabel 5.20	Rincian Belanja Bantuan Sosial.....	83
Tabel 5.21	Rincian Belanja Modal	84
Tabel 5.22	Rincian Belanja Modal Tanah pada SKPD.....	84
Tabel 5.23	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada SKPD	85
Tabel 5.24	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada SKPD	86
Tabel 5.25	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD	87
Tabel 5.26	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada SKPD	88
Tabel 5.27	Rincian Belanja Transfer	89
Tabel 5.28	Perhitungan Pembiayaan Netto.....	90
Tabel 5.29	Rincian Penerimaan Pembiayaan	91
Tabel 5.30	Rincian Pengeluaran Pembiayaan.....	92
Tabel 5.31	Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	93
Tabel 5.32	Rincian Kenaikan/Penurunan Saldo Anggaran Lebih	94
Tabel 5.33	Rincian Aset	95

Tabel 5.34	Rincian Aset Lancar	95
Tabel 5.35	Rincian Kas Di Rekening Kas Daerah.....	96
Tabel 5.36	Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran.....	97
Tabel 5.37	Rincian Kas Di Bendahara Penerimaan.....	97
Tabel 5.38	Rincian Kas JKN	97
Tabel 5.39	Rincian Kas BOS.....	98
Tabel 5.40	Rincian Piutang Pajak.....	99
Tabel 5.41	Daftar Piutang Pajak per Tahun.....	99
Tabel 5.42	Rincian Piutang Retribusi pada SKPD	100
Tabel 5.43	Daftar Piutang Retribusi per Tahun.....	101
Tabel 5.44	Rincian Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi	101
Tabel 5.45	Daftar Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah pada SKPD	101
Tabel 5.46	Rincian Beban Dibayar Di Muka	104
Tabel 5.47	Rincian Persediaan.....	104
Tabel 5.48	Daftar Saldo Akhir Persediaan pada SKPD.....	105
Tabel 5.49	Rincian Investasi Non Permanen	106
Tabel 5.50	Aging Schedule Dana Bergulir	107
Tabel 5.51	Rincian Investasi Permanen.....	107
Tabel 5.52	Investasi Permanen pada PT Bank Pembangunan Kalteng (<i>Cost Method</i>)	107
Tabel 5.53	Investasi Permanen pada PD BPR Marunting Sejahtera (<i>Equity Method</i>)	107
Tabel 5.54	Investasi Permanen pada PDAM Arut Tirta (<i>Equity Method</i>).....	108
Tabel 5.55	Investasi Permanen pada PD Agrotama Mandiri (<i>Equity Method</i>)	108
Tabel 5.56	Investasi Permanen pada PT Jamkrida (<i>Cost Method</i>)	108
Tabel 5.57	Rincian Aset Tetap	109
Tabel 5.58	Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Tanah.....	109
Tabel 5.59	Rekapitulasi Tanah Di Bawah Jalan	113
Tabel 5.60	Rincian Saldo Aset Tetap – Tanah Berdasarkan Jenisnya.....	113
Tabel 5.61	Daftar Saldo Aset Tetap – Tanah pada SKPD.....	114
Tabel 5.62	Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	115
Tabel 5.63	Daftar Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin pada SKPD	119
Tabel 5.64	Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	121
Tabel 5.65	Daftar Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan pada SKPD	125
Tabel 5.66	Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan	126
Tabel 5.67	Daftar Saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD	130
Tabel 5.68	Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya	131
Tabel 5.69	Daftar Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD.....	132
Tabel 5.70	Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan	133
Tabel 5.71	Daftar Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada SKPD	134
Tabel 5.72	Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap	135
Tabel 5.73	Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada SKPD	136
Tabel 5.74	Rincian Aset Lainnya	137
Tabel 5.75	Rincian Tagihan Lainnya.....	138
Tabel 5.76	Rincian Aset yang Dibatasi Penggunaannya	139
Tabel 5.77	Penambahan/Pengurangan Aset Tak Berwujud.....	140
Tabel 5.78	Daftar Saldo Aset Tak Berwujud pada SKPD.....	141
Tabel 5.79	Daftar Saldo Amortisasi pada SKPD.....	142
Tabel 5.80	Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Lain-lain.....	143
Tabel 5.81	Daftar Saldo Aset Lain-lain pada SKPD	145

Tabel 5.82	Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada SKPD.....	146
Tabel 5.83	Rincian Kewajiban.....	147
Tabel 5.84	Rincian Utang Belanja.....	148
Tabel 5.85	Daftar Utang Belanja pada SKPD	148
Tabel 5.86	Rincian Pendapatan-LO.....	150
Tabel 5.87	Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO	151
Tabel 5.88	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO.....	151
Tabel 5.89	Daftar Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada SKPD	152
Tabel 5.90	Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.....	153
Tabel 5.91	Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	153
Tabel 5.92	Daftar Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO pada SKPD.....	154
Tabel 5.93	Rincian Pendapatan Transfer-LO	155
Tabel 5.94	Rincian Dana Perimbangan-LO.....	155
Tabel 5.95	Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO.....	156
Tabel 5.96	Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	157
Tabel 5.97	Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	158
Tabel 5.98	Rincian Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO.....	159
Tabel 5.99	Rincian Beban – LO	160
Tabel 5.100	Rincian Beban Operasi	161
Tabel 5.101	Rincian Beban Pegawai	161
Tabel 5.102	Daftar Beban Pegawai pada SKPD.....	162
Tabel 5.103	Rincian Beban Barang dan Jasa.....	163
Tabel 5.104	Daftar Beban Barang/Persediaan pada SKPD	163
Tabel 5.105	Daftar Beban Jasa pada SKPD	164
Tabel 5.106	Daftar Beban Pemeliharaan pada SKPD	166
Tabel 5.107	Daftar Beban Perjalanan Dinas pada SKPD	167
Tabel 5.108	Daftar Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada SKPD	168
Tabel 5.109	Rincian Beban Hibah.....	169
Tabel 5.110	Daftar Beban Hibah pada SKPD	169
Tabel 5.111	Rincian Beban Bantuan Sosial.....	170
Tabel 5.112	Rincian Beban Penyisihan Piutang	171
Tabel 5.113	Daftar Beban Penyisihan Piutang pada SKPD	171
Tabel 5.114	Rincian Beban Penyusutan	172
Tabel 5.115	Daftar Beban Penyusutan pada SKPD.....	172
Tabel 5.116	Daftar Beban Amortisasi pada SKPD.....	174
Tabel 5.117	Rincian Beban Transfer	174
Tabel 5.118	Rincian Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	177
Tabel 5.119	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi.....	177
Tabel 5.120	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi.....	178
Tabel 5.121	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	179
Tabel 5.122	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	179
Tabel 5.123	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan.....	180
Tabel 5.124	Rincian Saldo Akhir Kas	181
Tabel 5.125	Koreksi Penyisihan Piutang pada SKPD	184
Tabel 5.126	Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi pada SKPD	184
Tabel 5.127	Koreksi Nilai Utang pada SKPD	186

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5.1	Daftar Aset Bersengketa.....	189
Lampiran 5.2	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	192



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, April 2022

Nomor : 900/ 506 /V/BPKAD/2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada
Yth. Kepala Perwakilan BPK-RI
Provinsi Kalimantan Tengah
Di –
Palangka Raya

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca per 31 Desember 2021, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Surat representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK-RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2021 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern.
13. Kami telah menilai efektifitas Sistem Pengendalian Intern dalam hal:
 - a) Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b) Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
18. Berkaitan dengan dampak pandemi *Covid-19*:
 - a) Kami telah mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, dan mempertimbangkan semua dampak keuangan dari pandemi *Covid-19* dan dampak peristiwa signifikan lainnya pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2021.
 - b) Kami telah menyajikan dalam Laporan Keuangan dan/atau telah mengungkapkan semua yang diperlukan terkait dengan dampak dari pandemi *Covid-19* tersebut.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH, SH., MH.



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pangkalan Bun, April 2022
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH, SH., MH.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Audited)

(dalam Rupiah)

Kode	URAIAN	Anggaran Perubahan 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
4	PENDAPATAN	1.454.636.011.759,00	1.633.972.466.127,94	112,33	1.449.011.596.895,94
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	249.202.388.200,00	392.164.379.004,55	157,37	224.651.929.841,28
4.1.01	Pajak Daerah	81.025.000.000,00	70.389.757.706,05	86,87	64.838.822.752,80
4.1.02	Retribusi Daerah	24.180.218.900,00	12.611.932.516,30	52,16	13.208.556.926,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.449.954.800,00	12.470.117.812,00	100,16	9.804.364.851,00
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	131.547.214.500,00	296.692.570.970,20	225,54	136.800.185.311,48
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.154.501.437.959,00	1.203.708.747.726,33	104,26	1.186.742.690.871,07
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.071.501.437.959,00	1.123.614.847.716,00	104,86	1.122.099.230.643,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	986.200.104.959,00	1.038.859.842.934,00	105,34	958.924.263.043,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	75.694.740.000,00	135.229.818.254,00	178,65	64.383.434.319,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	593.260.006.000,00	593.260.006.000,00	100,00	602.446.484.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	237.076.219.000,00	230.385.941.118,00	97,18	199.275.635.447,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	80.169.139.959,00	79.984.077.562,00	99,77	92.818.709.277,00
4.2.01.01.05	Dana Desa	85.301.333.000,00	84.755.004.782,00	99,36	81.413.807.600,00
	Dana Penyesuaian (DID dan DID Tambahan)	-	-	-	81.761.160.000,00
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	83.000.000.000,00	80.093.900.010,33	96,50	64.643.460.228,07
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	83.000.000.000,00	80.093.900.010,33	96,50	64.243.460.228,07
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	400.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50.932.185.600,00	38.099.339.397,06	74,80	37.616.976.183,59
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.932.185.600,00	38.099.339.397,06	74,80	37.616.976.183,59
5	BELANJA	1.529.006.284.628,00	1.461.583.803.894,41	95,59	1.442.474.017.840,80
5.1	BELANJA OPERASI	941.467.035.461,00	886.809.604.687,83	94,19	858.901.457.730,67
5.1.01	Belanja Pegawai	546.299.752.105,00	533.526.478.475,48	97,66	441.025.705.448,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.832.350.010,00	331.364.771.908,23	91,33	407.431.358.282,67
5.1.03	Belanja Bunga	847.000.000,00	847.000.000,00	100,00	-
5.1.05	Belanja Hibah	29.574.683.346,00	19.304.426.304,12	65,27	7.351.394.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.913.250.000,00	1.766.928.000,00	92,35	3.093.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	421.376.918.067,00	413.698.499.168,58	98,18	377.005.194.475,77
5.2.01	Belanja Modal Tanah	100.900.000,00	100.900.000,00	100,00	415.506.760,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.971.852.723,00	69.514.111.613,00	93,97	97.622.948.332,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.608.245.963,00	171.955.314.980,00	98,48	143.482.401.078,77
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	167.763.057.574,00	167.205.556.475,58	99,67	125.882.549.773,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Audited)

(dalam Rupiah)

Kode	URAIAN	Anggaran Perubahan 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.932.861.807,00	4.922.616.100,00	99,79	4.759.374.090,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	4.842.414.442,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	3.200.000.000,00	1.547.938.856,00	48,37	49.260.669.634,36
5.3.01	Belanja Tak Terduga	3.200.000.000,00	1.547.938.856,00	48,37	49.260.669.634,36
5.4	BELANJA TRANSFER	162.962.331.100,00	159.527.761.182,00	97,89	157.306.696.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.520.522.100,00	7.632.280.400,00	72,55	7.740.424.700,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	152.441.809.000,00	151.895.480.782,00	99,64	149.566.271.300,00
	SURPLUS/DEFISIT	(74.370.272.869,00)	172.388.662.233,53	(231,80)	6.537.579.055,14
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130.531.350.426,00	130.531.350.426,37	100,00	95.493.771.371,23
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	97.531.350.426,00	97.531.350.426,37	100,00	59.479.771.371,23
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	100,00	36.000.000.000,00
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	14.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.000.000.000,00	41.000.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	100,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	89.531.350.426,00	89.531.350.426,37	100,00	90.993.771.371,23
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	15.161.077.557,00	261.920.012.659,90		97.531.350.426,37

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, April 2022
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH, SH., MH.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Audited)

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	97.531.350.426,37	59.479.771.371,23
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(97.531.350.426,37)	(59.479.771.371,23)
3	Subtotal (1 + 2)	-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	261.920.012.659,90	97.590.424.926,37
5	Subtotal (3 + 4)	261.920.012.659,90	97.590.424.926,37
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
7	Lain-lain	-	(59.074.500,00)
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6)	261.920.012.659,90	97.531.350.426,37

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, April 2022
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH, SH., MH.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Audited)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	68.450.111.633,93	44.402.895.610,80
	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.095.194,00	3.367.123,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	20.277.093,00	7.835.000,00
	Kas JKN	533.961,00	388.439.034,00
	Kas BLUD	167.590.918.858,64	18.962.379.039,12
	Kas BOS	198.943.550,53	1.611.950.309,65
	Piutang Pajak	44.711.059.810,17	41.093.736.163,45
	Penyisihan Piutang Pajak	(31.572.099.488,31)	(27.338.328.868,98)
	Piutang Retribusi	2.905.509.406,50	1.587.470.143,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.096.421.324,98)	(753.398.068,45)
	Piutang Bagi Hasil Pajak PPh 21	170.247.730,00	579.089.303,00
	Penyisihan Piutang BHP Pajak PPh 21	-	-
	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	34.625.557.401,92	32.637.149.875,29
	Piutang Lainnya	22.897.522.223,00	97.209.155.589,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(2.221.254.721,00)	(5.690.612.058,45)
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	40.570.143,00	63.289.423,50
	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(40.570.143,00)	(31.644.711,75)
	Beban Dibayar Di Muka	335.234.824,33	343.830.227,96
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Persediaan	52.174.386.169,87	51.010.082.128,19
	Jumlah Aset Lancar	359.195.622.322,60	256.086.685.262,33
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Non Permanen	218.705.204,00	218.705.204,00
	Investasi Permanen	135.616.458.860,45	130.035.019.825,41
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	135.835.164.064,45	130.253.725.029,41
1.3	ASET TETAP		
	Tanah	573.976.967.018,07	498.396.123.964,07
	Peralatan dan Mesin	679.967.382.463,55	607.825.996.038,55
	Gedung dan Bangunan	1.232.792.193.621,29	1.087.204.097.394,82
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.059.391.512.388,30	2.884.524.022.534,07
	Aset Tetap Lainnya	43.770.873.560,40	42.243.910.443,40
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	136.022.753.529,36	113.172.344.563,91
	Akumulasi Penyusutan	(2.882.550.861.308,94)	(2.592.903.399.665,60)
	Jumlah Aset Tetap	2.843.370.821.272,03	2.640.463.095.273,22
1.5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Tagihan Lainnya	175.342.231,00	175.342.231,00
	Aset yang Dibatasi Penggunaannya	25.654.132.368,80	32.154.484.809,80
	Aset Tak Berwujud	51.356.828.667,00	49.212.867.367,00
	Amortisasi	(42.402.028.557,40)	(37.637.624.341,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Audited)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Aset Lain-lain	28.483.271.291,00	21.715.281.878,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(13.701.816.506,17)	(6.461.605.757,24)
	Jumlah Aset Lainnya	49.565.729.494,23	59.158.746.187,56
	JUMLAH ASET	3.387.967.337.153,31	3.085.962.251.752,52
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Pendapatan Diterima Di Muka	115.639.302,19	53.626.410,96
	Utang Belanja	83.764.199.615,24	111.850.190.338,99
	Utang Jangka Pendek Lainnya	33.000.000.000,00	36.000.000.000,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	116.879.838.917,43	147.903.816.749,95
	JUMLAH KEWAJIBAN	116.879.838.917,43	147.903.816.749,95
3	EKUITAS	3.271.087.498.235,88	2.938.058.435.002,57
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.387.967.337.153,31	3.085.962.251.752,52

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, April 2022
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH, SH., MH.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Audited)

(dalam Rupiah)

Kode Akun	URAIAN	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan
	KEGIATAN OPERASIONAL			
7	PENDAPATAN-LO	1.552.401.516.068,48	1.535.448.527.918,09	16.952.988.150,39
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	331.547.556.916,60	297.799.584.382,39	33.747.972.534,21
7.1.01	Pajak Daerah-LO	74.740.551.967,77	66.328.550.464,37	8.412.001.503,40
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	13.928.596.779,80	13.589.810.282,00	338.786.497,80
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	11.919.901.185,00	9.327.140.787,00	2.592.760.398,00
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	230.958.506.984,03	208.554.082.849,02	22.404.424.135,01
7.2	PENDAPATAN TRANSFER -LO	1.120.942.150.470,96	1.137.966.033.146,36	(17.023.882.675,40)
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.038.859.842.934,00	1.040.685.423.043,00	(1.825.580.109,00)
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	1.038.859.842.934,00	958.924.263.043,00	79.935.579.891,00
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO	135.229.818.254,00	64.383.434.319,00	70.846.383.935,00
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-LO	593.260.006.000,00	602.446.484.000,00	(9.186.478.000,00)
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	230.385.941.118,00	199.275.635.447,00	31.110.305.671,00
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	79.984.077.562,00	92.818.709.277,00	(12.834.631.715,00)
7.2.01.05	Dana Desa-LO	-	-	-
	Dana Penyesuaian (DID dan DID Tambahan)-LO	-	81.761.160.000,00	(81.761.160.000,00)
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	82.082.307.536,96	97.280.610.103,36	(15.198.302.566,40)
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	82.082.307.536,96	96.880.610.103,36	(14.798.302.566,40)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya-LO	-	400.000.000,00	(400.000.000,00)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	99.911.808.680,92	99.682.910.389,34	228.898.291,58
7.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	99.911.808.680,92	99.227.910.389,34	683.898.291,58
	Pendapatan Lainnya	-	455.000.000,00	(455.000.000,00)
8	BEBAN	1.273.606.510.310,78	1.280.723.248.945,70	(7.116.738.634,92)
8.1	BEBAN OPERASI	1.197.147.712.554,78	1.204.107.942.545,70	(6.960.229.990,92)
8.1.01	Beban Pegawai	443.723.077.127,00	458.012.501.009,95	(14.289.423.882,95)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	442.004.112.401,25	424.735.012.155,58	17.269.100.245,67
8.1.02.01	Beban Barang/Persediaan	143.028.416.060,42	103.257.689.915,22	39.770.726.145,20
8.1.02.02	Beban Jasa	254.339.261.676,33	261.589.681.680,61	(7.250.420.004,28)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	15.400.201.844,00	24.356.503.297,32	(8.956.301.453,32)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	28.308.282.820,50	32.454.937.262,43	(4.146.654.441,93)
8.1.02.05	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	927.950.000,00	3.076.200.000,00	(2.148.250.000,00)
8.1.03	Beban Bunga	897.000.000,00	-	897.000.000,00
8.1.05	Beban Hibah	17.668.503.094,00	47.729.054.807,88	(30.060.551.713,88)



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Audited)

(dalam Rupiah)

Kode Akun	URAIAN	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	1.766.928.000,00	3.093.000.000,00	(1.326.072.000,00)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	5.381.790.441,53	5.777.008.868,97	(395.218.427,44)
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	285.706.301.491,00	264.761.365.703,32	20.944.935.787,68
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	69.741.109.771,88	60.744.437.280,01	8.996.672.491,87
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.418.561.704,98	21.633.974.586,62	3.784.587.118,36
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	185.952.078.117,74	177.355.378.488,69	8.596.699.629,05
8.2.04	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.594.551.896,40	5.027.575.348,00	(433.023.451,60)
8.3	BEBAN TRANSFER	75.440.651.400,00	76.615.306.400,00	(1.174.655.000,00)
8.3.01	Beban Bagi Hasil	8.300.175.400,00	7.832.933.700,00	467.241.700,00
8.3.02	Beban Transfer Bantuan Keuangan	67.140.476.000,00	68.782.372.700,00	(1.641.896.700,00)
8.4	BEBAN TAK TERDUGA	1.018.146.356,00	-	1.018.146.356,00
8.4.01	Beban Tak Terduga	1.018.146.356,00	-	1.018.146.356,00
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	278.795.005.757,70	254.725.278.972,39	24.069.726.785,31
8.5	KEGIATAN NON OPERASIONAL-LO			
	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO			
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	628.178.232,25	157.643.353,43	470.534.878,82
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.707.297.071,27	1.100.432.999,93	606.864.071,34
	Jumlah Surplus Non Operasional	2.335.475.303,52	1.258.076.353,36	1.077.398.950,16
	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO			
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	1.461.963.159,28	1.907.274.489,05	(445.311.329,77)
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	605.174.537,06	3.277.027.803,46	(2.671.853.266,40)
	Jumlah Defisit Non Operasional	2.067.137.696,34	5.184.302.292,51	(3.117.164.596,17)
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	268.337.607,18	(3.926.225.939,15)	4.194.563.546,33
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	279.063.343.364,88	250.799.053.033,24	28.264.290.331,64



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Audited)

(dalam Rupiah)

Kode Akun	URAIAN	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan
8.6	POS LUAR BIASA			
	PENDAPATAN LUAR BIASA			
	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
	BEBAN LUAR BIASA			
	Beban Luar Biasa	-	733.667.268,00	(733.667.268,00)
	Jumlah Beban Luar Biasa	-	733.667.268,00	(733.667.268,00)
	SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA	-	(733.667.268,00)	733.667.268,00
	SURPLUS/DEFISIT - LO	279.063.343.364,88	250.065.385.765,24	28.997.957.599,64

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, April 2022
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH, SH., MH.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Audited)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
a	Arus Kas Masuk		
	Penerimaan Pajak Daerah	70.389.757.706,05	64.838.822.752,80
	Penerimaan Retribusi Daerah	12.611.932.516,30	13.208.556.926,00
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.470.117.812,00	9.804.364.851,00
	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	295.952.911.970,20	136.365.772.873,48
	Penerimaan Dana Bagi Hasil	135.229.818.254,00	64.383.434.319,00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum	593.260.006.000,00	602.446.484.000,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	310.370.018.680,00	292.094.344.724,00
	Penerimaan Dana Penyesuaian	84.755.004.782,00	163.174.967.600,00
	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	80.093.900.010,33	64.243.460.228,07
	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	-	400.000.000,00
	Penerimaan Hibah	38.099.339.397,06	37.161.976.183,59
	Penerimaan Dana Darurat	-	-
	Penerimaan Lainnya	-	455.000.000,00
	Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
	Jumlah	1.633.232.807.127,94	1.448.577.184.457,94
b	Arus Kas Keluar		
	Pembayaran Pegawai	533.526.478.475,48	441.025.705.448,00
	Pembayaran Barang dan Jasa	331.364.771.908,23	407.372.358.282,67
	Pembayaran Bunga	847.000.000,00	-
	Pembayaran Hibah	19.304.426.304,12	7.351.394.000,00
	Pembayaran Bantuan Sosial	1.766.928.000,00	3.093.000.000,00
	Pembayaran Tak Terduga	1.547.938.856,00	49.260.669.634,36
	Pembayaran Bagi Hasil	7.632.280.400,00	7.740.424.700,00
	Pembayaran Bantuan Keuangan	151.895.480.782,00	149.566.271.300,00
	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
	Jumlah	1.047.885.304.725,83	1.065.409.823.365,03
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	585.347.502.402,11	383.167.361.092,91
2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
a	Arus Kas Masuk		
	Pencairan Dari Dana Cadangan	-	-
	Penjualan atas Tanah	-	-
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	567.565.000,00	220.660.438,00
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	68.599.000,00	213.752.000,00
	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.657.000,00	-
	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Penjualan Aset Lainnya	84.838.000,00	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
	Jumlah	739.659.000,00	434.412.438,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Audited)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
b	Arus Keluar Kas		
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
	Perolehan Tanah	100.900.000,00	415.506.760,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	69.514.111.613,00	97.622.948.332,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan	171.955.314.980,00	143.482.401.078,77
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	167.205.556.475,58	125.882.549.773,00
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.922.616.100,00	4.759.374.090,00
	Perolehan Aset Lainnya	-	4.842.414.442,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00
	Pembayaran Pokok Utang	-	-
	Jumlah	418.698.499.168,58	381.505.194.475,77
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(417.958.840.168,58)	(381.070.782.037,77)
3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
a	Arus Masuk Kas		
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	33.000.000.000,00	36.000.000.000,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir	-	14.000.000,00
	Jumlah	33.000.000.000,00	36.014.000.000,00
b	Arus Keluar Kas		
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	36.000.000.000,00	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Jumlah	36.000.000.000,00	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(3.000.000.000,00)	36.014.000.000,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
a	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Pemerintah Daerah	102.684.651.055,00	94.036.815.731,00
	Kiriman Uang Masuk/Pengembalian Kas dari Bendahara Pengeluaran dan Setoran Kas Bendahara Penerimaan	-	-
	Penambahan Sisa Kas BOS	-	-
	Jumlah	102.684.651.055,00	94.036.815.731,00
b	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	102.684.651.055,00	94.036.741.731,00
	Kiriman Uang Keluar/Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum dipertanggungjawabkan (UP/TUP)	59.074.500,00	-
	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan	-	-
	Sisa Kas Bendahara Kapitasi JKN	-	-
	Jumlah	102.743.725.555,00	94.036.741.731,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(59.074.500,00)	74.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Audited)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	164.329.587.733,53	38.110.653.055,14
	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, BOS dan JKN	97.590.424.926,37	59.479.771.871,23
	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, BOS dan JKN	261.920.012.659,90	97.590.424.926,37
	Saldo Akhir Kas Terdiri dari :		
	- Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang Bersifat Umum (belum ditentukan penggunaannya)	68.450.111.633,93	44.461.969.610,80
	- Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang Dibatasi Penggunaannya	25.654.132.368,80	32.154.484.809,80
	- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	20.277.093,00	7.835.000,00
	- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.095.194,00	3.367.123,00
	- Saldo Akhir Kas Dana JKN	533.961,00	388.439.034,00
	- Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sultan Imanuddin	167.590.918.858,64	18.962.379.039,12
	- Saldo Akhir Kas Lainnya	-	-
	- Saldo Akhir Kas BOS	198.943.550,53	1.611.950.309,65
	Saldo Akhir Kas	261.920.012.659,90	97.590.424.926,37

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, April 2022
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH, SH., MH.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Audited)

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	EKUITAS AWAL	2.938.058.435.002,57	2.686.753.574.941,88
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	279.063.343.364,88	250.065.385.765,24
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	53.965.719.868,43	1.239.474.295,45
	Koreksi Saldo Awal Kas di Kasda		35.068.265,00
	Koreksi Saldo Awal Kas BLUD	(500,00)	
	Koreksi Lebih Catat Saldo Kas BOS		
	Koreksi Saldo Awal Kas JKN		
	Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		
	Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan		
	Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak	(733.470.615,00)	809.344.972,00
	Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi		195.828.000,00
	Koreksi Saldo Awal Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
	Koreksi Saldo Awal Piutang Lainnya	(9.713.688.124,56)	2.185.408.366,25
	Koreksi Saldo Awal Persediaan	(79.214.060,42)	472.742.155,77
	Koreksi Saldo Awal Investasi Non Permanen		
	Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen		
	Koreksi Saldo Awal Tanah	59.378.023.500,00	79.860.000,00
	Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin	831.000.000,00	
	Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan	1.807.913.000,00	
	Koreksi Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya		
	Koreksi Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan		
	Koreksi Saldo Awal Tagihan Lainnya		
	Koreksi Saldo Awal Aset yang Dibatasi Penggunaannya		(35.068.265,00)
	Koreksi Saldo Awal Aset Tak Berwujud		
	Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain		
	Koreksi Saldo Awal Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
	Koreksi Saldo Awal Pendapatan Diterima Di Muka	(95.739.000,00)	
	Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek Lainnya		
	Koreksi Nilai Piutang		
	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	4.265.428.471,87	100.281.289,36
	Koreksi Nilai Persediaan		
	Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi	(1.595.051.518,43)	(1.787.912.496,04)
	Koreksi Nilai Utang	254.939.699,31	55.929.217,00
	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain	(354.420.984,34)	(872.007.208,89)
	Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin		
4	EKUITAS AKHIR	3.271.087.498.235,88	2.938.058.435.002,57

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, April 2022
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH, SH., MH.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan saat ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah Pusat-Daerah, antar Pemerintah Daerah serta potensi daerah itu sendiri, salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a) untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas;



- c) untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi entitas yang berguna untuk pengambilan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di sisi lain penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- k) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- r) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- s) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- t) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- u) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- v) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pendapatan Hibah Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan



- BAB V Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Rincian dan Penjelasan Pos – pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2. Rincian dan Penjelasan Pos – pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3. Rincian dan Penjelasan Pos – pos Neraca
 - 5.4. Rincian dan Penjelasan Pos – pos Laporan Operasional
 - 5.5. Rincian dan Penjelasan Pos – pos Laporan Arus Kas
 - 5.6. Rincian dan Penjelasan Pos – pos Laporan Perubahan Ekuitas
- BAB VI Penjelasan Atas Informasi – informasi Non Keuangan
- BAB VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain menciptakan perekonomian yang seimbang dan ideal, tentunya masih ada banyak tujuan lainnya. Beberapa tujuan dari kebijakan ekonomi makro adalah sebagai berikut:

- a) menciptakan pertumbuhan ekonomi
- b) meningkatkan pendapatan
- c) menstabilkan keadaan perekonomian
- d) meratakan distribusi pendapatan
- e) mengembangkan kapasitas produksi
- f) membuat neraca pembayaran seimbang
- g) meningkatkan kesempatan kerja
- h) mengendalikan inflasi

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:

- a) Tingkat Kemiskinan sebesar 3,95 persen
- b) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,70 persen
- c) *Gini Ratio* sebesar 0,317 persen
- d) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,07 poin
- e) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 0,98 persen
- f) Tingkat Inflasi sebesar 4,62 persen (sesuai tingkat inflasi Kota Sampit sebagai acuan)
- g) Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp23.717,80 (Miliar Rupiah)

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa



jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah tingkat kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Kotawaringin Barat (%)	3,59	3,95	0,36
2	Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribuan Orang)	11,46	12,29	0,83
3	Provinsi Kalimantan Tengah (%)	4,82	5,61	0,79
4	Nasional (%)	9,78	10,14	0,36
5	Peringkat Provinsi	4	4	
6	Peringkat Nasional	20	N/A	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2021

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2020 sebesar 3,59 persen mengalami kenaikan pada Tahun 2021 menjadi 3,95 persen. Demikian pula Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat persentasenya meningkat, namun masih di bawah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan penganggaran tahun mendatang harus mendapatkan prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten	0,40	0,48	0,08
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,80	0,71	(0,09)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,61	1,71	0,10
4	Peringkat Provinsi	3	4	
5	Peringkat Nasional	21	N/A	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2021

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab	0,08	0,09	0,01
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,20	0,15	(0,05)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,42	0,04
4	Peringkat Provinsi	3	4	
5	Peringkat Nasional	23	N/A	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2021

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Penganggur terbuka**, terdiri dari: 1) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, 2) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, 3) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan 4) mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 adalah sebesar 4,70 persen, sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.4.



Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten (%)	4,76	4,70	(0,06)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,58	4,53	(0,05)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,49	(0,58)
4	Peringkat Provinsi	9	9	
5	Peringkat Nasional	230	N/A	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,70 persen, sedangkan TPT pada Tahun 2020 adalah sebesar 4,76 persen atau menurun dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2020. Namun demikian TPT Kabupaten Kotawaringin Barat masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,53 persen dan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional sebesar 6,49 persen.

2.1.3 Indek Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1, dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 adalah sebesar 0,317 poin, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 *Gini Ratio* Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun
1	Tingkat Kabupaten	0,333	0,317	(0,016)
2	Tingkat Provinsi	0,320	0,323	(0,006)
3	Tingkat Nasional	0,385	0,384	(0,001)
3	Peringkat Provinsi	N/A	N/A	
4	Peringkat Nasional	N/A	N/A	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2021

Pada Tahun 2021, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,317 poin. Angka ini turun 0,016 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2020 yang sebesar 0,333 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Provinsi dan Nasional. Peringkat Provinsi dan Nasional sampai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, data belum tersaji lengkap untuk semua Kabupaten/Kota se-Indonesia.



2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a) Rendah (< 60)
- b) Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c) Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d) Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 adalah sebesar 73,07 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun
1	Kabupaten Kotawaringin Barat	72,87	73,07	0,20
2	Provinsi	71,05	71,25	0,20
3	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	0,35
4	Peringkat Provinsi	2	2	
5	Peringkat Nasional	135	N/A	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2021

Realisasi pencapaian IPM Tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar 73,07 poin, dibandingkan Tahun 2020 sebesar 72,87 poin mengalami kenaikan sebesar 0,20 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 70,59 tahun, lebih cepat 0,08 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,42 tahun dengan harapan lama sekolah 12,72 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp13,109 juta atau menurun Rp66 juta dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Kotawaringin Barat pada saat ini berada pada urutan ke-2 (dua) dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan berada pada urutan 135 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat sebab masyarakat



adalah pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	12.875.812	13.004,13	N/A	N/A	N/A
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,79	0,98	N/A	N/A	N/A
3	Peringkat Provinsi	10	5	N/A		
4	Peringkat Nasional (Indonesia)*	149	45	N/A		

Sumber Dokumen: BPS Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah dan Indonesia, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2021

Dalam skala provinsi, pada tahun 2020 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat menempati urutan 5 dari Laju Pertumbuhan Kota atau Kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan skala nasional Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat menempati urutan 45 dari Laju Pertumbuhan Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia. Sementara sampai dengan Laporan Keuangan *Audited* ini disusun, data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2021 belum tersedia.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya, inflasi terbagi menjadi 4 kategori yang meliputi: 1) **Inflasi Ringan** (*Creeping Inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun, 2) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, 3) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) Kategori inflasi ini termasuk yang berat yang mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. 4) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, Tingkat Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 sebesar 4,62 persen, Tingkat Inflasi Provinsi 3,32 persen, dan Tingkat Inflasi Nasional 1,87 persen. Rata-rata Inflasi meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020, namun masih dalam kategori ringan sebagaimana dijelaskan di tabel 2.8.



Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten (%)	1,62	4,62	3,00
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,03	3,32	2,29
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	0,19
4	Peringkat Provinsi*	N/A	N/A	
5	Peringkat Nasional	18	18	

*Berdasarkan Inflasi Kota Sampit, Tingkat Inflasi di wilayah Kalteng hanya Kota Palangka Raya dan Sampit yang menjadi acuan

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2021

Tingkat inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,62 persen (data Inflasi kota Sampit sebagai acuan), sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2020 adalah sebesar 1,62 persen atau meningkat sebesar 3,00 persen dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2020. Kenaikan angka inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 paling tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu hanya sebesar 2,29 persen dan secara Nasional sebesar 0,19 persen.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat

Struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	4.617,06	5.197,45	6.235,40
2	Industri Pengolahan	4.754,48	5.211,62	6.405,07
3	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.664,28	2.881,23	3.101,44
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	19.332,10	20.521,90	23.717,80
5	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas*	19.332,10	20.521,90	23.717,80
6	PDRB Provinsi	150283,2 (M)	152190,9 (M)	N/A
7	PDRB Nasional	15833943,4 (M)	15434,2 (T)	N/A
8	Peringkat Provinsi	2	2	N/A
9	Peringkat Nasional	188	172	N/A

*PDRB Non Migas = PDRB Total karena Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengelola sektor Migas

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2021

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana Tahun 2020 masih merupakan salah satu komponen keuangan daerah yang terdampak *Covid-19*. Dalam Rangka Penanganan *Covid-19* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 terhadap komponen Pendapatan Daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan perubahan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 didasarkan atas perhitungan potensi dan ketercapaian target sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021,



serta mempertimbangkan realisasi Semester I Tahun 2021. Kebijakan perubahan target Pendapatan Daerah berdasarkan jenis Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada beberapa lapangan usaha yang terdampak *Covid-19*, terjadi penurunan kegiatan perekonomian. Pelaku usaha yang menjadi wajib pajak mengurangi produksi sebagai respon dari berkurangnya permintaan (konsumsi) pasar. Menurunnya omzet usaha ini mengakibatkan wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga menyebabkan turunnya Penerimaan Daerah dari sektor PAD.

a. Penganggaran perubahan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Target PAD pada 2021 terkoreksi akibat pandemi *Covid-19*, sehingga diperlukan penyesuaian dengan cara melakukan penghitungan ulang terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2021.
- Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemungutan dengan rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - menghambat mobilitas penduduk;
 - lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perubahan target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan didasarkan atas realisasi penerimaan dividen dan bagi hasil atas investasi (penyertaan modal) Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yaitu:

- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- PD BPR Marunting Sejahtera; dan
- PT Jaminan Kredit Daerah.

c. Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kebijakan perubahan target didasarkan atas realisasi Semester I Tahun 2021, perhitungan potensi serta relaksasi pembayaran pajak daerah dengan rincian kebijakan berdasarkan objek lain-lain PAD yang sah berikut:

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
Perubahan target menyesuaikan dengan rencana peralatan dan mesin serta aset lainnya yang telah masuk dalam usulan penghapusan barang dikarenakan rusak berat, umur ekonomis telah habis, tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional



Pemerintah Daerah yang selanjutnya diusulkan untuk dilelang dengan perhitungan harga berdasarkan penilaian dari KPKNL Pangkalan Bun.

- Hasil Sewa Barang Milik Daerah
Hasil sewa BMD merupakan pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak ketiga yang ditarget berdasarkan realisasi sewa BMD yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah, diantaranya sewa tanah dan bangunan yang digunakan untuk keperluan perbankan.
- Jasa Giro
Pendapatan jasa giro bersumber dari penempatan uang pada kas daerah dan uang bendahara pengeluaran atas pengelolaan dana BLUD pada RSUD. Perubahan target didasarkan atas kebijakan Pemerintah Daerah untuk mempercepat realisasi anggaran belanja daerah sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah serta untuk percepatan penanganan *pandemic Covid-19* sehingga dengan menurunnya jumlah dana mengendap dalam kas daerah berpengaruh terhadap penurunan jasa giro yang akan diterima.
- Pendapatan Bunga
Pendapatan bunga bersumber dari penempatan kas yang belum digunakan untuk pengeluaran daerah dalam bentuk *Deposito On Call (DOC)*. Kebijakan perubahan target didasarkan atas upaya percepatan realisasi belanja daerah yang menyebabkan Pemerintah Daerah tidak dapat lagi menempatkan uang dalam bentuk *DOC* dalam jumlah yang cukup untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
Kebijakan anggaran penerimaan dari TGR didasarkan atas realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain.
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penetapan target didasarkan atas realisasi pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan hasil audit pekerjaan.
- Pendapatan Denda Pajak Daerah
Kebijakan atas denda pajak daerah adalah penghapusan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Pendapatan dari Pengembalian
Penetapan target didasarkan atas realisasi pendapatan dari kelebihan pembayaran atas belanja daerah.
- Pendapatan Lainnya
Pendapatan lainnya didasarkan atas realisasi pendapatan yang terdiri dari penjualan bahan makanan melalui kegiatan pasar murah dan denda administrasi penegakan peraturan sebagai upaya pencegahan penularan *Covid-19*.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Kebijakan perubahan target pendapatan transfer didasarkan atas:

- a. Perubahan alokasi transfer dari Pemerintah yang semula ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 diubah berdasarkan ketetapan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus*



Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021, perubahan dilakukan atas alokasi DAU, DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

- b. Perubahan target DAK Nonfisik berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 dengan sisa dana yang terdapat pada kas daerah. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang menyatakan Sisa DAK Nonfisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam APBD/perubahan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah didasarkan atas Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan alokasi Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah.

Strategi dan upaya untuk pencapaian target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah:

- 1) Melakukan optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditempuh dengan mengawal target pajak dan retribusi daerah, difokuskan pada upaya:
 - Tetap menjaga ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan melakukan komunikasi persuasif kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
 - Memberikan dispensasi kepada wajib pajak tertentu;
 - Peningkatkan efektifitas pengendalian dan pengawasan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Perluasan basis pungutan pajak daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan daerah dan penetapan kantong-kantong potensial penerimaan retribusi daerah;
 - Penetapan obyek kena pajak baru harus dilaksanakan secara hati-hati dan obyektif untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak;
 - Melakukan kajian terhadap regulasi yang dapat meningkatkan potensi PAD;
 - Perbaiki mekanisme penerimaan pajak dan retribusi daerah, terutama menyangkut Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan Pengembangan Teknologi Informasi (TI);
 - Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan lembaga keuangan lainnya;
 - Peningkatan kinerja BUMD melalui pemberian penyertaan modal yang dikaitkan dengan penerimaan deviden yang akan diperoleh;
 - Pemasangan *tapping box* pada beberapa jenis usaha.



- 2) Memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) pemerintah daerah dalam mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Daerah, seperti Pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Strategi operasional yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:
- Review Perda-Perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - Peningkatan koordinasi antara SKPD dalam upaya meningkatkan PAD.

2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anggaran Belanja Daerah dibatasi kemampuan keuangan daerah yang didasarkan atas anggaran Penerimaan Daerah yang terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 guna melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan serta keperluan mendesak telah dilakukan perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sebanyak 3 (tiga) kali, yakni dengan:

- 1) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 Tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA. 2021
- 2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tanggal 21 Mei 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA. 2021
- 3) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 Tanggal 19 Juli 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA. 2021

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah:

- 1) Mempertahankan alokasi Belanja Daerah untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:
 - a. Anggaran fungsi pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 - b. Anggaran kesehatan dalam rangka peningkatan bidang kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Belanja wajib bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19.
 - c. Dana Transfer Umum yang terdiri dari DAU dan DBH paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan



- mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan Pendidikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- d. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari perubahan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - e. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - f. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan, paling sedikit 0,75% dari total APBD TA. 2021.
 - g. Alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah.
- 2) Menyediakan anggaran melalui *refocussing* dan rasionalisasi anggaran SKPD guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021, yakni untuk belanja Kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belanja prioritas lainnya dengan alokasi minimal 8% dari DAU Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk:
- a. Dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi *Covid-19* yang juga dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
 - c. Pemberian insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. Belanja Kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 3) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana SiLPA DBH SDA DR dengan penggunaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi, yakni untuk:



- a. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. penanaman DAS kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.
- 4) Penganggaran belanja yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya, baik SiLPA yang dibatasi penggunaannya maupun SiLPA yang bersifat umum
- 5) Penyesuaian anggaran belanja gaji dan tunjangan berdasarkan realisasi anggaran Semester I Tahun 2021 dengan kebijakan:
- a. Gaji dan tunjangan diperhitungkan berdasarkan realisasi bulan Juni 2021
 - b. Menyesuaikan perhitungan kebutuhan anggaran iuran jaminan Kesehatan sebesar 4% dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, KDH/WKDH dan ASN, iuran JKK dan JKM masing-masing sebesar 0,24% dan 0,72% dari gaji pokok
 - c. Tambahan Penghasilan ASN diperhitungkan berdasarkan realisasi tertinggi dari pembayaran bulan Januari sampai dengan Mei 2021 dengan perhitungan 64% dari *basic* TPP
 - d. Access untuk kebutuhan kenaikan pangkat, penambahan keluarga, mutasi ASN diperhitungkan sebesar 0,75%
 - e. Penyediaan anggaran tambahan belanja tunjangan transportasi dan belanja tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2021
- 6) Penambahan anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan Pencadangan anggaran dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* dan kebutuhan kegiatan mendesak lainnya
- 7) Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*, anggaran pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* yang dilaksanakan oleh unsur TNI/Polri menggunakan dana talangan yang bersumber dari APBN dan akan diperhitungkan dalam penyaluran DAU/DBH. Anggaran pelaksanaan ini belum diperhitungkan dalam perubahan APBD TA. 2021 dikarenakan belum adanya perhitungan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud
- 8) Melakukan pergeseran anggaran antar SKPD untuk memenuhi kebutuhan anggaran prioritas dan mendesak
- 9) Penyediaan anggaran bersifat wajib dan mengikat
- Alokasi anggaran belanja daerah pada rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2021 adalah sebesar Rp1.528.806.284.628,00,00 bertambah sebesar Rp38.961.339.528,00 atau 2,62% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp1.489.844.945.100,00,00. Tambahan anggaran belanja bersumber dari penganggaran SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya yang telah ditentukan penggunaannya (*earmarked*), terdiri dari:
- Kegiatan yang bersumber dari SiLPA SDA-DR sebesar Rp4.180.229.400,00
 - Kegiatan yang bersumber dari SiLPA DAK Fisik sebesar Rp1.160.776.400,00
 - Kegiatan yang bersumber dari SiLPA DAK Nonfisik sebesar Rp4.039.561.695,00
 - Kegiatan yang bersumber dari SiLPA DBH CHT sebesar Rp23.307.051,00
 - Kegiatan yang bersumber dari SiLPA Dana Kelurahan sebesar Rp598.364.848,00
 - Kegiatan yang bersumber dari SiLPA JKN sebesar Rp388.439.034,00
 - Kegiatan yang bersumber dari SiLPA BLUD sebesar Rp18.962.378.500,00



- Kegiatan yang bersumber dari SiLPA Dana BOS sebesar Rp1.611.950.300,00
- Tambahan anggaran belanja juga bersumber dari:
- Penganggaran SiLPA bersifat umum sebesar Rp4.773.676.600,00
 - Penambahan target pendapatan hibah, yaitu pendapatan dana Bantuan Operasional Sekolah yang dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan Dana BOS sebesar Rp2.342.600.000,00.
 - Hasil Penyesuaian dari target PAD sebesar Rp880.055.700,00.

Rencana belanja daerah diuraikan berdasarkan struktur APBD dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp942.170.081.064,00 bertambah sebesar Rp47.784.327.635,00 atau 5,34% dari anggaran semula sebesar Rp894.385.753.429,00.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Anggaran belanja pegawai sebesar Rp546.260.227.566,00 berkurang sebesar Rp8.926.474.824,00 atau -1,61% dari anggaran semula sebesar Rp555.186.702.390,00.

Pengurangan anggaran belanja pegawai menyesuaikan perhitungan kebutuhan anggaran belanja pegawai berdasarkan posisi pegawai per bulan Juni 2021.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja



kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Anggaran belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar Rp364.015.730.153,00 bertambah sebesar Rp52.133.840.865,00 atau 16,72% dari anggaran semula sebesar Rp311.881.889.288,00. Penambahan anggaran menyesuaikan prioritas anggaran Tahun 2021 untuk kebutuhan mendesak yakni penanganan pandemi *Covid-19* Tahun 2021 serta pengalokasian anggaran belanja daerah yang bersumber dari SiLPA yang telah ditentukan peruntukannya.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman Tahun 2021 dengan besaran 12% per tahun. Penganggaran pembayaran bunga dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD selaku SKPKD sebesar Rp847.000.000,00 berkurang sebesar Rp953.000.000,00 atau 52,94% dari anggaran semula sebesar Rp1.800.000.000,00.

d. Belanja Hibah

Anggaran belanja hibah sebesar Rp29.133.873.345,00 bertambah sebesar Rp4.839.211.594,00 atau 19,92% dari anggaran semula sebesar Rp24.294.661.751,00. Penambahan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian kode rekening belanja BOS kepada satuan Pendidikan swasta yang semula dianggarkan pada belanja pegawai serta alokasi belanja hibah kepada instansi vertikal dan PWI.

e. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp1.913.250.000,00 bertambah sebesar Rp690.750.000,00 atau 56,50% dari anggaran semula sebesar Rp1.222.500.000,00 tambahan anggaran dialokasikan untuk penyediaan bahan makanan untuk pasien yang terkonfirmasi positif *Covid-19* dan tenaga Kesehatan penanganan *Covid-19* serta bantuan sosial kepada korban musibah kebakaran.

2) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Anggaran belanja modal dialokasikan sebesar Rp419.465.543.464,00 berkurang sebesar Rp5.433.395.207,00 atau -1,28% dari anggaran semula sebesar Rp424.898.938.671,00 pengurangan anggaran belanja modal atas belanja sarana dan prasarana aparatur dan dialokasikan untuk kegiatan penanganan pandemi *Covid-19* bidang Kesehatan dan belanja prioritas lainnya yang ditetapkan Pemerintah.



3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pada penyesuaian APBD TA. 2021 anggaran belanja tidak terduga telah direalisasikan melalui pergeseran anggaran ke belanja SKPD untuk keperluan belanja Kesehatan dan belanja prioritas lainnya yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp3.212.681.000,00 sehingga belanja tidak terduga pada APBD berjalan Tahun 2021 adalah sebesar Rp787.319.000,00.

Berkenaan dengan kondisi pandemi *Covid-19* hingga saat ini masih terjadi dan cenderung terjadinya peningkatan kasus positif *Covid-19* maka anggaran belanja tidak terduga dialokasikan untuk pencadangan penanganan *Covid-19*. Anggaran belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau sama dengan alokasi pada anggaran murni TA. 2021.

4) Belanja Transfer

Anggaran belanja transfer sebesar Rp163.170.660.100,00 berkurang sebesar Rp3.389.592.900,00 atau -2,04% dari anggaran semula sebesar Rp166.560.253.000,00. Alokasi anggaran belanja transfer menyesuaikan perubahan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi dana transfer berupa dana perimbangan diluar DAK dan kurang salur retribusi daerah Tahun 2020.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Defisit APBD dalam rancangan Perubahan APBD TA. 2021 didanai dari perubahan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada Perubahan APBD TA. 2021 didasarkan atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 yang telah disetujui bersama dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020, yakni sebesar Rp97.531.350.426,37 bertambah sebesar Rp77.531.350.426,37 dari anggaran semula sebesar Rp20.000.000.000,00.



2) Penerimaan Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Dalam rancangan penerimaan pembiayaan dianggarkan tambahan anggaran pinjaman daerah pada perubahan APBD TA. 2021. Penganggaran tambahan anggaran pinjaman daerah didasarkan atas kebutuhan anggaran untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah pada APBD TA. 2021 serta defisit APBD TA. 2021 dari penurunan dari target PAD Tahun 2021.

Jenis pinjaman daerah yang direncanakan merupakan Pinjaman Jangka Menengah yang digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan daerah. Pinjaman daerah pada perubahan APBD TA. 2021 dianggarkan sebesar Rp33.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp12.000.000.000,00 atau 57,14% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp21.000.000.000,00.

Perhitungan besaran pinjaman daerah memperhatikan:

- Batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah; dan
- Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan sebagaimana kebijakan dalam APBD murni TA. 2021, yakni sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk keperluan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dengan rincian:

- 1) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp4.000.000.000,00;
- 2) PD BPR Marunting Sejahtera sebesar Rp1.000.000.000,00.

Selain itu pengeluaran pembiayaan juga dialokasikan untuk pembayaran pokok pinjaman Tahun 2020 sebesar Rp36.000.000.000,00.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Keuangan ini mengacu pada target-target keuangan yang dicanangkan pada masing-masing program pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, serta pada tiap-tiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.

Sesuai dengan struktur APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana klasifikasi belanja adalah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari belanja Urusan Wajib, belanja Urusan Pilihan dan belanja berdasarkan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.

Selanjutnya Urusan Wajib dan Pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab, dan pagu indikatif dalam Rencana Kerja dan



Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah di Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan melaksanakan 196 program dan 530 kegiatan. Indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Wajib

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari 54 program dan 143 kegiatan, dimana capaian realisasi belanja sebesar Rp988.745.422.312,35 atau 91,60 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.037.577.557.052,00 sehingga dari pagu anggaran tersebut yang belum terealisasi sebesar Rp87.186.999.671,83.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari 78 program dan 193 kegiatan, dimana capaian realisasi belanja sebesar Rp107.568.425.124,84 atau 98,83 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp111.223.997.720,00 sehingga dari pagu anggaran tersebut yang belum terealisasi sebesar Rp1.296.355.235,16.

b. Urusan Pemerintahan Pilihan

Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari 27 program dan 63 kegiatan, dimana capaian realisasi belanja sebesar Rp51.032.507.561,00 atau 97,76 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp52.201.379.720,00 sehingga dari pagu anggaran tersebut yang belum terealisasi sebesar Rp1.168.872.159,00.

c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdiri dari 37 program dan 131 kegiatan, dimana capaian realisasi belanja sebesar Rp314.237.448.896,22 atau 92,68 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp328.003.350.136,00 sehingga dari pagu anggaran tersebut yang belum terealisasi sebesar Rp24.006.704.239,78.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing program pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun Anggaran 2021. Uraian kinerja program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan terpisah dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021, sedangkan untuk Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat
APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021**

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021		
			Keuangan		Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	313.646.551.493,00	295.184.923.263,58	94,11	99,84
2	Dinas Kesehatan	455.465.038.235,00	428.788.519.787,28	94,14	96,41
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	227.055.507.247,00	226.273.942.377,49	99,66	99,75
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.848.983.505,00	10.746.650.399,00	99,06	99,99
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.012.233.401,00	12.775.541.953,00	98,18	99,97
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.976.131.535,00	5.835.318.828,00	83,65	84,23
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.708.059.024,00	11.422.164.942,00	83,32	100,00
8	Dinas Sosial	6.640.544.538,00	6.262.879.520,00	94,31	97,24
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.110.821.319,00	6.918.794.267,00	97,30	100,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.399.330.294,00	8.090.713.547,00	96,33	99,01
11	Dinas Ketahanan Pangan	4.738.781.901,00	4.635.563.345,00	97,82	100,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	25.231.145.854,00	24.624.174.151,00	97,59	98,81
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.257.276.828,00	6.032.893.201,00	96,41	100,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.625.028.062,00	6.486.600.202,00	97,91	99,95
15	Dinas Perhubungan	15.680.261.785,00	14.897.108.555,00	95,01	100,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8.923.390.376,00	8.774.837.982,00	98,34	99,60
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.736.238.893,00	11.184.007.730,00	95,29	99,99
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.125.702.281,00	4.978.249.135,84	97,12	98,96
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	7.586.496.781,00	7.172.866.784,00	94,55	94,67
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.346.707.806,00	5.228.539.487,00	97,79	99,82
21	Dinas Perikanan	13.899.683.946,00	13.711.884.330,00	98,65	100,00
22	Dinas Pariwisata	5.766.935.207,00	5.652.481.400,00	98,02	100,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	18.307.005.965,00	17.928.130.067,00	97,93	99,97



No	Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021		
			Keuangan		Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.891.209.751,00	9.574.888.572,00	96,80	99,12
25	Sekretariat Daerah	45.321.543.038,00	43.165.592.141,00	95,24	97,29
26	Sekretariat DPRD	28.769.737.008,00	27.352.893.823,00	95,08	99,44
27	Kecamatan Arut Selatan	13.766.206.466,00	13.222.915.641,00	96,05	96,05
28	Kecamatan Arut Utara	3.963.260.544,00	3.824.220.650,00	96,49	96,49
29	Kecamatan Kumai	7.320.424.358,00	7.121.668.608,50	97,28	99,22
30	Kecamatan Kotawaringin Lama	6.057.291.697,00	5.964.935.456,00	98,48	99,80
31	Kecamatan Pangkalan Lada	2.140.761.600,00	2.106.664.061,00	98,41	100,00
32	Kecamatan Pangkalan Banteng	2.621.604.840,00	2.606.460.829,00	99,42	100,00
33	Inspektorat Daerah	11.500.000.000,00	9.745.564.870,72	84,74	86,20
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.647.731.728,00	7.372.510.049,00	96,40	99,30
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	176.971.884.463,00	171.611.375.716,00	96,97	96,73
36	Badan Pendapatan Daerah	7.760.514.495,00	7.320.530.180,00	94,33	96,94
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.186.258.364,00	6.986.798.043,00	97,22	97,23
Jumlah		1.529.006.284.628,00	1.461.583.803.894,41	95,59	98,41

Sumber: Laporan Tepra per 31 Desember 2021

Secara ringkas, capaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 digambarkan sebagai berikut:

- Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp1.633.972.466.127,94 atau 112,33 persen dari pagu anggaran Rp1.454.636.011.759,00 sehingga dari pagu anggaran tersebut terealisasi lebih sebesar Rp179.336.454.368,94. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 Rp1.449.011.596.895,94 terjadi kenaikan sebesar Rp184.960.869.232,00;
- Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp1.461.583.803.894,41 atau 95,59 persen dari pagu anggaran Rp1.529.006.284.628,00 sehingga dari pagu anggaran tersebut tidak terealisasi sebesar Rp67.422.480.733,59. Dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020 Rp1.442.474.017.840,80 terjadi kenaikan sebesar Rp19.109.786.053,61;
- Pembiayaan Netto terealisasi sebesar Rp89.531.350.426,37 yang merupakan selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan Rp130.531.350.426,37 berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp44.97.531.350.426,37 dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp33.000.000.000,00 dengan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp41.000.000.000,00 berupa Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp36.000.000.000,00.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

3.2.1 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Pendapatan

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah terdapat beberapa pendapatan SKPD yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan (pencapaian kurang dari 95 persen). Berikut ini adalah penjelasan hambatan maupun kendala masing-masing SKPD dalam pencapaian target pendapatan.



1. Badan Pendapatan Daerah

a) Pajak Daerah

- Pajak Hotel terealisasi sebesar Rp1.019.134.857,83 atau 50,96% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00. Hal ini terjadi karena Tahun 2021 masih dalam masa pandemi *Covid-19* dan pemberlakuan PPKM level 4 di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemberlakuan PPKM ini menyebabkan salah satu alasan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Cabang Kotawaringin Barat mengajukan Permohonan Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran. Kondisi ini juga menyebabkan beberapa Hotel melaporkan tidak beroperasi karena minimnya kunjungan.
- Pajak Restoran terealisasi sebesar Rp2.447.046.558,40 atau 54,38% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.500.000.000,00. Hal ini terjadi karena pemberlakuan PPKM Di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemberlakuan PPKM membuat Asosiasi Pajak Hotel dan Restoran mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk dibebaskan membayar pajak dengan pertimbangan untuk menutupi biaya operasional di lapangan. Pemasangan Alat Perekam Transaksi Usaha *online* belum optimal menunjukkan dampak bagi peningkatan penerimaan pada sektor Pajak Restoran karena masih dalam masa pemulihan ekonomi.
- Pajak Hiburan terealisasi sebesar Rp311.084.958,00 atau 82,96% dari target yang ditetapkan Rp375.000.000,00 karena kondisi PPKM yang membatasi Wajib Pajak beroperasi.
- Pajak Reklame terealisasi sebesar Rp1.084.830.681,54 atau 69,92% dari target yang ditetapkan Rp1.500.000.000,00 karena terkendala proses identifikasi ijin dan kepemilikan (*vendor*) pada reklame jenis baliho dengan kondisi di lapangan.
- Pajak Penerangan Jalan terealisasi sebesar Rp23.343.368.909,28 atau 93,37% dari target yang ditetapkan Rp25.000.000.000,00 karena target PPJ PLN ditetapkan berdasarkan prediksi perhitungan secara merata setiap bulannya, sedangkan dalam pembayarannya didasarkan atas penggunaan riil di lapangan sehingga bersifat fluktuatif. Untuk PPJ non PLN dari sumber lain, tidak tercapainya realisasi tahun 2021 karena Pajak ini merupakan salah satu sumber pajak yang baru dipungut pada Bulan September 2020 atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan pihak swasta pemegang ijin penerangan jalan non PLN (Badan Usaha), sehingga perlu waktu untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan dengan pimpinan Badan Usaha. Dari 24 Perusahaan/Wajib Pajak yang terdata memiliki ijin penggunaan listrik sumber lain, kurang lebih hanya 63% Perusahaan/Badan Usaha yang telah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
- Pajak Parkir terealisasi sebesar Rp191.496.800,00 atau 42,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp450.000.000,00 karena kondisi pandemi *Covid-19* dan PPKM yang membatasi aktivitas masyarakat. Kondisi ini merubah pola hidup masyarakat yang lebih memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan layanan dan berinteraksi (*online*).
- Pajak Air Tanah terealisasi sebesar Rp36.844.243,00 atau 36,84% dari target yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 karena kondisi pandemi *Covid-19* dan PPKM yang membatasi masyarakat untuk beraktivitas. Salah satu penyumbang terbesar sumber pajak air tanah adalah dari kolam renang.



- Pajak Sarang Burung Walet terealisasi sebesar Rp1.120.980.670,00 atau 37,37% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00 karena tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayar pajak sarang burung walet masih sangat rendah. Kesulitan dalam pemungutan pajak ini adalah mengetahui waktu dan produksi yang dihasilkan dari setiap kali Wajib Pajak bertransaksi dan belum adanya regulasi serta formulasi untuk memaksa wajib pajak melakukan kewajibannya yang mendekati kondisi riil di lapangan.
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi sebesar Rp2.717.501.342,00 atau 53,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.100.000.000,00 karena sumber terbesar dari Pajak Mineral Bukan Logam selama ini dipungut dari kegiatan-kegiatan pemerintah dan zirkon. Berdasarkan data yang ada di Bapenda untuk perusahaan yang memegang ijin operasi zirkon hanya tinggal 1 perusahaan saja. Selain itu, berkurangnya kegiatan fisik juga mengakibatkan penurunan penerimaan jenis pajak ini.
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terealisasi sebesar Rp10.918.969.352,00 atau 72,79% dari target yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 karena kondisi ekonomi masyarakat masih dalam tahap pemulihan, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah serta basis data PBB-P2 yang masih dalam proses pemutakhiran, sehingga terkendala dalam melakukan tindakan penagihan.
- b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pendapatan Denda Pajak terealisasi sebesar Rp274.405.025,36 atau 76,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp358.856.200,00. Hal ini terjadi karena berkurangnya transaksi dan ketepatan waktu pembayaran oleh wajib pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan Denda Pajak.

2. Dinas Perikanan

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp97.775.000,00 atau 40,49% dari target yang ditetapkan sebesar Rp241.472.000,00 hal ini terjadi karena kondisi pabrik Es Raja Seberang yang rusak berat, pabrik Es Teluk Bogam dalam masa rehabilitasi, serta tidak optimalnya pusat promosi dan pemasaran P3HP dan pabrik Tepung Ikan di Desa Sungai Kapitan karena belum ada pihak ketiga/penyewa.
- b) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah realisasi sebesar Rp366.894.800,00 atau 88,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp415.433.000,00 hal ini terjadi karena pada Balai Benih Ikan jumlah indukan yang ada yaitu untuk stok indukan Ikan Nila yang produktif hasil pengadaan tahun 2019 sebanyak 957 ekor dan pengadaan tahun 2020 sebanyak 699 ekor, serta untuk pengadaan indukan tahun 2021 belum bisa menghasilkan atau belum berproduksi, sehingga total indukan yang produktif adalah sebanyak 1.656 ekor. Maka berdasarkan perhitungan produktivitasnya dapat diuraikan sebagai berikut: Indukan Ikan Nila Jenis Nirwana II untuk 1 set terdiri dari jantan 100 ekor dan betina 300 ekor (100 pasang), berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) strain Nirwana II 1 pasang menghasilkan 1000-2000 telur per siklus dan larva yang dihasilkan sebanyak 750 ekor dengan *survival rate* (SR) 60% maka menghasilkan benih sebanyak 450 ekor. Dengan masa siklus sebanyak 21 hari maka dalam satu tahun terjadi 17 kali siklus sehingga untuk 1 set ikan Nila (100 pasang) menghasilkan: $17 \times 450 \times 100 = 850.000$ ekor benih. Apabila jumlah indukan yang produktif sebanyak



1.656 ekor (4 set atau 400 pasang) maka dalam setahun dapat dihasilkan: $17 \times 450 \times 400 = 3.060.000$. Apabila rata-rata penjualan sebesar Rp100,00 per ekor maka dihasilkan estemasi penjualan dari benih ikan nila $3.060.000 \text{ ekor} \times \text{Rp}100,00 = \text{Rp}306.000.000,00$. Pada pembenihan ikan Patin menggunakan metode *striping* dengan siklus pembenihan 12 siklus, dan jumlah larva yang dihasilkan sebanyak 4.000.000 larva dengan SR 3% maka benih yang dihasilkan sebanyak 12.000 ekor sehingga jumlah benih yang dihasilkan $12 \times 12.000 = 144.000$ ekor dengan harga Rp300,00 sehingga untuk pembenihan patin menghasilkan Rp43.200.000,00 dalam satu tahun, jadi total keseluruhan kemampuan menghasilkan sebesar Rp349.200.000,00.

- c) Retribusi Izin Usaha Perikanan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.247.000,00 hal ini terjadi karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan Bahwa Penerbitan Izin Secara Elektronik sehingga Usaha Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak bisa dipungut Retribusi karena tingkat risiko pelaku usaha masih rendah.

3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengelola 1 jenis pendapatan yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan realisasi sebesar Rp302.167.201,00 atau 91,77% dari target yang ditetapkan sebesar Rp329.528.000,00 hal ini terjadi karena tidak ada penambahan menara sebagai sumber pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dibandingkan dengan potensi target yang ditetapkan.

4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Retribusi Daerah

Retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.464.207.175,00 atau 71,93% dari yang ditargetkan sebesar Rp2.400.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar tidak dapat diberlakukan sesuai rencana karena adanya resistensi dan pedagang pasar yang ditunda pelaksanaannya sesuai Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor 511/1037/DPPKUKM.6/IX/2020 Tanggal 14 September 2020.

b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.168.708,00 atau 27,81% dari yang ditargetkan sebesar Rp4.202.000,00. Pendapatan denda tersebut berasal dari adanya pembayaran retribusi pelayanan pasar yang dibayar melewati tanggal jatuh tempo. Rendahnya pendapatan denda retribusi menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran para pedagang pasar untuk membayar retribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo.



5. Dinas Lingkungan Hidup

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan realisasi sebesar Rp161.856.495,00 atau 75,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp124.630.000,00 hal ini terjadi karena terdapat beberapa wajib retribusi yang sudah tidak berlangganan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dan usahanya sudah tutup.

6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pada tahun 2021 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat mengelola 1 (satu) jenis pendapatan akan tetapi pendapatan tersebut tidak mencapai target yakni retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang hanya terealisasi sebesar Rp35.000.000,00 atau 19,63 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp178.298.000,00 hal ini terjadi karena:

- a) Penjualan benih padi sebagai PAD yang sedianya dilaksanakan pada tahun 2021 dari hasil penangkaran benih padi di Balai Benih Tanaman Pangan yang dilaksanakan pada tahun 2020 mengalami kegagalan panen disebabkan bencana banjir pada akhir tahun sehingga realisasi PAD sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 masih nihil.
- b) Berdasarkan Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor 900/31/TAPD/2021 Tanggal 13 April 2021 perihal penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2021, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mengalami rasionalisasi sehingga anggaran untuk penangkaran benih padi di Balai Benih Tanaman Pangan Tanjung Terantang juga mengalami rasionalisasi akibatnya mempengaruhi penerimaan PAD dari retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Benih/Bibit Padi Tahun Anggaran 2021.

7. Kecamatan Pangkalan Banteng

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) realisasi sebesar Rp6.670.125,00 atau 18,07 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp36.910.000,00 hal ini terjadi karena adanya Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.342/978/HUK Tanggal 14 Juli 2021 perihal Percepatan Pembentukan Perda Persetujuan Bangunan Gedung dan Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Surat tersebut menyatakan bahwa tanggal 2 Agustus 2021 merupakan batas akhir berlakunya Perda berkenaan Izin Mendirikan Bangunan, Perda berkenaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Produk Hukum Daerah Lainnya yang berhubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan. Bahwa akibat hukum dari berakhirnya batas waktu tersebut, maka Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat lagi melakukan pelayanan publik dan memungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

8. Kecamatan Kotawaringin Lama

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/IMB realisasi sebesar Rp6.822.850,00 atau 10,05% dari target yang ditetapkan sebesar Rp67.880.000,00, hal ini terjadi karena:

- a) Pandemi *Covid-19* yang mewabah sepanjang tahun 2021 telah menurunkan daya beli dan tingkat pendapatan masyarakat menurun, hal ini mengakibatkan sebagian besar



masyarakat lebih memilih membelanjakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari daripada untuk pengurusan IMB.

- b) Pemberian IMB untuk hunian (tempat tinggal) dengan luasan maksimal 100M2 dan tidak bertingkat (sesuai dengan Perbub Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 3 huruf e), sehingga dirasa belum mengakomodir bagi pemberian IMB untuk tempat usaha yang berukuran yang sama atau lebih kecil. Sementara jumlah tempat usaha lebih banyak dibangun daripada jumlah hunian di sepanjang jalan penghubung Pangkalan Bun – Sukamara.
- c) Dijaminkannya SHM/SKT di bank oleh masyarakat menjadi alasan tersendiri sulitnya kelengkapan berkas pengajuan IMB oleh masyarakat.

9. Kecamatan Kumai

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/IMB realisasi sebesar Rp13.385.120,00 atau 21,63% dari target Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp61.889.000,00, hal ini terjadi karena selama musim pandemi *Covid-19* ekonomi masyarakat menurun, sehingga kemampuan masyarakat untuk membangun perumahan dan mengurus IMB juga menurun, serta adanya Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan Penerbitan IMB di bawah 100 m2. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.342/978/HUK Tanggal 14 Juli 2021 yang menerangkan mulai tanggal 02 Agustus 2021 bahwa SIMBG versi lama yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berubah ke SIMBG versi baru dan menerbitkan persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Berkenaan dengan hal tersebut, DPMPSTP Kabupaten Kotawaringin Barat yang berwenang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), mulai tanggal 02 Agustus 2021 tidak lagi melakukan penerbitan/pemungutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

10. Kecamatan Arut Utara

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/IMB realisasi sebesar Rp1.430.562,40 atau 2,06% dari target yang ditetapkan sebesar Rp69.288.000, hal ini terjadi karena adanya perubahan Nomenklatur dari Ijin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung sehingga Perda Retribusi IMB tidak dapat dilaksanakan.

11. Kecamatan Pangkalan Lada

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/IMB realisasi sebesar Rp2.061.730,00 atau 3,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp55.415.000,00, hal ini terjadi karena pengajuan Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah di atas 100M2 ada penyesuaian aturan/regulasi mengenai Izin Mendirikan Bangunan dari Pusat untuk dihentikan sampai dengan waktu yang belum dipastikan.

12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing realisasi sebesar Rp320.598.000,00 atau 62,44% dari target yang ditetapkan sebesar Rp513.445.000,00, hal ini terjadi karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang belum diikuti oleh perubahan PERDA turunannya sehingga Retribusi Perpanjangan IMTA



disetorkan ke Pemerintah Pusat per 1 November 2021 sampai menunggu disahkannya Perda baru mengenai IMTA.

13. Kecamatan Arut Selatan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/IMB realisasi sebesar Rp54.122.253,00 atau 19,14% dari target yang ditetapkan sebesar Rp282.824.000,00, hal ini terjadi karena adanya pembatasan kewenangan penerbitan IMB sesuai dengan Perbub Kobar Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat untuk melaksanakan penerbitan IMB di bawah 100 m² dan tidak bertingkat, selain itu dipengaruhi oleh pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi perekonomian masyarakat.

14. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

a) Retribusi Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp3.900.000,00 atau 31,29% dari target yang ditetapkan sebesar Rp12.465.000,00. Realisasi retribusi berasal dari Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu penyewaan tanah dan bangunan (aula kantor BPKAD). Aula kantor BPKAD terjadwal sebagian besar digunakan untuk aktifitas pemerintahan yang tidak dipungut biaya.

b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- Pendapatan dari Pengembalian tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.250.626.010,06 atau 88,34% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp285.499.990,00, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp1.430.067.647,06, dan adanya Restitusi atas kelebihan Setoran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu sebesar Rp535.058.373,00
- Pendapatan Lainnya terealisasi sebesar Rp186.175.516,34 dikarenakan banyaknya jumlah setoran ke Kas Daerah yang tidak dapat diidentifikasi informasi jenis pendapatannya.

15. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

a) Retribusi Rumah Potong Hewan realisasi sebesar Rp66.050.000,00 atau 20,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp326.126.000,00, hal ini terjadi karena:

- Berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) tarif Nilai Retribusi RPH berlaku satu kali Pemetongan (per ekor) nilainya hanya sebesar Rp50.000,00
- Perda Nomor 19 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yang dalam lampiran Perda tersebut besaran tarif retribusi untuk Tarif Gred di bawah 300 kg bobot sapi hidup tarif retribusi sebesar Rp100.000,00 sedangkan bobot sapi hidup di atas 300 kg tarif retribusinya sebesar Rp150.000,00 sedangkan Perda Nomor 19 Tahun 2021 baru disahkan tanggal 31 Desember 2021
- Masih banyak pemetongan hewan/sapi di luar RPH Pangkalan Bun.

b) Retribusi Penjualan Hasil Usaha daerah (*Breeding Farm*) realisasi sebesar Rp69.929.000,00 atau 58,12% dari target yang ditetapkan sebesar Rp120.315.000,00 hal ini terjadi karena:



- Rasionalisasi anggaran untuk operasional pengembangan usaha ayam pedaging di kandang penyangga.
- Indukan ayam yang dikembangkan sudah turunan generasi ketiga sehingga telah mencapai fase degeneratif.
- Perlu pemasukan indukan generasi baru yang lebih produktif.
- Rasionalisasi anggaran untuk pengembangan usaha lainnya yaitu penggemukan sapi potong yang lebih ekonomis.
- Rasionalisasi anggaran untuk pengembangan kebun bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT).

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a) Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan realisasi sebesar Rp1.292.546.093,00 atau 20,86% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.219.066.000,00, hal ini dikarenakan adanya Surat dari Sekretaris Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.342/978/huk tanggal 14 Juli 2021 dalam hal percepatan pembentukan Perda PBG Kab/Kota bahwa tanggal 2 Agustus 2021 merupakan batas akhir berlakunya Perda berkenaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

b) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan denda perizinan tertentu dengan realisasi sebesar Rp1.195.714,00 atau 5,2 persen dari target yang dianggarkan Rp23.811.000,00. Pendapatan denda tersebut berasal dari adanya pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dibayar melewati tanggal jatuh tempo. Rendahnya pendapatan denda retribusi menunjukkan bahwa kesadaran para wajib retribusi meningkat untuk membayar retribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo.

17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp6.000.000,00 atau 7,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp77.687.000,00, hal ini terjadi karena:

- a) Penyewaan Aula Bappeda Kab. Ktw. Barat bukan bertujuan untuk komersil. Penggunaan Aula lebih diutamakan untuk keperluan lingkup Bappeda dan keperluan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga SKPD yang menggunakan Aula Bappeda Kab. Ktw. Barat yang dalam DPA SKPD nya tidak dianggarkan Biaya Sewa Aula tidak dikenakan tarif sewa (tidak dipungut biaya sewa).
- b) Pihak swasta hanya diperbolehkan menggunakan/menyewa Aula Bappeda Kab. Ktw. Barat di luar jam kerja/hari libur.
- c) Adanya larangan/pembatasan berkumpul/mengumpulkan orang banyak pada masa Pandemi Covid-19.

18. Sekretariat Daerah

a) Retribusi Daerah

Retribusi rumah dinas dan sewa aula kantor Bupati realisasi sebesar Rp133.749.000,00 atau 53,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp249.050.000,00, hal ini terjadi karena banyaknya penghuni rumah dinas yang belum melunasi pembayaran retribusi di tahun 2021 sehingga terhutang dan adanya



kenaikan tarif baru untuk rumah dinas golongan III dari Rp1.200.000 pada tahun 2020 menjadi Rp1.500.000 pada tahun 2021. Selain itu, hal ini terjadi karena adanya pengalihan obyek retribusi yang sebelumnya dikelola Sekretariat Daerah Kotawaringin Barat melalui surat Sekretariat Daerah Nomor 032/131/IV.III/SK/BPKAD/2021 Tanggal 22 Juli 2021 telah diserahkan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga agar pemungutan dapat lebih optimal.

- b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Hasil pemanfaatan BMD dari sewa ATM Bank Kalteng telah terealisasi sebesar Rp22.299.000 sesuai dengan surat perjanjian kontrak sewa untuk periode 01 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2023.

19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp2.425.193.949,00 atau 69,29% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.500.000.000,00, hal ini terjadi karena pengaruh cuaca yang sering berubah-ubah serta dana untuk pemeliharaan alat berat tidak sebanding dengan jumlah alat berat yang dipelihara.

20. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengelola 1 (satu) jenis pendapatan yakni Retribusi Daerah yang berupa sewa rumah dinas. Retribusi Sewa Rumah Dinas realisasi sebesar Rp161.680.000,00 atau 38,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp415.430.000,00. Hal ini terjadi karena jumlah rumah dinas yang berpenghuni hanya 231 unit dan masih terdapat penghuni rumah dinas yang belum membayar tagihan sewa retribusi rumah dinas.

3.2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Belanja

Jika dilihat lebih rinci, terdapat belanja dari program/kegiatan yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan (pencapaian kurang dari 95 persen), antara lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- a) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD realisasi sebesar Rp104.872.485,00 atau 90,63% dari anggaran sebesar Rp115.721.300,00 karena sisa anggaran merupakan efisiensi dari belanja uang lembur dan sisa pembayaran honor tenaga administrasi.
- b) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi sebesar Rp5.462.750,00 atau 75,78% dari anggaran sebesar Rp7.208.250,00 karena pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan di Pangkalan Bun akibat adanya pembatalan kegiatan selama pandemi.
- c) Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD realisasi sebesar Rp15.557.950,00 atau 87,99% dari anggaran sebesar Rp17.681.950,00 karena kegiatan koordinasi/perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan fasilitas sewa kendaraan, sehingga komponen uang harian hanya dibayarkan sebesar 80%.
- d) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp25.410.400,00 atau 66,28% dari anggaran sebesar Rp38.340.000,00 karena



- Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan masih terdapat pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak.
- e) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp73.778.585,00 atau 94,18% dari anggaran sebesar Rp78.341.748,00 karena realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.
 - f) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp223.845.956,00 atau 93,79% dari anggaran sebesar Rp238.655.000,00 karena Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan masih terdapat pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak.
 - g) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp185.259.135,00 atau 64,75% dari anggaran sebesar Rp286.095.420,00 karena realisasi anggaran disesuaikan dengan tagihan (penghematan listrik sesuai Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat)
 - h) Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru Rp1.393.139.000,00 atau 93,45% dari anggaran sebesar Rp1.490.836.522,00 karena terdapat sisa tender pekerjaan penambahan ruang kelas SDN 2 Karang Mulya.
 - i) Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Rp672.800.558,00 atau 58,21% dari anggaran sebesar Rp1.155.868.000,00 karena dua bangunan Perpustakaan yang bersumber dari dana DAK di SDN 1 Palih Baru dan SDN 1 Tempayang tidak dapat dilaksanakan karena sudah memiliki gedung Perpustakaan, sedangkan proses revisi/penggeseran lokus sudah tidak dapat dilakukan.
 - j) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Rp2.834.712.427,00 atau 93,33% dari anggaran sebesar Rp3.037.406.800,00 karena sisa dari proses Pengadaan Barang/Jasa.
 - k) Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rp162.462.200,00 atau 51,66% dari anggaran sebesar Rp314.504.630,00. Cetak SKHAN tidak terlaksana karena tidak ada penilaian secara personal bagi peserta didik dalam pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Hasil penilaiannya dalam bentuk evaluasi pemetaan mutu untuk satuan pendidikan. Penggandaan kegiatan ANBK juga tidak terlaksana karena tidak ada pendistribusian dokumen fisik soal ke Satuan Pendidikan.
 - l) Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp23.711.209.758,00 atau 82,04% dari anggaran sebesar Rp28.903.170.613,00. Sisa anggaran merupakan belanja BOS SD pada Sekolah Swata, dan telah disalurkan serta dibelanjakan oleh SD Swasta penerima Dana BOS.
 - m) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp1.430.483.650,00 atau 89,62% dari anggaran sebesar Rp1.596.193.578,00 karena Realisasi sesuai dengan nilai kontrak yang didapat dari proses Tender.
 - n) Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp2.281.786.000,00 atau 88,98% dari anggaran sebesar Rp2.564.490.440,00 karena Realisasi sesuai dengan nilai kontrak yang didapat dari proses Tender.
 - o) Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Rp996.382.000,00 atau 94,70% dari anggaran sebesar Rp1.052.100,00 karena realisasi sesuai dengan nilai kontrak yang didapat dari proses Tender.



- p) Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rp104.976.000,00 atau 77,67% dari anggaran sebesar Rp135.150.000,00 karena disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan.
- q) Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp39.411.100,00 atau 62,23% dari anggaran sebesar Rp63.328.092,00 disebabkan belanja pakaian batik peserta dan sewa gedung yang tidak realisasikan karena kegiatan dilaksanakan secara *online/daring*.
- r) Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp9.565.072.832 atau 70,47% dari anggaran sebesar Rp13.572.618.300,00. Sisa anggaran merupakan belanja BOS SMP pada Sekolah Swata, dan telah disalurkan serta dibelanjakan oleh SMP Swasta penerima Dana BOS.
- s) Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Rp58.997,366,00 atau 91,68% dari anggaran sebesar Rp64.349.680,00 karena selama pandemi pembelajaran dilakukan secara BDR sehingga tagihan rutin seperti air, listrik dan internet menurun, sementara pulsa internet ditunjang oleh Kemendikbudristek.
- t) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Rp80.316.000,00 atau 82,67% dari anggaran sebesar Rp97.158.120,00 karena adanya perubahan kebijakan Tahun 2021 terkait besaran uang harian yang dipotong 20% jika perjalanan dinas tersebut menggunakan sewa kendaraan, dan selama pandemi banyak kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan.
- u) Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp4.870.527.550,00 atau 88,69% dari anggaran sebesar Rp5.491.800.000,00 karena adanya penurunan jumlah peserta didik akibat terdampak Pandemi *Covid-19*.
- v) Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Rp58.363.433,00 atau 81,30% dari anggaran sebesar Rp71.785.086,00 karena terdapat penambahan pagu anggaran pada belanja tagihan listrik SKB untuk mengantisipasi pemasangan jaringan listrik yang baru pada SKB Kotawaringin barat, sedangkan pemasangan jaringan tersebut baru terlaksana pada akhir bulan Desember 2021. Dan selama pandemi, pembelajaran masih dilakukan secara *daring* atau Belajar Dari Rumah (BDR) sehingga tagihan listrik pun tidak sebanyak ketika melakukan pembelajaran secara tatap muka. Serta kegiatan sosialisasi *asesment* Nasional Pendidikan Kesetaraan yang semula teranggarkan menggunakan narasumber dari Provinsi namun karena terkendala masa pandemi *Covid-19*, akhirnya menggunakan narasumber Daerah.
- w) Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp25.619.650,00 atau 77,17% dari anggaran sebesar Rp33.199.650,00 karena adanya penurunan jumlah peserta didik akibat pandemi *Covid-19*.
- x) Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal atau Kesetaraan Rp4.854.081.978,00 atau 94,99 % dari anggaran sebesar Rp5.110.323.335,00 karena adanya pembatasan bepergian di dalam daerah untuk mengurangi risiko penularan *Covid-19*.
- y) Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya Rp1.051.649.650,00 atau 94,56% dari anggaran sebesar Rp1.112.170,650,00 karena terdapat sisa hasil lelang Pembangunan Rumah Sultan.



2. Dinas Kesehatan

- a) Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp56.910.000,00 karena kegiatan bimbingan teknis tidak dilaksanakan akibat pandemi *Covid-19*.
- b) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan realisasi sebesar Rp97.366.850,00 atau 74,21% dari anggaran sebesar Rp131.198.260,00 karena belanja cetak dan penggandaan untuk kegiatan yang sifatnya pertemuan tidak terlaksana akibat pandemi *Covid-19*.
- c) Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD realisasi sebesar Rp71.690.590,00 atau 81,41% dari anggaran sebesar Rp88.060.000,00 karena adanya pembatasan berkumpul di masa pandemi *Covid-19* sehingga kegiatan tidak bisa diselenggarakan.
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp641.107.315,00 atau 81,19% dari anggaran sebesar Rp789.622.488,00 karena penyediaan jasa dibayarkan sesuai tagihan yang ada.
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi sebesar Rp349.409.728,00 atau 93,31% dari anggaran sebesar Rp374.448.000,00. Untuk honor pejabat pengadaan tidak bisa dibayarkan seluruhnya dikarenakan salah satu pejabat pengadaan memegang jabatan fungsional.
- f) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp43.133.784,00 atau 91,51% dari anggaran sebesar Rp47.133.871,00 karena pembayaran dilakukan berdasarkan pengajuan dari pihak Puskesmas/bidang.
- g) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar Rp131.263.400,00 atau 84,61% dari anggaran sebesar Rp155.143.000,00 karena kondisi alat pendingin di lingkungan Dinas Kesehatan masih baik sehingga belanja pemeliharaan untuk alat pendingin tidak bisa diserap keseluruhan.
- h) Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan realisasi sebesar Rp3.938.757.268,71,00 atau 93,13% dari anggaran sebesar Rp4.229.512.000,00 karena disesuaikan dengan nilai kontrak dan telah dilakukan penawaran untuk masing-masing pekerjaan.
- i) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan realisasi sebesar Rp4.687.450.700,00 atau 78,49% dari anggaran sebesar Rp5.971.779.150,00 karena ada penurunan harga pada beberapa item barang.
- j) Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin realisasi sebesar Rp1.191.403.596,69 atau 68,13% dari anggaran sebesar Rp1.748.619.223,00 karena disebabkan beberapa hal:
 - waktu tayang obat di *e-katalog* setelah bulan Juni 2021. Hal ini mempengaruhi waktu mulai proses pengadaan.
 - terjadinya proses perubahan rincian belanja disebabkan ada kenaikan harga yang kemudian berdampak pada perubahan kuantitas obat yang diadakan. Hal ini memerlukan waktu dan mempengaruhi kelanjutan proses pengadaan.
 - kenaikan harga obat yang menyebabkan perubahan harga satuan pada aplikasi SIPD. Proses pengusulan untuk perubahan harga satuan juga mempengaruhi kelanjutan proses pengadaan karena perubahan tersebut harus diinput terlebih dahulu pada aplikasi SIPD, setelah itu baru bisa melaksanakan proses pengadaan.



- terjadinya pemutusan kontrak/surat pesanan oleh penyedia. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dari penyedia terhadap kesepakatan yang telah dibuat.
 - ada penyedia yang tidak mampu menyediakan seluruh item obat yang terdapat pada surat pesanan/kontrak.
- k) Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai realisasi sebesar Rp2.075.670.434,00 atau 68,24% dari anggaran sebesar Rp3.041.577.842,00 karena disebabkan:
- deviasi harga satuan di SSH/SIPD dengan di *e-katalog* sangat besar sehingga memungkinkan terjadinya efisiensi anggaran yang banyak.
 - terdapat 1 (satu) penyedia yang *cut off*, dengan alasan karena kekosongan barang.
- l) Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Mananan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya realisasi sebesar Rp169.748.500,00 atau 79,00% dari anggaran sebesar Rp214.876.507,00 karena terdapat peraturan baru pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah yaitu pembayaran perjalanan dinas jika menggunakan kendaraan dinas hanya bisa dibayarkan 80%, sedangkan menambah volume perjalanan dinas tidak dimungkinkan.
- m) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil realisasi sebesar Rp523.064.600,00 atau 81,92% dari anggaran sebesar Rp638.488.570,00 karena:
- kegiatan pertemuan sebagian dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting* sehingga anggaran makan dan minum serta perjalanan dinas dalam kota tidak terserap 100%
 - adanya pengembalian honor narasumber 50%
 - sumber dana DAK Non Fisik bisa digunakan pada bulan Agustus 2021 karena menunggu Perubahan Juknis dan anggaran
- n) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin realisasi sebesar Rp1.113.928.314,00 atau 86,20% dari anggaran sebesar Rp1.292.230.650,00 karena untuk penggunaan transport menggunakan *ambulance* sehingga anggaran untuk sewa mobil tidak digunakan tetapi hanya biaya BBM *ambulance* dan uang harian pendamping rujukan 80% dari standar biaya saja yang bisa direalisasikan.
- o) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir realisasi sebesar Rp78.234.000,00 atau 64,95% dari anggaran sebesar Rp120.446.950,00 karena kegiatan pertemuan yang awalnya akan dilaksanakan di setiap Puskesmas Poned dialihkan di aula Dinas Kesehatan.
- p) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar realisasi sebesar Rp177.932.750,00 atau 83,64% dari anggaran sebesar Rp212.729.950,00 karena masa pandemi, kunjungan ke sekolah tidak bisa dilaksanakan.
- q) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif realisasi sebesar Rp9.450.000,00 atau 90,91% dari anggaran sebesar Rp10.494.000,00 karena untuk belanja cetak spanduk sebanyak 53 lembar terdapat pengurangan harga dari nilai anggaran yang ditetapkan.
- r) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi realisasi sebesar Rp70.708.000,00 atau 78,32% dari anggaran sebesar Rp90.284.000,00 dan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat realisasi sebesar Rp101.367.000,00 atau 63,04% dari anggaran sebesar Rp160.805.000,00 karena:



- adanya *refocussing* dan pergeseran anggaran sehingga memperlambat pelaksanaan kegiatan.
- anggaran yang bersumber dari DAK Non Fisik terutama untuk belanja perjalanan dinas dalam kota baru bisa digunakan pada akhir bulan Agustus 2021 sehingga realisasi kegiatan juga baru dilaksanakan pada bulan tersebut.
- s) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis realisasi sebesar Rp58.459.000,00 atau 76,82% dari anggaran sebesar Rp76.100.000,00 karena:
 - pandemi *Covid-19* yang diikuti dengan menurunnya kunjungan pasien TBC ke Fasyankes karena tidak mau dites *Covid-19* (*PCR* atau *Rapid*)
 - perjalanan dinas terintegrasi dengan kegiatan program lainnya
 - petugas pengelola program TBC di beberapa Puskesmas fokus pada pelaksanaan tata kelola program *Covid-19*
 - Patelki Kotawaringin Barat sejak tahun 2020 menghentikan kegiatan pemeriksaan slide/sampel TBC di 18 Puskesmas dan RSSI.
- t) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV realisasi sebesar Rp165.474.323,00 atau 82,49% dari anggaran sebesar Rp200.603.730,00 karena:
 - Kegiatan makan minum penyuluhan HIV tidak terserap karena penyuluhan Hari AIDS sedunia tidak dilaksanakan
 - Kegiatan perjalanan dinas pemetaan populasi kunci tidak bisa maksimal karena sudah dikerjakan tetapi terkendala tanda tangan Kepala Desa yang tidak ada di tempat.
 - Penyuluhan luar kota untuk perusahaan swasta tidak dapat dilaksanakan terkendala peraturan terkait Pandemi *Covid-19*.
- u) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana realisasi sebesar Rp6.242.069.060,40 atau 80,53% dari anggaran sebesar Rp7.750.849.400,00 karena:
 - Terdapat kegiatan yang sudah dihapus tetapi harus dianggarkan kembali seperti pengambilan vaksin dan pengiriman Sampel *Covid-19* ke Provinsi sehingga perlu perubahan dan penyesuaian anggaran sehingga harus menunggu pengesahan DPA.
 - Khusus pengadaan barang dan Obat yang melalui *e-katalog* import banyak yang tidak tersedia, sekarang harus menggunakan produk dalam negeri namun harganya jauh lebih tinggi dari harga import sehingga kita harus menyesuaikan harga lagi melalui mekanisme notim dan perubahan.
 - Terdapat Pihak ketiga yang sampai batas waktunya belum memenuhi kewajiban mendatangkan barang yang dipesan sesuai kesepakatan kontrak sehingga dibatalkan.
 - Sebagian besar puskesmas kesulitan membuat pertanggungjawaban karena keterbatasan personel yang juga bertugas dalam kegiatan percepatan vaksinasi.
 - Beberapa faskes tidak memiliki tenaga admin khusus untuk mengerjakan SPJ sehingga walaupun kegiatan vaksinasi dikerjakan tetapi tidak bisa menyerap anggaran (yang sudah tervaksin dosis 1-2-3 sejumlah 228.439 dosis) sampai tanggal 8 Desember 2021.
 - Ada beberapa kegiatan yang anggarannya memang tidak bisa diserap seperti KIPi karena tidak ada kasus.



- v) Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan realisasi sebesar Rp130.990.700,00 atau 71,44% dari anggaran sebesar Rp183.368.700,00 karena:
 - Menurunnya kasus terkonfirmasi *Covid-19* pada triwulan IV, sehingga aktifitas perjalanan dinas untuk penyelidikan epidemiologi juga berkurang.
 - Kurangnya sumber daya manusia pada seksi surveilans dan imunisasi khususnya di program surveilans sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran. Kegiatan tersebut terintegrasi dengan kegiatan penanganan *Covid-19* khususnya vaksinasi *Covid-19* yang berlangsung terus-menerus.
- w) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular realisasi sebesar Rp893.248.150,00 atau 81,14% dari anggaran sebesar Rp1.100.917.500,00 karena:
 - Pembayaran upah kerja kader jumantik tidak bisa direalisasikan sesuai target karena banyak kader jumantik sudah tidak aktif lagi
 - Kegiatan perjalanan dinas Bimtek banyak dilakukan terintegrasi dengan kegiatan penanganan *Covid-19* dan dipertanggungjawabkan pada kegiatan tersebut sehingga bersifat efisiensi
- x) Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat realisasi sebesar Rp16.359.830.639,00 atau 79,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.664.049.484,00 karena pelayanan puskesmas dalam gedung maupun luar gedung tidak bisa maksimal dikarenakan pandemi *Covid-19* untuk menjangkau seluruh peserta JKN sehingga penghasilan yang diterima dari BPJS untuk Puskesmas berkurang.
- y) Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat realisasi sebesar Rp125.981.800,00 atau 75,91% dari anggaran sebesar Rp165.951.789,00 terkendala pandemi *Covid-19* sehingga untuk kegiatan advokasi, sosialisasi dan penguatan POKJA tidak maksimal dikerjakan dan untuk verifikasi lapangan juga tidak dilaksanakan karena tidak lolos berkas penilaian dr tim Pusat.
- z) Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit realisasi sebesar Rp675.713.812,00 atau 89,56% dari anggaran sebesar Rp754.466.409,00 karena masih ada SDM yang belum tercukupi sehingga dana untuk pembayaran SDM tidak terserap.
- aa) Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas realisasi sebesar Rp8.929.259.202,00 atau 92,96% dari anggaran sebesar Rp9.605.081.485,00 karena dibayarkan sesuai tagihan untuk masing-masing belanja.
- bb) Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp279.812.700,00 atau 27,43% dari anggaran sebesar Rp1.020.089.000,00 karena kegiatan survei oleh Tim Surveyor Kemenkes tidak dilakukan akibat Pandemi *Covid-19*, selain itu untuk pembinaan pada Puskesmas Re-Akreditasi tidak dapat dilakukan secara maksimal karena pembatasan pertemuan tatap muka dan waktu pembinaan.
- cc) Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah realisasi sebesar Rp70.953.500,00 atau 60,80% dari anggaran sebesar Rp116.707.100,00 karena kegiatan terintegrasi dengan kegiatan vaksinasi *Covid-19*, dan waktu untuk supervisi petugas belum tercapai karena bersamaan dengan pelaksanaan percepatan vaksinasi.
 - Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) realisasi sebesar Rp2.798.271.800,00 atau 59,70% dari anggaran sebesar Rp4.687.094.800,00 karena kasus menurun sehingga kegiatan layanan kesehatan di lapangan berkurang.



- Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) realisasi sebesar Rp30.375.000,00 atau 75,01% dari anggaran sebesar Rp40.495.000,00 karena ada kegiatan terintegrasi dengan vaksinasi dan kasus yang terjadi kebanyakan kasus KIPI ringan sehingga tidak dilaporkan.
- Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional realisasi sebesar Rp48.340.000,00 atau 73,70% dari anggaran sebesar Rp65.950.000,00 karena kasus sudah mulai turun di bulan November dan Desember sehingga tidak ada spesimen yang dikirim.
- dd) Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp4.616.000,00 atau 44,92% dari anggaran sebesar Rp10.275.000,00 karena:
 - Sebagian besar Fasyankes yang dilakukan visitasi hanya wilayah dalam kota sehingga tidak banyak menyerap anggaran.
 - Ada beberapa Fasyankes di wilayah perusahaan tidak dilakukan visitasi dikarenakan pihak perusahaan membatasi kunjungan selama pandemi *Covid-19*.
- ee) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan realisasi sebesar Rp50.295.501,00 atau 86,27% dari anggaran sebesar Rp58.302.950,00 karena tidak ada bahasan yang mendesak untuk dibahas oleh bidang Yankes dan melibatkan lintas bidang maupun lintas program sehingga tidak membutuhkan rapat khusus.
- ff) Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan realisasi sebesar Rp48.632.000,00 atau 84,32% dari anggaran sebesar Rp65.950.000,00 karena:
 - Telah dilakukan Sosialisasi tentang sistem rujukan pasien tidak mampu ke puskesmas-puskesmas namun dikarenakan pandemi *Covid-19* masyarakat enggan dirujuk dan untuk rujukan pasien terdiagnosa *Covid-19* ada dana tersendiri
 - Dana rujukan pasien tidak mampu hanya mengakomodir biaya transportasi dan tidak dengan biaya perawatan selanjutnya.
- gg) Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar realisasi sebesar Rp15.076.133.323,00 atau 88,49% dari anggaran sebesar Rp17.037.662.579,00 karena pada anggaran kebutuhan sumber daya manusia kesehatan termasuk anggaran insentif *Covid-19* untuk Puskesmas sedangkan pada bulan Oktober-Desember kasus *Covid-19* menurun drastis sehingga serapan anggaran tidak maksimal.
- hh) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) realisasi sebesar Rp49.288.250,00 atau 73,44% dari anggaran sebesar Rp67.090.000,00 karena izin diterbitkan sesuai pengajuan perizinan dan pada tahun 2021 permohonan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) di masa pandemi *Covid-19* terjadi penurunan sehingga kegiatan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.
- ii) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga realisasi sebesar Rp25.762.000,00 atau 40,74% dari anggaran sebesar Rp63.242.147,00 karena:



- Kurangnya SDM di Seksi Farmakes sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal.
 - Masih dalam situasi pandemi *Covid-19* sehingga membatasi kunjungan ke lapangan.
- jj) Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat realisasi sebesar Rp279.469.386,00 atau 84,05% dari anggaran sebesar Rp332.516.768,00 karena:
- Dalam kegiatan ini terdapat 3 sumber dana (DAU *Covid*, DAK NF, DAK BPOM) penyebab utama rendahnya capaian dari DAK BPOM karena adanya pembatasan kegiatan pengumpulan massa.
 - Untuk sumber dari DAK NF germas efisiensi anggaran tetapi untuk realisasi fisik 100% untuk kegiatan 4 kali penggerakan germas terlaksana.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi sebesar Rp2.358.900,00 atau 70,23% dari anggaran sebesar Rp3.358.900,00 karena pada saat penganggaran biaya konsinyering untuk perjalanan dinas luar daerah, terhubung masih dalam situasi pandemi *Covid-19* sehingga konsinyering dilakukan di dalam daerah.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp58.280.532,00 atau 92,18% dari anggaran sebesar Rp62.796.000 dikarenakan pada saat penganggaran perhitungan sudah termasuk biaya denda, namun pada pelaksanaannya muncul kebijakan pemutihan untuk biaya denda sehingga anggaran tidak terserap seluruhnya.
- c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi realisasi sebesar Rp74.886.698,50 atau 68,03% dari anggaran sebesar Rp110.081.775,00 karena pada belanja honorarium narasumber yang awalnya akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari diubah menjadi 1 (satu) hari, pada belanja perjalanan dinas biasa awalnya narasumber dianggarkan menggunakan transportasi pesawat, namun pelaksanaannya menggunakan transportasi darat, kemudian pada belanja perjalanan dinas dalam kota terdapat biaya uang saku peserta yang awalnya dibayarkan untuk 2 (dua) hari pelaksanaan, namun diubah menjadi 1 (satu) hari pelaksanaan.

4. Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat

- a) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha realisasi sebesar Rp6.928.000 atau 94,71% dari anggaran sebesar Rp7.315.000,00 karena belanja alat tulis kantor yang tidak direalisasikan sebesar Rp295.000,00.
- b) Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp15.999.000,00 atau 93,81% dari anggaran sebesar Rp17.055.000,00 karena jumlah peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi penggunaan tanah tidak mencapai target sebanyak 55 orang.



5. Satuan Polisi Pramong Praja dan Pemadam Kebakaran

- a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target anggaran sebesar Rp128.310,00 karena kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam daerah.
- b) Belanja alat atau bahan kegiatan kantor-benda pos realisasi sebesar Rp5.000.000,00 atau 46,62% dari target anggaran sebesar Rp10.725.000 karena jumlah realisasi belanja sudah memenuhi kebutuhan benda pos.
- c) Belanja jasa transaksi keuangan realisasi sebesar Rp65.000,00 atau 19,75% dari target anggaran sebesar Rp329.000,00 karena jumlah realisasi sudah sesuai kebutuhan transaksi keuangan
- d) Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya kelengkapannya realisasi sebesar Rp229.337.400,00 atau 91,52% dari target anggaran sebesar Rp250.599.173,00 karena jumlah realisasi belanja sudah memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan kontrak yang ada.
- e) Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan realisasi sebesar Rp1.376.000,00 atau 34,57% dari target anggaran sebesar Rp3.980.000,00 karena selama tahun 2021 hanya ada satu kali bimtek implementasi perundang-undangan.
- f) Penyediaan jasa surat menyurat realisasi sebesar Rp0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp175.000,00 karena selama tahun 2021 tidak ada pengiriman dokumen fisik surat.
- g) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi sebesar Rp73.084.240,00 atau 77% dari target Rp56.279.681,00 karena:
 - Belanja Telepon realisasi sebesar Rp9.607.147,00 atau 70,3% dari target Rp13.660.000,00 karena realisasi sesuai dengan tagihan.
 - Belanja Listrik realisasi sebesar Rp41.598.009 atau 90,13% dari target Rp52.500.000,00 karena realisasi sesuai dengan tagihan.
- h) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, belanja pemeliharaan alat-alat rumah tangga, alat pemadam kebakaran realisasi sebesar Rp0,00 atau 0% dari target Rp2.500.000,00 karena peralatan rumah tangga damkar masih dalam kondisi bagus dan tidak perlu perbaikan.
- i) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wakil Bupati, Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kebakaran realisasi sebesar Rp5.460.000,00 atau 92,86% dari target Rp5.880.000,00 karena jumlah realisasi tersebut sudah sesuai dengan giat perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan selama tahun 2021.

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah realisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 karena Belanja Hibah untuk Pembangunan Ruang Makan SPN Polda Kalteng yang dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan



Oktober 2021 belum diterima. Berdasarkan verifikasi APBD Perubahan tahun 2021 di tingkat Provinsi, dari segi waktu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sehingga ditunda dan dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

- b) Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial, Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Bekerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah, realisasi sebesar Rp12.303.800,00 atau 88,57% dari anggaran sebesar Rp13,891,950,00 karena kekurangtelitian dalam pengendalian kegiatan dan pertanggungjawaban/kartu kendali kegiatan.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp274.413.410,00 atau 73,33% dari anggaran sebesar Rp374.194.746,00 karena pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sangat rendah, dimana realisasi sesuai dengan penagihan.
- b) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp219.189.400,00 atau 90,09% dari anggaran sebesar Rp243.303.176,00 karena menyesuaikan pada jumlah dan harga komponen peralatan dan mesin yang mengalami kerusakan/perbaikan.
- c) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana realisasi sebesar Rp113.429.080,00 atau 93,01% dari anggaran sebesar Rp121.949.080,00 karena pembuatan sarana informasi kerawanan bencana menyesuaikan keperluan di lapangan.
- d) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan realisasi sebesar Rp622.148.857,00 atau 79,63% dari anggaran sebesar Rp781.273.712,00 karena:
- Pada tahun 2021 tidak terjadi bencana yang bersifat masiv dan menimbulkan kerusakan sarana prasarana yang memerlukan pemulihan darurat.
 - Adanya Pembatasan jumlah peserta kegiatan di saat masa pandemi *Covid-19*.
 - Pembayaran tenaga administrasi menyesuaikan aturan yang berlaku.
- e) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana realisasi sebesar Rp9.445.875,00 atau 73,22% dari anggaran sebesar Rp12.900.000,00 karena realisasi belanja konsumsi rapat disesuaikan dengan jumlah undangan/peserta rapat yang hadir.
- f) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp885.654.338,00 atau 49,07% dari anggaran sebesar Rp1.804.897.760,00 karena:
- Penyerapan anggaran disesuaikan dengan jumlah aktifitas pemadaman Karhutla pada sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sehingga berdampak pada penyerapan anggaran yang dialokasikan sangat kecil yaitu Rp753.169.250,00 atau 46,59% dari pagu Rp1.616.417.760,00.
 - Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Belanja



Perjalanan dinas rapat koordinasi disesuaikan dengan undangan dan kepentingan yang mendesak. Tim supervisi dari pusat (KLHK) tidak melakukan supervisi langsung di Kotawaringin Barat tetapi pembahasan anggaran dilakukan secara daring/virtual.

- g) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran realisasi sebesar Rp1.030.450.150,00 atau 90,54% dari anggaran sebesar Rp1.138.059.540,00 karena penghematan belanja sewa rumah untuk posko 1 unit selama 3 bulan, penghematan biaya sewa tenda dan kursi serta adanya pembatasan jumlah peserta untuk kegiatan Apel Siaga Karhutla.

8. Dinas Sosial

- a) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp36.379.685,00 atau 75% dari anggaran sebesar Rp48.397.500,00 karena tidak terealisasinya belanja cetak dan penggandaan, serta belanja perjalanan dinas yang dianggarkan untuk mengikuti musrenbang tidak terealisasi karena kegiatan ditiadakan.
- b) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan realisasi sebesar Rp8.758.700,00 atau 61,25% dari anggaran sebesar Rp14.300.000,00 karena pada kegiatan ini anggaran disediakan untuk pembayaran belanja bimbingan Teknis untuk 1 orang dan telah terealisasi sebesar anggaran yang disediakan, sedangkan untuk anggaran Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan sebesar Rp9.300.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp5.541.300,00 yang berdasarkan pada rincian pembayaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan terdapat selisih pembayaran dengan anggaran yang disediakan.
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp4.772.040,00 atau 80,71% dari anggaran sebesar Rp5.912.260,00 karena pembayaran pajak kendaraan dinas yang terealisasi kendaraan dinas roda 4 dan kendaraan dinas operasional *Dumplap* dan *Rescue*, untuk kendaraan dinas roda 2 ada beberapa yang tidak terealisasi karena kendala STNK yang tidak diketahui pemegangnya.
- d) Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal realisasi sebesar Rp97.984.750,00 atau 68,09% dari anggaran sebesar Rp143.906.850,00 karena sampai dengan akhir tahun pemulangan orang terlantar hanya dapat terealisasi sebesar Rp64.628.000,00 sedangkan untuk makan minum orang terlantar hanya terealisasi sebesar Rp20.220.000,00 sesuai dengan kedatangan dan pemberangkatan orang terlantar ke tempat asal yang untuk sementara waktu ditampung di rumah singgah.
- e) Kegiatan Penyediaan Makanan realisasi sebesar Rp180.928.000,00 atau 53,85% dari anggaran sebesar Rp336.000.000,00 karena belanja Bantuan Sosial untuk Pasien Positif *Covid-19* yang menjalani Isolasi Mandiri terbagi dalam 2 tahap. Tahap I terealisasi sedangkan tahap II tidak direalisasikan mengingat tidak ada lagi Pasien Positif *Covid-19* yang menjalani Isolasi Mandiri.



- f) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp344.358.500,00 atau 93,80% dari anggaran sebesar Rp367.120.000,00 karena:
- Tidak terlaksananya kegiatan Upacara Parade Dalam Rangka Hari Pahlawan ke-76 Tahun 2021 sehingga honorarium petugas upacara dan Pemain *Marching Band* tidak dibayarkan.
 - Belanja Sewa mobilitas darat yang dianggarkan untuk pendistribusian barang Rp7.800.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp3.250.000,00 karena pendistribusian barang di dalam kota memakai kendaraan dinas operasional Dinas Sosial
 - Uang tali asih untuk ahli waris Pendiri Kobar, Ahli Waris Pahlawan, Veteran dan Janda Veteran yang diusulkan sebanyak 79 orang karena ada 7 orang veteran dan janda veteran yang meninggal dunia
 - Belanja makanan dan minuman kegiatan Anjongsana tidak terlaksana karena kegiatan ditiadakan.

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp2.061.000,00 atau 68,76% dari anggaran sebesar Rp2.997.500,00 karena sebagian besar dokumen-dokumen kedinasan dikirimkan melalui media digital seperti *e-mail* dan *WhatsApp*.
- b) Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan penutupan Perusahaan yang Berakibat pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp10.428.450,00 atau 87,13% dari anggaran sebesar Rp11.968.450,00 karena realisasi biaya perjalanan dinas kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah kasus yang harus dimediasi.
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik keperluan UPTD BLK realisasi sebesar Rp19.217.439,00 atau 69,08% dari anggaran sebesar Rp27.817.104,00 karena realisasi pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan.

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kegiatan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan realisasi sebesar Rp115.740.073,00 atau 76,80% dari target anggaran sebesar Rp150.705.336,00 hal ini karena Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi *Covid-19* sehingga realisasi belanja tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.

11. Dinas Ketahanan Pangan

- a) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada Sub kegiatan Koordinasi dan Sikronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik realisasi sebesar Rp14.409.000,00 atau 89,97% dari anggaran sebesar Rp16.015.000,00 karena adanya sisa belanja perjalanan dinas (efisiensi).
- b) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca



Bahan Makanan realisasi sebesar Rp41.501.850,00 atau 91,50% dari anggaran sebesar Rp45.235.850,00 karena adanya sisa belanja perjalanan dinas (efisiensi).

- c) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp2.738.500,00 atau 87,14% dari anggaran sebesar Rp3.142.500,00 karena adanya sisa belanja perjalanan dinas (efisiensi).
- d) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per Tahun realisasi sebesar Rp4.736.000,00 atau 85,64% dari anggaran sebesar Rp5.530.000,00 karena adanya sisa belanja perjalanan dinas (efisiensi) dan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun realisasi sebesar Rp13.018.900,00 atau 89,76% dari anggaran sebesar Rp14.504.500 karena adanya sisa belanja perjalanan dinas (efisiensi).

12. Dinas Lingkungan Hidup

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp189.500,00 atau 77,35% dari anggaran sebesar Rp245.000,00 karena Pengiriman surat menyurat pada Dinas Lingkungan Hidup menggunakan melalui surat elektronik (*e-mail*) dan/atau aplikasi *Whatsapp*.
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp47.157.704,00 atau 51,07% dari anggaran sebesar Rp92.343.600,00 karena kebutuhan pembayaran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik menyesuaikan tagihan pembayaran.
- c) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp45.429.700,00 atau 94,03% dari anggaran sebesar Rp48.315.550,00. Sisa anggaran perjalanan dinas dikarenakan penganggaran untuk uang harian 100% tetapi pada pelaksanaannya menggunakan sewa mobil dan pembayaran uang harian hanya sebesar 80%.
- d) Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp132.582.299,00 atau 93,27% dari anggaran sebesar Rp142.148.005,00 karena untuk biaya jasa ketersediaan layanan (*Availability Payment*) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika untuk penyediaan data *AQMS* dari penyedia mengalami penurunan harga.
- e) Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik realisasi sebesar Rp9.260.000,00 atau 92,42% dari anggaran sebesar Rp10.020.000,00 karena pelaksanaan perjalanan dinas terkait inventarisasi limbah B3 menyesuaikan dengan jumlah fasilitas layanan kesehatan di masing-masing Kecamatan yang ditargetkan.
- f) Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp8.755.000,00 atau 88,66% dari anggaran sebesar Rp9.875.000,00. Sisa anggaran perjalanan dinas dikarenakan penganggaran untuk uang harian 100% tetapi pada pelaksanaannya menggunakan sewa mobil dan pembayaran uang harian hanya sebesar 80%.



- g) Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup realisasi sebesar Rp9.975.000,00 atau 87,69% dari anggaran sebesar Rp11.375.000,00. Sisa anggaran perjalanan dinas dikarenakan penganggaran untuk uang harian 100% tetapi pada pelaksanaannya menggunakan sewa mobil sehingga pembayaran uang harian hanya sebesar 80%.
- h) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan realisasi sebesar Rp48.277.450,00 atau 90,28% dari anggaran sebesar Rp53.472.500,00 karena kegiatan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan jumlah pengaduan pengelolaan lingkungan oleh masyarakat yang masuk.

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp14.940.000,00 karena kegiatan diselenggarakan dengan menggunakan media *Zoom Meeting*.
- b) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga realisasi sebesar Rp2.174.400,00 atau 86,16% dari anggaran sebesar Rp2.523.840,00 karena realisasi pengadaan di bawah nilai pengenaan PPn, sehingga PPn 10% yang disediakan pada DPA tidak diakumulasikan pada tagihan.
- c) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi sebesar Rp162.805.908,00 atau 86,01% dari anggaran sebesar Rp189.290.000,00 karena penyelenggaraan kegiatan di luar daerah masih terbatas dan pelaksanaannya menggunakan media *Zoom Meeting*.
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp490.000,00 karena pengiriman surat maupun laporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak menggunakan jasa pengiriman fisik tapi melalui media elektronik.
- e) Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil realisasi sebesar Rp33.464.000,00 atau 78,91% dari anggaran sebesar Rp42.410.000,00 karena dari besaran anggaran perjalanan dinas yang disediakan untuk biaya transportasi dibayarkan sesuai biaya riil dan tidak melebihi batas maksimal, biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum sebesar 30% karena tidak menggunakan biaya penginapan, dan uang harian perjalanan dinas hanya dibayarkan 80% karena komponen transportasi lokal sudah terakomodir pada biaya sewa transportasi.

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp42.721.427,00 atau 77,15% dari anggaran sebesar Rp55.374.960,00 karena belanja dibayarkan sesuai dengan tagihan dari penyedia, dimana selama tahun 2021 tagihan pemakaian Listrik, Air dan Telpon di bawah dari pagu yang dianggarkan.

15. Dinas Perhubungan

- a) Kegiatan Pendataan dan pendaftaran Objek Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp8.063.550,00 atau 46,21% dari anggaran sebesar Rp17.448.750,00 karena stok persediaan karcis objek retribusi daerah masih tersedia di tahun 2021, sehingga tidak melakukan realisasi anggaran.



- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp147.184.200,00 atau 86,06% dari anggaran sebesar Rp171.016.700,00 karena adanya pandemi *Covid-19* dan pembatasan aktivitas masyarakat sehingga sebagian kendaraan operasional lapangan tidak beroperasi.
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Unit UPT Pelabuhan Penyeberangan Kumai realisasi sebesar Rp174.950.700,00 atau 82,23% dari anggaran sebesar Rp212.745.600,00 karena Tenaga Kerja Daerah yang bertugas pada UPT Pelabuhan Penyeberangan Kumai melaksanakan cuti sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.

16. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

- a) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi sebesar Rp108.179.154,00 atau 94,25% dari anggaran sebesar Rp114.775.000,00 karena perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas di dalam kota dilaksanakan secara lebih selektif dan dipengaruhi oleh kondisi pandemi.
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp15.869.614,00 atau 66,01% dari anggaran sebesar Rp24.041.400,00 karena beberapa kendaraan dinas masih dalam kondisi baik.
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar Rp9.403.000,00 atau 53,77% dari anggaran sebesar Rp17.488.600,00 karena pemeliharaan hanya untuk peralatan dan mesin yang benar-benar memerlukan perbaikan/penggantian suku cadang.

17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp2.760.000,00 atau 92% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00 karena pendistribusian surat menyurat pada Tahun 2021 sudah banyak menggunakan *e-mail* sehingga menghemat biaya pengiriman.
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp254.930.608 atau 73,32% dari anggaran sebesar Rp347.689.860 karena adanya penghematan biaya listrik penggunaan travelator di Pasar Indra Sari Baru yang dalam masa pemeliharaan, sedangkan biaya listriknya sudah dianggarkan sampai dengan bulan Desember 2021 dan adanya pembebasan biaya listrik pada beberapa KWH listrik pasar akibat dari pandemi *Covid-19*.
- c) Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi realisasi sebesar Rp185.294.358,00 atau 80,62% dari anggaran sebesar Rp229.847.038,00 karena adanya pandemi *Covid-19* dan pemberlakuan PPKM dan menyesuaikan dengan juknis dimana untuk pengajar atau instruktur mengambil tenaga akademis dari Universitas setempat (UNTAMA), sementara di DPA pengalokasian tenaga pengajar diambil dari Balai Diklat Koperasi dan Widwaswara dari Provinsi, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan sehingga untuk belanja perjalanan dinas tidak terserap seluruhnya.
- d) Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro realisasi sebesar Rp114.048.484,00 atau



71,08% dari anggaran sebesar Rp160.456.962,00 karena kondisi pandemi dan pemberlakuan PPKM sehingga tidak dapat mendatangkan Narasumber dari Jawa. Rencana semula tema pelatihan kerajinan dan kerang diganti menjadi kewirausahaan dan bisnis, sehingga banyak pos-pos anggaran yang tidak terpakai.

- e) Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp13.642.000,00 atau 64,65% dari anggaran sebesar Rp21.100.000,00 karena adanya pandemi *Covid-19* dan pemberlakuan PPKM sehingga kegiatan tersebut tidak dapat seluruhnya dilaksanakan.
- f) Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro realisasi sebesar Rp69.922.125,00 atau 56,47% dari anggaran sebesar Rp123.831.597,00 karena rencana semula adalah pelatihan kerajinan dari limbah kerang, akan tetapi kondisi pandemik dan pemberlakuan PPKM sehingga tidak bisa mendatangkan Narasumber dari Jawa.
- g) Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp116.738.550,00 atau 84,29% dari anggaran sebesar Rp138.500.100,00 karena adanya rasionalisasi belanja cetak sehingga tidak direalisasikan dan adanya pembatalan kegiatan pasar murah dari Provinsi Kalteng sehingga belanja sewa kendaraan ini digunakan sebagai pendampingan.
- h) Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat realisasi sebesar Rp264.000.000,00 atau 84,50% dari anggaran sebesar Rp312.430.000,00 karena adanya pandemi *Covid-19* dan pemberlakuan PPKM sehingga kegiatan tersebut tidak dapat seluruhnya dilaksanakan.

18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- a) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp17.664.700,00 atau 34,04% dari anggaran sebesar Rp51.900.000,00. Kegiatan tidak terlaksana seluruhnya dikarenakan pandemi *Covid-19* dan masa PPKM tingkat Pusat yang panjang sehingga badan/instansi penyelenggara tidak dapat melaksanakan kegiatan dimaksud.
- b) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota realisasi Rp247.848.467,00 atau 88,31% dari anggaran sebesar Rp290.667.790,00 karena permasalahan 1 (satu) kegiatan yang pelaksanaannya dalam waktu bersamaan di 3 (tiga) lokasi Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- c) Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Realisasi Rp46.452.200,00 atau 70,31% dari pagu Rp66.070.000,00 karena kegiatan perjalanan dinas ke daerah yang dituju tidak mempunyai fasilitas standar sehingga biaya penginapan tidak dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya.



19. Dinas Perpustakaan

Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan sebesar Rp5.868.250,00 atau 69,09% dari anggaran Rp8.493.250,00 dikarenakan:

- belum adanya kesadaran masyarakat tentang keberadaan naskah kuno
- SDM terkait pengalihmediaan naskah kuno belum tersedia
- belum tersedianya koleksi budaya etnis nusantara

21. Dinas Pariwisata

a) Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri realisasi sebesar Rp79.590.568,00 atau 85,77% dari anggaran sebesar Rp92.797.600,00. Terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp13.207.032 yang terdiri dari:

- Sebesar Rp407.032,00 merupakan sisa dari realisasi Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN.
- Sebesar Rp12.800.000,00 merupakan pekerjaan pembuatan video animasi yang bersumber dari SILPA Dana DAK Non Fisik Tahun 2020. Pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena perkiraan biaya pembuatan Video Animasi lebih besar dari Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditetapkan, dimana besaran nilai tertinggi dalam SBU Tahun 2021 adalah Rp10.000.000,00 sementara untuk pembuatan video animasi dengan spesifikasi pekerjaan Video Film (Cinema), liputan 3-4 hari produksi, 1-2 menit video klip full, video durasi 1-2 jam membutuhkan biaya lebih dari Rp10.000.000,00.

b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp203.537.256,00 atau 93,40% dari anggaran sebesar Rp217.924.145,00. Terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp14.386.889,00. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp280.000,00 karena tidak ada dokumen/berkas fisik yang dikirim, melainkan menggunakan media *e-mail*, *whatsapp* dan media elektronik lainnya.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi keuangan sebesar Rp61.070.065,00 atau 83,95% dari anggaran sebesar Rp72.743.700,00 dikarenakan *event* besar yang rencananya diselenggarakan di Pangkalan Bun Park batal dilaksanakan karena pandemi *Covid-19*, sehingga berdampak pada pengurangan pemakaian listrik.

22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

a) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terealisasi sebesar Rp51.034.500,00 atau 94,97% dari anggaran sebesar Rp53.737.442,00. Hal ini dikarenakan terdapat efisiensi penggunaan anggaran pada Belanja Modal Pembelian Komputer Desktop All in One, LCD Proyektor, Printer



Dot Matrix dan Scanner. Pengadaan/pembelian barang-barang tersebut telah sesuai dengan kebutuhan Dinas TPHP, baik dari segi spesifikasi barang ataupun jumlahnya.

- b) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp55.309.000,00 atau 92,31% dari anggaran sebesar Rp59.915.554,00. Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, 2 (dua) Sub Kegiatan terealisasi lebih dari 95% namun 1 (satu) Sub Kegiatan yakni Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan hanya terealisasi sebesar 53,23% atau sebesar Rp4.349.500,00 dari Pagu Anggaran sebesar Rp9.299.500,00. Hal ini disebabkan anggaran pada Sub Kegiatan ini disediakan untuk Kendaraan Roda 4 (Mobil Operasional Kepala Dinas) Merk Strada CR/2.5 GLS (4X4) MT Type: *Double Cabin* dengan Nomor Polisi KH 8048 GU sebanyak 1 (satu) unit. Kendaraan tersebut telah diserahkan kepada Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 032/1298/TPHP.1/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 sehingga anggaran untuk pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan tersebut untuk selanjutnya tidak dapat direalisasikan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- a) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis realisasi sebesar Rp16.521.550,00 atau 75,12% dari anggaran sebesar Rp21.995.000,00 karena adanya kerjasama/*sharing* dengan Balai Veteriner Banjarbaru sehingga biaya pengambilan, pengiriman dan pengujian sampel laboratorium ditanggung oleh pihak Balai Veteriner Banjarbaru.
- b) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner realisasi sebesar Rp152.816.150,00 atau 90,32% dari anggaran sebesar Rp169.202.000,00 karena adanya Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang mengundurkan diri sehingga anggaran tidak terserap seluruhnya.
- c) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa realisasi sebesar Rp105.231.200,00 atau 65,34% dari anggaran sebesar Rp161.056.200,00. Kegiatan Revitalisasi tidak dilaksanakan karena telah dilakukan verifikasi, validasi dan penilaian terhadap lembaga petani (kelompok tani) oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan biaya honor untuk Narasumber direalisasikan setengah dari anggaran karena Narasumber berasal dari intern Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- d) Kegiatan Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis untuk Rumah Potong Hewan realisasi sebesar Rp278.405.047,00 atau 89,35% dari anggaran sebesar Rp311.597.247,00 karena adanya Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang mengundurkan diri sehingga anggaran tidak terserap seluruhnya.

24. Sekretariat Daerah

- a) Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp67.917.816,00 atau 85,81% dari anggaran sebesar Rp79.150.000 karena tidak terealisasinya premi asuransi untuk satu unit BMD yaitu asrama mahasiswa Palangkaraya karena nilai premi melebihi pagu anggaran



- b) Subkegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD realisasi sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp13.043.750,00 karena kegiatan penilaian BMD dilaksanakan oleh bidang aset BPKAD
- c) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi sebesar Rp611.641.484,00 atau 94,76% dari anggaran sebesar Rp645.470.000,00 dikarenakan pengalihan pelaksanaan kegiatan secara daring
- d) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp206.879.237,00 atau 70,11% dari anggaran sebesar Rp295.084.627,00 karena realisasi pemeliharaan menyesuaikan kondisi kendaraan
- e) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar Rp92.060.000,00 atau 76,69% dari anggaran sebesar Rp120.039.600,00 karena realisasi pemeliharaan menyesuaikan kondisi peralatan/mesin
- f) Subkegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi realisasi sebesar Rp78.549.700,00 atau 90,59% dari anggaran sebesar Rp86.713.700,00 karena ketersediaan narasumber dari segi eselon tidak sesuai permohonan dari PD dan adanya peringkasan hari pelaksanaan kegiatan dari 2 hari menjadi 1 hari
- g) Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan realisasi sebesar Rp324.307.099,00 atau 90,79% dari anggaran sebesar Rp357.217.098,00 karena realisasi belanja hibah kepada presidium pemekaran provinsi Kotawaringin hanya terserap 85% dari anggaran
- h) Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual realisasi sebesar Rp2.202.348.330,00 atau 75,78% dari anggaran sebesar Rp2.906.255.150,00 dikarenakan pelaksanaan kegiatan Kobar Bershalawat dengan pembatasan, penundaan pelaksanaan STQH dan MTQ tingkat Provinsi serta realisasi jasa tenaga administrasi sesuai hari kerja
- i) Subkegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik realisasi sebesar Rp33.624.200,00 atau 79,55% dari anggaran sebesar Rp42.268.800,00 disebabkan oleh realisasi pembayaran jasa tenaga administrasi yang menyesuaikan hari kerja dan tidak terlaksananya perjalanan dinas ke Biro PBJ Pemprov.

25. Sekretariat DPRD

- a) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp3.280.000,00 atau 77,91% dari anggaran sebesar Rp4.210.000,00 karena kegiatan lebih banyak dilaksanakan secara virtual
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp138.000,00 atau 24,64% dari anggaran sebesar Rp560.000,00 karena dokumen/berkas dikirim menggunakan media *e-mail*, *whatsapp* dan media elektronik lainnya
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp85.716.089,00 atau 84,93% dari anggaran sebesar Rp100.931.000,00 karena:
 - kendaraan dinas masih dalam kondisi baru sehingga tidak banyak memerlukan pemeliharaan dan perbaikan maupun penggantian suku cadang
 - bea pajak pada saat penganggaran ditambahkan estimasi kenaikan biaya STNK
- d) Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up (MCU)* DPRD realisasi sebesar Rp428.237.935,00 atau 73,78% dari anggaran sebesar Rp580.400.000,00 karena



biaya *MCU* sebagian pelaksanaannya menggunakan paket di bawah pagu, sedangkan SPD untuk *MCU* dilaksanakan dengan melanjutkan kegiatan sebelumnya sehingga biaya transportasi tidak terealisasi

- e) Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah realisasi sebesar Rp128.365.000,00 atau 87,33% dari anggaran sebesar Rp146.990.000,00 karena kegiatan dilaksanakan dengan pembatasan jumlah undangan yang hadir dan efisiensi tingkatan pembahasan
- f) Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan realisasi sebesar Rp30.978.800,00 atau 49,99% dari anggaran sebesar Rp61.965.000,00 karena kegiatan dilaksanakan dengan pembatasan jumlah undangan yang hadir dan efisiensi tingkatan pembahasan
- g) Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD realisasi sebesar Rp2.294.075.390,00 atau 74,01% dari anggaran sebesar Rp3.099.843.100,00 karena adanya kebijakan pimpinan DPRD yang mengharuskan kegiatan menyesuaikan dengan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD
- h) Kegiatan Pelaksanaan Reses realisasi sebesar Rp267.928.503,00 atau 84,57% dari anggaran sebesar Rp316.800.000,00 karena terkendala pandemi yang mengharuskan pembatasan kegiatan untuk mengumpulkan orang banyak.

26. Inspektorat Daerah

- a) Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi realisasi sebesar Rp133.824.957,00 atau 63,57% dari anggaran sebesar Rp210.520.000,00 karena adanya efisiensi dan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- b) Kegiatan pengadaan Peralatan dan mesin lainnya realisasi Rp1.215.176.000,00 atau 88,90% dari anggaran Rp1.366.844.798,00 karena adanya efisiensi dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp677.000,00 atau 25,01% dari anggaran Rp2.699.200,00 karena sebagian proses pengiriman surat menggunakan media *e-mail*
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp72.477.413,00 atau 77,38% dari anggaran Rp93.660.800,00 karena efisiensi dari penggunaan barang-barang elektronik
- e) Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp290.585.000,00 atau 55,31% dari anggaran sebesar Rp525.345.000,00 karena adanya 2 (dua) kegiatan pengawasan yang tidak terlaksana yaitu kegiatan Reviu Renja TA. 2022 dan Reviu Renja Perubahan TA. 2021 karena bersamaan dengan kegiatan pengawasan lainnya di luar PKPT
- f) Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu realisasi sebesar Rp321.135.000,00 atau 43,35% dari anggaran sebesar Rp740.725.000,00 karena untuk sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah tidak ada kasus kerugian negara baru yang masuk ke Inspektorat selama Tahun 2021 dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke proses pemeriksaan
- g) Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi realisasi sebesar Rp337.637.732,00 atau 83,82% dari anggaran Rp402.794.128,00 karena adanya kegiatan bersamaan di luar PKPT.



27. Kecamatan Arut Selatan

- a) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi sebesar Rp1.097.000,00 atau 86,46% dari anggaran sebesar Rp1.268.750,00 karena pandemi *Covid-19* maka kegiatan Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan di dalam daerah dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tidak memerlukan penggandaan karena hanya menggunakan hasil *print out*
- b) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan realisasi sebesar Rp10.240.000,00 atau 93,77% dari anggaran sebesar Rp10.920.000,00 karena pembatasan dan penundaan kegiatan Bimbingan teknis ke luar daerah selama masa pandemi *Covid-19* sehingga dialihkan secara virtual melalui *video conference*
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp149.185.257,00 atau 89,42% dari anggaran sebesar Rp166.842.830,00 karena anggaran diperhitungkan untukantisipasi apabila ada kenaikan tarif dasar listrik, telepon, internet, surat kabar dan air.

28. Kecamatan Kumai

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp33.078.000,00 atau 89,47% dari anggaran sebesar Rp36.972.500,00 karena kendaraan dinas tersebut masih dalam keadaan baik sehingga belum memerlukan penggantian suku cadang
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp19.128.100,00 atau 76,29% dari anggaran sebesar Rp25.072.710,00 karena kendaraan dinas tersebut masih layak pakai sementara Mobil Damkar masih ditanggung oleh BPBD sehingga pagu belanja pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan belum terpakai
- c) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan realisasi sebesar Rp65.487.464,00 atau 89,86% dari anggaran sebesar Rp72.874.750,00 karena pembinaan ke desa-desa dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain, sehingga anggaran biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota tidak lagi memakai anggaran yang tersedia
- d) Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp2.600.000,00 karena kegiatan dilaksanakan secara Daring/*Online* sehingga anggaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak serta makan dan minum rapat tidak terserap sepenuhnya
- e) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan realisasi sebesar Rp59.241.600,00 atau 81,14% dari anggaran sebesar Rp73.011.610,00 karena dalam pelaksanaan kegiatannya tidak lebih dari 8 jam atau 12km jadi hanya menggunakan Surat Tugas (ST) saja, sehingga Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota tidak terserap seluruhnya
- f) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Candi realisasi sebesar Rp40.800.000,00 atau 90,67% dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00 karena kader posyandu yang semula dianggarkan dan direkrut untuk 12 orang, 3 orang mengundurkan diri sehingga anggaran tidak seluruhnya terserap



- g) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kumai Hulu realisasi sebesar Rp183.233.600,00 atau 88,92% dari anggaran sebesar Rp206.069.950,00 karena beberapa kegiatan penyemprotan disinfektan menggunakan sprayer dan tidak menggunakan kendaraan roda 4 atau mesin penyemprot
- h) Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kelurahan Kumai Hilir realisasi sebesar Rp81.696.000,00 atau 87,29% dari anggaran sebesar Rp93.590.000,00 karena ada penurunan kasus *Covid-19* di Kelurahan Kumai Hilir.

29. Kecamatan Kotawaringin Lama

- a) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah realisasi sebesar Rp83.082.600,00 atau 87,55% dari anggaran sebesar Rp94.900.000,00. Hal ini karena di masa pandemi *Covid-19*, kegiatan rapat dan koordinasi banyak dilaksanakan secara virtual
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi sebesar Rp59.342.047,00 atau 89,75% dari anggaran sebesar Rp66.121.466,00. Hal ini karena jumlah pembayaran disesuaikan dengan tagihan yang ada.
- c) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha realisasi sebesar Rp.8.160.000,00 atau 92,62 % dari yang anggaran sebesar Rp.8.810.000,00 karena terbentur perubahan Peraturan Pemerintah Nomor.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan masih disusunnya PERDA tentang Bangunan Gedung yang menanungi sehingga kegiatan perizinan IMB ditunda sampai terbitnya PERDA tersebut.
- d) Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa realisasi Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp720.000,00, hal ini disebabkan permasalahan titik koordinat antar Desa dan Kabupaten telah diserahkan ke Pemerintah Daerah.

30. Kecamatan Pangkalan Banteng

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp856.000,00 atau 43,40% dari anggaran sebesar Rp1.972.500,00 dikarenakan realisasi menyesuaikan tagihan jumlah pembayaran Pajak STNK.

31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) realisasi sebesar Rp152.735.576,00 atau 85,81% dari anggaran sebesar Rp177.988.300,00 karena rapat-rapat koordinasi dilakukan secara daring, sehingga tidak menggunakan anggaran untuk biaya konsumsi dan transportasi.

32. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- a) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah realisasi sebesar Rp668.165.441,00 atau 94,61% dari anggaran sebesar Rp706.242.080,00 karena adanya penurunan pada belanja jasa tenaga administrasi yaitu 1 (satu) Tenaga



Kontrak Daerah mengundurkan diri serta adanya penurunan belanja perjalanan dinas luar kota

- b) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp684.578.159,00 atau 89,92% dari anggaran sebesar Rp761.336.960,00 karena rencana Kegiatan Asistensi Pengelolaan Barang Milik Daerah ke SKPD dan Desa tidak dilaksanakan, Belanja Honorarium Tenaga Ahli Eselon III dari Kabupaten hanya menghadirkan 1 (satu) orang, serta Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat berkurang dari jumlah anggota semula.

33. Badan Pendapatan Daerah

- a) Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi sebesar Rp4.524.208.630,00 atau 92,34% dari anggaran sebesar Rp4.899.593.000,00 karena Belanja Gaji dan Tunjangan Insentif Pemungutan Pajak untuk KDH/WKDH Triwulan IV belum bisa dibayarkan. Pembayaran dilakukan setelah ada Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan, sementara Rekonsiliasi Pendapatan ub. Desember 2021 dilaksanakan pada awal tahun berikutnya sehingga belanja tersebut menjadi utang tahun berjalan
- b) Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD realisasi sebesar Rp970.191,00 atau 19,40% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 karena realisasi disesuaikan dengan perhitungan Total Harga Pertanggungjawaban Polis Asuransi Jaminan Pokok dan Jaminan Perluasan
- c) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah realisasi sebesar Rp144.959.000,00 atau 94,83% dari anggaran sebesar Rp152.864.569,00 karena telah sesuai dengan pengadaan, sisa dari pagu belanja yang telah direalisasikan yaitu belanja Modal Komputer dan Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.

34. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran terealisasi sebesar Rp708.000,00 atau 57,80% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.225.000,00 dikarenakan untuk pengiriman surat lebih banyak dilakukan via *e-mail* dan *whatsapp*.
- b) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN pada Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN, anggaran terealisasi sebesar Rp109.646.143,00 atau 78,49% dari target yang ditetapkan sebesar Rp139.701.550,00 dikarenakan saat penyusunan anggaran perubahan atau kegiatan pengadaan ASN dasar yang digunakan adalah surat Kepala BKN Nomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 Tanggal 28 Mei 2021, dimana dalam surat tersebut mensyaratkan pelaksanaan ujian dalam satu hari dan maksimal adalah 3 hari. Sehingga penyusunan anggaran makanan snack disesuaikan dengan ketentuan tersebut. Namun pada akhir Agustus terbit kembali surat Kepala BKN Nomor 7787/E/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 yang mengubah ketentuan jumlah maksimal sesi dalam 1 hari menjadi 4 sesi, oleh karenanya terdapat sisa anggaran yang tidak dapat terserap maksimal.
- c) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, anggaran terealisasi sebesar Rp38.542.000,00 atau 93,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp41.243.600,00 dikarenakan pada belanja



perjalanan dinas biasa untuk Kegiatan Ujian Dinas tidak bisa terserap secara maksimal, karena Tim Fasilitasi Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II dari BKD Provinsi Kalimantan Tengah tidak turut dihadiri Kepala BKD Provinsi Kalteng.

- d) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN pada sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, anggaran terealisasi sebesar Rp309.265.664,00 atau 82,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp375.388.731,00 dikarenakan ada salah satu PNS peserta Tugas Belajar dapat lebih cepat menyelesaikan pendidikannya, sehingga biaya pendidikan berkurang dari yang sudah dianggarkan sebelumnya, juga karena ada perubahan jadwal pembayaran untuk beberapa PNS peserta Tugas Belajar.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 ini sebagian besar mengacu dan berpedoman kepada: (1) Kebijakan Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d 11 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, dan (2) Praktik-praktik Akuntansi yang selama ini dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Perubahan Kebijakan Akuntansi tersebut meliputi:

- a) Kebijakan Akuntansi Investasi;
- b) Kebijakan Akuntansi Aset Tetap; dan
- c) Kebijakan Akuntansi Penyusutan.

Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Satuan organisasi di Pemerintah Daerah disebut SKPD dan yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a) Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing - masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b) Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,



Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu:

Basis Akuntansi;

- a) Prinsip Nilai Historis
- b) Prinsip Realisasi
- c) Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Formal
- d) Prinsip Periodisasi
- e) Prinsip Konsistensi
- f) Prinsip Pengungkapan Lengkap
- g) Prinsip Penyajian Wajar

4.2.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat. PPKD menyusun LKPD berdasarkan konsolidasi laporan keuangan SKPD dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 meliputi 37 (tiga puluh tujuh) SKPD yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni: 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 6 Badan, 21 Dinas, 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan 6 Kecamatan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) yakni SKPKD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pengguna Anggaran.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d 11. Proses penyusunan Laporan Keuangan dilakukan melalui proses konsolidasi atau penggabungan keseluruhan Laporan Keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Dalam proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021, Bendahara Umum Daerah (BUD) tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan. Penggabungan keseluruhan yang telah disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan Laporan Keuangan SKPD disertai dengan beberapa penyesuaian (*adjustment*) yang perlu dilakukan maupun penelaahan terhadap buku besar, catatan, dokumen sumber maupun dokumen lainnya yang diperlukan dengan tujuan untuk menjaga keandalan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.



Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan opini “**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**” untuk yang ke-8 (delapan) kalinya berturut-turut.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a) Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan
- b) pendapatan direalisasi artinya, ada aliran masuk sumber daya ekonomi baik yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*)
- c) dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh Pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke Rekening Kas Umum Daerah

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a) diterbitkan SP2D LS
- b) khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran;
- c) dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.



Beban diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban
- b) terjadinya konsumsi aset
- c) terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa

Saat timbulnya kewajiban adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi



dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
- b) diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah

Aset diukur pada saat:

- a) kas dicatat sebesar nilai nominal
- b) investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
- c) piutang dicatat sebesar nilai nominal
- d) persediaan dicatat sebesar:
 - Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu:

- a) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- b) PD Bank Pengkreditan Rakyat Marunting Sejahtera
- c) PT Bank Kalteng
- d) PT Jamkrida

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari:

- a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
- b) Transaksi tanpa pertukaran (*no-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan



- c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang Pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan



mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK SKPD dan RK PPKD.

4.3.7 Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi Kas sehubungan dengan kegiatan operasional, Investasi Aset Non Keuangan, Pembiayaan dan Transaksi Non Anggaran yang menggambarkan Saldo Awal, Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Akhir Kas Pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran adalah semua pengeluaran kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

a) Klasifikasi Penyajian

Arus Kas disajikan ke dalam 4 (empat) kelompok aktivitas berikut:

1) Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus masuk Kas dari Aktivitas Operasi terutama diperoleh dari: (a) Penerimaan Pajak Daerah; (b) Penerimaan Retribusi Daerah; (c) Penerimaan Hibah; (d) Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Negara/Daerah dan Investasi Lainnya; (e) Lain-lain PAD yang Sah, dan (f) Transfer Masuk.

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi terutama digunakan untuk pengeluaran: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang dan Jasa; (c) Belanja Bunga; (d) Belanja Subsidi; (e) Belanja Hibah; (f) Belanja Bantuan Sosial; (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan (h) Transfer Keluar.

2) Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari: (a) Penjualan Aset Tetap; dan (b) Penjualan Aset Lainnya. Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari: (a) Perolehan Aset Tetap; (b) Perolehan Aset Lainnya; dan (c) Penyertaan Modal.

3) Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas Bruto sehubungan dengan pendanaan defisit anggaran atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap Arus Kas pemerintah atau klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan antara lain: (a) Penerimaan Pinjaman; (b) Penerimaan Hasil Penjualan Obligasi/Surat Utang Negara; (c) Penerimaan Kembali Pinjaman. Arus keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan antara lain: (a) Pembayaran Pokok Pinjaman; (c) Pemberian Pinjaman.

4) Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas Bruto yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan



Pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Kiriman/Transfer Uang.

PFK menggambarkan Kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Adapun Kiriman Uang menggambarkan mutasi Kas antar rekening Kas Umum Daerah.

Arus masuk Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Arus keluar Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

b) Metode Penyajian

Entitas pelaporan dapat menyajikan Laporan Arus Kas dengan menggunakan cara:

1) Metode Langsung

Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto.

2) Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional Non Kas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan Kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk Kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi Aset NonKeuangan dan Pembiayaan.

Terkait dengan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mempergunakan **metode langsung** dalam menyusun Laporan Arus Kas sebagaimana yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan dengan pertimbangan bahwa penggunaan metode langsung ini:

- menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi Arus Kas di masa yang akan datang
- lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan
- data tentang kelompok Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain sebagai berikut:

a) Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis retribusi, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.



Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

1) Piutang Pajak

No	Kualitas Piutang Pajak	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (kurang dari 1 tahun)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 2 tahun)	10%
3.	Diragukan (2 s/d 3 tahun)	50%
4.	Macet (di atas 3 tahun)	100%

2) Piutang Retribusi

No	Kualitas Piutang Retribusi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 6 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (7 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 12 bulan setelah jatuh tempo)	100%

3) Piutang Tuntutan Ganti Rugi

No	Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (13 s/d 24 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 24 bulan setelah jatuh tempo)	100%

4) Piutang Karena Perikatan Perjanjian

No	Kualitas Piutang Karena Perikatan Perjanjian	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (satu bulan sejak tagihan pertama)	10%
3.	Diragukan (satu bulan sejak tagihan kedua)	50%
4.	Macet (satu bulan sejak tagihan ketiga)	100%

c) Pengakuan Belanja Modal

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
- 3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Khusus



untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilai perolehannya harus dikapitalisasi. Penetapan nilai minimal materialitas pada saat proses penganggaran di DPA

d) Pengakuan Belanja Pemeliharaan

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitaliasi sebagai aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara
- 2) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau, bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan
- 3) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap tersebut melebihi 1 tahun (jangka panjang)
- 4) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan
- 5) Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara aset tetap meskipun jumlahnya material, tetap digolongkan sebagai *revenue expenditure*. *Revenue expenditure* mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini (*current year*)

e) Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi batasan jumlah biaya kapitalisasi perolehan awal aset tetap berikut:

- 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan mesin adalah pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan atau per unit peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00
- 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk gedung dan bangunan yang nilainya pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran bertahap/lanjutan yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian gedung dan bangunan seperti: teralis, sekat partisi, plafon, tambah daya listrik/instalasi listrik, keramik, pagar dll berapapun nilainya dikapitalisasi
- 3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk jalan/irigasi/jaringan yang nilainya pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran bertahap/lanjutan yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian jalan/irigasi/jaringan seperti: trotoar, plangson dll
- 4) Sedangkan untuk aset tetap renovasi yang nilai pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00

f) Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.



Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Pengakuan Penyusutan untuk perolehan aset tetap sebelum tahun 2015 atau sebelum diberlakukan akuntansi basis akrual, dimulai awal tahun berikutnya. Sedangkan untuk perolehan aset tetap mulai tahun 2015 atau setelah diberlakukan basis akrual, pengakuan penyusutan dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).

g) Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Surplus Defisit atau Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam Kebijakan Akuntansi ini, proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Penjelasan lebih rinci mengenai pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.454.636.011.759,00	1.633.972.466.127,94	1.449.011.596.895,94

Realisasi Pendapatan-LRA sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.633.972.466.127,94 atau tercapai 112,33% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.454.636.011.759,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp1.449.011.596.895,94.

Pendapatan-LRA Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Rincian Pendapatan-LRA

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
1	Pendapatan Asli Daerah	249.202.388.200,00	392.164.379.004,55	157,37	224.651.929.841,28
2	Pendapatan Transfer	1.154.501.437.959,00	1.203.708.747.726,33	104,26	1.186.742.690.871,07
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	50.932.185.600,00	38.099.339.397,06	74,80	37.616.976.183,59
Jumlah		1.454.636.011.759,00	1.633.972.466.127,94	112,33	1.449.011.596.895,94

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
249.202.388.200,00	392.164.379.004,55	224.651.929.841,28



Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp392.164.379.004,55 atau tercapai 157,37% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp249.202.388.200,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp224.651.929.841,28.

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
1	Pajak Daerah	81.025.000.000,00	70.389.757.706,05	86,87	64.838.822.752,80
2	Retribusi Daerah	24.180.218.900,00	12.611.482.516,30	52,16	13.208.556.926,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.449.954.800,00	12.470.117.812,00	100,16	9.804.364.851,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	131.547.214.500,00	296.693.020.970,20	225,54	136.800.185.311,48
Jumlah		249.202.388.200,00	392.164.379.004,55	157,37	224.651.929.841,28

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah pendapatan yang sifatnya memaksa dan pendapatan ini tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun dasar hukum dari pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu:

- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pajak Hiburan
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame
- Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pajak Penerangan Jalan
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir
- Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Air Tanah
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet
- Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
81.025.000.000,00	70.389.757.706,05	64.838.822.752,80

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp70.389.757.706,05 atau tercapai 86,87% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp81.025.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp64.838.822.752,80. 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 5.3.



Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Pajak Hotel	2.000.000.000,00	1.019.134.857,83	3.198.021.869,65
2	Pajak Restoran	4.500.000.000,00	2.447.046.558,40	2.661.000.389,70
3	Pajak Hiburan	375.000.000,00	311.084.958,00	222.547.437,45
4	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.048.830.681,54	893.190.606,08
5	Pajak Penerangan Jalan	25.000.000.000,00	23.343.368.909,28	20.514.407.429,82
6	Pajak Parkir	450.000.000,00	191.496.800,00	159.238.200,00
7	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	36.844.243,00	34.645.723,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000.000,00	1.120.980.670,00	1.267.236.400,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.100.000.000,00	2.717.092.655,00	3.710.200.792,47
10	Pajak Bumi dan Bangunan	15.000.000.000,00	10.918.969.352,00	10.343.460.735,63
11	BPHTB	24.000.000.000,00	27.234.908.021,00	21.834.873.169,00
	Jumlah	81.025.000.000,00	70.389.757.706,05	64.838.822.752,80

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
<u>24.180.218.900,00</u>	<u>12.611.932.516,30</u>	<u>13.208.556.926,00</u>

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.611.932.516,30 atau tercapai 52,16% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp24.180.218.900,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp13.208.556.926,00. Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Retribusi Jasa Umum	8.920.581.000,00	5.685.197.413,00	7.255.761.545,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.655.800.000,00	2.321.467.690,00	3.694.176.633,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	124.630.000,00	94.255.495,00	101.419.066,00
	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.275.000.000,00	766.270.000,00	648.305.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	1.994.078.000,00	1.411.293.375,00	1.664.492.950,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000,00	703.355.000,00	836.809.000,00
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	329.528.000,00	335.651.053,00	261.567.696,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	41.545.000,00	52.904.800,00	48.991.200,00
2	Retribusi Jasa Usaha	7.971.031.900,00	5.228.874.617,90	3.747.819.550,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.926.282.900,00	3.184.049.917,90	1.789.496.950,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000,00	312.293.600,00	650.080.400,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	326.126.000,00	66.050.000,00	100.050.000,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	500.000.000,00	694.646.300,00	324.253.200,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	500.000.000,00	500.011.000,00	425.751.000,00
	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	718.623.000,00	471.823.800,00	458.188.000,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu	7.288.606.000,00	1.697.860.485,40	2.204.975.831,00
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	6.769.461.000,00	1.375.162.485,40	1.844.945.831,00
	Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.453.000,00	2.100.000,00	300.000,00
	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	1.247.000,00	-	1.500.000,00
	Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	513.445.000,00	320.598.000,00	358.230.000,00
	Jumlah	24.180.218.900,00	12.611.932.516,30	13.208.556.926,00

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah pada SKPD

No.	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	415.430.000,00	162.130.000,00	-
2	Dinas Kesehatan	3.946.600.000,00	2.601.287.690,00	3.895.206.633,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.500.000.000,00	2.437.555.917,90	1.262.808.450,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	513.445.000,00	320.598.000,00	358.230.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	186.945.000,00	161.399.495,00	183.077.566,00
6	Dinas Perhubungan	4.279.453.000,00	2.478.664.900,00	2.459.747.600,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	329.528.000,00	335.651.053,00	261.567.696,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.035.623.000,00	1.464.198.175,00	1.713.484.150,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.195.255.000,00	1.292.546.093,00	1.797.727.848,00
10	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	57.964.900,00	17.500.000,00	34.100.000,00
11	Dinas Perikanan	658.152.000,00	464.669.800,00	434.199.000,00
12	Dinas Pariwisata	500.000.000,00	482.511.000,00	391.651.000,00
13	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	178.298.000,00	35.000.000,00	45.000.000,00
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	451.018.000,00	135.979.000,00	186.839.000,00
15	Sekretariat Daerah	249.250.000,00	111.450.000,00	86.000.000,00
16	Kecamatan Arut Selatan	282.824.000,00	52.246.005,00	17.920.350,00
17	Kecamatan Arut Utara	69.288.000,00	1.430.562,40	1.029.620,00
18	Kecamatan Kumai	61.889.000,00	13.385.120,00	1.709.400,00
19	Kecamatan Kotawaringin Lama	67.880.000,00	6.822.850,00	2.809.523,00
20	Kecamatan Pangkalan Lada	55.415.000,00	2.061.730,00	14.312.670,00
21	Kecamatan Pangkalan Banteng	55.810.000,00	24.945.125,00	31.186.420,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	77.686.000,00	6.000.000,00	24.250.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.465.000,00	3.900.000,00	5.700.000,00
	Jumlah	24.180.218.900,00	12.611.932.516,30	13.208.556.926,00



3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
12.449.954.800,00	12.470.117.812,00	9.804.364.851,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.470.117.812,00 atau tercapai 100,16% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp12.449.954.800,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp9.804.364.000,00. Pendapatan ini berasal dari bagian laba (deviden) tahun 2021 atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PT Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp11.868.427.713,00, PD BPR Marunting Sejahtera Rp550.216.627,00, dan PT Jamkrida Rp31.310.461,00.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
131.547.214.500,00	296.692.570.970,20	136.800.185.311,48

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp296.692.570.970,20 atau tercapai 225,54% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp131.547.214.500,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp136.800.185.311,48. Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari:

Tabel 5.6 Rincian Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	400.000.000,00	739.659.000,00	434.412.438,00
2	Jasa Giro	1.773.833.000,00	2.103.656.135,39	2.378.998.594,01
3	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah (Deposito)	850.000.000,00	928.673.467,00	2.617.547.707,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	18.932.500,00	22.719.280,50	14.605.252,50
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	152.735.000,00	285.997.771,12	330.892.616,23
6	Pendapatan Denda Pajak	358.856.200,00	274.405.025,36	348.559.871,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Umum	32.100.000,00	3.015.696,00	12.777.543,96
8	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha	-	1.195.081,00	-
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	302.936.113,00	-
10	Pendapatan Pengembalian	2.547.590.800,00	2.145.627.471,06	1.991.700.705,53
11	Pendapatan Lainnya	-	102.136.760,77	59.204.829,00
12	Pendapatan BLUD	125.226.167.000,00	289.478.592.169,00	121.250.695.254,25
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	-	-	6.993.686.500,00
14	PAD Lainnya	-	18.458.000,00	47.995.500,00



No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
15	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	146.401.000,00	222.601.000,00	-
16	Hasil Sewa BMD	40.599.000,00	62.898.000,00	319.108.500,00
	Jumlah	131.547.214.500,00	296.692.570.970,20	136.800.185.311,48

Rincian Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Rincian Lain-lain PAD yang Sah pada SKPD

No.	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Dinas Kesehatan	125.540.599.000,00	289.519.495.669,00	128.462.340.254,25
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	146.401.000,00	222.601.000,00	-
3	Dinas Ketahanan Pangan	-	18.458.000,00	47.995.500,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	-	457.000,00	337.488,00
5	Dinas Perhubungan	4.087.000,00	92.000,00	115.800.000,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	2,00	-
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.202.000,00	1.177.708,00	1.398.468,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.811.000,00	1.195.714,00	10.141.587,96
9	Sekretariat Daerah	-	22.299.000,00	-
10	Kecamatan Arut Selatan	-	1.876.248,00	-
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.469.258.300,00	6.630.513.603,84	7.813.589.762,27
12	Badan Pendapatan Daerah	358.856.200,00	274.405.025,36	348.582.251,00
	Jumlah	131.547.214.500,00	296.692.570.970,20	136.800.185.311,48

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.154.501.437.959,00	1.203.708.747.726,33	1.186.742.690.871,07

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.203.708.747.726,33 atau tercapai 104,26% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.154.501.437.959,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp1.186.742.690.871,07. Rincian Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.8 Rincian Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.071.501.437.959,00	1.123.614.847.716,00	1.122.099.230.643,00
	Dana Perimbangan	986.200.104.959,00	1.038.859.842.934,00	958.924.263.043,00
	Dana Desa	85.301.333.000,00	84.755.004.782,00	81.413.807.600,00
	Dana Penyesuaian (DID dan DID Tambahan)	-	-	81.761.160.000,00



No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	83.000.000.000,00	80.093.900.010,33	64.643.460.228,07
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	83.000.000.000,00	80.093.900.010,33	64.243.460.228,07
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	400.000.000,00
	Jumlah	1.154.501.437.959,00	1.203.708.747.726,33	1.186.742.690.871,07

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.071.501.437.959,00	1.123.614.847.716,00	1.122.099.230.643,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.123.614.847.716,00 atau tercapai 104,86% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.071.501.437.959,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp1.122.099.230.643,00.

a. Dana Perimbangan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
986.200.104.959,00	1.038.859.842.934,00	958.924.263.043,00

Realisasi Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.038.859.842.934,00 atau tercapai 105,34% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp986.200.104.959,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp958.924.263.043,00. Rincian Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.9 Rincian Dana Perimbangan

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	75.694.740.000,00	135.229.818.254,00	64.383.434.319,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	593.260.006.000,00	593.260.006.000,00	602.446.484.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	237.076.219.000,00	230.385.941.118,00	199.275.635.447,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	80.169.139.959,00	79.984.077.562,00	92.818.709.277,00
	Jumlah	986.200.104.959,00	1.038.859.842.934,00	958.924.263.043,00

▪ Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
75.694.740.000,00	135.229.818.254,00	64.383.434.319,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp135.229.818.254,00 atau tercapai 178,65% dari anggaran yang telah ditetapkan



sebesar Rp75.694.740.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp64.383.434.319,00.

▪ **Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
593.260.006.000,00	593.260.006.000,00	602.446.484.000,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp593.260.006.000,00 atau tercapai 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp593.260.006.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp602.446.484.000,00.

▪ **Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
237.076.219.000,00	230.385.941.118,00	199.275.635.447,00

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp230.385.941.118,00 atau tercapai 97,18% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp237.076.219.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp199.275.635.447,00. Berikut ini adalah rinciannya:

Tabel 5.10 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	DAK Reguler Bidang Pendidikan	-	-	21.666.901.544,00
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD	688.089.000,00	684.800.900,00	-
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	19.888.629.000,00	20.526.950.462,00	-
4	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	3.458.622.000,00	1.774.141.481,00	-
5	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler Perpustakaan Daerah	300.000.000,00	295.756.000,00	-
6	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	-	-	66.062.397.803,00
7	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar	20.791.324.000,00	20.484.814.405,00	-
8	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kefarmasian	3.258.856.000,00	2.646.558.396,00	-
9	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Penugasan Penurunan AKI dan AKB	100.231.732.000,00	96.475.846.861,00	-
10	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler KB	1.261.717.000,00	1.252.525.000,00	-
11	DAK Penugasan Bidang Pertanian	-	-	597.274.500,00
12	DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah Penugasan Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	312.430.000,00	264.000.000,00	215.248.000,00
13	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Penugasan	1.208.000.000,00	1.195.068.108,00	-
14	DAK Reguler Bidang Air Minum	-	-	6.794.599.000,00
15	DAK Reguler Bidang Sanitasi	-	-	3.315.270.000,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
16	DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	-	-	2.730.323.000,00
17	DAK Fisik Bidang Jalan Reguler Jalan	37.158.271.000,00	37.142.055.500,00	30.656.222.400,00
18	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	-	-	57.492.720.901,00
19	DAK Fisik Bidang Jalan Penugasan Jalan	20.041.329.000,00	20.041.329.000,00	-
20	DAK Fisik Bidang Air Minum Penugasan	4.773.014.000,00	4.745.508.300,00	2.844.298.379,00
21	DAK Fisik Bidang Sanitasi Penugasan	2.348.995.000,00	2.343.600.000,00	3.043.704.000,00
22	DAK Fisik Bidang Irigasi Penugasan	7.000.000.000,00	6.967.122.000,00	-
23	DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penugasan Lingkungan Hidup	7.313.811.000,00	7.023.460.000,00	1.472.350.000,00
24	DAK Fisik Bidang Transportasi Laut Penugasan	7.041.400.000,00	6.522.404.705,00	-
25	DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	1.411.643.720,00
26	DAK Penugasan Bidang Pariwisata	-	-	972.682.200,00
Jumlah		237.076.219.000,00	230.385.941.118,00	199.275.635.447,00

▪ **Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
80.169.139.959,00	79.984.077.562,00	92.818.709.277,00

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp79.984.077.562,00 atau tercapai 99,77% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp80.169.139.959,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp92.818.709.277,00. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dapat dilihat pada berikut:

Tabel 5.11 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	56.578.529.000,00	56.578.529.000,00	50.712.170.000,00
2	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	681.000.000,00	1.046.487.000,00	926.863.000,00
3	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	1.112.983.000,00	890.387.000,00	434.725.000,00
4	DAK Non Fisik Bantuan Oprasional Penyelenggaraan PAUD	4.957.524.000,00	4.957.524.000,00	5.448.663.341,00
5	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	1.162.221.574,00	1.162.221.574,00	867.950.000,00
6	DAK Non Fisik BOPKKB BOK	11.437.049.855,00	12.019.570.147,00	31.750.888.668,00
7	DAK Non Fisik BOPKKB Pengawasan Obat dan Makanan	451.079.000,00	-	-
8	DAK Non Fisik BOPKKB Jaminan Persalinan	459.394.689,00	-	-
9	DAK Non Fisik BOPKKB BOKB	1.137.719.573,00	1.137.719.573,00	1.310.504.657,00
10	DAK Non Fisik Dana PK2UKM	328.962.400,00	328.962.400,00	384.101.300,00
11	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	906.003.868,00	906.003.868,00	710.615.159,00



No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
12	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan	621.500.000,00	621.500.000,00	-
13	DAK Non Fisik Dana Fasilitas Penanaman Modal	335.173.000,00	335.173.000,00	-
14	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata	-	-	272.228.152,00
Jumlah		80.169.139.959,00	79.984.077.562,00	92.818.709.277,00

b. Dana Desa

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
85.301.333.000,00	84.755.004.782,00	81.413.807.600,00

Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp84.755.004.782,00 atau tercapai 99,36% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp85.301.333.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp81.413.807.600,00.

c. Dana Penyesuaian (DID dan DID Tambahan)

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
0,00	0,00	81.761.160.000,00

Tidak terdapat realisasi maupun anggaran yang ditetapkan untuk akun Dana Penyesuaian (DID dan DID Tambahan) sampai dengan 31 Desember 2021, sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp81.761.160.000,00.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
83.000.000.000,00	80.093.900.010,33	64.643.460.228,07

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp80.093.900.010,33 atau tercapai 96,50% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp83.000.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp64.643.460.228,07.

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
83.000.000.000,00	80.093.900.010,33	64.243.460.228,07

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp80.093.900.010,33 atau tercapai 96,50% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp83.000.000.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp64.243.460.228,07. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 5.12.



Tabel 5.12 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	14.096.013.000,00	15.236.123.715,97	9.672.550.068,07
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.068.658.000,00	10.272.283.835,16	8.553.321.493,45
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	47.633.939.000,00	43.113.061.777,10	36.307.371.598,06
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	113.696.000,00	106.544.846,10	64.020.574,49
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	11.087.694.000,00	11.365.885.836,00	9.646.196.494,00
Jumlah		83.000.000.000,00	80.093.900.010,33	64.243.460.228,07

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
0,00	0,00	400.000.000,00

Tidak terdapat realisasi maupun anggaran yang ditetapkan untuk akun Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp400.000.000,00.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
50.932.185.600,00	38.099.339.397,06	37.616.976.183,59

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp31.863.275.831,06 dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp6.236.063.566,00. Total realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp38.099.339.397,06 atau tercapai 74,80% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp50.932.185.600,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp37.616.976.183,59.

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.529.006.284.628,00	1.461.583.803.894,41	1.442.474.017.840,80

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.461.583.803.894,41 atau tercapai 95,59% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.529.006.284.628,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp1.442.474.017.840,80. Rincian Belanja diuraikan sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.13.



Tabel 5.13 Rincian Belanja

No.	URAIAN	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
1	Belanja Operasi	941.467.035.461,00	886.809.604.687,83	94,19	858.901.457.730,67
2	Belanja Modal	421.376.918.067,00	413.698.499.168,58	98,18	377.005.194.475,77
3	Belanja Tak Terduga	3.200.000.000,00	1.547.938.856,00	48,37	49.260.669.634,36
4	Belanja Transfer	162.962.331.100,00	159.527.761.182,00	97,89	157.306.696.000,00
	Jumlah	1.529.006.284.628,00	1.461.583.803.894,41	95,59	1.442.474.017.840,80

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membiayai operasional pemerintahan.

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
941.467.035.461,00	886.809.604.687,83	858.901.457.730,67

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp886.809.604.687,83 atau tercapai 94,19% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp941.467.035.461,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp858.901.457.730,67. Belanja Operasi terdiri dari:

Tabel 5.14 Rincian Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	546.299.752.105,00	533.526.478.475,48	441.025.705.448,00
2	Belanja Barang dan Jasa	362.832.350.010,00	331.364.771.908,23	407.431.358.282,67
3	Belanja Bunga	847.000.000,00	847.000.000,00	-
4	Belanja Hibah	29.574.683.346,00	19.304.426.304,12	7.351.394.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	1.913.250.000,00	1.766.928.000,00	3.093.000.000,00
	Jumlah	941.467.035.461,00	886.809.604.687,83	858.901.457.730,67

1) Belanja Pegawai

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
546.299.752.105,00	533.526.478.475,48	441.025.705.448,00

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp533.526.478.475,48 atau tercapai 97,66% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp546.299.752.105,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp441.025.705.448,00. Belanja Pegawai tahun 2020 dialokasikan untuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja untuk pimpinan dan anggota DPRD/KDH/WKDH, insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta uang lembur. Rincian Belanja Pegawai Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 tersaji pada tabel 5.15.



Tabel 5.15 Rincian Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	271.642.574.117,00	268.906.415.166,00	267.405.055.248,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	109.087.104.000,00	106.169.490.985,00	107.867.945.977,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	71.100.112.912,00	64.433.745.600,00	49.994.764.000,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.840.177.000,00	15.839.914.254,00	13.472.654.189,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	775.521.000,00	533.661.042,00	144.739.632,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	795.970.000,00	793.420.000,00
7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	796.570.796,00
8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	38.819.606,00
9	Belanja Pegawai BOS	7.612.846.000,00	7.535.684.630,00	-
10	Belanja Pegawai BLUD	69.439.817.076,00	69.311.596.798,48	-
11	Uang Lembur	-	-	511.736.000,00
Jumlah		546.299.752.105,00	533.526.478.475,48	441.025.705.448,00

Rincian Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.16 Rincian Belanja Pegawai pada SKPD

No.	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	213.701.563.000,00	207.588.932.021,00	188.604.418.028,00
2	Dinas Kesehatan	146.290.010.269,00	142.971.885.114,48	65.887.409.833,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.612.384.825,00	7.469.961.657,00	7.021.159.679,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.933.329.650,00	2.874.608.783,00	2.718.915.106,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.877.863.000,00	7.731.220.661,00	7.583.756.298,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.305.837.000,00	3.295.714.853,00	3.129.079.228,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.359.937.000,00	3.343.684.508,00	3.249.280.314,00
8	Dinas Sosial	3.911.000.000,00	3.896.418.275,00	4.021.807.250,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.173.942.000,00	4.091.717.533,00	3.659.130.909,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.356.440.000,00	4.275.286.778,00	3.931.226.018,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	3.610.557.000,00	3.537.436.518,00	3.532.289.215,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	4.600.403.000,00	4.468.603.934,00	4.179.204.558,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.452.116.000,00	4.376.874.020,00	4.347.834.775,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.127.118.200,00	4.083.697.219,00	3.977.247.040,00
15	Dinas Perhubungan	3.988.627.020,00	3.948.470.111,00	3.983.931.104,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.489.156.000,00	4.437.432.997,00	4.192.381.603,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.610.009.000,00	5.490.967.531,00	5.754.520.924,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.993.713.000,00	3.967.507.085,00	4.051.398.587,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.983.638.186,00	3.811.322.929,00	3.589.272.457,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.984.293.000,00	3.898.817.294,00	3.585.230.750,00
21	Dinas Perikanan	3.436.403.000,00	3.421.368.714,00	3.127.004.514,00
22	Dinas Pariwisata	3.844.880.000,00	3.791.450.961,00	3.541.104.960,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	13.872.193.000,00	13.606.061.467,00	13.652.125.945,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.154.506.000,00	5.095.406.197,00	4.840.321.697,00
25	Sekretariat Daerah	13.513.079.583,00	13.303.847.710,00	12.589.159.256,00
26	Sekretariat DPRD	18.671.610.650,00	18.562.324.152,00	16.163.026.954,00
27	Inspektorat Kabupaten	5.362.999.054,00	4.998.974.910,00	4.587.687.723,00
28	Kecamatan Arut Selatan	8.534.693.000,00	8.426.727.685,00	7.843.399.930,00
29	Kecamatan Arut Utara	2.757.679.000,00	2.621.561.507,00	2.716.667.911,00
30	Kecamatan Kumai	4.722.977.000,00	4.656.921.845,00	4.437.141.611,00
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	3.326.384.000,00	3.297.924.427,00	3.272.242.369,00
32	Kecamatan Pangakalan Lada	1.834.806.000,00	1.817.044.905,00	1.726.493.381,00
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	2.219.246.000,00	2.208.273.152,00	2.070.880.748,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.602.717.000,00	4.539.021.922,00	4.345.600.760,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.441.533.160,00	5.398.941.818,00	16.318.037.885,00
36	Badan Pendapatan Daerah	4.899.593.000,00	4.524.208.630,00	5.015.653.713,00
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.742.515.508,00	3.695.858.652,00	3.779.662.415,00
Jumlah		546.299.752.105,00	533.526.478.475,48	441.025.705.448,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
362.832.350.010,00	331.364.771.908,23	407.431.358.282,67

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp331.364.771.908,23 atau tercapai 91,33% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp362.832.350.010,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp407.431.358.282,67. Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.17 Rincian Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Barang Pakai Habis	67.432.747.788,00	60.807.306.893,09
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	187.350.225,00	146.660.851,00
3	Belanja Jasa Kantor	137.570.428.635,00	126.584.275.071,50
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.781.277.631,00	13.098.737.286,96
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.393.586.650,00	1.173.259.500,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	630.479.500,00	559.210.000,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	63.200.000,00	62.200.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.565.891.800,00	3.550.026.800,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.068.041.491,00	2.014.779.480,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	350.910.000,00	337.671.463,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	329.723.031,00	267.252.500,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.065.881.271,00	1.916.263.203,00
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.859.777.675,00	4.444.240.433,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.423.233.837,00	1.415.287.009,00
15	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.489.382.366,00	6.476.946.831,00
16	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.822.140,00	1.805.000,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.876.688.470,00	27.726.669.127,50
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.027.450.000,00	927.950.000,00
19	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.188.747.449,00	15.286.997.993,18
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	67.525.730.051,00	64.567.232.466,00
Jumlah		362.832.350.010,00	331.364.771.908,23

Rincian Belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18 Rincian Belanja Barang dan Jasa pada SKPD

No.	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.304.881.009,00	36.146.620.305,58	46.903.492.008,13
2	Dinas Kesehatan	170.350.808.752,00	151.700.965.768,09	187.488.710.541,64
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.145.742.234,00	23.659.696.120,50	34.055.449.736,62
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.194.296.413,00	2.152.888.986,00	3.900.835.969,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.881.044.203,00	3.807.000.292,00	4.795.819.545,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.246.933.286,00	1.216.271.425,00	1.000.497.167,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.894.625.074,00	7.626.664.434,00	3.552.737.376,00
8	Dinas Sosial	2.134.620.688,00	1.913.386.395,00	3.298.130.260,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.943.142.833,00	1.870.868.248,00	4.038.699.346,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.649.160.869,00	2.431.541.782,00	2.368.075.606,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	1.128.224.901,00	1.098.126.827,00	1.720.403.535,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	12.920.591.349,00	12.738.960.317,00	13.993.246.785,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.413.866.161,00	1.268.656.756,00	1.398.493.977,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.203.361.468,00	2.112.988.490,00	2.015.001.799,00
15	Dinas Perhubungan	3.285.256.000,00	3.150.095.519,00	3.266.235.136,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.027.242.376,00	3.931.424.985,00	4.352.449.696,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.714.440.495,00	5.282.081.399,00	7.436.001.325,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.004.466.018,00	884.372.050,84	954.389.953,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.467.816.482,00	2.232.625.060,00	3.101.405.642,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.047.288.805,00	1.018.851.036,00	1.167.650.408,00
21	Dinas Perikanan	9.060.093.691,00	8.896.531.812,00	13.165.220.461,00
22	Dinas Pariwisata	1.649.183.036,00	1.589.108.201,00	2.624.143.224,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	4.381.075.523,00	4.271.034.100,00	7.077.385.946,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.733.711.256,00	4.476.489.880,00	4.716.481.266,00
25	Sekretariat Daerah	15.529.812.147,00	13.976.742.745,00	15.727.247.601,28
26	Sekretariat DPRD	9.903.812.569,00	8.597.357.671,00	9.420.928.981,00
27	Inspektorat Kabupaten	3.974.902.917,00	2.745.676.040,72	2.594.228.158,00
28	Kecamatan Arut Selatan	4.217.994.185,00	3.943.661.079,00	4.657.552.844,00
29	Kecamatan Arut Utara	692.498.316,00	689.575.915,00	825.174.827,00
30	Kecamatan Kumai	1.753.465.811,00	1.642.037.458,50	2.272.938.315,00
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	1.473.096.416,00	1.418.686.029,00	1.237.975.543,00
32	Kecamatan Pangkalan Lada	305.955.600,00	289.619.156,00	479.119.282,00
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	402.358.840,00	398.187.677,00	748.207.735,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.733.363.597,00	2.559.198.127,00	2.141.119.871,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.338.076.813,00	4.107.653.860,00	3.949.372.829,00
36	Badan Pendapatan Daerah	2.477.792.815,00	2.424.448.550,00	3.250.552.143,00
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.247.347.062,00	3.094.677.411,00	1.735.983.445,00
	Jumlah	362.832.350.010,00	331.364.771.908,23	407.431.358.282,67

3) Belanja Bunga

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
847.000.000,00	847.000.000,00	0,00

Realisasi Belanja Bunga sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp847.000.000,00 atau tercapai 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp847.000.000,00 yang merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) BUMD Jangka Menengah, sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 tidak terdapat realisasi.

4) Belanja Hibah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
29.574.683.346,00	19.304.426.304,12	7.351.394.000,00

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp19.304.426.304,12 atau tercapai 65,27% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp29.574.683.346,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp7.351.394.000,00. Belanja Hibah tahun 2020 dialokasikan untuk Belanja Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi Kemasyarakatan, BOP PAUD dan Kesetaraan, serta Bantuan Keuangan Kepada Partai



Politik. Sedangkan rincian Belanja Hibah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.19 Rincian Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.545.367.367,00	2.442.631.901,12
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.520.934.838,00	15.561.474.403,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	8.208.061.141,00	-
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.300.320.000,00	1.300.320.000,00
Jumlah		29.574.683.346,00	19.304.426.304,12

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial baik masyarakat pada umumnya maupun pegawai Pemerintah pada khususnya.

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.913.250.000,00	1.766.928.000,00	3.093.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.766.928.000,00 atau tercapai 92,35% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.913.250.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp3.093.000.000,00. Di bawah ini adalah rincian Belanja Bantuan Sosial selama tahun 2021:

Tabel 5.20 Rincian Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.898.250.000,00	1.751.928.000,00
-	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.588.500.000,00	1.584.000.000,00
-	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu	309.750.000,00	167.928.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00
-	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00
Jumlah		1.913.250.000,00	1.766.928.000,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
421.376.918.067,00	413.698.499.168,58	377.005.194.475,77

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp413.698.499.168,58 atau tercapai 98,18% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp421.376.918.067,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp377.005.194.475,77.



Belanja Modal Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari:

Tabel 5.21 Rincian Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Tanah	100.900.000,00	100.900.000,00	100,00	415.506.760,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.971.852.723,00	69.514.111.613,00	93,97	97.622.948.332,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.608.245.963,00	171.955.314.980,00	98,48	143.482.401.078,77
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	167.763.057.574,00	167.205.556.475,58	99,67	125.882.549.773,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.932.861.807,00	4.922.616.100,00	99,79	4.759.374.090,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	4.842.414.442,00
Jumlah		421.376.918.067,00	413.698.499.168,58	98,18	377.005.194.475,77

1) Belanja Modal Tanah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
100.900.000,00	100.900.000,00	415.506.760,00

Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp100.900.000,00 atau tercapai 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp100.900.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp346.517.905,00. Rincian Belanja Modal Tanah pada SKPD sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.22 Rincian Belanja Modal Tanah pada SKPD

No.	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	-	147.779.500,00
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	199.682.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100.900.000,00	100.900.000,00	68.045.260,00
Jumlah		100.900.000,00	100.900.000,00	415.506.760,00

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
73.971.852.723,00	69.514.111.613,00	97.622.948.332,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp69.514.111.613,00 atau tercapai 93,97% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp73.971.852.723,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp97.622.948.332,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada tabel 5.23.



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.23 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada SKPD

No.	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.620.006.518,00	20.466.506.661,00	21.854.442.735,00
2	Dinas Kesehatan	37.257.211.980,00	33.698.939.642,00	45.547.471.966,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	212.629.373,00	210.249.424,00	5.055.496.500,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.655.000,00	4.655.000,00	117.788.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.253.326.198,00	1.237.321.000,00	7.074.290.420,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.041.249,00	23.012.550,00	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78.496.950,00	78.432.000,00	6.327.591.900,00
8	Dinas Sosial	31.623.850,00	31.623.850,00	294.605.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.137.486,00	14.137.486,00	38.800.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	124.238.987,00	119.710.987,00	988.106.100,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	42.450.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.037.000.000,00	2.814.050.000,00	1.875.025.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	288.195.448,00	285.230.000,00	529.202.850,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	202.742.144,00	198.378.993,00	35.425.000,00
15	Dinas Perhubungan	803.506.982,00	772.119.700,00	310.506.200,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	156.992.000,00	156.265.000,00	492.903.200,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	81.139.964,00	80.868.000,00	801.061.000,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97.523.263,00	96.370.000,00	175.831.000,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	273.913.913,00	269.725.795,00	695.646.700,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	300.000.000,00	295.756.000,00	96.584.000,00
21	Dinas Perikanan	148.612.255,00	147.677.000,00	-
22	Dinas Pariwisata	73.023.731,00	72.961.995,00	213.152.000,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	53.737.442,00	51.034.500,00	217.431.500,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.992.495,00	2.992.495,00	30.613.300,00
25	Sekretariat Daerah	5.175.007.038,00	4.973.413.882,00	318.227.000,00
26	Sekretariat DPRD	184.853.860,00	183.785.000,00	762.628.000,00
27	Inspektorat Kabupaten	1.914.946.069,00	1.758.363.920,00	265.550.000,00
28	Kecamatan Arut Selatan	306.414.281,00	277.535.800,00	1.713.829.000,00
29	Kecamatan Arut Utara	50.544.748,00	50.544.748,00	42.208.986,00
30	Kecamatan Kumai	149.228.126,00	141.977.205,00	503.498.000,00
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	160.532.378,00	158.508.000,00	485.270.000,00
32	Kecamatan Pangkalan Lada	-	-	43.986.800,00
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	-	-	51.500.000,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	311.651.131,00	274.290.000,00	105.825.000,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	77.753.390,00	76.890.000,00	172.821.675,00
36	Badan Pendapatan Daerah	383.128.680,00	371.873.000,00	221.090.000,00
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	119.045.794,00	118.911.980,00	122.089.500,00
Jumlah		73.971.852.723,00	69.514.111.613,00	97.622.948.332,00



3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
174.608.245.963,00	171.955.314.980,00	143.482.401.078,77

Realisasi Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp171.955.314.980,00 atau tercapai 98,48% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp174.608.245.963,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terelisasi sebesar Rp143.482.401.078,77. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.24 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada SKPD

No.	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.729.104.167,00	17.664.157.010,00	17.982.936.852,00
2	Dinas Kesehatan	97.537.299.234,00	96.677.305.994,00	84.569.698.145,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.882.433.206,00	36.881.435.525,00	19.157.722.493,92
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	975.305.500,00	974.637.400,00	1.011.531.700,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	99.300.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	452.265.100,00
7	Dinas Sosial	10.400.000,00	10.373.000,00	-
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	699.600.000,00	663.475.000,00	630.919.900,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.269.490.438,00	1.264.174.000,00	237.289.100,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	25.645.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	125.271.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	103.099.219,00	102.132.425,00	127.038.300,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	76.106.250,00	75.835.500,00	-
14	Dinas Perhubungan	7.597.871.783,00	7.021.423.225,00	456.751.810,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	14.399.000,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	311.749.434,00	311.225.800,00	6.604.254.000,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	3.870.000,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	813.128.200,00	811.193.000,00	1.184.413.300,00
19	Dinas Perikanan	1.254.575.000,00	1.246.306.804,00	2.480.580.500,00
20	Dinas Pariwisata	199.848.440,00	198.960.243,00	819.128.200,00
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	80.000.900,00
22	Sekretariat Daerah	6.247.644.270,00	6.246.587.804,00	4.524.647.000,00
23	Sekretariat DPRD	9.459.929,00	9.427.000,00	454.149.134,85
24	Inspektorat Kabupaten	207.152.000,00	206.550.000,00	-
25	Kecamatan Arut Selatan	220.500.000,00	134.498.250,00	133.292.471,00
26	Kecamatan Arut Utara	200.000.000,00	200.000.000,00	-



No.	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
27	Kecamatan Kumai	166.199.990,00	165.800.000,00	183.184.422,00
28	Kecamatan Kotawaringin Lama	1.097.278.903,00	1.089.817.000,00	1.827.718.250,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	204.253.000,00
30	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	-	92.141.500,00
Jumlah		174.608.245.963,00	171.955.314.980,00	143.482.401.078,77

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
167.763.057.574,00	167.205.556.475,58	125.882.549.773,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp167.205.556.475,58 atau tercapai 99,67% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp167.763.057.574,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp125.882.549.773,00. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.25 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD

No.	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65.000.000,00	64.962.000,00	-
2	Dinas Kesehatan	3.808.000.000,00	3.517.807.268,71	942.700.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154.350.757.242,00	154.203.774.749,87	121.104.164.827,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.506.826.712,00	3.505.290.000,00	599.033.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	375.000.000,00	373.384.000,00	-
6	Dinas Lingkungan Hidup	4.490.651.550,00	4.421.609.900,00	-
7	Dinas Perhubungan	5.000.000,00	5.000.000,00	553.217.500,00
8	Dinas Pariwisata	-	-	180.990.000,00
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	20.000.000,00
10	Sekretariat Daerah	-	-	989.054.169,00
11	Kecamatan Arut Selatan	486.605.000,00	440.492.827,00	654.065.029,00
12	Kecamatan Arut Utara	229.913.630,00	229.913.630,00	501.585.760,00
13	Kecamatan Kumai	445.303.440,00	443.322.100,00	92.739.488,00
14	Kecamatan Kotawaringin Lama	-	-	245.000.000,00
Jumlah		167.763.057.574,00	167.205.556.475,58	125.882.549.773,00

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
4.932.861.807,00	4.922.616.100,00	4.759.374.090,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.922.616.100,00 atau tercapai 99,79% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar



Rp4.932.861.807,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp4.759.374.090,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.26 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada SKPD

No.	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.168.249.775,00	3.162.432.863,00	3.938.998.090,00
2	Dinas Kesehatan	21.708.000,00	21.700.000,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.406.193.000,00	1.406.193.000,00	789.470.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	27.070.230,00	27.070.230,00	-
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.700.000,00	15.700.000,00	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100.000.000,00	99.715.000,00	-
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.900.000,00	18.865.000,00	-
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.000.000,00	30.000.000,00	-
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.126.001,00	15.115.157,00	14.406.000,00
10	Inspektorat Kabupaten	39.999.960,00	36.000.000,00	-
11	Kecamatan Arut Utara	32.624.850,00	32.624.850,00	-
12	Kecamatan Kumai	52.999.991,00	52.910.000,00	-
13	Kecamatan Kotawaringin Lama	-	-	16.500.000,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.290.000,00	4.290.000,00	-
Jumlah		4.932.861.807,00	4.922.616.100,00	4.759.374.090,00

6) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.842.414.442,00</u>

Tidak terdapat realisasi maupun anggaran yang ditetapkan untuk akun Belanja Modal Aset Lainnya, sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp4.842.414.442,00.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
<u>3.200.000.000,00</u>	<u>1.547.938.856,00</u>	<u>49.260.669.634,36</u>

Belanja Tidak Terduga tahun 2021 dialokasikan untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp1.547.938.856,00 atau tercapai 48,37% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.200.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terelisasi sebesar Rp49.260.669.634,36.



5.1.2.4 Belanja Transfer

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
162.962.331.100,00	159.527.761.182,00	157.306.696.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp159.527.761.182,00 atau tercapai 97,89% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp162.962.331.100,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp157.306.696.000,00 yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Rincian Transfer sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada berikut:

Tabel 5.27 Rincian Belanja Transfer

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Bagi Hasil	10.520.522.100,00	7.632.280.400,00	7.740.424.700,00
	- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	8.102.500.000,00	6.492.481.300,00	6.502.448.300,00
	- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.418.022.100,00	1.139.799.100,00	1.237.976.400,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	152.441.809.000,00	151.895.480.782,00	149.566.271.300,00
	- Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	149.566.271.300,00
	- Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	152.196.809.000,00	151.650.480.782,00	-
	Jumlah	162.962.331.100,00	159.527.761.182,00	157.306.696.000,00

1) Belanja Bagi Hasil

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
10.520.522.100,00	7.632.280.400,00	7.740.424.700,00

Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri dari realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp6.492.481.300,00 atau tercapai 80,13% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp8.102.500.000,00 serta Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.139.799.100,00 atau tercapai 47,14% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.418.022.100,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020, Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp7.740.424.700,00.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
152.441.809.000,00	151.895.480.782,00	149.566.271.300,00

Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi



sebesar Rp245.000.000,00 atau tercapai 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp245.000.000,00 serta Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp151.650.480.782,00 atau tercapai 99,64% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp152.196.809.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp149.566.271.300,00.

5.1.3 Pembiayaan Netto

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
89.531.350.426,00	89.531.350.426,37	90.993.771.371,23

Realisasi Pembiayaan Netto sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp89.531.350.426,37 atau tercapai 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp89.531.350.426,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp90.993.771.371,23 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.28 Perhitungan Pembiayaan Netto

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Penerimaan Pembiayaan	130.531.350.426,00	130.531.350.426,37	95.493.771.371,23
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	97.531.350.426,00	97.531.350.426,37	59.479.771.371,23
	Penerimaan Pinjaman Daerah	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	36.000.000.000,00
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	14.000.000,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	41.000.000.000,00	41.000.000.000,00	4.500.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	-
	Pembiayaan Netto	89.531.350.426,00	89.531.350.426,37	90.993.771.371,23

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
130.531.350.426,00	130.531.350.426,37	95.493.771.371,23

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp130.531.350.426,37 atau tercapai 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp130.531.350.426,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp95.493.771.371,23. Rincian Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel 5.29.



Tabel 5.29 Rincian Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	97.531.350.426,00	97.531.350.426,37	100,00	59.479.771.371,23
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	100,00	36.000.000.000,00
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	14.000.000,00
Jumlah		130.531.350.426,00	130.531.350.426,37	100,00	95.493.771.371,23

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
<u>97.531.350.426,00</u>	<u>97.531.350.426,37</u>	<u>59.479.771.371,23</u>

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya merupakan penggunaan atas SiLPA TA. 2020 yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp97.531.350.426,37 atau tercapai 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp97.531.350.426,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp59.479.771.371,23.

b) Penerimaan Pinjaman Daerah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
<u>33.000.000.000,00</u>	<u>33.000.000.000,00</u>	<u>36.000.000.000,00</u>

Penerimaan Pinjaman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bank, dimana realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp33.000.000.000,00 atau tercapai 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp33.000.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp36.000.000.000,00.

c) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.000.000,00</u>

Tidak terdapat realisasi maupun anggaran yang ditetapkan untuk akun Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021, sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp14.000.000,00 yang merupakan penerimaan kembali Investasi Non Permanen Dana Bergulir dari Petani Jagung.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
<u>41.000.000.000,00</u>	<u>41.000.000.000,00</u>	<u>4.500.000.000,00</u>



Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp41.000.000.000,00 atau tercapai 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp41.000.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp4.500.000.000,00. Rincian Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.30 Rincian Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
1	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	100,00	-
Jumlah		41.000.000.000,00	41.000.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00

a) Penyertaan Modal Daerah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 atau tercapai 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp4.500.000.000,00.

b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	0,00

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp36.000.000.000,00 atau tercapai 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp36.000.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 tidak terdapat realisasi.

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
15.161.077.557,00	261.920.012.659,90	97.531.350.426,37

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp261.920.012.659,90 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp97.531.350.426,37. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dapat dilihat pada tabel 5.31.



Tabel 5.31 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Pelampauan Penerimaan PAD	142.961.990.804,00	5.999.551.330,00
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	49.207.309.767,00	-
3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-
4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	-	14.547.113.371,00
5	Penghematan Belanja	69.750.712.088,90	76.984.685.725,00
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	-	-
7	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	-	-
8	Sisa Belanja Lainnya	-	-
Jumlah		261.920.012.659,90	97.531.350.426,00



5.2 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos- pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021:

Tabel 5.32 Rincian Kenaikan/Penurunan Saldo Anggaran Lebih

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	97.531.350.426,37	59.479.771.371,23
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(97.531.350.426,37)	(59.479.771.371,23)
3	Subtotal (1 + 2)	-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	261.920.012.659,90	97.590.424.926,37
5	Subtotal (3 + 4)	261.920.012.659,90	97.590.424.926,37
6	Lain-lain	-	(59.074.500,00)
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6)	261.920.012.659,90	97.531.350.426,37

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2020 yaitu sebesar Rp97.531.350.426,37 dimana dipergunakan seluruhnya sebagai Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2021. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp261.920.012.659,90 adalah SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021.

Sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2021 menjadi sebesar Rp261.920.012.659,90 dan mengalami kenaikan sebesar Rp164.388.662.233,53 atau 168,55% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.



5.3 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai pos-pos Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

5.3.1 Aset

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3.387.967.337.153,31	3.085.962.251.752,52

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki Aset per 31 Desember 2021 senilai Rp3.387.967.337.153,31 dan per 31 Desember 2020 senilai Rp3.085.962.251.752,52 yang terdiri dari:

Tabel 5.33 Rincian Aset

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Aset Lancar	359.195.622.322,60	256.086.685.262,33
2	Investasi Jangka Panjang	135.835.164.064,45	130.253.725.029,41
3	Aset Tetap	2.843.370.821.272,03	2.640.463.095.273,22
4	Aset Lainnya	49.565.729.494,23	59.158.746.187,56
Jumlah		3.387.967.337.153,31	3.085.962.251.752,52

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
359.195.622.322,60	256.086.685.262,33

Jumlah Aset Lancar bersih per 31 Desember 2021 senilai Rp359.195.622.322,60 dan per 31 Desember 2020 senilai Rp256.086.685.262,33.

Tabel 5.34 Rincian Aset Lancar

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Kas di Kas Daerah	68.450.111.633,93	44.402.895.610,80
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.095.194,00	3.367.123,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	20.277.093,00	7.835.000,00
4	Kas JKN	533.961,00	388.439.034,00
5	Kas BLUD	167.590.918.858,64	18.962.379.039,12
6	Kas BOS	198.943.550,53	1.611.950.309,65
7	Piutang Pajak	44.711.059.810,17	41.093.736.163,45
8	Penyisihan Piutang Pajak	(31.572.099.488,31)	(27.338.328.868,98)
9	Piutang Retribusi	2.905.509.406,50	1.587.470.143,00
10	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.096.421.324,98)	(753.398.068,45)
11	Piutang Bagi Hasil Pajak PPh 21	170.247.730,00	579.089.303,00
12	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	34.625.557.401,92	32.637.149.875,29



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
13	Piutang Lainnya	22.897.522.223,00	97.209.155.589,00
14	Penyisihan Piutang Lainnya	(2.221.254.721,00)	(5.690.612.058,45)
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	40.570.143,00	63.289.423,50
16	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(40.570.143,00)	(31.644.711,75)
17	Beban Dibayar Di Muka	335.234.824,33	343.830.227,96
18	Persediaan	52.174.386.169,87	51.010.082.128,19
Jumlah		359.195.622.322,60	256.086.685.262,33

1) Kas di Kas Daerah

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>68.450.111.633,93</u>	<u>44.402.895.610,80</u>

Kas Di Kas Daerah adalah saldo Kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp68.450.111.633,93 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp44.402.895.610,80 yang disimpan pada rekening Bank Pembangunan Kalteng (BPK), BNI dan BRI Cabang Pangkalan Bun. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.35 Rincian Kas Di Rekening Kas Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Bank Kalteng		
	Kas Daerah No. 4000101000002	72.002.049.329,64	32.600.158.464,12
2	BNI		
	Rekening No. 008 142 6262	2.397.271.820,00	962.917.451,00
3	BRI		
	Rek. Pendapatan No. 0282 01 000447-30-3	7.550.000,00	-
	Kas Daerah No. 000278-30-6	19.697.420.853,09	43.053.378.505,48
Jumlah		94.104.292.002,73	76.616.454.420,60

Pada tabel 5.31, Saldo Kas di Rekening Kas Daerah sebesar Rp94.104.292.002,73 berbeda dengan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp68.450.111.633,93 karena di dalamnya termasuk Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp25.654.132.368,80.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>5.095.194,00</u>	<u>3.367.123,00</u>

Kas Di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang masih ada di tangan Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.095.194,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.367.123,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat pada tabel 5.36.



Tabel 5.36 Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran

No.	SKPD	31 Desember 2021		31 Desember 2020
		Nilai	Tgl Setor	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	250.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.054.542,00	3 Januari 2022	900,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	255.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	2.861.223,00
5	Dinas Sosial	40.652,00	17 Februari 2022	-
Jumlah		5.095.194,00		3.367.123,00

3) Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>20.277.093,00</u>	<u>7.835.000,00</u>

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas di tangan Bendahara Penerimaan SKPD atas pendapatan tahun berjalan tetapi saat tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Daerah, dimana per 31 Desember 2021 saldonya sebesar Rp20.277.093,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.835.000,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan terdapat pada SKPD:

Tabel 5.37 Rincian Kas Di Bendahara Penerimaan

No.	SKPD	31 Desember 2021		31 Desember 2020
		Nilai	Tgl Setor	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.361.968,00	4 Januari 2022	-
2	Dinas Kesehatan	2.956.000,00	3 Januari 2022	6.685.000,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.959.125,00	3 Januari 2022	1.150.000,00
Jumlah		20.277.093,00		7.835.000,00

4) Kas JKN

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>533.961,00</u>	<u>388.439.034,00</u>

Saldo Kas JKN per 31 Desember 2021 sebesar Rp533.961,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp388.439.034,00 merupakan saldo atas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdapat pada 18 Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 5.38 Rincian Kas JKN

No.	Puskesmas	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Arut Selatan	440,00	7.807.485,00
2.	Mendawai	0,00	517,00
3.	Madurejo	1.657,00	12.292,00



No.	Puskesmas	31 Desember 2021	31 Desember 2020
4.	Kumai	196.621,00	142.740.565,00
5.	Sungai Rangit	4.472,00	4.680.010,00
6.	Pangkalan Lada	17.450,00	179.303,00
7.	Semanggang	10.135,00	22.661.266,00
8.	Natai Pelingkau	43,00	7.201,00
9.	Kumpai batu Atas	43,00	145.255,00
10.	Teluk Bogam	100,00	12.897.633,00
11.	Kotawaringin Lama	450,00	63.181.238,00
12.	Arut Utara	1.420,00	10,00
13.	Karang Mulya	263.685,00	35.761.608,00
14.	Pandu Senjaya	14.702,00	66.260.905,00
15.	Riam Durian	19.260,00	25.658.153,00
16.	Sambi	200,00	205.326,00
17.	Runtu	3,00	3.281.197,00
18.	Ipuh Bangun Jaya	3.280,00	2.959.070,00
Jumlah		533.961,00	388.439.034,00

5) Kas BLUD

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
167.590.918.858,64	18.962.379.039,12

Saldo Kas BLUD adalah saldo kas pada RSUD Sultan Imanuddin per 31 Desember 2021 sebesar Rp167.590.918.858,64 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.962.379.039,12.

6) Kas BOS

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
198.943.550,53	1.611.950.309,65

Saldo Kas dari Dana BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp198.943.550,53 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.611.950.309,65 merupakan kas yang ditransfer dari Pemerintah Pusat untuk dikelola langsung oleh sekolah-sekolah Negeri Tingkat Dasar sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten. Rincian Kas BOS untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.39 Rincian Kas BOS

No.	Jenjang Pendidikan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	104.208.074,38	1.335.832.001,32
2	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	94.735.476,15	276.118.308,33
Jumlah		198.943.550,53	1.611.950.309,65



7) Piutang Pajak

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
44.711.059.810,17	41.093.736.163,45

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.711.059.810,17 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp41.093.736.163,45. Jumlah Piutang Pajak ini merupakan hasil verifikasi/perhitungan data Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau persamaannya yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, akan tetapi saat tanggal pelaporan Wajib Pajak belum menyetorkan ke Kas Daerah. Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40 Rincian Piutang Pajak

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Piutang Pajak Hotel	342.685.007,00	346.038.787,23
2	Piutang Pajak Restoran	139.585.296,43	121.843.606,83
3	Piutang Pajak Hiburan	13.856.000,20	24.589.450,00
4	Piutang Pajak Reklame	394.988.131,56	325.555.083,10
5	Pajak Penerangan Jalan	9.041.605,99	97.865.737,30
6	Pajak Parkir	5.075.200,00	15.448.800,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	600,00	387.070,00
8	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	17.600.000,00	21.100.000,00
9	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	164.327.402,99	145.352.373,99
10	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	43.604.531.016,00	39.976.185.705,00
11	Piutang BPHTB	19.369.550,00	19.369.550,00
Jumlah		44.711.059.810,17	41.093.736.163,45

Sedangkan daftar piutang pajak yang disajikan per tahun dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 5.41 Daftar Piutang Pajak per Tahun

No.	Tahun Piutang Pajak	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	2010	3.290.500,00	3.290.500,00
2	2011	8.063.925,00	8.063.925,00
3	2012	8.390.500,00	8.390.500,00
4	2013	4.842.500,00	4.842.500,00
5	2014	930.000,00	930.000,00
6	2015	1.232.000,00	1.232.000,00
7	2016	4.118.500,00	4.118.500,00
8	2017	106.382.462,46	106.382.462,46
9	2018	119.272.905,62	123.174.156,72
10	2019	220.650.426,40	233.737.779,97
11	2020	456.545.166,00	623.388.134,30
12	2021	172.809.908,69	-
13	1994-2021	43.604.531.016,00	39.976.185.705,00
Jumlah		44.711.059.810,17	41.093.736.163,45



8) Piutang Retribusi

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2.905.509.406,50	1.587.470.143,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.905.509.406,50 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.587.470.143,00. Jumlah Piutang Retribusi ini merupakan hasil verifikasi/perhitungan data Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan/atau persamaannya yang diterbitkan oleh SKPD, akan tetapi saat tanggal pelaporan Wajib Retribusi belum menyetorkan ke Kas Daerah. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada berikut:

Tabel 5.42 Rincian Piutang Retribusi pada SKPD

No.	SKPD/Jenis Retribusi	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	48.930.000,00	-
2	Dinas Kesehatan		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	133.525.000,00	211.370.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.635.884,50	-
4	Dinas Perhubungan		
	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.891.376.000,00	627.826.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	204.700.000,00	200.700.000,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
	Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi	50.197.789,00	83.681.641,00
6	Dinas Lingkungan Hidup		
	Retribusi Pelayanan Kebersihan	25.950.000,00	27.260.000,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
	Retribusi Pelayanan Pasar	372.743.025,00	281.520.350,00
8	Sekretariat Daerah		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	37.150.000,00	21.500.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14.774.208,00	18.205.272,00
	Retribusi Izin Gangguan Keramaian	109.017.500,00	340.000,00
	Retribusi Situ	340.000,00	109.017.500,00
10	Kecamatan Arut Selatan		
	Retribusi Izin Gangguan Keramaian	-	79.380,00
11	Dinas Perikanan		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.000,00	3.000.000,00
12	Kecamatan Pangkalan Banteng		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.400.000,00	1.700.000,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.270.000,00	1.270.000,00
	Jumlah	2.905.509.406,50	1.587.470.143,00



Sedangkan daftar piutang retribusi yang disajikan per tahun dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.43 Daftar Piutang Retribusi per Tahun

No.	Tahun Piutang Retribusi	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	2009	285.000,00	285.000,00
2	2010	28.480.000,00	28.480.000,00
3	2011	3.570.000,00	3.570.000,00
4	2012	5.110.000,00	5.110.000,00
5	2013	14.304.508,00	14.304.508,00
6	2014	41.079.508,00	41.079.508,00
7	2015	83.501.725,00	83.501.725,00
8	2016	32.430.000,00	32.430.000,00
9	2017	75.292.900,00	75.292.900,00
10	2018	248.034.600,00	248.034.600,00
11	2019	32.015.850,00	32.015.850,00
12	2020	692.211.306,00	1.023.366.052,00
13	2021	1.649.194.009,50	-
Jumlah		2.905.509.406,50	1.587.470.143,00

9) Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>(32.668.520.813,29)</u>	<u>(28.091.726.937,43)</u>

Saldo Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar (Rp32.668.520.813,29) sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp28.091.726.937,43) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.44 Rincian Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(31.572.099.488,31)	(27.338.328.868,98)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(1.096.421.324,98)	(753.398.068,45)
Jumlah		(32.668.520.813,29)	(28.091.726.937,43)

Sedangkan daftar Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah pada masing masing SKPD per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.45 Daftar Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah pada SKPD

No.	SKPD/Jenis Pajak dan Retribusi	31 Desember 2020	31 Desember 2021
1	Badan Pendapatan Daerah		
	Pajak Hotel	(42.118.639,90)	(19.370.031,77)
	Pajak Restoran	(54.847.423,49)	(22.354.152,51)
	Pajak Hiburan	(5.172.000,01)	(1.702.772,50)
	Pajak Reklame	(200.352.267,83)	(102.593.986,59)
	Pajak Penerangan Jalan	(452.080,30)	(4.893.286,87)



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	SKPD/Jenis Retribusi	31 Desember 2020	31 Desember 2021
	Pajak Parkir	(268.760,00)	(772.440,00)
	Pajak Air Tanah	(30,00)	(28.403,50)
	Pajak Sarang Burung Walet	(5.950.000,00)	(2.235.000,00)
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(101.636.891,79)	(96.405.551,79)
	Pajak Bumi dan Bangunan	(31.150.955.970,00)	(27.084.847.118,45)
	BPHTB	(10.345.425,00)	(3.126.125,00)
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(2.446.500,00)	-
3	Dinas Kesehatan		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(46.505.000,00)	(43.576.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(631.794,23)	-
5	Dinas Perhubungan		
	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	(497.141.000,00)	(259.487.250,00)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	(162.750.000,00)	(128.215.000,00)
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
	Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi	(50.197.789,00)	(53.546.174,20)
7	Dinas Lingkungan Hidup		
	Retribusi Pelayanan Kebersihan	(25.322.500,00)	(24.999.500,00)
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
	Retribusi Pelayanan Pasar	(176.207.533,75)	(116.858.046,25)
9	Sekretariat Daerah		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(8.997.500,00)	(2.695.000,00)
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	(14.774.208,00)	(13.725.660,00)
	Retribusi SITU	(340.000,00)	(340.000,00)
	Retribusi Izin Gangguan Keramaian	(109.017.500,00)	(109.017.500,00)
11	Kecamatan Arut Selatan		
	Retribusi Izin Gangguan Keramaian	-	(7.938,00)
12	Dinas Perikanan		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(750.000,00)	(150.000,00)
16	Kecamatan Pangkalan Banteng		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(70.000,00)	(85.000,00)
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(1.270.000,00)	(695.000,00)
	Jumlah	(32.668.520.813,29)	(28.091.726.937,43)

10) Piutang Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>170.247.730,00</u>	<u>579.089.303,00</u>

Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak PPh 21 per 31 Desember 2021 sebesar Rp170.247.730,00 merupakan hasil perhitungan kelebihan potongan atas pajak PPh 21 pegawai dari tahun 2015 s.d 2021. Piutang Bagi Hasil Pajak PPh 21 per 31 Desember 2020 sebesar Rp579.089.303,00.



11) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
34.625.557.401,92	32.637.149.875,29

Pengakuan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp34.625.557.401,92 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.637.149.875,29.

12) Piutang Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
22.897.522.223,00	97.209.155.589,00

Piutang Lainnya merupakan Piutang atas Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD pada RSUD Sultan Imanuddin. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.897.522.223,00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp97.209.155.589,00.

13) Penyisihan Piutang Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(2.221.254.721,00)	(5.690.612.058,45)

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.221.254.721,00) sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp5.690.612.058,45) merupakan Penyisihan Piutang atas Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD yang dikelola oleh RSUD Sultan Imanuddin.

14) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
40.570.143,00	63.289.423,50

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.570.143,00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp63.289.423,50 yang merupakan Ganti Rugi an. Jamin Ginting pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan telah dilakukan upaya pemotongan pada rekening tambahan penghasilan yang bersangkutan.

15) Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(40.570.143,00)	(31.644.711,75)

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 sebesar (Rp40.570.143,00) sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp31.644.711,75).



16) Beban Dibayar Di Muka

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
335.234.824,33	343.830.227,96

Saldo Beban Dibayar Di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp335.234.824,33 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp343.830.227,96 yang terdiri dari:

Tabel 5.46 Rincian Beban Dibayar Di Muka

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Asuransi Barang Milik Daerah/Pasar (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	145.753.424,66	144.109.589,04
2	Sewa Rumah Asrama (Sekretariat Daerah)	188.954.514,42	199.720.638,92
3	Asuransi Gedung Kantor TA 2020 (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	526.885,25	-
Jumlah		335.234.824,33	343.830.227,96

17) Persediaan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
52.174.386.169,87	51.010.082.128,19

Persediaan merupakan barang/bahan habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo akhir persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp52.174.386.169,87 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp51.010.082.128,19. Tabel di bawah ini menyajikan rincian persediaan berdasarkan jenisnya:

Tabel 5.47 Rincian Persediaan

No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Persediaan ATK, Buku dan Barang Cetak	1.349.988.752,30	1.157.910.214,06
2	Persediaan Alat Listrik	21.997.253,00	36.423.040,00
3	Persediaan Benda Pos Lainnya	33.054.000,00	6.984.000,00
4	Persediaan Alat Kebersihan	21.986.161,00	26.316.090,00
5	Persediaan Benda Berharga	668.025.014,00	681.392.010,00
6	Persediaan Bahan Material dan Bahan Lainnya	4.758.938.127,34	2.316.195.831,46
7	Persediaan Obat-obatan	23.554.850.214,11	23.906.189.264,26
8	Persediaan Bahan Kimia	467.875.401,50	755.041.834,41
9	Persediaan Hewan dan Ternak	189.220.000,00	13.575.000,00
10	Persediaan Benih Sayur	-	13.535.088,00
11	Persediaan Benih Ikan	149.216.591,00	262.828.456,00
12	Persediaan Bahan Pangan	-	80.500.000,00
13	Persediaan Habis Pakai	-	1.034.528.000,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
14	Persediaan Laboratorium	-	118.967.220,00
15	Persediaan Gown/ Baju Kerja	-	28.500.000,00
16	Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	18.744.622.764,12	20.028.145.100,00
17	Persediaan Barang Fisik	475.300.980,00	475.300.980,00
18	Donasi	-	67.750.000,00
19	Hibah	1.739.310.911,50	-
Jumlah		52.174.386.169,87	51.010.082.128,19

Sedangkan daftar saldo akhir persediaan pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.48 Daftar Saldo Akhir Persediaan pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.675.419,83	53.678.893,19
2	Dinas Kesehatan	17.963.179.805,67	18.810.771.632,45
3	Rumah Sakit Umum Daerah	12.094.427.821,94	8.322.398.278,41
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.150.618.642,09	20.068.310.293,87
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	418.715,00	851.700,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	506.000,00	978.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.371.300,00	3.567.000,00
8	Dinas Sosial	-	80.500.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	95.132.363,00	417.817.900,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	490.963.505,86	510.944.678,86
11	Dinas Lingkungan Hidup	91.115.555,48	113.807.555,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	339.222.608,50	725.126.542,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.700.126,00	1.808.300,00
14	Dinas Perhubungan	95.603.967,00	85.814.550,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.790.404,00	8.255.580,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	180.130.308,00	11.925.900,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-	1.514.500,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.590.871,00	5.250.750,00
19	Dinas Perikanan	280.716.591,00	262.828.456,00
20	Dinas Pariwisata	46.453.354,00	31.634.426,00
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	225.321.423,50	320.877.238,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	302.295.413,00	396.449.844,41
23	Sekretariat Daerah	461.665.854,00	325.807.766,00
24	Sekretariat DPRD	224.928,00	19.500.000,00
25	Kecamatan Pangkalan Lada	2.923.742,00	4.198.450,00
26	Inspektorat Kabupaten	16.561.370,00	4.375.780,00



No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	6.414.900,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	674.929,00	4.292.310,00
29	Badan Pendapatan Daerah	294.101.152,00	410.380.904,00
Jumlah		52.174.386.169,87	51.010.082.128,19

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	135.835.164.064,45	130.253.725.029,41

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp135.835.164.064,45 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp130.253.725.029,41. Penjelasan lebih lanjut mengenai saldo Investasi Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

1) Investasi Non Permanen

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	218.705.204,00	218.705.204,00

Investasi Non Permanen adalah saldo dana yang digulirkan/dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui: (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam bentuk pinjaman kepada petani jagung dengan bunga sebesar 3% dari pokok pinjaman serta dikenakan denda bunga sebesar 0,25% dari suku bunga berlaku. Penanaman Modal kepada masyarakat ini sesuai dengan SK Kepala Daerah dan pengembalian dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.49 Rincian Investasi Non Permanen

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dana Bergulir (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah)	16.260.000,00	16.260.000,00
2	Pinjaman ke petani jagung (PPKD)	202.445.204,00	202.445.204,00
Jumlah		218.705.204,00	218.705.204,00

Pencatatan Dana Bergulir pertama kali sebesar harga perolehan, yaitu sebesar kas yang dibayarkan dan secara periodik. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Pada tahun 2016 SKPD pengelola dana bergulir telah melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan waktu jatuh temponya (*aging schedule*) atau nilai saat ini. Dasar pembuatan *aging schedule* adalah SKPD teknis/tim melakukan pengecekan ke lokasi/penerima dana bergulir.

Pada tabel 5.50 disajikan *Aging Schedule* per 31 Desember 2021 dari masing-masing SKPD pengelola dana bergulir.



Tabel 5.50 Aging Schedule Dana Bergulir

No.	Uraian	Kemungkinan Tertagih
1	Dana Bergulir (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah)	16.260.000,00
2	Pinjaman ke petani jagung (PPKD)	202.445.204,00
Jumlah		218.705.204,00

2) Investasi Permanen

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	135.616.458.860,45	130.035.019.825,41

Investasi Permanen adalah Penyertaan Modal yang dilakukan Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp135.616.458.860,45 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp130.035.019.825,41 yang terdapat pada:

Tabel 5.51 Rincian Investasi Permanen

No.	Perusahaan Daerah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	PT Bank Pembangunan Kalteng	57.500.000.000,00	53.500.000.000,00
2	PD BPR Marunting Sejahtera	19.389.497.840,29	17.879.885.624,29
3	PDAM Arut Tirta	54.410.440.072,16	54.338.613.253,12
4	PD Agrotama Mandiri	1.316.520.948,00	1.316.520.948,00
5	PT Jamkrida	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Jumlah		135.616.458.860,45	130.035.019.825,41

- a. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PT Bank Pembangunan Kalteng per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp57.500.000.000,00 dan Rp53.500.000.000,00 dimana mengalami kenaikan sebesar Rp4.000.000.000,00 yang berasal dari Penyertaan Modal pada tahun 2021. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.52 Investasi Permanen pada PT Bank Pembangunan Kalteng (Cost Method)

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Saldo Awal	53.500.000.000,00	50.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal	4.000.000.000,00	3.500.000.000,00
Saldo Akhir		57.500.000.000,00	53.500.000.000,00

- b. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PD BPR Marunting Sejahtera per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp19.389.497.840,29 dan Rp17.879.885.624,29 dengan rincian:

Tabel 5.53 Investasi Permanen pada PD BPR Marunting Sejahtera (Equity Method)

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Saldo Awal	17.879.885.624,29	16.256.676.688,36
2	Penyesuaian atas laba (rugi) setelah audited	432.254,00	431.999,93



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
3	Pembagian Dividen ke Pemda	(550.216.627,00)	-
4	Laba (Rugi) Operasional Tahun Berjalan	1.059.396.589,00	1.100.001.000,00
5	Penyertaan Modal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Saldo Akhir		19.389.497.840,29	18.357.109.688,29

Data tahun 2021 diperoleh dari Laporan Keuangan PD BPR Marunting Sejahtera per 31 Desember 2021 *unaudited*.

- c. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PDAM Arut Tirta per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp54.410.440.072,16 dan Rp54.338.613.253,12 dengan rincian:

Tabel 5.54 Investasi Permanen pada PDAM Arut Tirta (Equity Method)

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Saldo Awal	54.338.613.253,12	57.349.901.216,89
2	Penyesuaian laba (rugi) hasil <i>audited</i>	(575.641.409,23)	(174.819.462,00)
3	Penyertaan Modal	-	-
4	Laba (Rugi) Operasional Tahun Berjalan	647.468.228,27	(2.836.468.501,77)
Saldo Akhir		54.410.440.072,16	54.338.613.253,12

Data tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan PDAM Tirta Arut per 31 Desember 2021 *unaudited*.

- d. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2021 dan 2020 pada PD Agrotama Mandiri tetap sebesar Rp1.316.520.948,00. PD Agrotama Mandiri sejak tahun 2015 sudah tidak beroperasi (dalam proses pembekuan).

Tabel 5.55 Investasi Permanen pada PD Agrotama Mandiri (Equity Method)

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Saldo Awal	1.316.520.948,00	1.316.520.948,00
2	Penyertaan Modal	-	-
Saldo Akhir		1.316.520.948,00	1.316.520.948,00

- e. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2021 dan 2020 pada PT Jamkrida tetap sebesar Rp3.000.000.000,00.

Tabel 5.56 Investasi Permanen pada PT Jamkrida (Cost Method)

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Saldo Awal	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal	-	-
Saldo Akhir		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00

Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Kalteng dan PT Jamkrida dicatat berdasarkan metode *cost* karena kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kurang dari 20%. Sedangkan pencatatan Investasi Permanen pada 3 (tiga) Perusahaan Daerah yaitu PD BPR Marunting Sejahtera, PDAM Tirta Arut dan PD Agrotama Mandiri berdasarkan metode ekuitas, apabila mendapatkan keuntungan maka akan dicatat sebagai penambah investasi dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan ketiga BUMD tersebut sepenuhnya adalah milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.



5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2.843.370.821.272,03	2.640.463.095.273,22

Aset Tetap adalah jenis Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat ekonomis lebih dari dua belas bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan/nilai wajar saat perolehannya. Aset Tetap bersih Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2021 senilai Rp 2.843.370.821.272,03 sedangkan per 31 Desember 2020 senilai Rp 2.640.463.095.273,22. Aset Tetap tahun 2021 dan 2020 diklasifikasikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.57 Rincian Aset Tetap

No.	Klasifikasi Aset Tetap	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Tanah	573.976.967.018,07	498.396.123.964,07
2	Peralatan dan Mesin	679.967.382.463,55	607.825.996.038,55
3	Gedung dan Bangunan	1.232.792.193.621,29	1.087.204.097.394,82
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.059.391.512.388,30	2.884.524.022.534,07
5	Aset Tetap Lainnya	43.770.873.560,40	42.243.910.443,40
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	136.022.753.529,36	113.172.344.563,91
7	Akumulasi Penyusutan	(2.882.550.861.308,94)	(2.592.903.399.665,60)
Aset Tetap Bersih		2.843.370.821.272,03	2.640.463.095.273,22

Penjelasan lebih lanjut mengenai saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tanah

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
573.976.967.018,07	498.396.123.964,07

Saldo Aset Tetap – Tanah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicatat berdasarkan hasil penilaian independen pada tahun 2005 oleh PT Satyatama Grahatara Surabaya, ditambah dengan nilai perolehan tahun-tahun berikutnya. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2020, terdapat penambahan senilai Rp 75.580.843.054,00 sehingga saldo per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp 573.976.967.018,07. Penambahan/pengurangan Aset Tetap – Tanah pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.58 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Tanah

No.	Uraian	Nilai
Saldo Awal tanah		498.396.123.964,07
1	Penambahan Tanah:	106.904.110.017,00
	Koreksi pencatatan tahun sebelumnya-Hasil Penilaian aset lama	59.378.023.500,00
	Penetapan Status Penggunaan-Masuk	100.900.000,00



No.	Uraian	Nilai
	Mutasi Masuk	29.852.978.272,00
	Penilaian atas barang Hibah	2.897.877.300,00
	Hibah	14.674.330.945,00
2	Pengurangan Tanah:	31.323.266.963,00
	Mutasi Keluar	29.852.978.272,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Pemanfaatan oleh Pihak Lain	218.600.000,00
	Hibah	1.251.688.691,00
	Saldo Akhir Tanah	573.976.967.018,07

1) Penambahan Aset Tetap – Tanah tahun 2021 total senilai Rp106.904.110.017,00 antara lain disebabkan oleh:

a. Koreksi pencatatan tahun sebelumnya – hasil penilaian aset lama senilai Rp59.378.023.500,00 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp110.072.500,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp57.599.005.000,00
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp1.668.946.000,00

Hasil Penilaian ini meliputi penilaian atas Tanah Di Bawah Jalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penetapan Nilai Aset Tetap Nomor 032/100/IV.I/BPKAD/2021 Tanggal 29 Juli 2021 dan 032/193/IV.I/BPKAD/2021 Tanggal 14 Desember 2021.

b. Penetapan status penggunaan – masuk senilai Rp100.900.000,00 berasal dari belanja modal Tanah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke beberapa SKPD pada Kegiatan Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah berupa pensertifikatan Tanah, yaitu:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp64.494.800,00
- Dinas Kesehatan Rp2.598.080,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp3.100.000,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp745.680,00
- Dinas Ketahanan Pangan Rp1.880.680,00
- Dinas Perhubungan Rp1.263.400,00
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp457.360,00
- Dinas Perikanan Rp4.291.600,00
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp448.560,00
- Kecamatan Arut Selatan Rp19.514.120,00
- Kecamatan Arut Utara Rp1.684.360,00
- Kecamatan Pangkalan Banteng Rp421.360,00

c. Mutasi masuk senilai Rp29.852.978.272,00 ke SKPD:

- Dinas Kesehatan Rp14.000.000,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp24.874.229.310,00
- Dinas Lingkungan Hidup Rp3.841.248.962,00
- Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp59.000.000,00
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp1.050.500.000,00
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp14.000.000,00



- d. Penilaian atas barang Hibah senilai Rp2.897.877.300,00 terdapat pada SKPD:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp13.520.000,00
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp374.707.300,00
 - Dinas Pariwisata Rp2.509.650.000,00
- e. Hibah senilai Rp14.674.330.945,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berasal dari:
- masyarakat an. H. Rochbanda. HY berupa Tanah Makam/Kuburan Umum yang terletak di Jl. Makam RT.26 Kel. Baru sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah Nomor 593.21/468/BR/XII/2011.Agr Tanggal 30 Desember 2011 Rp1.000.000,00
 - masyarakat an. M. Tamsil berupa Tanah Makam/Kuburan Umum yang terletak di RT. 13/04 Desa Amin Jaya P. Banteng sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/742/DS-AJ/PB/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 Rp15.000.000,00
 - masyarakat an. Arsamin berupa Tanah Makam/Kuburan Umum yang terletak di RT. 10 Kel. Candi Kec. Kumai sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor 593/182/CD/VI/2007 Tanggal 10 Juni 2007 Rp21.900.000,00
 - masyarakat an. Lahuri berupa Tanah Makam/Kuburan Umum yang terletak di Jl. TPU RT. 06/02 Desa Sungai Pakit P. Banteng sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/40/AGRARIA/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Rp500.000,00
 - masyarakat an. Jamhari. M berupa Tanah Makam/Kuburan Umum yang terletak di Jl. Baru RT. 04 Desa Sulung Arut Selatan sesuai dengan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Nomor 594/43/DS-AS/II/2021 Tanggal 25 Februari 2021 Rp1.000.000,00
 - PT. KARYA KHARISMA ENDAH Berupa Tanah PSU Sesuai Dengan Berita Acara Serah Terima Aset PSU Perumahan Antara PT. KARYA KHARISMA ENDAH Dengan PEMERNTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Nomor 653/01/PERKIM.II/IV/2021 Tanggal 22 April 2021 Rp700.430.295,00
 - PT. UNIVERSAL KARYA SENTOSA berupa Tanah PSU sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset PSU Perumahan antara PT. UNIVERSAL KARYA SENTOSA Dengan PEMERNTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Nomor 653/02/PERKIM.II/IV/2021 Tanggal 22 April 2021 Rp3.250.000.000,00
 - PT. GRIYA SRIKANDI PERMAI berupa Tanah PSU sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset PSU Perumahan antara PT. GRIYA SRIKANDI PERMAI Dengan PEMERNTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Nomor 653/03/PERKIM.II/IV/2021 Tanggal 22 April 2021 Rp2.416.825.000,00
 - PT. ARTAMARA BUANA PERKASA berupa Tanah PSU sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset PSU Perumahan antara PT. ARTAMARA BUANA PERKASA Dengan PEMERNTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Nomor 653/04/PERKIM.II/IV/2021 Tanggal 22 April 2021 Rp598.672.000,00
 - PT. MANDIRI BANGUN SENTOSA berupa Tanah PSU sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset PSU Perumahan antara PT. MANDIRI BANGUN SENTOSA Dengan PEMERNTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Nomor 653/05/PERKIM.II/IV/2021 Tanggal 22 April 2021 Rp4.883.790.000,00



- PT. MENDAWAI PUTRA MANDIRI berupa Tanah PSU sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset PSU Perumahan antara PT. MENDAWAI PUTRA MANDIRI Dengan PEMERNTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Nomor 653/06/PERKIM.II/IV/2021 Tanggal 22 April 2021 Rp2.267.195.600,00
- PT. TUNAS CIPTA PERTINDO berupa Tanah PSU sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset PSU Perumahan antara PT. TUNAS CIPTA PERTINDO Dengan PEMERNTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Nomor 653/07/PERKIM.II/IV/2021 Tanggal 22 April 2021 Rp454.229.400,00
- PT. KYNDAI LIMPUAR SARANA berupa Tanah PSU sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset PSU Perumahan antara PT. KYNDAI LIMPUAR SARANA dengan PEMERNTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Nomor 653/08/PERKIM.II/IV/2021 Tanggal 22 April 2021 Rp53.788.650,00
- masyarakat an. Muhtar berupa Tanah Makam/Kuburan Umum yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Gg. Keramat Karanganyar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/043/KM/HM/VIII/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 Rp10.000.000,00

2) Pengurangan Aset Tetap – Tanah tahun 2021 total senilai Rp31.323.266.963,00 antara lain disebabkan oleh:

- a. Mutasi keluar senilai Rp29.852.978.272,00 dari SKPD:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp20.836.861.650,00
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp14.000.000,00
 - Sekretariat Daerah Rp8.754.816.622,00
 - Kecamatan Arut Selatan Rp233.300.000,00
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp14.000.000,00
- b. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh Pihak Lain senilai Rp218.600.000,00 pada SKPD:
 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp159.600.000,00 berupa Tanah di Jalan Pangeran Diponegoro yang dimanfaatkan oleh Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kotawaringin Barat. Sesuai dengan SK Bupati Kotawaringin Barat Nomor 032/129/IV.II/SK/BPKAD/2021 Tanggal 01 Oktober 2021.
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp59.000.000,00 berupa Tanah yang dimanfaatkan sebagai Kantor Kesekretariatan KONI.
- c. Hibah senilai Rp1.251.688.691,00 dari SKPD:
 - Sekretariat Daerah Rp276.078.357,00 yang terdiri dari Rp199.500.000,00 kepada BRIMOB berdasarkan NPHD Nomor 22/XI/105.1.4/2021 dan 032/1577/IV.III/BPKAD/2021, 032/1578/IV.III/BPKAD/2021 serta BAST Nomor BA/5/XI/105.1.4/2021 Tanggal 19 November 2021, Rp76.578.357,00 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp43.098.334,00 kepada BPOM Berdasarkan NPHD Nomor PL.03.07.1.2.08.21.34 dan 032/1202/IV.III/BPKAD/2021 Tanggal 3 Mei 2021 dan BAST Nomor PL.03.07.1.2.08.21.33 dan 032/1203/IV.III/BPKAD/2021 Tanggal 3 Mei 2021.



- Dinas Perhubungan Rp932.512.000,00 kepada Kementerian Perhubungan berupa 2 bidang tanah dan 1 bidang tanah untuk jalan.

Dari keseluruhan bidang Tanah yang tercatat pada KIB Tanah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat Aset Tetap – Tanah di bawah Jalan dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.59 Rekapitulasi Tanah Di Bawah Jalan

No.	SKPD	Tahun 2021	
	Uraian	Bidang	Nilai Perolehan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Tanah Jalan Kabupaten	326	259.590.430.700,00
	Tanah Jalan Desa	1976	42.783.801.840,00
	Tanah Jalan Lingkungan	163	3.641.857.050,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
	Tanah Jalan Desa	400	19.608.339.450,00
	Tanah Jalan Lingkungan	29	1.228.522.200,00
	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	64	11.011.228.900,00
3	Dinas Lingkungan Hidup		
	Tanah Jalan Desa	3	14.280.000,00
	Jumlah	2961	337.878.460.140,00

Pada tahun 2021 masih terdapat 21 bidang Tanah seluas 1.446.279 M² senilai Rp19.584.211.755,00 yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat namun mengalami sengketa. Daftar Aset dimaksud dapat dilihat pada **lampiran 5.1**.

Saldo Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp573.976.967.018,07 dan Rp498.396.123.964,07 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60 Rincian Saldo Aset Tetap – Tanah Berdasarkan Jenisnya

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Tanah Perkampungan	7.018.935.386,72	6.591.533.846,72
2	Tanah Pertanian	-	-
3	Tanah Perkebunan	-	-
4	Tanah Kebun Campuran	-	-
5	Tanah Hutan	339.775.070,00	339.775.070,00
6	Tanah Kolam Ikan	-	-
7	Tanah Danau/Rawa	-	-
8	Tanah Tandus/Rusak	-	-
9	Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	-	-
10	Tanah Pengguna Lain	-	-
11	Tanah Untuk Bangunan Gedung	223.691.162.671,35	217.149.046.377,35
12	Tanah Untuk Pertambangan	-	-
13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	342.927.093.890,00	274.315.768.670,00
	Jumlah	573.976.967.018,07	498.396.123.964,07



Sedangkan daftar saldo akhir Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada masing-masing SKPD:

Tabel 5.61 Daftar Saldo Aset Tetap – Tanah pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.820.261.330,06	26.632.174.030,06
2	Dinas Kesehatan	6.434.379.452,67	6.417.781.372,67
3	Rumah Sakit Umum Daerah	43.585.632.480,00	43.585.632.480,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	307.839.219.590,00	271.077.076.240,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	40.700.370.385,00	774.002.830,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.675.240.000,00	3.675.240.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	152.990.000,00	152.990.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.140.000,00	7.140.000,00
9	Dinas Sosial	694.040.000,00	694.040.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.296.248.680,00	2.295.503.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1.460.900.000,00	1.460.900.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	400.382.180,00	398.501.500,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	5.024.532.162,00	1.183.283.200,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	400.000.000,00	400.000.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	354.800.000,00	354.800.000,00
16	Dinas Perhubungan	2.811.429.680,00	3.742.678.280,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	320.000.000,00	479.600.000,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.011.971.760,00	23.025.514.400,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	10.125.205.425,00	10.125.205.425,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	645.200.000,00	645.200.000,00
21	Dinas Perikanan	777.900.626,00	773.609.026,00
22	Dinas Pariwisata	3.671.862.300,00	1.162.212.300,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	12.578.121.871,00	12.578.121.871,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.383.802.060,00	332.853.500,00
25	Sekretariat Daerah	55.013.401.963,67	64.044.296.942,67
26	Sekretariat DPRD	932.900.000,00	932.900.000,00
27	Inspektorat Kabupaten	350.000.000,00	350.000.000,00
28	Kecamatan Arut Selatan	13.403.043.520,00	13.616.829.400,00
29	Kecamatan Arut Utara	93.978.260,00	92.293.900,00
30	Kecamatan Kumai	458.313.066,67	458.313.066,67
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	327.915.000,00	327.915.000,00
32	Kecamatan Pangkalan Lada	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	845.764.560,00	845.343.200,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	467.400.000,00	467.400.000,00
36	Badan Pendapatan Daerah	288.000.000,00	288.000.000,00
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	487.000.000,00	487.000.000,00
38	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	4.737.620.666,00	3.111.773.000,00
Saldo Akhir Tanah		573.976.967.018,07	498.396.123.964,07



2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>679.967.382.463,55</u>	<u>607.825.996.038,55</u>

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicatat berdasarkan hasil penilaian/inventarisasi oleh BPKP pada tahun 2002 sebagai dasar pembuatan neraca awal, dan selanjutnya ditambahkan nilai perolehan tahun-tahun berikutnya. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020, terdapat penambahan senilai Rp72.141.386.425,00 sehingga saldo per 31 Desember 2021 menjadi Rp679.967.382.463,55. Penambahan/pengurangan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.62 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai
Saldo Awal Peralatan dan Mesin		607.825.996.038,55
1	Penambahan:	83.697.416.132,00
	Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 yang diakui sebagai Aset Peralatan dan Mesin	68.395.105.041,00
	Pengadaan Belanja Modal Selain Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan dan Mesin	1.670.943.624,00
	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021	58.484.000,00
	Hibah	10.679.545.467,00
	Koreksi pencatatan tahun sebelumnya-Hasil Penilaian atas aset lama	831.000.000,00
	Mutasi Masuk	750.948.000,00
	Reklasifikasi masuk	1.311.390.000,00
2	Pengurangan:	11.556.029.707,00
	Mutasi Keluar	750.948.000,00
	Reklasifikasi ke ekstrakom	9.015.944,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat	7.194.432.123,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2021	2.972.934.640,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain	628.699.000,00
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin		679.967.382.463,55

- 1) Penambahan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin tahun 2021 total senilai Rp83.697.416.132,00 antara lain disebabkan oleh:
 - a. Belanja Modal – Peralatan dan Mesin tahun 2021 yang diakui sebagai Aset Peralatan dan Mesin hanya senilai Rp68.395.105.041,00 sehingga tidak sama dengan realisasi Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Rp69.514.111.613,00. Dengan kata lain, terdapat senilai Rp1.119.006.572,00 dari Belanja Modal – Peralatan dan Mesin tahun 2021 yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Peralatan dan Mesin. Hal ini dikarenakan terdapat Belanja Modal – Peralatan dan Mesin pada:
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp275.000,00 berupa pengadaan layar *Background* alat perekaman e-KTP, harga satuannya di bawah batas kapitalisasi sehingga dicatat sebagai Aset *Ekstracomptabel*.



- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp305.756,00 berupa pengadaan 6 buah pelampung, harga satuannya di bawah batas kapitalisasi sehingga dicatat sebagai Aset *Ekstracomptabel*.
 - Dinas Perikanan Rp1.995.000,00 berupa 7 buah jaring ikan ukuran 2x4 meter, harga satuannya di bawah batas kapitalisasi sehingga dicatat sebagai Aset *Ekstracomptabel*.
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp94.653.548,00 berupa alat peraga dengan harga satuan di bawah batas kapitalisasi sehingga dicatat sebagai Aset *Ekstracomptabel*.
 - Dinas Kesehatan Rp79.340.771,00 berupa peralatan operasional medis dengan harga satuan di bawah batas kapitalisasi sehingga dicatat sebagai Aset *Ekstracomptabel*.
 - Dinas Kesehatan Rp707.476.500,00 menambah Aset Gedung Bangunan, berupa pembuatan bangunan tempat parkir BSL 3, anteroom 5 lantai, WC pengunjung, rehab radiologi, *backdrop nurse station* lanan, penataan samping IGD, Penyekatan ruang tunggu dan partisi IGD, dan rehab IGD di RSUD Sultan Imanuddin dari Belanja Modal BLUD.
 - Dinas Kesehatan Rp49.115.000,00 menambah Aset Tak Berwujud, berupa Sistem Informasi Manajemen/Pengembangan Aplikasi RENDAL di RSUD Sultan Imanuddin dari Belanja Modal BLUD.
 - Dinas Kesehatan Rp185.624.997,00 berupa Belanja (BHP) pembelian alat kedokteran *Flowmeter*, alat *Tree Way*, alat Regulator Tabung sehingga dicatat sebagai persediaan.
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp220.000 berupa kabel speaker, harga satuannya di bawah batas kapitalisasi sehingga dicatat sebagai Aset *Ekstracomptabel*
- b. Pengadaan Belanja Modal Selain Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan dan Mesin Rp1.670.943.624,00 yaitu pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp931.863.394,00 Belanja Modal BOS dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - Dinas Kesehatan Rp21.700.000,00 berupa belanja modal pengadaan CCTV dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp27.070.230,00 berupa CCTV, standing proyektor dan drone dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - Dinas Perikanan Rp654.310.000,00 berupa peralatan *Cold Storage Freezer* dan 4 mesin pompa air di BBI Pinang Merah dari Belanja Modal Gedung Bangunan
 - Inspektorat Rp36.000.000,00 berupa *Drone* dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- c. Penambahan Peralatan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa Rp58.484.000,00 yaitu pada:
- Sekretariat DPRD berupa pengadaan dudukan pot tanaman dari Belanja Pemeliharaan dengan harga satuan memenuhi Kapitalisasi Aset dari bahan kayu dan campuran.
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp42.284.000,00.



- d. Hibah Masuk Peralatan dan Mesin yang menambah aset Peralatan Mesin Rp10.679.545.467,00 yaitu pada:
- Dinas Pendidikan Rp2.299.708.000,00 berasal dari Hibah Bantuan TIK Kementerian senilai Rp2.236.858.000,00 dan Hibah dari Yayasan Pertiwi Arut Utara atas TK Pertiwi Pangkut senilai Rp62.850.000,00.
 - Dinas Kesehatan Rp7.878.795.867,00 hibah dari Kemenkes RI Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat BAST Nomor KN.02.04/6/PPK/2362/X/2021 tanggal 29 November 2021 berupa KIT UKS Rp506.053.220,00 dan paket peralatan infusion pump Rp7.372.742.647,00 di RSUD Sultan Imanuddin dengan BAST Nomor KN.02.07/2181/2021 tanggal 31 Mei 2021.
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp176.600.000,00 Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor BA 89/D/V/RT.03.03/03/2021 Tanggal 26 Maret 2021 berupa 1 (satu) Unit Trailer Dapur Umum Lapangan seharga Rp169.100.000,00 serta Hibah dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor BA.35/BPB-PK/2/IV/2021 Tanggal 15 April 2021 berupa 10 (sepuluh) buah *Velbed* seharga @ Rp750.000,00.
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp10.500.000,00, hibah dari masyarakat berupa 1 set CCTV dan Televisi sebesar Rp5.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 140/CSR/KSA/Serah-Terima/XII/2021 Tanggal 16 Desember 2021 serta Hibah dari masyarakat berupa Booth Kontainer sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 007/SAPK/EM/XII/2021 Tanggal 16 Desember 2021.
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp17.528.500,00 Hibah dari Kementerian Investasi berupa Seperangkat Komputer PC dan Printer sebesar Rp17.528.500,00.
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp148.931.100,00 Hibah dari Perpustakaan Nasional berupa komputer dan peralatan untuk Perpustakaan.
 - Dinas Pariwisata Rp23.930.000,00 Hibah sebesar Rp23.930.000,00 Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Program Airnav Safety Tahun 2021 Nomor BAC.022/G/22/LPPNPI/KBL.03/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, dengan rincian berupa tempat sampah sebesar Rp9.900.000,00 sebanyak 11 buah, tempat Cuci Tangan sebesar Rp10.000.000,00 sebanyak 8 Set serta Instalasi pipa dari tandon ketempat cuci tangan di 8 Gazebo sebesar Rp4.030.000 sebanyak 1 paket.
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp123.552.000,00 Hibah dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sebesar Rp123.552.000,00 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4.4/PSP.KP/BMN/B/01/2021 Tanggal 14 Januari 2021 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi



Kalimantan Tengah Nomor 4.4/PSP.KP/BMN/B/01/2021 Tanggal 14 Januari 2021 berupa 6 komputer PC dan modemnya.

- e. Koreksi pencatatan tahun sebelumnya-Hasil Penilaian atas aset lama senilai Rp831.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan SK Penilaian Nomor 032/193/IV.I/BPKAD/2021 Tanggal 14 Desember 2021.
- f. Mutasi Masuk senilai Rp750.948.000,00 ke SKPD:
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp33.649.000,00
 - Dinas Perhubungan Rp49.399.000,00
 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp44.900.000,00
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp57.800.000,00
 - BPKAD – PPKD Rp565.200.000,00
- g. Rincian Reklasifikasi Masuk ke Peralatan Mesin Rp1.311.390.000,00 berupa aset-aset yang pada TA. 2020 dimanfaatkan oleh pihak lain dan tercatat di Aset Lain-lain yaitu pada:
 - Sekretariat Daerah Rp855.550.000,00 atas kendaraan yang sebelumnya dipinjam-pakai oleh AURI, BPN dan Polres Ktw. Barat
 - Pengelola Barang di BPKAD Rp455.840.000 berupa 2 buah Kijang Innova

2) Pengurangan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin tahun 2021 total senilai Rp11.556.029.707,00 antara lain disebabkan oleh:

- a. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat Rp7.194.432.123,00 pada:
 - Dinas Kesehatan Rp5.169.209.000,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp22.200.000,00
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp34.329.000,00
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp163.335.400,00
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp39.295.500,00
 - Dinas Lingkungan Hidup Rp338.000,00
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp142.203.000,00
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp174.974.850,00
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp28.120.000,00
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp22.710.000,00
 - Dinas Perikanan Rp332.901.673,00
 - Dinas Pariwisata Rp197.500.000,00
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp21.012.000,00
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp9.118.000,00
 - Sekretariat Daerah Rp105.658.000,00
 - Sekretariat DPRD Rp287.925.000,00
 - Kecamatan Arut Selatan Rp28.560.000,00
 - Kecamatan Arut Utara Rp52.495.000,00
 - Kecamatan Pangkalan Lada Rp1.600.000,00
 - Kecamatan Pangkalan Banteng Rp86.991.700,00
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp273.956.000,00



- b. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2021 Rp2.972.934.640,00 yaitu pada:
- Dinas Kesehatan Rp254.500.000,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp2.119.536.640,00
 - Dinas Ketahanan Pangan Rp7.500.000,00
 - Dinas Perikanan Rp79.600.000,00
 - Sekretariat Daerah Rp401.200.000,00
 - Kecamatan Arut Utara Rp49.200.000,00
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp21.600.000,00
 - Pengelola Barang pada BPKAD Rp39.798.000,00
- c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain Rp628.699.000,00 berupa:
- ambulance KH 157 GU ke Lembaga Pemasarakatan Kelas II B sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 800/3700/KD.A/2021 Tanggal 16 Februari 2021 Rp49.000.000,00
 - aset yang dimanfaatkan pihak lain oleh Komandan Pos TNI AL senilai Rp229.800.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/173/BU.III/2021 Tanggal 30 September 2021
 - kendaraan yang dipinjam pakai oleh Polres Kotawaringin Barat Rp349.899.000,00
- d. Mutasi Keluar senilai Rp750.948.000,00 dari:
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp57.800.000,00
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp330.000.000,00
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp147.000.000,00
 - BPKAD-PPKD Rp216.148.000,00
- e. Reklasifikasi ke Ekstrakom Rp9.015.944,00 karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi

Daftar saldo akhir Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.63 Daftar Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92.548.868.173,70	68.912.175.610,70
2	Dinas Kesehatan	87.402.854.857,14	81.640.681.081,14
3	Rumah Sakit Umum Daerah	215.933.212.444,13	186.590.216.979,13
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.072.479.966,00	32.003.967.182,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.107.852.830,00	1.110.676.600,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	20.196.320.362,00	19.088.991.518,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.449.655.019,00	1.426.642.469,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.518.114.427,99	23.263.082.427,99
9	Dinas Sosial	1.872.255.550,00	1.840.631.700,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.685.530.046,00	4.671.392.560,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.406.015.609,00	4.315.100.122,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2020
12	Dinas Ketahanan Pangan	1.473.153.534,66	1.480.653.534,66
13	Dinas Lingkungan Hidup	21.488.440.992,40	17.843.728.992,40
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.613.431.561,95	3.328.476.561,95
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.315.265.160,00	1.259.089.167,00
16	Dinas Perhubungan	11.171.546.619,00	10.350.027.919,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.176.670.974,00	5.033.305.974,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.040.696.604,95	4.959.828.604,95
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.365.654.269,00	2.368.930.619,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.026.016.245,00	1.784.410.450,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.464.633.306,00	3.042.656.206,00
22	Dinas Perikanan	24.805.796.722,00	24.418.306.395,00
23	Dinas Pariwisata	2.608.782.267,75	2.709.390.272,75
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	10.340.203.081,60	10.516.628.581,60
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.781.246.877,00	7.787.372.382,00
26	Sekretariat Daerah	37.785.928.637,27	32.693.622.755,27
27	Sekretariat DPRD	9.904.606.875,00	9.992.546.875,00
28	Inspektorat Kabupaten	3.968.124.005,00	2.173.760.085,00
29	Kecamatan Arut Selatan	7.371.481.319,00	7.122.505.519,00
30	Kecamatan Arut Utara	1.410.395.593,00	1.461.545.845,00
31	Kecamatan Kumai	4.346.607.317,67	4.204.630.112,67
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	3.871.190.840,67	3.712.682.840,67
33	Kecamatan Pangkalan Lada	1.369.285.350,00	1.370.885.350,00
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	2.096.971.876,67	2.183.963.576,67
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.778.650.457,00	3.946.916.457,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.301.259.312,00	7.136.169.312,00
37	Badan Pendapatan Daerah	4.835.641.895,00	4.463.768.895,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.749.801.485,00	4.630.889.505,00
39	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	1.312.740.000,00	985.745.000,00
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin		679.967.382.463,55	607.825.996.038,55

3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.232.792.193.621,29	1.087.204.097.394,82

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain berasal dari belanja modal, belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap, belanja tidak terduga, hibah, penetapan status penggunaan, maupun reklasifikasi masuk. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020, terdapat penambahan senilai Rp145.588.096.226,47 sehingga saldo per 31 Desember 2021 menjadi Rp1.232.792.193.621,29. Penambahan atau pengurangan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan pada tahun 2021 disajikan dalam tabel 5.64.



Tabel 5.64 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai
Saldo Awal Gedung dan Bangunan		1.087.204.097.394,82
1	Penambahan:	149.999.726.452,47
	Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 Yang diakui sebagai Aset Gedung dan Bangunan	126.855.341.367,00
	Pengadaan Belanja Modal Selain Gedung dan Bangunan Yang dikapitalisasi sebagai Aset Gedung dan Bangunan	5.819.820.900,00
	Pengadaan Barang dari Belanja Hibah	444.980.000,00
	Pengadaan Barang dan Jasa 2021	180.654.920,00
	Koreksi pencatatan tahun sebelumnya-Penilaian atas aset lama	1.807.913.000,00
	Hibah	744.330.000,00
	Mutasi Masuk	2.175.683.200,00
	Reklasifikasi masuk	11.971.003.065,47
2	Pengurangan:	4.411.630.226,00
	Mutasi Keluar	2.158.333.200,00
	Reklasifikasi keluar	61.255.869,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2021	1.748.375.757,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain	443.665.400,00
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan		1.232.792.193.621,29

- 1) Penambahan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan tahun 2021 total senilai Rp149.999.726.452,47 antara lain disebabkan oleh:
 - a. Pengadaan Belanja Modal – Gedung dan Bangunan tahun 2021 yang diakui sebagai Aset Gedung dan Bangunan hanya senilai Rp126.855.341.367,00 sehingga tidak sama dengan realisasi Belanja Modal – Gedung dan Bangunan Rp171.955.314.980,00. Dengan kata lain, terdapat senilai Rp45.099.973.613,00 dari Belanja Modal – Gedung dan Bangunan tahun 2021 yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Gedung dan Bangunan. Hal ini dikarenakan Belanja Modal – Gedung dan Bangunan pada:
 - Dinas Sosial Rp10.373.000,00 berupa Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan yang dikapitalisasi sebagai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Perhubungan Rp183.072.900,00 berupa Penerangan Jalan Umum yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Dinas Perhubungan Rp1.867.770.000,00 berupa rehab Ponton Dermaga Pariwisata yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Dinas Perhubungan Rp285.383.500,00 berupa berupa Rubber Funder Pelabuhan Penyeberangan Kumai yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Dinas Perhubungan Rp4.851.000,00 berupa berupa perencanaan teknis pembangunan Halte depan SMK Muhammadiyah yang dikapitalisasi sebagai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Perikanan Rp654.310.000,00 berupa peralatan Cold Storage Freezer dan 4 mesin pompa air di BBI Pinang Merah yang dikapitalisasi sebagai aset Peralatan dan Mesin
 - Dinas Perikanan Rp236.134.304,00 berupa kolam induk dan 4 buah sumur bor yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan



- Sekretariat DPRD Rp9.427.000,00 berupa pembangunan gedung kantor yang dikapitalisasi sebagai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Kecamatan Arut Selatan Rp66.000.000,00 berupa tiang listrik dan instalasinya di Kecamatan Arut Selatan yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Kecamatan Kumai Rp64.800.000,00 berupa jaringan Galvanis PJU di Kecamatan Kumai yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp5.699.826.606,08 pembayaran atas utang belanja modal TA 2020 di TA 2021 yang asetnya telah dicatat pada TA 2020
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp4.990.023.000,00 berupa pekerjaan lanjutan Water Front City yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp24.529.939.998,92 berupa pekerjaan fisik yang sampai dengan akhir TA 2021 belum selesai di Sport Centre, Pangkalan Bun Park, berikut perencanaan teknisnya yang dikapitalisasi sebagai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp209.437.000,00 berupa rehab aula kantor yang dikapitalisasi sebagai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Sekretariat Daerah Rp6.080.327.804,00 berupa bangunan penunjang rumah jabatan Bupati, perencanaan teknis Pembangunan pagar Makam gg. Mawar RT.10 Kel. Candi Kec. Kumai, perencanaan teknis pemagaran makam desa bumiharjo Kec.Kumai, perencanaan teknis Penataan kawasan makam muslim RT 02 Sei Tendang Kec.Kumai yang dikapitalisasi sebagai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Kesehatan Rp199.202.500,00 berupa pembangunan Pustu Desa Gendis yang dikapitalisasi sebagai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp9.095.000,00 berupa 3 buah plang papan nama sekolah yang tidak memenuhi kapitalisasi
- b. Pengadaan Belanja Modal Selain Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi sebagai Aset Gedung dan Bangunan Rp5.819.820.900,00 yaitu pada:
- Dinas Kesehatan Rp707.476.500,00 berupa pembuatan bangunan tempat parkir BSL 3, anteroom 5 lantai, WC pengunjung, rehab radiologi, backdrop nurse station lanan, penataan samping IGD, Penyekatan ruang tunggu dan partisi IGD, dan rehab IGD di RSUD Sultan Imanuddin dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp49.962.000,00 dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pekerjaan Pemasangan Listrik Ruang Kelas dan Ruang Praktik SPNF Kotawaringin Barat pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp640.772.500,00 dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
 - Dinas Lingkungan Hidup Rp4.421.609.900,00 dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Perencanaan dan Pengawasan Teknis 3 buah gedung dan bangunan yang terdiri dari pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah di Kecamatan Arut Selatan, Pembangunan Bank Sampah Induk dan Pembangunan



Rumah Kompos di Kecamatan Kumai

- c. Pengadaan Barang dari Belanja Hibah Rp444.980.000,00 berasal dari pembangunan pembangunan Rumah Sultan Kutaringin yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Pengadaan Barang dan Jasa 2021 yang menambah aset Gedung dan Bangunan Rp180.654.920,00 yaitu pada:
- Dinas Kesehatan berupa belanja penambahan daya listrik pada Labkesda senilai Rp34.966.600,00 dan belanja pemeliharaan gedung Dinas Kesehatan sebesar Rp84.000.000,00
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp61.688.320,00 berupa belanja penambahan daya listrik.
- e. Koreksi pencatatan tahun sebelumnya-Penilaian atas aset lama Rp1.807.913.000,00 berdasarkan SK Penilaian Nomor 032/193/IV.I/BPKAD/2021 Tanggal 14 Desember 2021.
- f. Hibah masuk Gedung dan Bangunan Rp744.330.000,00 yaitu pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp584.860.000,00 berupa gedung sekolah TK Pertiwi Arut Utara
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp83.500.000,00 Hibah dari BNI berupa bantuan Lapak Pasar Sungai Bulin
 - Dinas Lingkungan Hidup Rp50.000.000,00 Hibah dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berupa pemeliharaan Taman Bundaran Orang Utan sebesar Rp50.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor BA.3594/ML.02.01/RKLM-2021 Tanggal 17 September 2021
 - Dinas Pariwisata Rp25.970.000,00 Hibah dari Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Program Airnav Safety Tahun 2021 Nomor BAC.022/G/22/LPPNPI/KBL.03/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 berupa Pembuatan taman (penataan lanscape) seluas 37,1 M2 sebanyak 1 paket
- g. Reklasifikasi masuk yang menambah aset Gedung dan Bangunan Rp11.376.112.065,47 yaitu pada:
- Dinas Kesehatan Rp2.701.440,00 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Puskesmas Natai Pelingkau
 - Dinas Kesehatan Rp139.000.000,00 dari Aset Lain-Lain berupa gudang pada RSUD Sultan Imanuddin
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp616.101.000,00 berupa bangunan Gedung BLK Kotawaringin Barat yang telah selesai pembangunannya, pada TA 2020 tercatat di Konstruksi dalam Pengerjaan
 - Sekretariat Daerah Rp10.618.309.625,47 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Rumah Jabatan Bupati
- h. Mutasi Masuk senilai Rp2.175.683.200,00 pada:
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp344.621.200,00 berupa Gedung Sekretariat KONI
 - Dinas Lingkungan Hidup Rp130.157.000,00 berupa Monumen Palagan Sambi



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

- Rp85.957.000,00 dan Rumah Dinas Rp44.200.000,00
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa Taman PKK Rp410.728.500,00
 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rp44.300.000,00 berupa Gedung Balai di Kelurahan Baru
 - Dinas Kesehatan Rp44.300.000,00 berupa bangunan Eks. Balai Pelingkau Kelurahan Baru
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp1.184.226.500,00 berupa Pembuatan Pagar dan Gapura TPU Sungai Kapitan, TPU Desa Amin Jaya, Makam Pangkalan Banteng, TPU Sumber Agung, TPU KM 13, Kuburan Muslim, dan Tapal Batas Pemakaman KM 13
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp17.350.000,00 berupa meteran PLN di SDN 1 Palih Baru, SDN 1 Ipuh Bangun Jaya, SMPN 2 Kotawaringin Lama, dan SDN 2 Pangkut
- 2) Pengurangan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan tahun 2021 total senilai Rp4.411.630.226,00 antara lain disebabkan oleh:
- a. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2021 Rp1.748.375.757,00 yaitu pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp493.729.957,00
 - Dinas Kesehatan Rp1.070.003.800,00
 - Kecamatan Pangkalan Banteng Rp92.542.000,00
 - Badan Pendapatan Daerah Rp11.000.000,00
 - Pengelola Barang di BPKAD Rp81.100.000,00
 - b. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain Rp443.665.400,00 berupa:
 - Bangunan yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro dimanfaatkan oleh pihak lain/Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kotawaringin Barat. Sesuai dengan SK Bupati Kotawaringin Barat Nomor 032/129/IV.II/SK/BPKAD/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 Rp61.200.000,00
 - Rumah Dinas Jalan Hasanudin yang dimanfaatkan sebagai Kantor KONI Rp344.621.200,00
 - Pada Sekretariat Daerah Rp37.844.200,00 berupa Rumah Dinas Jalan Diponegoro
 - c. Mutasi keluar senilai Rp2.158.333.200,00 yaitu pada:
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp44.200.000,00 berupa bangunan asrama semi permanen yang terletak pada Desa Sungai Kapitan
 - Kecamatan Arut Selatan Rp44.300.000,00 berupa Gedung Balai di Kelurahan Baru
 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rp44.300.000,00 berupa Gedung Balai di Kelurahan Baru
 - Sekretariat Daerah Rp2.025.533.200,00 berupa Rumah Dinas, Monumen Palagan Sambi, Taman PKK, Gapura dan pagar Kuburan Muslim, Gapura TPU Desa Sumber Agung, Gapura dan Pagar TPU Tanah Desa Amin Jaya, TPU Muslim Desa Sumber Agung, tapal batas pemakaman KM 13, Pemagaran Makam Pangkalan Banteng dan Pemagaran TPU Sungai Kapitan Kecamatan Kumai



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

d. Reklasifikasi Keluar Rp61.255.869,00 yaitu pada:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp2.550.000,00 berupa Plang Papan Nama yang berasal dari Dana BOS 2021
- Dinas Kesehatan Rp9.136.969,00 berupa Izin Mendirikan Bangunan Rusunawa pada Rumah Sakit Imanuddin
- Dinas Pariwisata Rp26.725.000,00 berupa Pengadaan dan Pemasangan Mainan anak-anak 2 Set (4 Unit) di OW. Pantai Kubu
- Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Rp17.850.000,00 berupa Pengadaan Papan Nama Kantor Balai Penyuluhan Pertanian di Pangkalan Banteng, Kotawaringin Lama, dan Arut Utara
- Kecamatan Kotawaringin Lama Rp4.993.900,00 berupa Bak Tempat Pencucian Sampah di BPP Arut Utara

Daftar saldo akhir Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada masing-masing SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.65 Daftar Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	309.877.441.407,65	290.919.046.534,65
2	Dinas Kesehatan	178.083.182.920,26	160.764.193.505,26
3	Rumah Sakit Umum Daerah	246.962.576.031,69	167.275.267.181,69
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.843.145.113,65	60.181.499.193,65
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.420.626.433,33	6.261.762.533,33
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.099.477.972,91	5.099.477.972,91
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.555.409.083,00	2.555.409.083,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.922.159.903,00	6.922.159.903,00
9	Dinas Sosial	2.076.550.525,00	2.076.550.525,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.995.058.439,00	5.715.482.439,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.959.396.810,00	3.695.222.810,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	843.293.991,00	843.293.991,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	50.272.416.893,50	45.670.649.993,50
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.138.401.090,00	3.036.268.665,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	978.471.200,00	902.635.700,00
16	Dinas Perhubungan	25.858.244.696,79	21.177.898.871,79
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	747.213.970,37	808.413.970,37
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	90.468.316.638,00	90.073.590.838,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.137.520.000,00	3.137.520.000,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	23.217.078.873,00	22.615.322.873,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.396.560.117,77	3.396.560.117,77
22	Dinas Perikanan	19.831.640.573,72	19.475.778.073,72
23	Dinas Pariwisata	16.932.816.005,07	16.734.610.762,07
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	22.773.183.721,00	22.835.233.721,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.565.410.731,00	15.154.682.231,00
26	Sekretariat Daerah	44.773.092.551,24	36.051.900.325,77
27	Sekretariat DPRD	11.780.731.004,89	11.780.731.004,89
28	Inspektorat Kabupaten	3.887.080.392,28	3.680.530.392,28
29	Kecamatan Arut Selatan	13.046.198.366,36	13.022.000.116,36
30	Kecamatan Arut Utara	4.969.059.609,92	4.769.059.609,92
31	Kecamatan Kumai	4.756.703.235,16	4.655.703.235,16
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	11.021.656.828,74	9.303.278.728,74
33	Kecamatan Pangkalan Lada	3.383.143.081,00	3.383.143.081,00
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	3.472.170.369,00	3.564.712.369,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.472.351.350,00	6.472.351.350,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.423.085.453,30	7.423.085.453,30
37	Badan Pendapatan Daerah	1.517.222.420,00	1.528.222.420,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.661.309.282,27	3.661.309.282,27
39	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	1.672.796.536,42	579.538.536,42
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan		1.232.792.193.621,29	1.087.204.097.394,82

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3.059.391.512.388,30	2.884.524.022.534,07

Saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain berasal dari belanja modal, belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap, belanja tidak terduga, hibah, penetapan status penggunaan, reklasifikasi masuk, dan utang belanja yang diakui sebagai penambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020, terdapat penambahan senilai Rp174.867.489.854,23 sehingga saldo per 31 Desember 2021 menjadi Rp3.059.391.512.388,30. Penambahan/pengurangan Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2021 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.66 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai
Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan		2.884.524.022.534,07
1	Penambahan:	271.400.688.604,90
	Pengadaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 yang diakui sebagai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	134.011.027.113,71
	Pengadaan Belanja Modal Selain Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.699.635.153,00
	Pengadaan Barang dan Jasa 2021	2.000.000,00
	Hibah	33.477.703.626,52
	Mutasi Masuk	96.012.707.711,67
	Reklasifikasi Masuk	197.615.000,00
2	Pengurangan:	96.533.198.750,67
	Mutasi Keluar	96.012.707.711,67



No.	Uraian	Nilai
	Reklasifikasi keluar	17.350.000,00
	Reklasifikasi ke ekstrakom	358.738.648,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2021	144.402.391,00
	Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.059.391.512.388,30

- 1) Penambahan Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 total senilai Rp271.400.688.604,00 antara lain disebabkan oleh:
 - a. Pengadaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 yang diakui sebagai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan hanya senilai Rp134.011.027.113,71 sehingga tidak sama dengan realisasi Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp167.205.556.475,58. Dengan kata lain, terdapat senilai Rp33.194.529.361,87 dari Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan. Hal ini dikarenakan Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp49.962.000,00 dikapitalisasi sebagai aset Gedung dan Bangunan berupa Pekerjaan Pemasangan Listrik Ruang Kelas dan Ruang Praktik SPNF Kotawaringin Barat
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp373.384.000,00 dikapitalisasi sebagai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Perencanaan Pembangunan Jembatan di Desa Arga Mulya, Sidomulyo, Keraya, Sebuai, Tanjung Terantang, Kumpai Batu Bawah, Sungai Hijau dan Desa Riam
 - Dinas Lingkungan Hidup Rp4.421.609.900,00 berupa bangunan Bank Sampah Induk, bangunan rumah kompos dan bangunan pusat daur ulang sampah dikapitalisasi sebagai aset Gedung dan Bangunan
 - Kecamatan Arut Selatan Rp60.000.000,00 berupa pemeliharaan MCK di Kelurahan Raja Seberang milik warga yang tidak memenuhi kriteria aset tetap
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp24.300.173.393,92 pembayaran atas utang belanja modal TA 2020 di TA 2021 yang asetnya telah dicatat pada TA 2020
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp3.984.908.028,00 berupa pekerjaan fisik yang sampai dengan akhir TA 2021 belum selesai serta perencanaan teknisnya yang dikapitalisasi sebagai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Perhubungan Rp5.000.000,00
 - b. Pengadaan Belanja Modal Selain Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp7.699.635.153,00 yaitu pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp6.451.449,00 dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp4.990.023.000,00 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa pekerjaan lanjutan Water Front City
 - Dinas Perhubungan Rp183.072.900,00 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Penerangan Jalan Umum
 - Dinas Perhubungan Rp1.867.770.000,00 dari Belanja Modal Gedung dan



- Bangunan berupa rehab Ponton Dermaga Pariwisata
- Dinas Perhubungan Rp285.383.500,00 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Rubber Funder Pelabuhan Penyeberangan Kumai
 - Dinas Perikanan Rp236.134.304,00 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa kolam induk dan 4 buah sumur bor
 - Kecamatan Arut Selatan Rp66.000.000,00 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa tiang listrik dan instalasinya di Kecamatan Arut Selatan
 - Kecamatan Kumai Rp64.800.000,00 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa jaringan Galvanis PJU di Kecamatan Kumai
- c. Pengadaan Barang dan Jasa yang menambah aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.000.000,00 berasal dari Belanja BOS SD Negeri 2 Raja Seberang berupa Pemasangan instalasi air baru (PDAM)
- d. Hibah Jalan,Irigasi dan Jaringan Rp33.477.703.626,52 yaitu pada:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp14.042.683.626,52 Hibah dari Pekerjaan Konsorsium/CSR, tindak lanjut atas temuan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas LKPD TA 2020, berupa Jalan Kabupaten Pekerjaan konsorsium Jalan Pandau - Riam - Panahan, Kec. Aruta sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 600/73.A/PUPR, Tanggal 30 Januari 2019.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp4.217.606.000,00 Hibah dari Pekerjaan Konsorsium/CSR, tindak lanjut atas temuan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas LKPD TA 2020, berupa Jalan Kabupaten Pekerjaan konsorsium Jalan Sungai bedaun - Batas Sungai Pulau, Kec.Kumai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 600/78/PUPR, Tanggal 30 Januari 2019
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.486.500.000,00 Hibah dari Pekerjaan Konsorsium/CSR, tindak lanjut atas temuan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas LKPD TA 2020, berupa Jalan Kabupaten Pekerjaan konsorsium Jalan Mulyajadi - Sungai Pulau - batas Sungai Bedaun, Kec. Pangkalan Banteng sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 600/076/PUPR, Tanggal 30 Januari 2019
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp427.500.000,00 Hibah dari Pekerjaan Konsorsium/CSR, tindak lanjut atas temuan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas LKPD TA 2020, berupa Jalan Kabupaten Pekerjaan konsorsium Jalan Sambu - sp. Salip - sei. Dau - batas seruyan, Kec. Arut Utara sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 600/2005/PUPR, Tanggal 22 Oktober 2020
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.757.261.000,00 Hibah dari Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, berupa Jalan Kabupaten Lokal, total sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 296.1./BA/DC/2020 Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Kawasan Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp2.786.493.000,00 Hibah dari Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan



- Perumahan Rakyat, berupa Jalan Kabupaten Lokal, total sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 296.1./BA/DC/2020 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Raja Seberang Kab. Kotawaringin Barat
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.668.815.000,00 Hibah dari Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, berupa Jalan Kabupaten Lokal, total sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 296.1./BA/DC/2020 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Kotawaringin Barat
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp4.762.721.000,00 Hibah dari Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, berupa Jalan Kabupaten Lokal, total sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 296.1./BA/DC/2020 Pekerjaan Peningkatan PSD Permukiman Perdesaan Kawasan Agropolitan Kab. Kotawaringin Barat
 - Dinas Perhubungan Rp2.328.124.000,00 Hibah dari Kementerian Perhubungan berupa Dermaga Indra Sari.
- e. Reklasifikasi masuk Rp197.615.000,00 yaitu reklasifikasi aset konstruksi dalam pengerjaan ke aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa perencanaan teknis rehabilitasi ponton Dermaga Parwisata Kumai pada Dinas Perhubungan
- f. Mutasi masuk senilai Rp96.012.707.711,67 pada:
- Dinas Perhubungan Rp41.824.230.720,95 berupa Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp54.188.476.990,72 berupa Pembangunan Jalan
- 2) Pengurangan Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 total senilai Rp96.533.198.750,67 disebabkan oleh:
- a. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2021 Rp144.402.391,00 pada:
- Dinas Perhubungan Rp100.829.791,00 berupa Dermaga Kumai Seberang
 - Pengelola Barang di BPKAD Rp43.572.600,00
- b. Mutasi keluar senilai Rp96.012.707.711,67 pada:
- Sekretariat Daerah Rp41.824.230.720,91 berupa Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - Dinas Pekerjaan Umum Rp54.188.476.990,72 berupa Pembangunan Jalan
- c. Reklasifikasi Keluar Rp17.350.000,00 pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp17.350.000,00 berupa Instalasi Listrik dan Meteran PLN di SDN 1 Palih Baru, SDN 1 Ipuh Bangun Jaya, SMPN 2 Kotawaringin Lama, dan SDN 2 Pangkut
- d. Reklasifikasi ke Ekstrakom Rp358.738.648,00 pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp71.292.000,00 berupa Instalasi Air Bersih, Jaringan Internet dan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya
 - Dinas Perhubungan Rp2.779.860,00 berupa Instalasi PDAM Pelabuhan Penyeberangan Kumai
 - Kecamatan Arut Selatan Rp169.927.300,00 berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)



- Kecamatan Kumai Rp114.739.488,00 berupa Jaringan Listrik

Daftar saldo akhir Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.67 Daftar Saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.394.738.969,00	1.459.929.520,00
2	Dinas Kesehatan	7.294.144.268,71	3.776.337.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	24.306.986.463,94	24.306.986.463,94
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.834.655.367.625,63	2.726.785.040.701,83
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	63.087.900.976,72	5.394.133.986,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	570.000,00	570.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.016.096.400,00	9.016.096.400,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	991.701.567,50	991.701.567,50
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	361.635.000,00	361.635.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.415.500.620,10	2.415.500.620,10
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.000.000,00	9.000.000,00
12	Dinas Perhubungan	52.390.313.022,90	5.807.726.552,95
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	996.794.082,00	996.794.082,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	432.904.181,00	432.904.181,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	148.516.866,00	148.516.866,00
16	Dinas Perikanan	12.858.189.940,00	12.622.055.636,00
17	Dinas Pariwisata	12.852.939.021,58	12.852.939.021,58
18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	32.260.198.197,22	32.260.198.197,22
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	892.111.700,00	892.111.700,00
20	Sekretariat Daerah	25.000.000,00	41.849.230.720,95
21	Inspektorat Kabupaten	4.205.240,00	4.205.240,00
22	Kecamatan Arut Selatan	930.630.556,00	654.065.029,00
23	Kecamatan Arut Utara	869.099.390,00	639.185.760,00
24	Kecamatan Kumai	486.122.100,00	92.739.488,00
25	Kecamatan Kotawaringin Lama	487.366.200,00	487.366.200,00
26	Kecamatan Pangkalan Lada	27.030.000,00	27.030.000,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.750.000,00	13.750.000,00
28	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	182.700.000,00	226.272.600,00
Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan		3.059.391.512.388,30	2.884.524.022.534,07

5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>43.770.873.560,40</u>	<u>42.243.910.443,40</u>



Saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berasal dari belanja modal yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020, terdapat penambahan senilai Rp1.526.963.117,00 sehingga saldo per 31 Desember 2021 menjadi Rp43.770.873.560,40. Penambahan/pengurangan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2021 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.68 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai
	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	42.243.910.443,40
1	Penambahan:	1.526.963.117,00
	Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 yang diakui sebagai Aset Aset Tetap Lainnya	1.506.580.617,00
	Hibah	20.382.500,00
2	Pengurangan:	-
	Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	43.770.873.560,40

- 1) Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2021 total senilai Rp1.526.963.117,00 disebabkan oleh:
 - a. Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2021 yang diakui sebagai Aset Tetap Lainnya hanya senilai Rp1.506.580.617,00 sehingga tidak sama dengan realisasi Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya Rp4.922.616.100,00. Dengan kata lain, terdapat senilai Rp3.416.035.483,00 dari Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya tahun 2021 yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Lainnya. Hal ini dikarenakan Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya pada:
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp15.700.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud berupa software aplikasi
 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp99.715.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud berupa hasil kajian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp18.865.000,00 dikapitalisasi sebagai aset Tak Berwujud berupa pengadaan Sistem Informasi dan Konsultasi Pelaku Industri Kecil Menengah kegiatan Penyediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IKUI, IPKI. Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Dinas Kesehatan Rp21.700.000,00 dikapitalisasi sebagai aset Peralatan Mesin berupa belanja modal pengadaan CCTV
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.406.193.000,00 dikapitalisasi sebagai aset Tak Berwujud berupa Pengembangan sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (Ejakon), Kajian Banjir Kanal Kota Pangkalan Bun, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan KLHS Kawasan Perkotaan Kecamatan Pangkalan Banteng, dan Review Desain Kawasan Kota Pangkalan Bun
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp27.070.230,00 dikapitalisasi sebagai aset Peralatan Mesin berupa CCTV, standing proyektor dan *drone*



- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp30.000.000,00 dikapitalisasi sebagai aset Peralatan Mesin berupa pengembangan *website*
- Inspektorat Daerah Rp36.000.000,00 dikapitalisasi sebagai aset Peralatan Mesin berupa *drone*
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp6.451.449,00 dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari Belanja BOS berupa Pemasangan instalasi air baru (PDAM) dan pembuatan sumur bor
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp640.772.500,00 dikapitalisasi sebagai aset Gedung dan Bangunan berasal dari Belanja BOS berupa sekat dinding harmonika, instalasi listrik, pagar, pintu, jendela, terapis, pintu, pintu teralis, washtafel, teralis, jendela, pagar, plang nama sekolah, dll
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp931.863.394,00 dikapitalisasi sebagai aset Peralatan Mesin yang terdiri dari Rp42.284.000,00 berasal dari Belanja Barang Jasa BOS SD dan Rp889.579.394,00 berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp181.704.910,00 tidak memenuhi kriteria aset tetap yang berasal dari belanja modal BOS

b. Hibah masuk Rp20.382.500,00 adalah hibah buku yang diterima oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan rincian:

- Hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia senilai Rp19.042.500,00
- Hibah dari masyarakat umum senilai Rp1.340.000,00

2) Tidak terdapat pengurangan pada saldo Aset Tetap Lainnya selama tahun 2021.

Daftar saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.69 Daftar Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.100.812.922,40	33.699.172.312,40
2	Dinas Kesehatan	15.575.000,00	15.575.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	206.756.365,00	206.756.365,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.055.862.700,00	2.055.862.700,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	226.187.500,00	226.187.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.415.000,00	8.415.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.124.100,00	12.124.100,00
8	Dinas Sosial	750.000,00	750.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.212.000,00	3.212.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.250.000,00	1.250.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	365.000,00	365.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.586.871.500,00	1.586.871.500,00
13	Dinas Perhubungan	139.700.000,00	139.700.000,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.482.080,00	11.482.080,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.000.000,00	14.000.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.440.557.423,00	2.405.059.766,00
17	Dinas Perikanan	24.534.800,00	24.534.800,00
18	Dinas Pariwisata	221.745.000,00	221.745.000,00
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	68.922.650,00	68.922.650,00
20	Sekretariat Daerah	1.099.551.000,00	1.099.551.000,00
21	Sekretariat DPRD	321.414.775,00	321.414.775,00
22	Inspektorat Kabupaten	14.945.395,00	14.945.395,00
23	Kecamatan Arut selatan	66.245.000,00	66.245.000,00
24	Kecamatan Arut Utara	32.624.850,00	-
25	Kecamatan Kumai	52.910.000,00	-
26	Kecamatan Kotawaringin Lama	20.680.000,00	20.680.000,00
27	Kecamatan Pangkalan Lada	1.680.000,00	1.680.000,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.543.000,00	1.253.000,00
29	Badan Pendapatan Daerah	5.772.000,00	5.772.000,00
30	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10.383.500,00	10.383.500,00
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya		43.770.873.560,40	42.243.910.443,40

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	136.022.753.529,36	113.172.344.563,91

Terdapat saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dikarenakan Bangunan dan/atau Gedung masih dalam proses pembangunan dan belum siap untuk digunakan. Jika dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020, ada penambahan senilai Rp22.850.408.965,45 sehingga saldo per 31 Desember 2021 menjadi Rp136.022.753.529,36.

Di bawah ini adalah rincian penambahan/pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2021:

Tabel 5.70 Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai
Saldo Awal Kontruksi Dalam Pengerjaan		113.172.344.563,91
1	Penambahan:	35.404.400.330,92
	Pengadaan Belanja Modal Tahun 2021	35.401.850.330,92
	Reklasifikasi masuk	2.550.000,00
2	Pengurangan:	12.553.991.365,47
	Reklasifikasi keluar	12.553.991.365,47
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan		136.022.753.529,36



- 1) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2021 disebabkan oleh:
 - a. Pengadaan Belanja Modal Tahun 2021 Rp35.401.850.330,92 pada:
 - Dinas Kesehatan Rp199.202.500,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp28.514.848.026,92 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp24.529.939.998,92 dan berasal dari Belanja Modal Jalan, Irigasi Jaringan Rp3.984.908.028,00
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp373.384.000,00 berasal dari Belanja Modal Jalan, Irigasi Jaringan
 - Dinas Sosial Rp10.373.000,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Dinas Perhubungan Rp4.851.000,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp209.437.000,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Sekretariat Daerah Rp6.080.327.804,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Sekretariat DPRD Rp9.427.000,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - b. Reklasifikasi Masuk Rp2.550.000,00 pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp2.550.000,00 berasal dari Gedung dan Bangunan Tahun 2020 berupa Perencanaan Pembangunan WC dan Sanitary SDN 1 Pangkalan Dewa
- 2) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2021 total senilai Rp12.553.991.365,47 disebabkan oleh Reklasifikasi Keluar pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan Rp597.592.440,00 dikapitalisasi ke aset Gedung dan Bangunan
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp616.101.000,00 dikapitalisasi ke aset Gedung dan Bangunan
 - Dinas Perhubungan Rp197.615.000,00 dikapitalisasi ke aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Sekretariat Daerah Rp11.142.682.925,47 dikapitalisasi ke aset Gedung dan Bangunan Rp 10.618.309.625,47 dan ke Aset Tak Berwujud Rp524.373.300,00

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2021 senilai Rp136.022.753.529,36 disajikan pada **lampiran 5.2**. Sedangkan daftar saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing SKPD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.71 Daftar Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	622.440.273,72	619.890.273,72
2	Dinas Kesehatan	2.041.623.266,00	1.845.122.206,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	384.300.000,00	979.191.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	119.581.912.508,97	91.067.064.482,05
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.137.666,67	2.137.666,67



No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	75.839.500,00	75.839.500,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	389.121.892,00	15.737.892,00
9	Dinas Sosial	10.373.000,00	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	616.101.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.815.893.558,00	1.815.893.558,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48.675.000,00	48.675.000,00
13	Dinas Perhubungan	70.706.500,00	263.470.500,00
14	Dinas Komunikasi, Informatik, Statistik dan Persandian	254.243.000,00	254.243.000,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	42.438.000,00	42.438.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.970.000,00	2.970.000,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	409.167.000,00	199.730.000,00
18	Dinas Pariwisata	10.612.000,00	10.612.000,00
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	164.271.560,00	164.271.560,00
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.427.000,00	9.427.000,00
21	Sekretariat Daerah	9.239.148.804,00	14.301.503.925,47
22	Sekretariat DPRD	9.427.000,00	-
23	Kecamatan Arut Selatan	835.926.000,00	835.926.000,00
24	Kecamatan Arut Utara	2.100.000,00	2.100.000,00
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan		136.022.753.529,36	113.172.344.563,91

7. Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	(2.882.550.861.308,94)	(2.592.903.399.665,60)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 senilai (Rp2.882.550.861.308,94) merupakan hasil dari koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya dan penyusutan tahun 2021. Rincian Akumulasi Penyusutan berdasarkan klasifikasi Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.72 Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap

No.	Jenis Aset	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Peralatan dan Mesin	(473.163.499.764,04)	(411.961.904.169,68)
2	Gedung dan Bangunan	(200.690.606.450,53)	(175.604.443.084,73)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.208.696.755.094,37)	(2.005.337.052.411,19)
Jumlah		(2.882.550.861.308,94)	(2.592.903.399.665,60)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2021 tidak sama apabila dibandingkan dengan hasil uji dari penjumlahan beban penyusutan tahun 2021 ditambah akumulasi penyusutan Aset Tetap tahun 2020 *audited*. Terdapat selisih perhitungan sebesar Rp8.535.712.048,74 yang disebabkan adanya koreksi:



- 1) Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap Hibah senilai Rp17.536.156.637,01 yang diterima di tahun 2021, namun tahun perolehan Aset Tetap Hibah tersebut sebelum tahun 2021
- 2) Akumulasi penyusutan atas pengalihan status masuk Aset Tetap senilai Rp64.856.591.129,43
- 3) Akumulasi penyusutan atas pengalihan status keluar Aset Tetap senilai (Rp64.856.591.129,43)
- 4) Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang dilelang dan pemusnahan senilai (Rp3.326.268.860,97)
- 5) Akumulasi penyusutan atas reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-lain senilai (Rp7.528.866.852,12)
- 6) Akumulasi penyusutan atas Penilaian Aset Tetap senilai Rp831.000.000,00
- 7) Akumulasi penyusutan atas Reklasifikasi dari Aset lain-lain ke Aset Tetap senilai Rp1.145.020.976,12
- 8) Akumulasi penyusutan atas Nilai Perolehan Hasil Penelusuran Dokumen/Koreksi Kurang Catat senilai Rp119.839.470,30
- 9) Akumulasi penyusutan atas Aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain/pinjam pakai senilai (Rp305.473.906,74)
- 10) Akumulasi penyusutan atas kesalahan memilih Kategori Masa Manfaat senilai Rp9.753.450,53
- 11) Akumulasi penyusutan atas kesalahan klasifikasi pada KIB, atribusi senilai Rp391.722.922,17 reklasifikasi senilai (Rp337.211.614,52) dan perubahan Nilai Perolehan senilai Rp39.826,96

Adapun daftar saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap masing-masing SKPD per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.73 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(112.095.574.457,78)	(92.612.725.415,28)
2	Dinas Kesehatan	(82.968.896.808,13)	(70.963.863.640,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(168.283.216.998,08)	(144.940.956.255,01)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.126.057.141.973,43)	(1.981.340.116.392,38)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(60.633.885.897,00)	(5.569.839.464,69)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(13.617.375.428,97)	(11.339.534.373,42)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.772.760.538,09)	(1.670.427.089,60)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(16.997.142.179,35)	(12.834.629.153,38)
9	Dinas Sosial	(2.079.438.404,68)	(1.868.537.056,10)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(6.802.057.217,42)	(6.094.544.575,62)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(3.621.007.118,80)	(3.005.498.445,83)
12	Dinas Ketahanan Pangan	(1.590.635.338,80)	(1.505.432.685,35)
13	Dinas Lingkungan Hidup	(28.189.403.196,80)	(24.729.914.921,19)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(3.457.050.282,21)	(3.003.554.170,65)
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(1.326.712.123,96)	(1.371.357.205,13)
16	Dinas Perhubungan	(29.836.684.693,97)	(15.331.291.275,51)



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(3.587.842.462,41)	(2.533.487.122,29)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(17.651.080.119,83)	(15.094.071.218,00)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.463.906.930,22)	(2.301.140.607,48)
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	(7.039.361.852,68)	(6.287.477.725,91)
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(3.063.526.106,33)	(2.683.802.969,05)
22	Dinas Perikanan	(30.130.221.954,58)	(28.687.975.231,94)
23	Dinas Pariwisata	(10.515.648.651,60)	(9.404.416.719,15)
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	(41.182.551.056,74)	(39.094.586.462,19)
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(10.465.674.296,90)	(9.380.546.218,73)
26	Sekretariat Daerah	(39.244.730.204,50)	(47.811.766.056,46)
27	Sekretariat DPRD	(10.264.934.023,71)	(9.411.189.968,40)
28	Kecamatan Arut Selatan	(7.644.990.151,41)	(6.464.540.207,56)
29	Kecamatan Arut Utara	(2.393.990.120,88)	(2.198.303.864,11)
30	Kecamatan Kumai	(3.577.279.878,26)	(2.906.915.805,36)
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	(3.833.035.098,19)	(3.086.502.717,80)
32	Kecamatan Pangkalan Lada	(1.968.959.138,98)	(1.800.870.970,51)
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	(2.322.827.057,88)	(2.129.526.193,23)
34	Inspektorat Kabupaten	(2.445.445.611,30)	(2.080.823.781,98)
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.767.392.513,56)	(4.459.317.929,37)
36	Badan Pendapatan Daerah	(4.410.049.100,90)	(4.065.499.710,74)
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(7.760.522.617,20)	(6.947.583.688,22)
38	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	(1.593.514.522,76)	(1.325.656.851,49)
39	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(4.894.395.180,65)	(4.565.175.526,49)
Jumlah		(2.882.550.861.308,94)	(2.592.903.399.665,60)

5.3.1.4 Aset Lainnya

31 Desember 2021
(Rp)

49.565.729.494,23

31 Desember 2020
(Rp)

59.158.746.187,56

Aset Lainnya adalah aset yang tidak diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang ataupun Aset Tetap. Aset Lainnya terdiri dari Tagihan penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi (TGR), Tagihan Lainnya, Aset Lainnya yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain. Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2021 senilai Rp49.565.729.494,23 dan per 31 Desember 2020 Rp59.158.746.187,56.

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari:

Tabel 5.74 Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Tagihan Lainnya	175.342.231,00	175.342.231,00
2	Aset yang Dibatasi Penggunaannya	25.654.132.368,80	32.154.484.809,80
3	Aset Tak Berwujud	51.356.828.667,00	49.212.867.367,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
4	Amortisasi	(42.402.028.557,40)	(37.637.624.341,00)
5	Aset Lain-lain (setelah Penyusutan)	14.781.454.784,83	15.253.676.120,76
6	Aset Lain-lain	28.483.271.291,00	21.715.281.878,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(13.701.816.506,17)	(6.461.605.757,24)
Jumlah		49.565.729.494,23	59.158.746.187,56

1) Tagihan Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
175.342.231,00	175.342.231,00

Tagihan Lainnya merupakan saldo tagihan piutang lainnya yang mempunyai masa tagih lebih dari 1 (satu) tahun. Tidak terdapat perubahan Saldo Tagihan Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp175.342.231,00.

Tabel 5.75 Rincian Tagihan Lainnya

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Piutang tahun 2008	873.923,00	873.923,00
	Piutang Pajak Reklame:		
	- GMHK Ega Megatron	86.720,00	86.720,00
	- CV. Surya Alam Makmur	324.000,00	324.000,00
	Piutang Pajak Golongan C:		
	- CV. Bina Putra	463.203,00	463.203,00
2	Piutang tahun 2009	3.159.750,00	3.159.750,00
	Piutang Pajak Hotel:		
	- Losmen Permata Hijau	354.000,00	354.000,00
	- Losmen Mentari	594.000,00	594.000,00
	- Losmen Selektia	150.000,00	150.000,00
	Piutang Pajak Reklame:		
	- CV. Bina Persada	96.750,00	96.750,00
	- CV. Griya Fortuna Buun	216.000,00	216.000,00
	- CV. Maju Jaya Borneo	108.000,00	108.000,00
	- Koperasi Rajawali Perkasa	108.000,00	108.000,00
	- CV. Putra Arut Persada	96.750,00	96.750,00
	- CV. Sawit Sumber Mas Sarana	290.250,00	290.250,00
	- Bengkel Sumber Baru	579.000,00	579.000,00
	- Jaya Makmur	92.250,00	92.250,00
	- Kios Berkat Anugrah	162.000,00	162.000,00
	- CV. Alba	108.000,00	108.000,00
	- CV. Mulya	96.750,00	96.750,00
	- UD. Sinti	108.000,00	108.000,00
3	Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan PT Korindo TA. 2002	59.148.018,00	59.148.018,00
4	Piutang Retribusi Pasar dan Tebusan Blok Pasar Indra Kencana	97.249.320,00	97.249.320,00



No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
5	Piutang Dana Bergulir Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar	9.800.000,00	9.800.000,00
6	Piutang Bunga Dana UPPKS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	5.111.220,00	5.111.220,00
Jumlah		175.342.231,00	175.342.231,00

2) Aset yang Dibatasi Penggunaannya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>25.654.132.368,80</u>	<u>32.154.484.809,80</u>

Aset yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas yang telah ada peruntukannya yaitu saldo kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah atau Kas Daerah. Saldo Akhir Kas di BUD/Kasda yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 senilai Rp25.654.132.368,80 sedangkan per 31 Desember 2020 Rp32.154.484.809,80 atau mengalami penurunan sebesar Rp6.500.352.441,00. Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang Dibatasi Penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.76 Rincian Aset yang Dibatasi Penggunaannya

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dana DBH-DR	14.509.124.135,00	19.002.151.290,00
2	DAK Fisik	557.378.568,80	1.160.776.487,80
3	BOP PAUD	621.272.450,00	534.276.000,00
4	BOKB	66.205.899,00	448.614.427,00
5	Dana BOK	5.004.347.573,00	6.047.459.853,00
6	Dana BOK Tambahan	-	824.772.715,00
7	Dana CHT	16.585.362,00	23.307.051,00
8	Penanaman Modal	94.084.835,00	-
9	Dana Sertifikasi Guru	3.565.485.476,00	3.001.276.480,00
10	Dana Tamsil Guru	545.250.000,00	15.513.000,00
11	Dana Tunjangan Khusus Guru	188.714.400,00	185.199.500,00
12	Dana Amiduk	323.223.714,00	149.353.132,00
13	Dana Kelurahan	-	598.364.848,00
14	BOP Kesetaraan	52.638.750,00	89.278.426,00
15	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	90.961.158,00	61.341.600,00
16	Dana Pelayanan Kepariwisata	12.800.000,00	12.800.000,00
17	Ketahanan Pangan	6.060.048,00	-
Jumlah		25.654.132.368,80	32.154.484.809,80

3) Aset Tak Berwujud

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>51.356.828.667,00</u>	<u>49.212.867.367,00</u>



Saldo Aset Tak Berwujud berasal dari pengadaan belanja modal dan belanja selain Aset Tak Berwujud yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020, terdapat penambahan senilai Rp2.143.961.300,00 sehingga saldo per 31 Desember 2021 menjadi Rp51.356.828.667,00. Rincian penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.77 Penambahan/Pengurangan Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
	Saldo awal Aset Tak Berwujud	49.212.867.367,00
1	Penambahan:	2.143.961.300,00
	Pengadaan Belanja Modal Selain Tak Berwujud Yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud	1.619.588.000,00
	Reklasifikasi masuk	524.373.300,00
2	Pengurangan:	-
	Saldo Akhir Aset Tak Berwujud	51.356.828.667,00

- 1) Penambahan Aset Tak Berwujud tahun 2021 total senilai Rp2.143.961.300,00 berasal dari:
 - a. pengadaan Belanja Modal selain Aset Tak Berwujud yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud senilai Rp1.619.588.000,00 pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan Rp49.115.000,00 dari Belanja Modal Peralatan Mesin berupa *Software* Aplikasi
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.406.193.000,00 dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (Ejakon) Rp74.888.000,00, Kajian Banjir Kanal Kota Pangkalan Bun Rp346.775.000,00, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan KLHS Kawasan Perkotaan Kecamatan Pangkalan Banteng Rp684.530.000,00 dan Review Desain Kawasan Kota Pangkalan Bun Rp300.000.000,00
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp15.700.000,00 dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa *Software* Aplikasi Sistem Operasi Komputer Server Center
 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp99.715.000,00 dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Hasil Kajian Arsitektur SPBE
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp18.865.000,00 dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Perangkat Lunak Sistem Informasi dan Konsultasi Pelaku Industri Kecil dan Menengah
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp30.000.000,00 dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa pengembangan *Website* Perizinan
 - b. Reklasifikasi masuk yang menambah Aset Tak Berwujud Rp524.373.300,00 yaitu pada Sekretariat Daerah dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa masterplan dan DED pembangunan Kantor Bupati.



2) Tidak terdapat pengurangan Aset Tak Berwujud selama tahun 2021.

Daftar saldo akhir Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada masing-masing SKPD dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.78 Daftar Saldo Aset Tak Berwujud pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	750.578.500,00	750.578.500,00
2	Dinas Kesehatan	14.723.500,00	14.723.500,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.514.858.000,00	1.465.743.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.041.562.285,00	23.635.369.285,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	147.950.000,00	147.950.000,00
6	Dinas Sosial	227.800.000,00	227.800.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.718.000,00	14.718.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	18.700.000,00	18.700.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	902.873.000,00	902.873.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	138.135.000,00	138.135.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.700.000,00	-
12	Dinas Perhubungan	8.266.582.040,00	8.266.582.040,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.303.383.000,00	1.203.668.000,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	628.683.000,00	609.818.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	312.013.242,00	282.013.242,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	199.485.000,00	199.485.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	94.345.000,00	94.345.000,00
18	Dinas Perikanan	466.950.000,00	466.950.000,00
19	Dinas Pariwisata	49.830.000,00	49.830.000,00
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	44.850.000,00	44.850.000,00
21	Sekretariat Daerah	1.254.884.300,00	730.511.000,00
22	Kecamatan Arut Selatan	63.725.200,00	63.725.200,00
23	Inspektorat Kabupaten	99.192.500,00	99.192.500,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.897.899.800,00	6.897.899.800,00
25	Badan Pendapatan Daerah	767.462.000,00	767.462.000,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.297.994.200,00	1.297.994.200,00
27	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	517.025.500,00	517.025.500,00
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	304.925.600,00	304.925.600,00
Saldo Akhir Aset Tak Berwujud		51.356.828.667,00	49.212.867.367,00

4) Amortisasi

31 Desember 2021
(Rp)

(42.402.028.557,40)

31 Desember 2020
(Rp)

(37.637.624.341,00)



Amortisasi adalah perhitungan akumulasi penyusutan untuk Aset Tak Berwujud dimana per 31 Desember 2021 saldonya senilai (Rp42.402.028.557,40) sedangkan per 31 Desember 2020 senilai (Rp37.637.624.341,00). Adapun daftar saldo akhir Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada masing-masing SKPD tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.79 Daftar Saldo Amortisasi pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(383.005.300,00)	(280.407.200,00)
2	Dinas Kesehatan	(14.723.500,00)	(14.723.500,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(1.047.818.600,00)	(818.080.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(20.018.551.485,00)	(17.680.328.685,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(29.590.000,00)	-
6	Dinas Sosial	(57.540.000,00)	(11.980.000,00)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(14.718.000,00)	(14.718.000,00)
8	Dinas Ketahanan Pangan	(18.700.000,00)	(18.700.000,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	(843.453.000,00)	(704.825.400,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(82.807.000,00)	(64.190.000,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-
12	Dinas Perhubungan	(7.548.818.664,00)	(6.853.411.776,00)
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(656.419.400,00)	(415.685.800,00)
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(551.034.000,00)	(536.338.000,00)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(166.258.648,40)	(123.760.000,00)
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	(39.897.000,00)	(39.897.000,00)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(85.039.000,00)	(78.787.000,00)
18	Dinas Perikanan	(460.152.000,00)	(444.554.000,00)
19	Dinas Pariwisata	(39.864.000,00)	(29.898.000,00)
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(44.850.000,00)	(44.850.000,00)
21	Sekretariat Daerah	(961.908.980,00)	(577.253.000,00)
22	Kecamatan Arut Selatan	(51.905.040,00)	(48.950.000,00)
23	Inspektorat Kabupaten	(55.522.500,00)	(35.684.000,00)
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(6.478.451.440,00)	(6.129.931.080,00)
25	Badan Pendapatan Daerah	(661.070.000,00)	(600.708.000,00)
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(1.267.979.900,00)	(1.248.012.800,00)
27	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	(517.025.500,00)	(517.025.500,00)
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(304.925.600,00)	(304.925.600,00)
Saldo Akhir Aset Tak Berwujud		(42.402.028.557,40)	(37.637.624.341,00)

5) Aset Lain-lain

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
28.483.271.291,00	21.715.281.878,00



Aset Lain-lain milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari Aset dalam kondisi Rusak Berat yang diusulkan untuk dihapuskan, aset hasil penilaian, aset dalam proses Hibah, aset dalam proses Lelang, dan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020, terdapat penambahan senilai Rp6.767.989.413,00 sehingga saldo per 31 Desember 2021 menjadi Rp28.483.271.291,00. Penambahan/pengurangan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2021 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.80 Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Lain-lain

No.	Uraian	Nilai
	Saldo awal Aset Lain-lain (RB)	21.715.281.878,00
1	Penambahan:	13.351.109.311,00
	Reklasifikasi masuk karena Rusak Berat	7.194.432.123,00
	Reklasifikasi masuk karena Lelang 2021	4.865.712.788,00
	Reklasifikasi masuk karena pemanfaatan oleh pihak lain	1.290.964.400,00
2	Pengurangan:	6.583.119.898,00
	Penghapusan karena Rusak Berat	41.017.110,00
	Penghapusan karena lelang 2021	5.091.712.788,00
	Reklasifikasi ke Aset Tetap	1.450.390.000,00
	Saldo akhir Aset Lain-Lain	28.483.271.291,00

- 1) Penambahan saldo Aset Lain-lain total senilai Rp13.351.109.311,00 disebabkan antara lain oleh:
 - a. Reklasifikasi masuk karena Rusak Berat Rp7.194.432.123,00 pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan Rp5.169.209.000,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp22.200.000,00
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp34.329.000,00
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp163.335.400,00
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp39.295.500,00
 - Dinas Lingkungan Hidup Rp338.000,00
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp142.203.000,00
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp174.974.850,00
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp28.120.000,00
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp22.710.000,00
 - Dinas Perikanan Rp332.901.673,00
 - Dinas Pariwisata Rp197.500.000,00
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp21.012.000,00
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp9.118.000,00
 - Sekretariat Daerah Rp105.658.000,00
 - Sekretariat DPRD Rp287.925.000,00
 - Kecamatan Arut Selatan Rp28.560.000,00
 - Kecamatan Arut Utara Rp52.495.000,00
 - Kecamatan Pangkalan Lada Rp1.600.000,00
 - Kecamatan Pangkalan Banteng Rp86.991.700,00



- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp273.956.000,00
 - b. Reklasifikasi masuk karena Lelang 2021 Rp4.865.712.788,00 pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp493.729.957,00
 - Dinas Kesehatan Rp1.324.503.800,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp2.119.536.640,00
 - Dinas Ketahanan Pangan Rp7.500.000,00
 - Dinas Perhubungan Rp100.829.791,00
 - Dinas Perikanan Rp79.600.000,00
 - Sekretariat Daerah Rp401.200.000,00
 - Kecamatan Arut Utara Rp49.200.000,00
 - Kecamatan Pangkalan Banteng Rp92.542.000,00
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp21.600.000,00
 - Badan Pendapatan Daerah Rp11.000.000,00
 - Pengelola Barang pada BPKAD Rp164.470.600,00
 - c. Reklasifikasi masuk karena pemanfaatan oleh pihak lain Rp1.290.964.400,00 pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan Rp49.000.000,00 berupa ambulance (Merk Zebra) yang di Pinjam Pakai untuk Lembaga Permayarakatan Kelas II B
 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp220.800.000,00 berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Pangeran Diponegoro yang dimanfaatkan oleh pihak lain (Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia) RAPI Kabupaten Kotawaringin Barat
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp403.621.200,00 berupa tanah Rp59.000.000,00 dan Gedung Sekretariat KONI Rp344.621.200,00
 - Sekretariat Daerah Rp267.644.200,00 berupa 2 buah *Speed Boat* dan Rumah Dinas Jalan Diponegoro yang dipinjampakai oleh TNI Angkatan Laut dan Presidium
 - Pengelola Barang pada BPKAD Rp349.899.000,00 berupa 1 buah sepeda motor Honda Megapro dan 1 buah Mobil Jeep
- 2) Pengurangan saldo Aset Lain-lain total senilai Rp6.583.119.898,00 disebabkan oleh:
- a. Penghapusan aset rusak berat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp41.017.110,00 berdasarkan SK Nomor 032/192/IV.III/SK/BPKAD/2021 Tanggal 21 Desember 2021
 - b. Penghapusan karena lelang 2021 Rp5.091.712.788,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor 032/152-169/IV.III/SK/BPKAD/2021 bulan November 2021
 - c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Rp1.450.390.000,00 karena aset yang pada tahun sebelumnya dipinjam-pakai oleh pihak lain, di tahun 2021 telah dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:
 - Dinas Kesehatan Rp139.000.000,00 berupa gudang pada RSUD Sultan Imanuddin
 - Sekretariat daerah Rp855.550.000,00 berupa 2 buah mini bus dan mobil jeep
 - Pengelola Barang pada BPKAD Rp455.840.000,00 berupa 2 buah Kijang Innova



Daftar saldo akhir Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.81 Daftar Saldo Aset Lain-lain pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.867.013.819,00	8.867.013.819,00
2	Dinas Kesehatan	358.075.042,00	343.075.042,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	5.963.089.000,00	932.880.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.200.000,00	-
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	34.329.000,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	163.335.400,00	105.000.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.700.000,00	3.700.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.737.500,00	61.737.500,00
9	Dinas Sosial	101.000,00	101.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	67.482.890,00	108.500.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.295.500,00	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	338.000,00	-
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	142.203.000,00	-
16	Dinas Perhubungan	4,00	4,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	220.800.000,00	-
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.125.000,00	2.125.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	174.974.850,00	-
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	513.841.200,00	82.100.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.710.000,00	-
22	Dinas Perikanan	332.901.673,00	-
23	Dinas Pariwisata	254.100.000,00	56.600.000,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	449.662.000,00	441.150.000,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	276.568.000,00	268.950.000,00
26	Sekretariat Daerah	8.274.252.704,00	8.829.500.504,00
27	Sekretariat DPRD	287.925.000,00	-
28	Kecamatan Arut Selatan	28.560.000,00	-
29	Kecamatan Arut Utara	52.495.000,00	-
30	Kecamatan Kumai	-	-
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	-	-
32	Kecamatan Pangkalan Lada	5.600.000,00	4.000.000,00
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	99.791.700,00	12.800.000,00
34	Inspektorat Kabupaten	3.859.000,00	3.859.000,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	273.956.000,00	-



No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
36	Badan Pendapatan Daerah	285.000.000,00	285.000.000,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
38	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.201.249.009,00	1.307.190.009,00
39	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	-
Saldo Akhir Aset Lain-Lain		28.483.271.291,00	21.715.281.878,00

6) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	(13.701.816.506,17)	(6.461.605.757,24)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 senilai (Rp13.701.816.506,17) sedangkan per 31 Desember 2020 (Rp6.461.605.757,24) yang merupakan akumulasi penyusutan aset rusak berat, aset yang dimanfaatkan pihak lain, dan aset dalam proses lelang. Tabel 5.81 menyajikan daftar SKPD yang memiliki saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Tabel 5.82 Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.374.780.900,00)	(3.374.780.900,00)
2	Dinas Kesehatan	(49.000.000,00)	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(5.169.209.000,00)	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(22.200.000,00)	-
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(34.329.000,00)	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(160.264.654,01)	(105.000.000,00)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(18.333.918,32)	(29.817.900,49)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(39.295.500,00)	-
9	Dinas Lingkungan Hidup	(338.000,00)	-
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(142.203.000,00)	-
11	Dinas Perhubungan	(4,00)	(4,00)
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(22.951.047,21)	-
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(151.626.989,62)	-
14	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	(86.942.478,34)	(19.704.539,51)
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(22.710.000,00)	-
16	Dinas Perikanan	(298.133.739,69)	-
17	Dinas Pariwisata	(197.500.000,00)	-
18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	(92.230.459,15)	(83.718.459,15)
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(218.231.908,15)	(210.613.908,15)
20	Sekretariat Daerah	(1.861.672.086,77)	(1.970.390.224,68)
21	Sekretariat DPRD	(287.925.000,00)	-
22	Kecamatan Arut Selatan	(28.560.000,00)	-



No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
23	Kecamatan Arut Utara	(51.559.134,15)	-
24	Kecamatan Pangkalan Lada	(1.600.000,00)	-
25	Kecamatan Pangkalan Banteng	(86.900.666,42)	-
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(273.956.000,00)	-
27	Badan Pendapatan Daerah	(40.964.020,34)	(40.964.020,34)
28	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	(968.399.000,00)	(626.615.800,92)
Jumlah		(13.701.816.506,17)	(6.461.605.757,24)

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
116.879.838.917,43	147.903.816.749,95

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki saldo Kewajiban yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek yaitu Kewajiban Lancar (kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan). Kewajiban ini timbul akibat adanya kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, juga kepada penyedia jasa yang telah menyediakan jasa akan tetapi pembayarannya di kemudian hari, sehingga mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan aliran kas keluar. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp116.879.838.917,43 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp147.903.816.749,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83 Rincian Kewajiban

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Pendapatan Diterima Dimuka	115.639.302,19	53.626.410,96
2	Utang Belanja	83.764.199.615,24	111.850.190.338,99
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	33.000.000.000,00	36.000.000.000,00
Jumlah		116.879.838.917,43	147.903.816.749,95

1) Pendapatan Diterima Di Muka

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
115.639.302,19	53.626.410,96

Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp115.639.302,19 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp53.626.410,96 yang merupakan pendapatan atas Sewa Barang Milik Daerah pada RSUD Sultan Imanuddin serta Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Utang Belanja

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
83.764.199.615,24	111.850.190.338,99



Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp83.764.199.615,24 terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal serta Utang Belanja Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, sedangkan Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp111.850.190.338,99. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.84 Rincian Utang Belanja

No.	Jenis Utang	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Utang Belanja Pegawai	8.779.962.362,00	23.807.186.770,31
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	69.101.476.293,19	52.828.645.568,68
3	Utang Belanja Modal	507.960,05	30.000.000.000,00
4	Utang Belanja Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.882.253.000,00	5.214.358.000,00
Jumlah		83.764.199.615,24	111.850.190.338,99

Berikut ini adalah daftar saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada masing-masing SKPD:

Tabel 5.85 Daftar Utang Belanja pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.881.012.977,00	8.432.194.589,00
2	Dinas Kesehatan	1.058.853.041,00	6.946.025.607,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	69.073.631.299,19	48.432.116.319,68
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	258.279.704,05	30.526.692.762,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	108.166.031,00	266.955.373,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	273.829.456,00	611.768.456,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	127.377.325,00	295.618.997,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	137.537.003,00	236.573.152,00
9	Dinas Sosial	147.966.078,00	309.159.742,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	134.859.097,00	350.470.896,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	159.204.261,00	340.220.370,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	98.645.607,00	293.821.128,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	144.650.983,00	360.667.315,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	139.124.143,00	344.929.063,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	138.072.764,00	317.592.240,00
16	Dinas Perhubungan	152.020.772,00	324.023.266,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	156.866.958,00	346.594.649,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	181.857.805,00	429.991.708,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	140.417.913,00	319.212.746,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	128.673.383,00	291.048.568,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	131.690.941,00	373.004.219,00
22	Dinas Perikanan	127.279.853,00	277.240.649,00
23	Dinas Pariwisata	128.782.208,00	331.730.580,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	468.733.192,00	888.249.695,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	247.819.392,00	384.093.729,00
26	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	7.807.506,00
27	Sekretariat Daerah	419.344.388,00	1.018.599.802,00
28	Sekretariat DPRD	77.939.967,00	193.771.383,00
29	Inspektorat Kabupaten	196.165.599,00	323.388.195,00
30	Kecamatan Arut Selatan	274.846.190,00	568.138.959,00
31	Kecamatan Arut Utara	81.761.885,00	206.447.205,00
32	Kecamatan Kumai	153.623.970,00	326.566.398,00
33	Kecamatan Kotawaringin Lama	111.023.849,00	238.941.744,00
34	Kecamatan Pangkalan Lada	69.265.798,00	127.642.433,00
35	Kecamatan Pangkalan Banteng	75.686.195,00	188.409.996,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	158.865.425,00	401.160.944,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	145.622.204,00	374.661.602,00
38	Badan Pendapatan Daerah	239.855.258,00	347.228.302,31
39	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	132.593.701,00	283.072.051,00
40	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	5.882.253.000,00	5.214.358.000,00
Saldo Akhir Utang Belanja		83.764.199.615,24	111.850.190.338,99

3) Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
33.000.000.000,00	36.000.000.000,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2021 merupakan pinjaman jangka pendek dari Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp33.000.000.000,00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp36.000.000.000,00.

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3.271.087.498.235,88	2.938.058.435.002,57

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu selisih antara Aset Rp3.387.967.337.153,31 dan Kewajiban Rp116.879.838.917,43. Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.271.087.498.235,88 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.938.058.435.002,57 atau mengalami kenaikan sebesar Rp333.029.063.233,31.



5.4 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pos-pos Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan – LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>1.552.401.516.068,48</u>	<u>1.535.448.527.918,09</u>

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.552.401.516.068,48 dan TA. 2020 sebesar Rp1.535.448.527.918,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.86 Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	331.547.556.916,60	297.799.584.382,39
2	Pendapatan Transfer-LO	1.120.942.150.470,96	1.137.966.033.146,36
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	99.911.808.680,92	99.682.910.389,34
Jumlah		1.552.401.516.068,48	1.535.448.527.918,09

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>331.547.556.916,60</u>	<u>297.799.584.382,39</u>

Rekening ini menggambarkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk TA. 2021 dan TA. 2020. Pendapatan Asli Daerah untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp331.547.556.916,60.

1) Pendapatan Pajak Daerah-LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>74.740.551.967,77</u>	<u>66.328.550.464,37</u>

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendapatan Pajak Daerah pada



Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, dimana pengakuannya terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2021, sehingga nilai pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah senilai ketetapan Pajak Daerah dan tidak termasuk pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan di tahun 2021. Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk TA. 2021 dan TA. 2020, masing-masing sebesar Rp74.740.551.967,77 dan Rp66.328.550.464,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.87 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
1	Pajak Hotel	1.015.781.077,60	837.257.037,61
2	Pajak Restoran	2.464.788.248,00	2.408.553.940,80
3	Pajak Hiburan	300.351.508,20	228.170.887,45
4	Pajak Reklame	1.118.263.730,00	843.465.061,89
5	Pajak Penerangan Jalan	23.254.544.777,97	20.612.273.167,12
6	Pajak Parkir	181.123.200,00	174.687.000,00
7	Pajak Air Tanah	36.457.773,00	34.400.043,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	1.120.480.670,00	1.270.171.300,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.736.067.684,00	3.756.069.554,87
10	Pajak Bumi dan Bangunan	15.277.785.278,00	14.310.581.052,63
11	BPHTB	27.234.908.021,00	21.852.921.419,00
Jumlah		74.740.551.967,77	66.328.550.464,37

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
13.928.596.779,80	13.589.810.282,00

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemungutan Retribusi Daerah didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah-LO sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, masing-masing sebesar Rp13.928.596.779,80 dan Rp13.589.810.282,00. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.88 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
1	Retribusi Jasa Umum	7.005.176.236,00	7.658.415.360,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.321.467.690,00	3.694.176.633,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	92.945.495,00	102.349.066,00
	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	2.029.820.000,00	957.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	1.502.516.050,00	1.769.355.175,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	703.355.000,00	836.809.000,00
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	302.167.201,00	249.734.286,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	52.904.800,00	48.991.200,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
2	Retribusi Jasa Usaha	5.229.070.502,40	3.836.714.550,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.180.245.802,40	1.811.391.950,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	316.293.600,00	717.080.400,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	66.050.000,00	100.050.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	694.646.300,00	324.253.200,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	500.011.000,00	425.751.000,00
	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	471.823.800,00	458.188.000,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu	1.694.350.041,40	2.094.680.372,00
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	1.371.652.041,40	1.734.650.372,00
	Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.100.000,00	300.000,00
	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	-	1.500.000,00
	Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	320.598.000,00	358.230.000,00
	Jumlah	13.928.596.779,80	13.589.810.282,00

Retribusi Daerah-LO Kabupaten Kotawaringin Barat dipungut dan dikelola oleh 23 SKPD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada SKPD untuk TA. 2021 dan TA. 2020 tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.89 Daftar Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
1	Dinas Kependidikan dan Kebudayaan	210.985.000,00	-
2	Dinas Kesehatan	2.522.142.690,00	3.911.951.633,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.450.191.802,40	1.262.808.450,00
4	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	320.598.000,00	358.230.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	160.089.495,00	184.007.566,00
6	Dinas Perhubungan	3.746.214.900,00	2.835.442.600,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	302.167.201,00	249.734.286,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.555.420.850,00	1.818.346.375,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.289.115.029,00	1.687.353.009,00
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	17.500.000,00	34.100.000,00
11	Dinas Perikanan	463.169.800,00	422.199.000,00
12	Dinas Pariwisata	482.511.000,00	391.651.000,00
13	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	35.000.000,00	45.000.000,00
14	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	135.979.000,00	186.839.000,00
15	Sekretariat Daerah	127.100.000,00	100.300.000,00
16	Kecamatan Arut Selatan	52.166.625,00	17.999.730,00
17	Kecamatan Arut Utara	1.430.562,40	1.029.620,00
18	Kecamatan Kumai	13.385.120,00	1.709.400,00
19	Kecamatan Kotawaringin Lama	6.822.850,00	2.809.523,00
20	Kecamatan Pangakalan Lada	2.061.730,00	14.312.670,00



No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
21	Kecamatan Pangkalan Banteng	24.645.125,00	32.886.420,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.000.000,00	25.400.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3.900.000,00	5.700.000,00
Jumlah		13.928.596.779,80	13.589.810.282,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
11.919.901.185,00	9.327.140.787,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp11.919.901.185,00. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.90 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Bank Pembangunan Kalteng	11.919.901.185,00	9.327.140.787,00
2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PT Jamkrida	-	-
Jumlah		11.919.901.185,00	9.327.140.787,00

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
230.958.506.984,03	208.554.082.849,02

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp230.958.506.984,03 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp208.554.082.849,02. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.91 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
1	Jasa Giro	2.103.656.135,39	2.378.998.594,01
2	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah (Deposito)	928.673.467,00	2.617.547.707,00
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	285.997.771,12	330.892.616,23
4	Pendapatan Denda Pajak	179.377.633,36	443.587.263,00
5	Pendapatan Denda Retribusi Umum	3.015.696,00	12.564.135,96
6	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha	1.195.081,00	-
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	302.936.113,00	-
8	Pendapatan Pengembalian	1.736.785.898,06	1.344.068.749,53
9	Pendapatan Lainnya	102.136.760,77	59.418.237,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
10	Pendapatan BLUD	224.981.891.134,00	193.474.930.857,25
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	-	6.993.686.500,00
12	PAD Lainnya	18.458.000,00	592.306.100,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	222.601.000,00	-
14	Hasil Sewa BMD	91.782.294,33	306.082.089,04
Jumlah		230.958.506.984,03	208.554.082.849,02

Lain-lain PAD yang Sah-LO masing-masing SKPD untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp230.958.956.984,03 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp208.554.082.849,02 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.92 Daftar Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
1	Dinas Kesehatan	2.944.500,00	6.994.110.089,04
2	RSUD Sultan Imanuddin	225.063.593.634,00	193.679.439.357,25
3	Satpol PP dan Damkar	222.601.000,00	-
4	Dinas Ketahanan Pangan	18.458.000,00	47.995.500,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	457.000,00	337.488,00
6	Dinas Perhubungan	92.000,00	115.800.000,00
7	Kominfo	2,00	-
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.177.708,00	1.398.468,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.195.714,00	10.141.587,96
10	Dinas Perikanan	-	544.310.600,00
11	Sekretaris Daerah	7.439.794,33	-
12	Kecamatan Arut Selatan	1.876.248,00	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.459.293.750,34	6.716.940.115,77
14	Badan Pendapatan Daerah	179.377.633,36	443.609.643,00
Jumlah		230.958.506.984,03	208.554.082.849,02

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>1.120.942.150.470,96</u>	<u>1.137.966.033.146,36</u>

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat Lainnya dan Provinsi yang kemudian dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendapatan Transfer-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.120.942.150.470,96 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.137.966.033.146,36 dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel 5.93.



Tabel 5.93 Rincian Pendapatan Transfer-LO

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.038.859.842.934,00	1.040.685.423.043,00
	Dana Perimbangan-LO	1.038.859.842.934,00	958.924.263.043,00
	Dana Penyesuaian (DID dan DID Tambahan)-LO	-	81.761.160.000,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	82.082.307.536,96	97.280.610.103,36
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	82.082.307.536,96	96.880.610.103,36
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya-LO	-	400.000.000,00
Jumlah		1.120.942.150.470,96	1.137.966.033.146,36

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>1.038.859.842.934,00</u>	<u>1.040.685.423.043,00</u>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.038.859.842.934,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.122.099.230.643,00.

a. Dana Perimbangan-LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>1.038.859.842.934,00</u>	<u>958.924.263.043,00</u>

Dana Perimbangan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.038.859.842.934,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp958.924.263.043,00 dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.94 Rincian Dana Perimbangan-LO

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO	135.229.818.254,00	64.383.434.319,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-LO	593.260.006.000,00	602.446.484.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	230.385.941.118,00	199.275.635.447,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	79.984.077.562,00	92.818.709.277,00
Jumlah		1.038.859.842.934,00	958.924.263.043,00

▪ Dana Bagi Hasil-LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>135.229.818.254,00</u>	<u>64.383.434.319,00</u>

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp135.229.818.254,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp64.383.434.319,00.



▪ **Dana Alokasi Umum-LO**

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
593.260.006.000,00	602.446.484.000,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp593.260.006.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp602.446.484.000,00.

▪ **Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO**

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
230.385.941.118,00	199.275.635.447,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp230.385.941.118,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp199.275.635.447,00. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.95 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
1	DAK Reguler Bidang Pendidikan	-	21.666.901.544,00
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD	684.800.900,00	-
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	20.526.950.462,00	-
4	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	1.774.141.481,00	-
5	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler Perpustakaan Daerah	295.756.000,00	-
6	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	-	66.062.397.803,00
7	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar	20.484.814.405,00	-
8	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kefarmasian	2.646.558.396,00	-
9	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Penugasan Penurunan AKI dan AKB	96.475.846.861,00	-
10	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler KB	1.252.525.000,00	-
11	DAK Penugasan Bidang Pertanian	-	597.274.500,00
12	DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah Penugasan Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	264.000.000,00	215.248.000,00
13	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Penugasan	1.195.068.108,00	-
14	DAK Reguler Bidang Air Minum	-	6.794.599.000,00
15	DAK Reguler Bidang Sanitasi	-	3.315.270.000,00
16	DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	-	2.730.323.000,00
17	DAK Fisik Bidang Jalan Reguler Jalan	37.142.055.500,00	30.656.222.400,00
18	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	-	57.492.720.901,00
19	DAK Fisik Bidang Jalan Penugasan Jalan	20.041.329.000,00	-
20	DAK Fisik Bidang Air Minum Penugasan	4.745.508.300,00	2.844.298.379,00
21	DAK Fisik Bidang Sanitasi Penugasan	2.343.600.000,00	3.043.704.000,00
22	DAK Fisik Bidang Irigasi Penugasan	6.967.122.000,00	-



No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
23	DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penugasan Lingkungan Hidup	7.023.460.000,00	1.472.350.000,00
24	DAK Fisik Bidang Transportasi Laut Penugasan	6.522.404.705,00	-
25	DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	-	1.411.643.720,00
26	DAK Penugasan Bidang Pariwisata	-	972.682.200,00
Jumlah		230.385.941.118,00	199.275.635.447,00

▪ **Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO**

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>79.984.077.562,00</u>	<u>92.818.709.277,00</u>

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp79.984.077.562,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp92.818.709.277,00. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.96 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

No.		Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	56.578.529.000,00	50.712.170.000,00
2	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	1.046.487.000,00	926.863.000,00
3	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	890.387.000,00	434.725.000,00
4	DAK Non Fisik Bantuan Oprasional Penyelenggaraan PAUD	4.957.524.000,00	5.448.663.341,00
5	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	1.162.221.574,00	867.950.000,00
6	DAK Non Fisik BOPKKB BOK	12.019.570.147,00	31.750.888.668,00
7	DAK Non Fisik BOPKKB Pengawasan Obat dan Makanan	-	-
8	DAK Non Fisik BOPKKB Jaminan Persalinan	-	-
9	DAK Non Fisik BOPKKB BOKB	1.137.719.573,00	1.310.504.657,00
10	DAK Non Fisik Dana PK2UKM	328.962.400,00	384.101.300,00
11	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	906.003.868,00	710.615.159,00
12	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan	621.500.000,00	-
13	DAK Non Fisik Dana Fasilitas Penanaman Modal	335.173.000,00	-
14	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata	-	272.228.152,00
Jumlah		79.984.077.562,00	92.818.709.277,00

b. Dana Penyesuaian (DID dan DID Tambahan)-LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>81.761.160.000,00</u>

Dana Penyesuaian (DID dan DID Tambahan)-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp81.761.160.000,00.



2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
82.082.307.536,96	97.280.610.103,36

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp82.082.307.536,96 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp97.280.610.103,36 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
82.082.307.536,96	96.880.610.103,36

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp82.082.307.536,96 dan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp96.880.610.103,36.

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya-LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
0,00	400.000.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp400.000.000,00.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
99.911.808.680,92	99.682.910.389,34

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp99.911.808.680,92 dan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp99.682.910.389,34 yang terdiri dari:

Tabel 5.97 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
1	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO	99.911.808.680,92	99.227.910.389,34
2	Pendapatan Lainnya-LO	-	455.000.000,00
Jumlah		99.911.808.680,92	99.682.910.389,34

Berdasarkan tabel di atas, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO selama tahun 2021 sebesar Rp99.911.808.680,92 adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Hibah



barang berupa Aset Tetap yang diakui sebagai Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO adalah sebesar nilai bukunya sedangkan Hibah berupa persediaan dan uang yang diakui sebagai Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO adalah sebesar nilai perolehannya.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO berupa Aset Tetap, Persediaan dan Uang yang diterima oleh masing-masing SKPD untuk TA. 2021 dan TA. 2020.

Tabel 5.98 Rincian Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		38.099.339.397,06	35.161.976.203,59
1	BOS	31.863.275.831,06	35.161.976.203,59
2	JKN	6.236.063.566,00	-
Persediaan		16.698.417.182,35	13.746.213.053,86
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.000.000,00	1.200.000,00
2	Dinas Kesehatan	16.019.490.129,35	7.172.561.437,76
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	4.367.003.795,10
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	676.902.600,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	366.938.333,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	75.360.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	654.639.153,00	759.187.690,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	10.894.000,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	440.000,00	11.095.110,00
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	299.730.088,00
11	Sekretariat Daerah	-	5.340.000,00
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.847.900,00	-
Jasa		2.343.600,00	-
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.343.600,00	-
Uang		153.500.000,00	2.474.649.980,00
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	153.500.000,00	125.000.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	-	1.999.999.980,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	349.650.000,00
Aset Tetap		44.958.208.501,54	47.845.071.151,89
Tanah		17.572.208.245,00	5.533.099.050,00
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.520.000,00	3.734.600.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	15.049.038.245,00	593.094.750,00
3	Dinas Perhubungan	-	932.512.000,00
4	Dinas Pariwisata	2.509.650.000,00	272.612.300,00
5	Kecamatan Kotawaringin Lama	-	280.000,00
Peralatan dan Mesin		10.645.682.725,18	2.678.199.198,91
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.236.858.000,00	43.410.207,21
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.791.958,18	-
3	Dinas Kesehatan	7.878.795.867,00	-
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	176.600.000,00	127.000.000,00
5	Dinas Sosial	-	22.650.242,94



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	713.958.020,51
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.500.000,00	-
8	Dinas Lingkungan Hidup	-	1.526.415.709,16
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	24.814.800,00
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.528.500,00	-
11	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-	94.814.127,24
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	149.126.400,00	-
13	Dinas Pariwisata	23.930.000,00	69.300.000,00
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	55.836.091,85
15	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	123.552.000,00	-
Gedung dan Bangunan		651.393.782,79	13.304.975.743,26
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	491.923.782,79	1.807.483.131,34
2	Rumah Sakit Umum Daerah	-	4.701.231.515,88
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	4.419.543.711,88
4	Dinas Lingkungan Hidup	50.000.000,00	150.000.000,00
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	83.500.000,00	781.433.559,09
6	Dinas Pariwisata	25.970.000,00	1.445.283.825,07
Jalan, Irigasi dan Jaringan		16.068.541.248,57	26.304.345.024,72
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.740.417.248,57	26.304.345.024,72
2	Dinas Perhubungan	2.328.124.000,00	-
Aset Tetap Lainnya (Buku)		20.382.500,00	24.452.135,00
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	24.452.135,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20.382.500,00	-
Jumlah		99.911.808.680,95	99.227.910.389,34

5.4.2 Beban – LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>1.273.606.510.310,78</u>	<u>1.280.723.248.945,70</u>

Beban – LO merupakan beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Tak Terduga. Beban – LO Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.273.606.510.310,78 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.280.723.248.945,70. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.99 Rincian Beban – LO

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
1	Beban Operasi	1.197.147.712.554,78	1.204.107.942.545,70
2	Beban Transfer	75.440.651.400,00	76.615.306.400,00
3	Beban Tak Terduga	1.018.146.356,00	-
Jumlah		1.273.606.510.310,78	1.280.723.248.945,70



5.4.2.1 Beban Operasi

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.197.147.712.554,78	1.204.107.942.545,70

Rekening ini menggambarkan realisasi Beban Operasi pada Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.197.147.712.554,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100 Rincian Beban Operasi

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
1	Beban Pegawai	443.723.077.127,00	458.012.501.009,95
2	Beban Barang dan Jasa	442.004.112.401,25	424.735.012.155,58
3	Beban Bunga	897.000.000,00	-
4	Beban Hibah	17.668.503.094,00	47.729.054.807,88
5	Beban Bantuan Sosial	1.766.928.000,00	3.093.000.000,00
6	Beban Penyisihan Piutang	5.381.790.441,53	5.777.008.868,97
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	285.706.301.491,00	264.761.365.703,32
Jumlah		1.197.147.712.554,78	1.204.107.942.545,70

1) Beban Pegawai

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
443.723.077.127,00	458.012.501.009,95

Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp443.723.077.127,00 dan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp458.012.501.009,95 dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.101 Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	268.969.684.641,00	269.483.213.159,64
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	95.783.236.846,00	120.131.358.552,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	59.900.875.600,00	54.527.634.000,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	15.832.106.748,00	11.858.076.700,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	634.013.292,00	64.339.254,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	795.970.000,00	793.420.000,00
7	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	603.903.738,31
8	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	38.819.606,00
9	Uang Lembur	-	511.736.000,00
10	Beban Pegawai BOS	-	-
11	Beban Pegawai BLUD	1.807.190.000,00	-
Jumlah		443.723.077.127,00	458.012.501.009,95



Sedangkan Beban Pegawai pada masing-masing SKPD untuk TA. 2021 dan TA. 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.102 Daftar Beban Pegawai pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	193.500.638.141,00	196.631.920.040,00
2	Dinas Kesehatan	46.315.571.032,00	42.856.624.393,00
3	RSUD Sultan Imanuddin	27.861.575.974,00	26.355.695.813,64
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.201.040.639,00	7.288.245.013,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.711.363.279,00	2.873.565.282,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.403.513.844,00	7.847.544.578,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.127.378.681,00	3.280.923.498,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.239.844.677,00	3.340.075.141,00
9	Dinas Sosial	3.737.602.733,00	4.154.740.111,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.875.533.167,00	3.846.903.757,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.094.270.669,00	4.055.296.117,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	3.340.034.028,00	3.697.766.330,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	4.252.503.482,00	4.354.846.946,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.171.069.100,00	4.467.912.811,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.905.703.190,00	4.117.059.845,00
16	Dinas Perhubungan	3.775.861.225,00	4.143.170.905,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.244.736.392,00	4.357.530.135,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	5.244.850.334,00	5.945.223.145,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.788.910.984,00	4.182.527.644,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.651.510.334,00	3.734.707.934,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.657.504.016,00	3.797.784.245,00
22	Dinas Perikanan	3.262.392.522,00	3.260.353.390,00
23	Dinas Pariwisata	3.588.437.189,00	3.697.260.128,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	13.189.262.073,00	13.966.947.323,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.959.370.860,00	5.036.765.178,00
26	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	13.467.461.695,00
27	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	744.739.632,00
28	Sekretariat Daerah	12.723.735.859,00	12.345.571.275,00
29	Sekretariat DPRD	18.438.685.230,00	2.775.074.526,00
30	Inspektorat Kabupaten	4.871.752.314,00	4.703.079.687,00
31	Kecamatan Arut Selatan	8.135.876.984,00	8.114.982.416,00
32	Kecamatan Arut Utara	2.496.877.927,00	2.729.941.443,00
33	Kecamatan Kumai	4.482.673.011,00	4.572.075.331,00
34	Kecamatan Kotawaringin Lama	3.169.816.932,00	3.369.551.737,00
35	Kecamatan Pangkalan Lada	1.758.790.173,00	1.779.278.863,00
36	Kecamatan Pangkalan Banteng	2.095.549.351,00	2.183.390.267,00



No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.302.135.216,00	4.567.276.914,00
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.169.902.420,00	16.500.406.698,00
39	Badan Pendapatan Daerah	4.431.430.343,00	4.973.215.226,31
40	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.545.372.802,00	3.895.065.597,00
Jumlah		443.723.077.127,00	458.012.501.009,95

2) Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>442.004.112.401,25</u>	<u>424.735.012.155,58</u>

Beban ini merupakan Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp442.004.112.401,25 yang terdiri dari:

Tabel 5. 103 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
1	Beban Barang/Persediaan	143.028.416.060,42	103.257.689.915,22
2	Beban Jasa	254.339.261.676,33	261.589.681.680,61
3	Beban Pemeliharaan	15.400.201.844,00	24.356.503.297,32
4	Beban Perjalanan Dinas	28.308.282.820,50	32.454.937.262,43
5	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	927.950.000,00	3.076.200.000,00
Jumlah		442.004.112.401,25	424.735.012.155,58

a. Beban Barang/Persediaan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>143.028.416.060,42</u>	<u>103.257.689.915,22</u>

Beban ini merupakan Beban Barang/Persediaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp143.028.416.060,42. Beban Barang/Persediaan TA. 2021 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.104 Daftar Beban Barang/Persediaan pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.718.525.571,78	15.349.974.909,65
2	Dinas Kesehatan	13.080.361.563,80	23.567.582.391,85
3	RSUD Sultan Imanuddin	64.734.948.623,09	51.625.944.956,01
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.484.043.614,90	1.301.497.779,52
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	840.535.780,00	111.146.840,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	414.345.705,00	134.063.450,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	246.462.891,00	81.618.200,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.718.604.400,00	681.308.096,00
9	Dinas Sosial	968.265.340,00	312.987.930,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	522.221.278,00	462.546.281,50



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.503.659.506,00	610.599.536,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	208.865.000,00	163.542.150,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	1.931.508.229,52	395.642.505,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	911.504.642,50	325.652.219,60
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	285.667.334,00	276.516.075,00
16	Dinas Perhubungan	290.544.854,10	210.766.700,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	130.177.839,00	193.952.180,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	293.735.877,00	554.072.150,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	157.205.913,00	131.419.970,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	695.417.570,00	763.267.567,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	92.456.207,00	89.477.500,00
22	Dinas Perikanan	7.361.112.810,00	892.784.659,00
23	Dinas Pariwisata	557.863.574,20	248.253.720,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2.631.917.570,87	679.078.450,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.816.344.266,41	618.341.130,09
26	Sekretariat Daerah	2.398.066.613,00	800.748.038,00
27	Sekretariat DPRD	1.518.096.337,00	534.876.350,00
28	Inspektorat Kabupaten	391.973.506,00	112.178.760,00
29	Kecamatan Arut Selatan	1.558.137.048,77	518.705.837,00
30	Kecamatan Arut Utara	155.143.510,00	53.971.800,00
31	Kecamatan Kumai	588.054.370,00	268.591.100,00
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	247.704.925,48	121.328.650,00
33	Kecamatan Pangkalan Lada	100.041.485,00	48.415.110,00
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	63.837.810,00	57.601.000,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	653.235.101,00	89.739.900,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	923.370.019,00	305.496.324,00
37	Badan Pendapatan Daerah	496.715.024,00	405.617.700,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	337.744.350,00	158.382.000,00
Jumlah		143.028.416.060,42	103.257.689.915,22

b. Beban Jasa

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>254.339.261.676,33</u>	<u>261.589.681.680,61</u>

Beban ini merupakan Beban Jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp254.339.261.676,33. Beban Jasa pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.105 Daftar Beban Jasa pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.762.287.830,40	28.094.840.011,05
2	Dinas Kesehatan	37.546.852.862,00	47.584.066.390,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
3	RSUD Sultan Imanuddin	120.237.789.454,24	102.733.861.768,78
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.601.381.917,00	8.388.210.858,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.087.715.191,00	998.360.356,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.670.090.890,00	3.373.171.692,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	516.424.643,00	333.936.859,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.602.749.547,00	5.803.175.393,00
9	Dinas Sosial	782.792.403,00	1.635.243.818,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.119.095.201,00	1.435.567.104,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.176.465.438,00	1.581.633.780,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	224.677.079,00	337.870.171,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	10.521.196.348,00	11.222.648.152,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	450.717.423,00	482.481.088,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.059.869.554,00	692.486.445,00
16	Dinas Perhubungan	1.827.472.633,00	2.235.896.177,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.643.735.768,00	3.861.500.019,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.145.561.770,38	3.827.516.838,04
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	424.800.499,84	527.837.362,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	846.965.090,00	1.385.040.099,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	799.546.146,00	881.081.966,00
22	Dinas Perikanan	1.202.250.581,00	1.302.996.740,00
23	Dinas Pariwisata	763.897.196,00	1.411.760.404,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.290.813.909,00	1.588.336.232,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.494.939.592,00	1.672.246.714,00
26	Sekretariat Daerah	9.479.844.605,50	11.821.049.374,74
27	Sekretariat DPRD	2.954.687.857,00	3.894.447.817,00
28	Inspektorat Kabupaten	426.832.719,72	455.062.613,00
29	Kecamatan Arut Selatan	1.960.304.953,00	2.103.520.027,00
30	Kecamatan Arut Utara	376.434.405,00	470.911.447,00
31	Kecamatan Kumai	759.584.118,50	1.050.103.730,00
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	875.324.329,00	827.602.493,00
33	Kecamatan Pangkalan Lada	127.537.285,00	201.535.920,00
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	221.002.867,00	291.683.735,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.385.083.032,00	1.573.714.077,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.213.360.381,75	2.512.798.739,00
37	Badan Pendapatan Daerah	1.338.595.552,00	1.818.399.698,00
38	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah	165.000.000,00	-
39	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.255.580.605,00	1.177.085.573,00
Jumlah		254.339.261.676,33	261.589.681.680,61



c. Beban Pemeliharaan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
15.400.201.844,00	24.356.503.297,32

Beban ini merupakan Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.400.201.844,00. Beban Pemeliharaan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.106 Daftar Beban Pemeliharaan pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.292.758.488,00	1.955.230.383,82
2	Dinas Kesehatan	314.249.970,00	1.125.568.685,00
3	RSUD Sultan Imanuddin	2.079.628.217,00	2.300.123.006,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.573.511.079,00	9.934.420.551,50
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	33.639.200,00	24.501.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	481.779.000,00	580.162.400,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.750.480,00	35.091.452,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	174.972.200,00	640.474.601,00
9	Dinas Sosial	149.903.000,00	200.396.400,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.311.500,00	68.348.700,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	61.308.782,00	24.644.020,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	32.928.270,00	48.679.381,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	194.595.100,00	1.397.646.490,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	71.621.716,00	67.638.681,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34.065.684,00	130.713.074,00
16	Dinas Perhubungan	838.460.284,00	1.044.537.423,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	31.651.314,00	21.857.400,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	203.534.925,00	266.103.173,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55.490.940,00	92.345.352,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	106.388.800,00	82.577.700,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	53.780.536,00	58.868.981,00
22	Dinas Perikanan	65.425.000,00	107.763.947,00
23	Dinas Pariwisata	56.109.332,00	86.435.388,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	48.445.000,00	163.970.350,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	44.680.000,00	79.481.214,00
26	Sekretariat Daerah	682.683.037,00	1.477.434.528,00
27	Sekretariat DPRD	439.576.398,00	446.478.396,00
28	Inspektorat Kabupaten	77.594.799,00	76.776.963,00
29	Kecamatan Arut Selatan	265.235.000,00	786.101.700,00
30	Kecamatan Arut Utara	18.148.000,00	52.099.800,00
31	Kecamatan Kumai	200.028.000,00	176.439.100,00
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	80.770.000,00	128.417.000,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
33	Kecamatan Pangkalan Lada	11.273.191,00	22.298.500,00
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	14.859.000,00	26.020.000,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	88.148.045,00	79.739.029,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	249.632.331,00	331.644.396,00
37	Badan Pendapatan Daerah	122.031.826,00	153.893.332,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	80.233.400,00	61.580.300,00
Jumlah		15.400.201.844,00	24.356.503.297,32

d. Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>28.308.282.820,50</u>	<u>32.454.937.262,43</u>

Beban ini merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp28.308.282.820,50. Beban Perjalanan Dinas pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.107 Daftar Beban Perjalanan Dinas pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.305.161.910,00	1.115.258.103,43
2	Dinas Kesehatan	10.510.058.592,00	9.650.309.217,00
3	RSUD Sultan Imanuddin	116.572.537,00	200.786.602,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	361.083.062,50	554.115.413,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	191.446.135,00	305.795.473,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	234.244.000,00	733.226.471,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	422.199.911,00	548.788.156,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	255.396.487,00	417.484.976,00
9	Dinas Sosial	417.477.530,00	461.389.254,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	190.714.269,00	367.601.318,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	658.432.746,00	603.342.537,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	211.628.751,00	285.534.383,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	114.436.759,00	240.290.159,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	220.991.908,00	199.162.796,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	687.218.645,00	750.711.877,00
16	Dinas Perhubungan	192.202.397,00	314.147.186,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	127.794.154,00	177.431.412,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	469.400.583,00	550.316.700,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	246.675.495,00	225.335.672,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	471.348.300,00	523.388.126,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	76.731.626,00	138.491.311,00
22	Dinas Perikanan	251.926.186,00	296.038.338,00
23	Dinas Pariwisata	170.774.928,00	286.077.027,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	409.464.300,00	1.192.546.134,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	226.289.353,00	404.068.100,00
26	Sekretariat Daerah	1.134.957.832,00	1.629.949.031,00
27	Sekretariat DPRD	3.688.072.151,00	4.569.221.418,00
28	Inspektorat Kabupaten	1.837.089.426,00	1.953.032.442,00
29	Kecamatan Arut Selatan	385.809.778,00	228.282.364,00
30	Kecamatan Arut Utara	139.850.000,00	247.588.700,00
31	Kecamatan Kumai	209.187.640,00	248.762.900,00
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	219.951.600,00	160.768.000,00
33	Kecamatan Pangkalan Lada	51.920.000,00	206.416.205,00
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	98.488.000,00	372.903.000,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	439.146.849,00	391.259.155,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	559.381.624,00	795.463.834,00
37	Badan Pendapatan Daerah	583.630.800,00	770.705.900,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	421.126.556,00	338.947.572,00
Jumlah		28.308.282.820,50	32.454.937.262,43

e. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>927.950.000,00</u>	<u>3.076.200.000,00</u>

Beban ini merupakan Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp927.950.000,00. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.108 Daftar Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	57.500.000,00	-
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	2.607.500.000,00
3	Dinas Sosial	72.000.000,00	-
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.000.000,00	-
5	Dinas Ketahanan Pangan	440.000.000,00	-
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	43.750.000,00	137.000.000,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.500.000,00	3.500.000,00
8	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	114.350.000,00	-
9	Dinas Pariwisata	50.500.000,00	210.000.000,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	58.200.000,00
11	Sekretariat Daerah	136.350.000,00	60.000.000,00
Jumlah		927.950.000,00	3.076.200.000,00



3) Beban Bunga

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
897.000.000,00	0,00

Beban Bunga periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp897.000.000,00 terdiri dari Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah Rp847.000.000,00 dan Beban provisi di BLUD Rp50.000.000,00.

4) Beban Hibah

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
17.668.503.094,00	47.729.054.807,88

Beban Hibah untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp17.668.503.094,00 yaitu Beban Hibah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (PPKD) dan SKPD dalam bentuk program kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.109 Rincian Beban Hibah

No.	Uraian	Nilai
1	Hibah Barang kepada Instansi Vertikal:	1.251.688.691,00
	- kepada BRIMOB	199.500.000,00
	- kepada BPOM	43.098.334,00
	- kepada KPU	76.578.357,00
	- kepada Kemenhub	932.512.000,00
2	Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.192.450.600,00
3	Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.547.745.803,00
4	Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	376.298.000,00
5	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.300.320.000,00
	Jumlah	17.668.503.094,00

Beban Hibah pada masing-masing SKPD untuk TA. 2021 dan TA. 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.110 Daftar Beban Hibah pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.646.332.403,00	2.333.071.550,00
2	Dinas Kesehatan	199.916.000,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	5.865.888.476,88
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.300.320.000,00	-
5	Dinas Sosial	18.150.000,00	7.225.481.340,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	278.596.000,00	1.792.769.734,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	234.408.458,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	366.938.333,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	-	893.910.950,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	180.950.000,00	705.398.880,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	29.760.000,00
12	Dinas Perhubungan	932.512.000,00	-
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	150.000.000,00	15.000.000,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	2.246.331.670,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	48.000.000,00	149.740.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	6.457.510,00
17	Dinas Perikanan	-	11.014.530.436,00
18	Dinas Pariwisata	-	374.777.000,00
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	3.675.606.400,00
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	1.872.583.500,00
21	Sekretariat Daerah	4.774.578.357,00	10.000.000,00
22	Kecamatan Arut Selatan	-	1.031.021.885,00
23	Kecamatan Arut Utara	-	5.000.000,00
24	Kecamatan Kumai	18.700.000,00	528.984.685,00
25	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	43.098.334,00	7.351.394.000,00
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	77.350.000,00	-
Jumlah		17.668.503.094,00	47.729.054.807,88

5) Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.766.928.000,00	3.093.000.000,00

Beban Bantuan Sosial untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.766.928.000,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.093.000.000,00 yang dikelola khusus oleh Bendahara Umum Daerah. Rinciannya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.111 Rincian Beban Bantuan Sosial

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.751.928.000,00	3.093.000.000,00
-	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.584.000.000,00	3.093.000.000,00
-	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu	167.928.000,00	-
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	15.000.000,00	-
-	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	15.000.000,00	-
Jumlah		1.766.928.000,00	3.093.000.000,00



6) Beban Penyisihan Piutang

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	5.381.790.441,53	5.777.008.868,97

Beban Penyisihan Piutang tidak tertagih berdasarkan perhitungan penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp5.381.790.441,53 dan Rp5.777.008.868,97 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.112 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	4.238.743.879,40	1.854.837.321,85
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	410.713.231,98	187.902.425,45
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	732.333.330,15	3.734.269.121,67
	Jumlah	5.381.790.441,53	5.777.008.868,97

Sedangkan Beban Penyisihan Piutang pada masing-masing SKPD untuk TA. 2021 dan TA. 2020 terangkum di bawah ini:

Tabel 5.113 Daftar Beban Penyisihan Piutang pada SKPD

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.446.500,00	-
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	2.446.500,00	-
2	Dinas Kesehatan	33.441.250,00	43.576.000,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	33.441.250,00	43.576.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	723.407.898,90	3.708.953.352,27
	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (BLUD)	723.407.898,90	3.708.953.352,27
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	631.794,23	-
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	631.794,23	-
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	8.925.431,25	25.315.769,40
	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (TGR)	8.925.431,25	25.315.769,40
6	Dinas Lingkungan Hidup	597.500,00	6.848.500,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	597.500,00	6.848.500,00
7	Dinas Perhubungan	272.188.750,00	81.801.250,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	272.188.750,00	81.801.250,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	3.348.385,20
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	-	3.348.385,20
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	89.079.433,75	42.333.546,25
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	89.079.433,75	42.333.546,25
10	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.825.504,00	6.553.806,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	3.825.504,00	6.553.806,00
11	Dinas Perikanan	600.000,00	150.000,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	600.000,00	150.000,00



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020
12	Sekretariat Daerah	7.257.500,00	2.515.000,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	7.257.500,00	2.515.000,00
13	Kecamatan Arut Selatan	-	7.938,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	-	7.938,00
14	Kecamatan Pangkalan Banteng	70.000,00	85.000,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	70.000,00	85.000,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	575.000,00	683.000,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	575.000,00	683.000,00
16	Badan Pendapatan Daerah	4.238.743.879,40	1.854.837.321,85
	Beban Penyisihan Piutang Pajak	4.238.743.879,40	1.854.837.321,85
	Jumlah	5.381.790.441,53	5.777.008.868,97

7) Beban Penyusutan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>281.111.749.594,60</u>	<u>259.733.790.355,32</u>

Beban Penyusutan berasal dari penyusutan seluruh aset tetap selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp281.111.749.594,60. Rincian Beban Penyusutan berdasarkan klasifikasi Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.114 Rincian Beban Penyusutan

No.	Jenis Aset Tetap	TA. 2021	TA. 2020
1	Peralatan dan Mesin	69.741.109.771,88	60.744.437.280,01
2	Gedung dan Bangunan	25.418.561.704,98	21.633.974.586,62
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	185.952.078.117,74	177.355.378.488,69
	Jumlah	281.111.749.594,60	259.733.790.355,32

Sedangkan daftar Beban Penyusutan Aset Tetap masing-masing SKPD untuk TA. 2021 dan TA. 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.115 Daftar Beban Penyusutan pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.505.125.879,79	13.905.584.805,08
2	Dinas Kesehatan	40.793.626.374,03	33.883.163.558,29
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	181.853.171.650,86	173.756.453.013,60
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.029.250.381,07	1.288.158.897,84
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.404.456.709,63	1.469.567.675,45
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	102.333.448,44	120.258.480,45
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.162.513.022,88	4.317.695.068,90
8	Dinas Sosial	210.699.735,87	177.608.270,18



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	707.066.978,35	791.531.279,01
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	654.467.735,15	540.016.084,91
11	Dinas Ketahanan Pangan	92.702.653,69	103.520.766,84
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.535.980.724,77	2.462.455.971,53
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	453.500.251,03	392.967.449,49
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	97.557.918,50	74.609.063,02
15	Dinas Perhubungan	3.697.060.231,10	2.338.384.786,41
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.090.206.391,21	1.145.932.705,78
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.558.621.739,54	2.229.428.696,30
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	256.593.312,27	312.354.934,98
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	777.713.469,07	757.934.748,50
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	402.433.138,24	372.911.200,47
21	Dinas Perikanan	1.819.980.462,76	2.966.457.696,12
22	Dinas Pariwisata	1.310.576.425,31	1.364.951.815,54
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2.475.418.620,35	2.723.353.499,20
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.012.091.380,65	1.224.200.828,64
25	Sekretariat Daerah	3.038.720.117,63	4.310.780.821,42
26	Sekretariat DPRD	1.141.669.031,48	1.091.259.700,53
27	Inspektorat Kabupaten	364.286.596,04	302.315.115,25
28	Kecamatan Arut Selatan	1.220.302.233,56	938.180.017,77
29	Kecamatan Arut Utara	296.343.659,13	274.440.492,60
30	Kecamatan Kumai	670.443.243,57	585.734.327,91
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	746.962.979,78	627.154.125,15
32	Kecamatan Pangkalan Lada	169.688.168,52	203.375.992,19
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	307.966.156,98	335.054.382,93
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	750.630.584,26	747.690.537,85
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	724.738.928,34	864.881.762,12
36	Badan Pendapatan Daerah	347.629.607,99	323.703.212,34
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	329.219.652,76	393.881.388,43
38	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	-	15.837.182,30
	Jumlah	281.111.749.594,60	259.733.790.355,32

8) Beban Amortisasi

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>4.594.551.896,40</u>	<u>5.027.575.348,00</u>

Beban ini merupakan Beban Amortisasi yang berasal dari penyusutan seluruh Aset Tak Berwujud dalam periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp4.594.551.896,40. Beban Amortisasi pada masing-masing SKPD yaitu sebagai berikut:



Tabel 5.116 Daftar Beban Amortisasi pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2021	TA. 2020
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	102.598.100,00	16.548.100,00
2	Dinas Kesehatan	-	2.944.700,00
3	RSUD Sultan Imanuddin	229.738.600,00	193.099.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.338.222.800,00	2.476.353.100,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	29.590.000,00	-
6	Dinas Sosial	45.560.000,00	5.990.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	138.627.600,00	145.027.600,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	18.617.000,00	6.380.000,00
9	Dinas Perhubungan	695.406.888,00	1.237.079.888,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	240.733.600,00	205.940.600,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	14.696.000,00	-
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42.498.648,40	30.480.000,00
13	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	39.897.000,00	39.897.000,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6.252.000,00	3.102.000,00
15	Dinas Perikanan	15.598.000,00	15.598.000,00
16	Dinas Pariwisata	9.966.000,00	9.966.000,00
17	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	-	-
18	Sekretariat Daerah	174.906.660,00	73.932.000,00
19	Kecamatan Arut Selatan	2.955.040,00	-
20	Inspektorat Kabupaten	19.838.500,00	19.838.500,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	348.520.360,00	437.103.360,00
22	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	19.967.100,00	19.967.100,00
23	Badan Pendapatan Daerah	60.362.000,00	69.628.400,00
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	-	18.700.000,00
Jumlah		4.594.551.896,40	5.027.575.348,00

5.4.2.2 Beban Transfer

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	<u>75.440.651.400,00</u>	<u>76.615.306.400,00</u>

Beban Transfer untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp75.440.651.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117 Rincian Beban Transfer

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
1	Beban Transfer Bagi Hasil	8.300.175.400,00	7.832.933.700,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan	67.140.476.000,00	68.782.372.700,00
Jumlah		75.440.651.400,00	76.615.306.400,00



5.4.2.3 Beban Tak Terduga

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.018.146.356,00	0,00

Beban Tak Terduga untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.018.146.356,00 yang ditujukan untuk kegiatan penanggulangan bencana banjir di Kotawaringin Barat melalui PPKD.

5.4.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
278.795.005.757,70	254.725.278.972,39

Surplus dari Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp278.795.005.757,70 dimana Pendapatan – LO sebesar Rp1.552.401.516.068,48 dan Beban – LO sebesar Rp1.273.606.510.310,78.

5.4.4 Surplus Non-Operasional

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2.335.475.303,52	1.258.076.353,36

Surplus dari Kegiatan Non-Operasional sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.335.475.303,52 terdiri dari:

- Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp628.178.232,25 karena adanya lelang BMD pada tahun 2021
- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.707.297.071,27 karena adanya:
 - Penyesuaian atas laba BPR Marunting Sejahtera tahun 2020 setelah *audited* Rp432.254,00
 - Laba Operasional BPR Marunting Sejahtera tahun 2021 Rp1.059.396.589,00
 - Laba Operasional PDAM Tirta Arut tahun 2021 Rp647.468.228,27

5.4.5 Defisit Non-Operasional

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(2.067.137.696,34)	(5.184.302.292,51)

Defisit dari Kegiatan Non-Operasional sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.067.137.696,34) terdiri dari:

- Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar (Rp1.461.963.159,28) karena adanya lelang BMD pada tahun 2021
- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp605.174.537,06) karena adanya:
 - Penyesuaian (rugi) PDAM Tirta Arut tahun 2020 setelah *audited* (Rp575.641.409,23)



- Pengurangan Aset Lain-lain karena penghapusan aset rusak berat (Rp29.533.127,83)

5.4.6 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
268.337.607,18	(3.926.225.939,15)

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional merupakan penjumlahan antara Surplus Non-Operasional dan Defisit Non-Operasional, dimana sampai dengan 31 Desember 2021 Surplus dari Kegiatan Non-Operasional sebesar Rp268.337.607,18 dan TA. 2020 sebesar (Rp3.926.225.939,15).

5.4.7 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
279.063.343.364,88	250.799.053.033,24

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa merupakan penjumlahan antara Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional dan Non-Operasional. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp279.063.343.364,88 dan TA. 2020 sebesar Rp250.799.053.033,24.

5.4.8 Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
0,00	(733.667.268,00)

Defisit dari Pos Luar Biasa sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sedangkan TA. 2020 sebesar (Rp733.667.268,00).

5.4.9 Surplus/(Defisit) – LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
279.063.343.364,88	250.065.385.765,24

Surplus/(Defisit)-LO merupakan penjumlahan antara Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa dan Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa selama satu periode pelaporan. Surplus-LO berdasarkan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp279.063.343.364,88 sedangkan TA. 2020 sebesar Rp250.065.385.765,24.



5.5 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas-aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah.

Penjelasan lebih rinci mengenai Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dari keempat Aktivitas dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.118 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	585.347.502.402,11	383.167.361.092,91
	Arus Kas Masuk	1.633.232.807.127,94	1.448.577.184.457,94
	Arus Kas Keluar	1.047.885.304.725,83	1.065.409.823.365,03
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(417.958.840.168,58)	(381.070.782.037,77)
	Arus Kas Masuk	739.659.000,00	434.412.438,00
	Arus Keluar Kas	418.698.499.168,58	381.505.194.475,77
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(3.000.000.000,00)	36.014.000.000,00
	Arus Masuk Kas	33.000.000.000,00	36.014.000.000,00
	Arus Keluar Kas	36.000.000.000,00	-
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(59.074.500,00)	74.000,00
	Arus Masuk Kas	102.684.651.055,00	94.036.815.731,00
	Arus Keluar Kas	102.743.725.555,00	94.036.741.731,00
	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	164.329.587.733,53	38.110.653.055,14

5.5.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	<u>1.633.232.807.127,94</u>	<u>1.448.577.184.457,94</u>

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi atau aktivitas penerimaan kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.633.232.807.127,94 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.448.577.184.457,94 yang terinci pada tabel berikut:

Tabel 5.119 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Penerimaan Pajak Daerah	70.389.757.706,05	64.838.822.752,80
2	Penerimaan Retribusi Daerah	12.611.932.516,30	13.208.556.926,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.470.117.812,00	9.804.364.851,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	295.952.911.970,20	136.365.772.873,48
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	135.229.818.254,00	64.383.434.319,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	593.260.006.000,00	602.446.484.000,00



No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	310.370.018.680,00	292.094.344.724,00
8	Penerimaan Dana penyesuaian	84.755.004.782,00	163.174.967.600,00
9	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	80.093.900.010,33	64.243.460.228,07
10	Bantuan Keuangan dari Propinsi	-	400.000.000,00
11	Penerimaan Hibah	38.099.339.397,06	37.161.976.183,59
12	Penerimaan Lainnya	-	455.000.000,00
Jumlah		1.633.232.807.127,94	1.448.577.184.457,94

5.5.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.047.885.304.725,83	1.065.409.823.365,03

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.047.885.304.725,83 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.065.409.823.365,03. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.120 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Pembayaran Pegawai	533.526.478.475,48	441.025.705.448,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	331.364.771.908,23	407.372.358.282,67
3	Pembayaran Bunga	847.000.000,00	-
4	Pembayaran Hibah	19.304.426.304,12	7.351.394.000,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	1.766.928.000,00	3.093.000.000,00
6	Pembayaran Tak Terduga	1.547.938.856,00	49.260.669.634,36
7	Pembayaran Bagi Hasil	7.632.280.400,00	7.740.424.700,00
8	Pembayaran Bantuan Keuangan	151.895.480.782,00	149.566.271.300,00
Jumlah		1.047.885.304.725,83	1.065.409.823.365,03

5.5.3 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
739.659.000,00	434.412.438,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi atau aktivitas penerimaan kas karena adanya pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp739.659.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp434.412.438,00 dengan rincian seperti pada tabel 5.121.



Tabel 5.121 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	567.565.000,00	220.660.438,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	68.599.000,00	213.752.000,00
3	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.657.000,00	-
4	Penjualan Aset Lainnya	84.838.000,00	-
Jumlah		739.659.000,00	434.412.438,00

5.5.4 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
418.698.499.168,58	381.505.194.475,77

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi merupakan kegiatan pengadaan/pembelian Aset Tetap yang dianggarkan dari Belanja Modal APBD dan Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah, dimana sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp418.698.499.168,58 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp381.505.194.475,77. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.122 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Perolehan Tanah	100.900.000,00	415.506.760,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	69.514.111.613,00	97.622.948.332,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	171.955.314.980,00	143.482.401.078,77
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	167.205.556.475,58	125.882.549.773,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.922.616.100,00	4.759.374.090,00
6	Perolehan Aset Lainnya	-	4.842.414.442,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00
Jumlah		418.698.499.168,58	381.505.194.475,77

5.5.5 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
33.000.000.000,00	36.014.000.000,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan atau aktivitas penerimaan kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang, dimana sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp33.000.000.000,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp36.014.000.000,00. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dapat dilihat pada tabel 5.123.



Tabel 5.123 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	33.000.000.000,00	36.000.000.000,00
2	Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir	-	14.000.000,00
Jumlah		33.000.000.000,00	36.014.000.000,00

5.5.6 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>36.000.000.000,00</u>	<u>0,00</u>

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp36.000.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 tidak terdapat Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan.

5.5.7 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>102.684.651.055,00</u>	<u>94.036.815.731,00</u>

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp102.684.651.055,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp94.036.815.731,00 yang berasal dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemerintah Daerah.

5.5.8 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>102.743.725.555,00</u>	<u>94.036.741.731,00</u>

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp102.743.725.555,00 yang terdiri dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp102.684.651.055,00 dan Kiriman Uang Keluar/Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan (UP/TUP) Rp59.074.500,00. Sedangkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp94.036.741.731,00

5.5.9 Saldo Akhir Kas

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>261.920.012.659,90</u>	<u>97.590.424.926,37</u>

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp261.920.012.659,90 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp97.590.424.926,37. SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp261.920.012.659,90



sehingga sama jika dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas sampai dengan 31 Desember 2021. Namun terdapat SP2D dengan Nomor 23409 pada Dinas Sosial sebesar Rp48.000,00 atas Belanja JKK-JKM tanggal 28 Desember 2021 yang pada proses pemotongannya ditarik kembali dananya oleh Bank Kalteng dan masih ada di Kasda sampai dengan 31 Desember 2021.

Adapun rincian Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.124 Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang Bersifat Umum (belum ditentukan penggunaannya)	68.450.111.633,93	44.461.969.610,80
2	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang Dibatasi Penggunaannya	25.654.132.368,80	32.154.484.809,80
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	20.277.093,00	7.835.000,00
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.095.194,00	3.367.123,00
5	Saldo Akhir Kas Dana JKN	533.961,00	388.439.034,00
6	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sultan Imanuddin	167.590.918.858,64	18.962.379.039,12
7	Saldo Akhir Kas Lainnya	-	-
8	Saldo Akhir Kas BOS	198.943.550,53	1.611.950.309,65
Saldo Akhir Kas		261.920.012.659,90	97.590.424.926,37



5.6 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir Pemerintah pada periode pelaporan.

Penjelasan lebih rinci mengenai pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Saldo Awal Ekuitas tahun 2021 sebesar Rp2.938.058.435.002,57
- 2) Surplus/Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp279.063.343.364,88 merupakan Surplus atas Kegiatan Operasional (basis akrual) yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar total senilai Rp53.965.719.868,43 disebabkan adanya:
 - Koreksi saldo awal Kas BLUD tahun 2021 senilai (Rp500,00) adalah koreksi kurang debet atas SPM TA. 2020 pada RSUD Sultan Imanuddin.
 - Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak tahun 2021 senilai (Rp733.470.615,00) pada Badan Pendapatan Daerah merupakan koreksi berdasarkan hasil cek lapangan, dimana ditemukan adanya piutang sampai dengan tahun 2020 yang sudah lunas dan dibuktikan dengan tanda bukti lunas, serta adanya verifikasi terhadap ketetapan berulang pada *data base*. Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak terdiri dari koreksi Piutang PBB sebesar (Rp730.470.615,00) dan Piutang Pajak Sarang Burung Walet (Rp3.000.000,00)
 - Koreksi Saldo Awal Piutang Lainnya tahun 2021 senilai (Rp9.713.688.124,56) pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan sebesar (Rp9.719.904.939,00) merupakan koreksi saldo piutang klaim BPJS Kesehatan dan *Covid-19*, dimana beberapa klaim BPJS Kesehatan yang tersaji pada laporan keuangan TA. 2020 menggunakan estimasi dari RSUD Sultan Imanuddin dan angka tersebut belum terverifikasi oleh BPJS Kesehatan.
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp6.216.814,44 adalah koreksi saldo piutang sewa Barang Milik Daerah (BMD) tahun 2020 yang belum tercatat dan dibayar sekaligus di tahun 2021.
 - Koreksi Saldo Awal Persediaan tahun 2021 senilai (Rp79.214.060,42) pada Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - Nilai koreksi persediaan yang bersumber dari APBD sebesar (Rp809.917.202,70) diperoleh dari perhitungan ulang terhadap laporan persediaan tahun 2020, dimana terdapat salah perhitungan pada saldo akhir persediaan sebesar (Rp1.945.775.422,04). Setelah dilakukan *stock opname* ulang terhadap persediaan yang ada di IFK berupa obat dan bahan medis serta dibandingkan dengan rincian persediaan yang tercantum pada laporan tahun 2020, terdapat beberapa persediaan yang belum tercatat dengan total nilai Rp1.135.860.403,24.
 - Nilai koreksi persediaan yang bersumber dari Hibah Provinsi sebesar Rp14.527.424,32 diperoleh dari perhitungan ulang terhadap laporan persediaan



tahun 2020, dimana terdapat salah perhitungan saldo akhir sebesar Rp51.370.839,68. Setelah dilakukan *stock opname* ulang terhadap persediaan yang ada di IFK berupa obat dan bahan medis serta dibandingkan dengan rincian persediaan pada laporan 2020, terdapat beberapa persediaan yang belum tercatat pada laporan 2020 dengan total nilai Rp65.898.264.

- Nilai koreksi persediaan yang bersumber dari BTT sebesar Rp2.183,90 setelah dilakukan perhitungan ulang terhadap laporan persediaan tahun 2020.
- Nilai koreksi persediaan Puskesmas sebesar (Rp403.158.000,00). Berdasarkan laporan persediaan tahun 2020, terdapat barang berupa bilik hitung di Puskesmas Kumpai Batu Atas dengan jumlah stok akhir sebanyak 400 buah, senilai Rp403.158.000,00. Setelah dilakukan penelusuran pada catatan barang keluar, laporan Puskesmas dan catatan kartu stok bilik hitung, ternyata tidak ada distribusi bilik hitung ke Puskesmas Kumpai Batu Atas, sehingga nilai persediaan tersebut menjadi koreksi jumlah persediaan di Puskesmas.
- Nilai koreksi persediaan ARV Puskesmas sebesar (Rp30) setelah dilakukan perhitungan ulang terhadap laporan persediaan tahun 2020. Data dukung berupa laporan persediaan ARV dari Puskesmas Madurejo dan Semanggang.
- Nilai koreksi persediaan obat dan bahan medis tahun 2020 yang belum tercatat/terlaporkan sebesar Rp1.119.331.564,06.
- Koreksi Saldo Awal Tanah tahun 2021 sebesar Rp59.378.023.500,00 berdasarkan SK penilaian yang terbit pada tahun 2021 pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp110.072.500,00 berupa tanah bangunan rumah Negara.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp57.599.005.000,00 berupa tanah untuk jalan Kabupaten.
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp1.668.946.000 berupa tanah bangunan rumah Negara dan tanah kosong yang telah diperuntukkan.
- Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebesar Rp831.000.000,00 berdasarkan SK penilaian yang terbit pada tahun 2021 berupa kendaraan *truck* dan *pick up*.
- Koreksi saldo Awal Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp1.807.913.000,00 berdasarkan SK penilaian yang terbit pada tahun 2021 pada SKPD:
 - Kecamatan Kotawaringin lama Rp633.555.000,00 berupa gedung bangunan Posyandu Prestasi Kelurahan Kotawaringin Hilir dan Posyandu Karya Bhakti Kelurahan Kotawaringin Hulu.
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp1.174.358.000,00 berupa bangunan rumah Negara/Dinas.
- Koreksi Saldo Awal Pendapatan Diterima di Muka tahun 2021 senilai (Rp95.739.000,00) pada Dinas Kesehatan yaitu pendapatan diterima di muka atas pemanfaatan ruang untuk ATM dan Kantor Kas Bank di RSUD Sultan Imanuddin.
- Koreksi Penyisihan Piutang disebabkan oleh adanya pelunasan di tahun 2021 atas piutang sampai dengan tahun 2020, dimana pada tahun sebelumnya telah diperhitungkan penyisihan piutangnya berdasarkan kebijakan akuntansi.



- Koreksi Penyisihan Piutang pada SKPD tahun 2021 sebesar Rp4.265.428.471,87 dan tahun 2020 sebesar Rp100.281.289,36 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.125 Koreksi Penyisihan Piutang pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dinas Kesehatan	30.512.250,00	7.789.467,60
2	RSUD Sultan Imanuddin	4.192.765.236,35	-
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	(6.328.942,34)
4	Dinas Lingkungan Hidup	274.500,00	605.000,00
5	Dinas Perhubungan	-	53.383.000,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.348.385,20	4.531.726,20
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	29.729.946,25	25.581.243,75
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.776.956,00	13.849.794,15
9	Dinas Perikanan	-	750.000,00
10	Sekretariat Daerah	955.000,00	120.000,00
11	Kecamatan Arut Selatan	7.938,00	-
12	Kecamatan Pangkalan Banteng	85.000,00	-
13	Badan Pendapatan Daerah	4.973.260,07	-
Jumlah		4.265.428.471,87	100.281.289,36

- Koreksi penyusutan aset tetap (Rp1.595.051.518,43) disebabkan oleh adanya:
 - Koreksi penyusutan atas Penilaian aset lama (tindak lanjut temuan pemeriksaan LKPD TA 2020) sebesar (Rp831.000.000,00)
 - Koreksi penyusutan atas aset lama yang belum tercatat (Rp119.839.470,30)
 - Koreksi penyesuaian penyusutan atas aset yang pada tahun sebelumnya dimanfaatkan oleh pihak lain (Rp749.759.782,99)
 - Koreksi penyusutan atas perubahan kategori aset (Rp9.753.450,53)
 - Koreksi penyusutan karena atribusi (Rp391.722.922,17)
 - Koreksi penyusutan karena perubahan data tahun perolehan aset (Rp39.826,96)
 - Koreksi atas penyusutan aset lama yang direklasifikasi ke ekstrakom karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi Rp337.211.614,52
 - Amortisasi tahun 2021 terdapat pada Sekretariat Daerah Rp209.749.320,00 yang disebabkan adanya reklasifikasi Hasil Kajian (DED) dan Masterplan Pembangunan Gedung Kantor Bupati tahun 2018 dari KDP ke Aset Tak Berwujud, serta terdapat lebih saji amortisasi atas Hasil Kajian (DED) tahun 2020 pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (Rp39.897.000,00)

Koreksi penyusutan Aset Tetap/Amortisasi pada masing-masing SKPD tahun 2021 sebesar (Rp1.595.051.518,43) dan tahun 2020 sebesar (Rp1.787.912.496,04) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.126 Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	81.622.133,92	(2.840.235.846,23)
2	Dinas Kesehatan	(18.909.509,81)	(55.400.686,94)
3	RSUD Sultan Imanuddin	(158.762.210,24)	(115.275.713,55)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(99.250.207,59)	917.151.653,15



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(11.261.355,88)	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	(6.399.036,52)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	(28.660.684,74)
8	Dinas Sosial	(201.612,63)	-
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(445.663,92)	(8.183.715,81)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(336.437,26)	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	-	(512.402,96)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(824.014.858,73)	(964.879,04)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	(4.191.271,65)
14	Dinas Perhubungan	(32.549.012,25)	(16.682.902,38)
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	(2.802.253,93)
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	245.709,38	(11.690.891,25)
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	(2.296.688,58)
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	39.857.173,04	(9.837.144,87)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	(2.860.938,76)
20	Dinas Perikanan	-	(17.811.098,23)
21	Dinas Pariwisata	(90.149,98)	(2.875.732,34)
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	(421.648,21)
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	(2.977.756,57)
24	Sekretariat Daerah	(450.195.040,74)	(10.498.189,17)
25	Sekretariat DPRD	-	(12.949.271,04)
26	Kecamatan Arut Selatan	(8.386,85)	(42.471.208,75)
27	Kecamatan Arut Utara	(101.731,17)	-
28	Kecamatan Kumai	(37.047,10)	(4.106,79)
29	Kecamatan Kotawaringin Lama	311.925,98	(155.715,61)
30	Kecamatan Pangkalan Banteng	-	(222.561,55)
31	Inspektorat Daerah	(335.232,72)	-
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	(7.204.103,66)
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	(20.628.336,95)
34	Badan Pendapatan Daerah	-	24.222.260,25
35	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	(3.787.107,57)
36	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	(120.590.003,88)	498.715.484,21
	Jumlah	(1.595.051.518,43)	(1.787.912.496,04)

- Koreksi nilai utang antara lain disebabkan oleh adanya lebih catat utang tahun 2020 atas perhitungan sebagai berikut:
 - Gaji PNS sebesar Rp5.187.199,00
 - Tambahan Penghasilan Pegawai Rp243.775.042,00
 - Insentif Pemungutan Pajak Daerah Rp14.952.247,31 merupakan koreksi atas insentif upah pungut KDH dan WKDH
 - Belanja Barang dan Jasa Rp8.974.789,00 untuk penanganan Covid-19 yang termasuk PPN-DN dimana berdasarkan PMK nomor 28/PMK.03/2020 tentang pelaksanaan pengadaan vaksin dan obat-obatan penanganan Covid-19 tidak dikenakan PPN-DN, lebih catat utang



klaim non kapitasi Puskesmas dan kurang catat utang insentif nakes Covid-19 di Puskesmas ub. Oktober 2020.

Koreksi Nilai Utang tahun 2021 sebesar Rp254.939.699,31 dan tahun 2020 sebesar Rp55.929.217,00 terdapat pada SKPD berikut:

Tabel 5.127 Koreksi Nilai Utang pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	(300,00)
2	Dinas Kesehatan	260.650.000,00	64.040.450,00
3	RSUD Sultan Imanuddin	(10.831.234,00)	18.594.815,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	(10.303.880,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(4.204.142,00)	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.952.745,00	(500,00)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	57,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(4.803.682,00)	-
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(98.567,00)	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	(59,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan	(2.235.869,00)	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	(587.170,00)
13	Dinas Perhubungan	(8,00)	-
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	(1.289.713,00)
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.016.706,00	-
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(471,00)	-
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.892.790,00	-
18	Dinas Perikanan	(8.939.496,00)	(132,00)
19	Dinas Pariwisata	-	246,00
20	Sekretariat Daerah	(605.131,00)	-
21	Inspektorat Kabupaten	-	(7.955.610,00)
22	Kecamatan Arut Selatan	(991.146,00)	474.540,00
23	Kecamatan Arut Utara	1.740,00	(7.043.748,00)
24	Kecamatan Kumai	(1.113.006,00)	8,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.408.813,00	-
26	Badan Pendapatan Daerah	14.839.657,31	-
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	213,00
Jumlah		254.939.699,31	55.929.217,00

- Koreksi nilai penyusutan Aset Lain-lain tahun 2021 senilai (Rp354.420.984,34) terdapat pada Sekretariat Daerah (Rp80.319.984,34) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Rp274.101.000,00) disebabkan adanya pengembalian atas aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain dan direklasifikasikan ke aset tetap.

Jadi, Ekuitas Akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.271.087.498.235,88.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di Provinsi Kalimantan Tengah bagian barat, dengan ibu kota di Pangkalan Bun. Kabupaten Kotawaringin Barat didirikan pada tanggal 3 Oktober 1959 dan memiliki semboyan Marunting Batu Aji (Menuju Kejayaan). Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km² atau 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah bertetangga dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau. Secara administratif, Kabupaten Kotawaringin terdiri atas 81 Desa, 13 Kelurahan, dan 6 Kecamatan. Kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kecamatan Arut Selatan, yaitu 128.248 jiwa sedangkan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kumai, yaitu seluas 2.921 Km². Berdasarkan Peta RTRWK tahun 2017 – 2037, Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1°26' – 3°33' Lintang Selatan, 111°20' – 112°6' Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
2. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
3. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan;
4. dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Berdasarkan hasil proyeksi survei penduduk, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 sebanyak 272.531 jiwa. Jumlah penduduk menurut kelompok jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 141.564 jiwa dan perempuan sebanyak 130.967 jiwa.

Terhitung mulai tanggal 21 April 2017 Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H diangkat sebagai Bupati Kotawaringin Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.62-2912 Tahun 2017. Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dipimpin oleh:

1. Bupati : Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H
2. Wakil Bupati : AHMADI RIANSYAH
3. Sekretaris Daerah : SUYANTO, S.H., M.H

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka pada awal tahun 2017 terjadi Perubahan Struktur Organisasi Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pelantikan Organisasi Pemerintah Daerah yang diadakan pada tanggal 7 Januari 2017.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan data dari pembebanan gaji yang dibayarkan dan dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2021 sebanyak 3909 orang yang terdiri dari: Pejabat Negara 2 orang, golongan IV sebanyak 874 orang, golongan III sebanyak 2.585 orang, golongan II sebanyak 441 orang, dan golongan I sebanyak 7 orang.



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, yang mana dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.633.972.466.127,94 atau naik 12,76 persen dibandingkan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.449.011.596.895,94. Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.461.583.803.894,41 atau naik 1,32 persen dibandingkan Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.442.474.017.840,80. Surplus Anggaran sebesar Rp172.388.662.233,53 merupakan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja – Transfer Daerah. Pembiayaan Netto sebesar Rp89.531.350.426,37 merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp130.531.350.426,37 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp41.000.000.000,00. Jumlah Aset Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.387.967.337.153,31 atau naik sebesar 9,79 persen dibandingkan Aset Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.085.962.251.752,52.

Demikian secara ringkas pokok-pokok mengenai Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021. Semoga Laporan Keuangan yang disajikan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk penyusunan Laporan Keuangan tahun berikutnya.

Pangkalan Bun, April 2022
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH, SH., MH.

**Lampiran 5.1 Daftar Aset Bersengketa
Kabupaten Kotawaringin Barat**

NO.	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	NOMOR		LUAS (M ²)	TAHUN	LETAK/ ALAMAT	STATUS TANAH			PENGUNAAN	ASAL- USUL	HARGA (Rp)	KETERANGAN
		KODE BARANG	REGISTER				HAK	SERTIFIKAT					
								TANGGAL	NOMOR				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (<i>Tanah Bangunan Kantor Pemerintah</i>)	01.01.11.04.001	1	30.745	11/03/1996	Jl. H M Rafii	SPPFT			Bangunan Kantor	APBD	932.900.000,00	Nilai Neraca Merupakan Hasil Appraisal Th 2005
2	Tanah Bangunan Pasar (<i>Tanah Bangunan Pasar</i>)	01.01.11.02.001	21	39.777	23/09/2004	Jl. A. Yani Km 40 Pandu Senjaya	Hak Pakai	23/09/2004	SHP. 1	Pasar Sayangan	Hibah	62.500.000,00	Pandu Senjaya
3	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu (<i>Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu</i>)	01.01.11.04.012	1	2.400	31/12/2002	Jl. P. Antasari P.Bun	Hak Pakai			Puskesmas	Hibah	2.400.000.000,00	Puskesmas Arut Selatan
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	18	53.888	31/12/1985	Jl. Cilik Riwut II	Hak Pakai	13/08/1985	SHP. 155	Rumah Dinas	Pembelian	666.666.667,00	Rumah Dinas (Cilik Riwut II) dan STKN
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	7	7.115	31/12/1985	Jl. Iskandar No. 65 Kelurahan Madurejo	Hak Pakai	13/08/1985	SHP. 24	Kantor	Pembelian	1.423.000.000,00	Kantor Kelurahan Madurejo
6	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi (<i>Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi</i>)	01.01.11.04.009	1	2.500	27/08/2020	Pantai Kubu	Hibah				Hibah	1.092.250,00	Tanah Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
7	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan (<i>Tanah kosong yang sudah diperuntukkan</i>)	01.01.11.05.005	1	243.080	31/12/2004	Desa Kumpai Batu Atas	Hak Pakai	04/02/2003	SP.593.21 /17/KBA/IV /2003	Makam	Pembelian	425.390.000,00	Tanah Kosong untuk TPU di Desa Kumpai Batu Atas
8	Tanah kosong yang tidak diusahakan	01.01.11.05.001	4	462	31/12/1985	Jl. Hasanudin	Hak Pakai	13/08/1985	SHP No. 27	-	Pembelian	60.000.000,00	Tanah Kosong/ Kafe depan Gereja Imanuel
9	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) (<i>Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)</i>)	01.01.11.04.002	1	8.800	31/12/2005	Jl. Bhayangkara	Hak Pakai			SDN 3 Pasir Panjang	Lain-lain	88.000.000,00	Hasil Appraisal Tahun 2005

NO.	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	NOMOR		LUAS (M ²)	TAHUN	LETAK/ ALAMAT	HAK	STATUS TANAH		PENGGUNAAN	ASAL- USUL	HARGA (Rp)	KETERANGAN
		KODE BARANG	REGISTER					SERTIFIKAT					
								TANGGAL	NOMOR				
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Tanah Bangunan Kantor Pemerintah)	01.01.11.04.001	9	4.918	31/12/1981	Jl. A. Yani Km 63 Ds. Karang Mulya	Hak Pakai	20/02/2015	SHP. 5	Kantor BPP Pangkalan Banteng	Pembelian	23.323.368,00	SHM Tanah Kantor Bpp Pangkalan Banteng
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	5	839	31/12/1989	Jl. Diponegoro	Hak Pakai	20/09/1989	SHP No. 31	Gedung	Pembelian	167.800.000,00	Ex. Kantor PDAM
12	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya)	01.01.11.04.025	3	139.732	30/12/2006	Jl. Raya Pasir Panjang	Hak Pakai				Pembelian	734.320.400,00	Lokasi Peti Kemas + Pensertifikatan 2017 Rp33.440.400 + Pensertifikatan 2018 Rp2.220.000
13	Tanah Bangunan Olah Raga	01.01.11.04.008	3	30.000	31/12/2005	Jl. Pariwisata, Kec. Pangkalan Banteng	Hak Pakai		sertifikat asal	Lapangan	Pembelian	6.000.000,00	Lokasi Olah Raga Pangkalan Banteng
14	Tanah Kosong Lainnya	01.01.11.05.007	40	112.700	31/12/1994	Dusun Sumber Agung, Kec. Pangkalan Lada	Hak Pakai	15/01/1994	SHP. 2		Pembelian	56.400.000,00	Tanah Kosong/ Tanah Kas Desa
15	Tanah Kosong Lainnya	01.01.11.05.007	31	49.728	31/12/2004	Desa Pasir Panjang	Hak Pakai		SHP. 46	Perumahan	Pembelian	12.500.000,00	Tanah Kosong Lokalisasi PSK di Pasir Panjang
16	Tanah Kosong Lainnya	01.01.11.05.007	49	2.439	31/12/2005	Jl. Kawitan	Hak Pakai				Pembelian	292.700.000,00	Tanah Kosong
17	Tanah Kebun	01.01.11.05.004	1	36.625	31/12/2005	Jl. A. Yani Km. 14	Hak Pakai	08/01/2005	SHP. 1	Kebun	Pembelian	150.000.000,00	Tanah Kebun PKK Kab. Ktw. Barat
	Tanah Kebun	01.01.11.05.004	2	14.200	31/12/2005	Desa Purbasari	Hak Pakai		sertifikat asal	Kebun	Pembelian	99.400.000,00	Lokasi Perluasan Kebun PKK
	Hutan Untuk Penggunaan Khusus Lainnya	01.01.05.05.009	1	142.500	30/12/2006	Desa Purbasari	Hak Pakai		sertifikat asal	Hutan Kota	Pembelian	16.875.000,00	Lokasi Hutan Kota 1
	Hutan Untuk Penggunaan Khusus Lainnya	01.01.05.05.009	2	337.100	31/12/2007	Desa Purbasari	Hak Pakai		sertifikat asal	Hutan Kota	Pembelian	268.150.000,00	Lokasi Hutan Kota 2
	Hutan Untuk Penggunaan Khusus Lainnya	01.01.05.05.009	3	9.900	31/12/2008	Desa Purbasari	Hak Pakai		surat adat	Hutan Kota	Pembelian	54.750.070,00	Lokasi Hutan Kota 3

NO	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	NOMOR		LUAS (M ²)	TAHUN	LETAK/ ALAMAT	STATUS TANAH			PENGUNAAN	ASAL-USUL	HARGA (Rp)	KETERANGAN
		KODE BARANG	REGISTER				HAK	SERTIFIKAT					
								TANGGAL	NOMOR				
18	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (<i>Tanah Bangunan Kantor Pemerintah</i>)	01.01.11.04.001	1	9.739	31/12/2002	Jl. Iskandar No.5 P. Bun	Hak Pakai	31/12/2002	SHP. 129	Gedung Kantor	Lain-lain	1.460.900.000,00	
19	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (<i>Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya</i>)	01.01.11.04.025	1	97.092	26/04/1974	Jl. Padat Karya Kel. Baru Pangkalan Bun	Hak Pakai	26/04/1974	DA.07/D.I .5/IV-1974	Lahan Balai Benih dan RPH	Lain-lain	7.961.544.000,00	LAHAN BALAI BENIH/RPH
20	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	1	50.000	31/12/1997	Jl. H. M. Rafi'i	Hak Pakai	23/04/1997	SHP. 133		Pembelian	160.000.000,00	Tanah Kosong rencana Rujab Bappeda
21	Tanah Kosong Lainnya (<i>Tanah Kosong Lainnya</i>)	01.01.11.05.007	1	20.000	31/01/2018	Jl. Lijo Kel. Madurejo	Hak Pakai	18/02/1994	SHP. 43	Kosong	Pembelian	2.060.000.000,00	
Jumlah				1.446.279								19.584.211.755,00	

**Lampiran 5.2 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Kabupaten Kotawaringin Barat**

NO	JENIS BARANG/NAMA BARANG	DOKUMEN		NILAI KONTRAK (Rp)	KETERANGAN
		TANGGAL	NOMOR		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				619.890.273,72	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	11/10/2014	11/PJ-XI/DIKDAS/2014	49.027.000,00	Perencanaan Teknis Revitalisasi SMPN 1 Arut Selatan
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	11/10/2014	05/PJ-XI/DIKDAS/2014	49.280.000,00	Perencanaan Teknis Revitalisasi SDN 1 Kumai Hulu
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	11/10/2014	08/PJ-XI/DIKDAS/2014	48.917.000,00	Perencanaan Teknis Revitalisasi SDN 1 Baru
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	02/01/2016	03/SPK.Rec.01-02.03/2016	23.694.000,00	Perencanaan Pembangunan Aula Dinas Dikpora Tahap I
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	07/01/2016	03/SP.Was.01-02.03/2016	14.371.500,00	Pengawasan Pembangunan Aula Dinas Dikpora Tahap I
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	07/01/2016	03/SP.Kont.01-02.03/2016	434.600.773,72	Konstruksi Pembangunan Aula Dinas Dikpora Tahap I
Dinas Kesehatan				3.020.814.266,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	12/03/2015	440/903/KD.H	786.916.986,00	Peningkatan Pembangunan Puskesmas rawat Inap (perawatan) Kumai Kec. kumai. CV. EL YASSIN + Penambahan daya bangun puskesmas perawatan Kumai dari 900 menjadi 2200 Va CV.Jaya Raya No.440/037/KD.H
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	10/05/2017	440/490/kd.h	213.359.700,00	Pembayaran: Pelunasan, No.BAST: 440/10700/KD.A, Tanggal 18 Desember 2017, Pekerjaan :Pembangunan Sekretariat IBI kec Arut selatan (CV MYTA)
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	04/08/2019	-	2.090.000,00	Perencanaan Teknis Rehab Pustu desa Berambai Makmur (PT MEGASURYA KONSULTAN)
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	04/11/2019	-	2.086.000,00	Perencanaan Teknis Rehab Pustu Sungai Pulau (PT MEGASURYA KONSULTAN)
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	18/04/2019	-	4.180.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung lama pkm Desa pangkalan dewa (PT MEGASURYA KONSULTAN)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	19/06/2019	-	10.986.600,00	Perencanaan teknis pembangunan pustu raja sebrang (PT MEGA SURYA KONSULTAN)
7.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/08/2019	-	69.900.000,00	Rehab Pustu Sungai pulau (CV WAHYU A)
8.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>BANGUNAN</i>)	10/04/2019	-	108.750.000,00	Pembangunan Pustu Raja Sebrang (CV DENHAS) 30%
9.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	11/11/2019	-	2.794.000,00	Pengawasan Teknis rehab pustu desa berambai makmur (CV TIKKA KREATIF DESAIN KONSULTAN)
10.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	11/11/2019	-	14.485.600,00	Pengawasan teknis pembangunan pustu raja sebrang (CV TIKKA KREATIF DESAIN KONSULTANT)
11.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	11/12/2019	-	69.980.000,00	Rehab Pustu desa Berambai makmur (CV PRATAMA JASA PUTRA)
12.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	18/11/2019	-	2.795.440,00	Pengawasan teknis rehab pustu sungai pulau (CV TIKKA KREATIF DESAIN KONSULTAN)
13.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	12/06/2019	-	5.599.000,00	Pengawasan teknis rehabilitasi gedung lama puskesmas desa pangkalan dewa (CV TIKKA KREATIF DESAIN KONSULTANT)
14.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	12/06/2019	-	139.963.000,00	Rehabilitasi Gedung lama Puskesmas desa Pangkalan Dewa (CV LIRA NUSANTARA)

15.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	17/12/2019	-	253.750.000,00	Pembangunan Pustu raja sebrang (CV KDENHAS)
16.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>PERENCANAAN TEKNIS</i>)	-	-	2.266.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar Puskesmas Ipuh Bangun Jaya (PT MEGASURYA KONSULTAN)
17.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.849.000,00	Perencanaan teknis lanjutan rehab gedung puskesmas lama menjadi gedung pertemuan pkm Pangkalan Lada (PT MEGASURYA KONSULTAN)
18.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	42.810.000,00	Lanjutan Rehab Gedung lama pkm Pangkalan Lada (CV SAMPURNA JAYA)
19.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	4.268.000,00	Pengawasan teknis lanjutan gedung lama menjadi gedung pertemuan pkm lada (CV TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN)
20.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (BANGUNAN)	-	-	99.890.000,00	Lanjutan rehab gedung puskesmas lama menjadi gedung pertemuan puskesmas pangkalan lada (DID tAMBAHAN) (CV SAMPURNA JAYA)
21.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.701.440,00	Retribusi daerah untuk Pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Puskesmas Sungai Rangit
22.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	05/05/2021	800/068/KD.B.Konsultan	5.643.000,00	perencanaan teknis pembangunan pustu desa Gendis (CV. PRIMA CIPTA DESIGN). BASTHP : 800/3457/KD.A/2021 tanggal 11 mei 2021
23.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	07/06/2021	800/279/KD.B.KONSTRUKSI	189.753.500,00	Pembangunan Pustu Desa Gandis (CV RAHMAH) Basthp no : 800/7252/KD.B/2021 Tanggal 1 Oktoberr 2021
24.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	07/06/2021	800/285/KD.B.KONSULTAN.P	3.806.000,00	Pengawasan teknis pembangunan pustu gancis (CV EMPIRIS TRITECH DESIGN) Basthp no : 800/7262/KD.B/2021 tanggal 1 oktober 2021
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	26/09/2019	RS/S.19.09.994.III.2	384.300.000,00	Gedung Pemulasaran Jenazah (Tahap 1)
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	10/10/2019	RS/S.10.10.1028.III.2	89.548.800,00	Konsultasi Gedung Poliklinik
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konsultasi Perencanaan teknis pembangunan gedung poliklinik</i>)	10/10/2019	RS/S.10.10.1028.III.2	208.947.200,00	Konsultasi Perencanaan teknis pembangunan gedung poliklinik
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	27/03/2020	619/445/RSUD.SP	88.918.500,00	Perencanaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	27/03/2020	619/445/RSUD.SP	207.476.500,00	Perencanaan pembangunan bedah sentral
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				119.581.912.508,97	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Jembatan Beton Kabupaten/Kota</i>)	23/07/2013	600/48-SP/BM-2013/PUD	798.589.922,00	Triple box culvert 3x3 S.Bengaris pada ruas jalan Kumpai Batu Atas - Sebuai tahap 1 (Arsel)
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Jembatan Beton Kabupaten/Kota</i>)	22/04/2015	600/049-SP/BM-2015/PUD	563.853.900,00	Jembatan Tipe Komposit pada ruas Jalan Sei. Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei. Kakap Tahap I) (Kumai), Rp. 450.000.000,- BAST No. 80/SH-PB/IX/2015, Tgl. 18 Sep 2015, + Perenc. Teknis Rp. 98.962.600,- + Pengawasan Teknis Rp. 14.891.000,-
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Jalan Kabupaten Kelas III</i>)	13/08/2015	600/215-SP/BM-2015/PUD	99.170.500,00	Perencanaan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Tahun 2016
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Jalan Kabupaten Kelas III</i>)	18/08/2015	600/318-SP/BM-2015/PUD	123.981.000,00	Perencanaan Teknis Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Tahun 2016
	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	19/11/2015	600/446-SP/BM-2015/PUD	82.392.200,00	<i>Perencanaan Teknis Jembatan Tipe Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 2) (Kumai), Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2016 (ABT)</i>

6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen</i>)	25/11/2015	600/33-SPK/TRKP-2015/PUD	49.335.000,00	Perencanaan teknis Prasarana TPA Trans LIK Desa pasir Panjang
7.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	24/04/2015	600/045-SP/BM-2015/PUD	5.944.666.000,00	Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap I (Arsel) Rp. 4.606.595.000- BAST No. 001/PT.KJM/XII/2015, Tgl. 02 Desember 2015, + Perenc. Teknis Rp. 793.067.000,- + Pengawasan Teknis Rp. 148.850.000,- + Penyelidikan tanah Rp. 396.154.000,-
8.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Jembatan Beton Kabupaten/Kota</i>)	31/12/2015	600/216-SP/BM-2015/PUD	119.823.000,00	Perencanaan Teknis Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Tahun 2016
9.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	31/12/2015	600/32-SPK/TRKP-2015/PUD	24.000.000,00	Perencanaan Teknis TPST di Kecamatan Arut Selatan
10.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	28/01/2016	600/037-SP/BM-2016/PUD	1.627.118.000,00	Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 2) (Kumai), Rp. 1.580.000.000,- BAST No. 70/SH-PB/VII/2016, Tgl. 25 Juli 2016, Pengawasan Rp. 47.118.000,-
11.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	11/11/2016	600/143-SP/BM-2016/PUD	197.840.500,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 19, Rp. 197.840.500,-
12.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	11/11/2016	600/140-SP/BM-2016/PUD	205.964.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 16, Rp. 205.964.000,- BAST No. 303/PT.MK-P.BUN/XII/2016, Tgl. 20 Des 2016
13.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/144-SP/BM-2016/PUD	241.626.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 20, Rp. 241.626.000,-, BAST No. 523/BNP-P.BUN/XII/2016, Tgl. 20 Des 2016
14.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/153-SPK/BM-2016/PUD	48.620.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Masuk Vihara Natai Raya (Arsel) + Jalan AMPI Candi - Sungai Tendang (Kumai) + Jalan Yuka Candi (Kumai) (Dana DP2D2), Rp. 48.620.000,-, BAST No. 104/CV.SMC/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
15.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	06/10/2016	600/028-SP/BM-2016/PUD	3.582.202.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Rungun - Kondang - Batas Lamadau (Kolam) + Jalan Beji (Kolam) + Jalan Sagu Suka Mulya-Batas Pangkalan Muntai (Kolam) (Dana DP2D2), BAST No. 192/PCD.P.BUN/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
16.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	-	48.785.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Rungun - Kondang - Batas Lamadau (Kolam) + Jalan Beji (Kolam) + Jalan Sagu Suka Mulya-Batas Pangkalan Muntai (Kolam) (Dana DP2D2), BAST No. 192/PCD.P.BUN/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
17.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/148-SPK/BM-2016/PUD	48.620.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Kumai Hulu - Sp. Pelabuhan Roro - Sp. Pelabuhan CPO (Kumai) (Dana DP2D2), BAST No. 193/PCD.P.BUN/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
18.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/149-SPK/BM-2016/PUD	48.620.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Kumpai Batu Atas - Batas Pasir Panjang - Sebuai Barat (Arsel + Kumai) (Dana DP2D2), BAST No. 101/CV/SMC/XII/2016, Tgl. 14 De 2016
19.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/150-SPK/BM-2016/PUD	48.235.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Pelita (Kumai) + Jalan DPRD 1 (Kumai) (Dana DP2D2), BAST No. 98/CV.SMC/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
20.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/165-SPK/BM-2016/PUD	48.862.000,00	Perencanaan Teknis Jalan A. Wongsu-Jalan Pramuka (Arsel) (Dana DP2D2), Rp. 48.862.000,- BAST No. 308/PT.MK-P.BUN/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016

21.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/158-SPK/BM-2016/PUD	48.834.500,00	Perencanaan Teknis Jalan Natai Arahan (arsel) (Dana DP2D2), Rp. 48.834.500,- BAST No. 202/CV.BEC-PB/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
22.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/159-SPK/BM-2016/PUD	48.807.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Akasia 2 + Jalan Perumahan Pasir Panjang Permai+ Jl. Sudirman (Arsel) (Dana DP2D2), Rp. 48.807.000,- BAST No. 36/CV.EBP-PB/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
23.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/160-SPK/BM-2016/PUD	48.834.500,00	Perencanaan Jalan Sp. Bumi Harjo - Pangkalan Satu (Kumai) (Dana DP2D2), Rp. 48.834.500,- BAST No. 202/CV.BEC-PB/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
24.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/168-SPK/BM-2016/PUD	49.137.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Sp. Natai Kerbau (P. Banteng) (Dana DP2D2), Rp. 49.137.000,- BAST No. 202/CV.BEC-PB/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
25.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/161-SPK/BM-2016/PUD	49.109.500,00	Perencanaan Teknis Jalan Sp. Marga Mulya (P. Banteng) (Dana DP2D2), Rp. 49.109.500,- BAST No. 200/CV.BEC-PB/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
26.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/162-SPK/BM-2016/PUD	49.137.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Negara KM. 53-Sungai Bengkoang (P. Banteng) (Dana DP2D2), Rp. 49.137.000,- BAST No. 40/CV.EBP-PB/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
27.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/163-SPK/BM-2016/PUD	49.137.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Sido Mulyo-Sungai Kuning (P. Banteng) (Dana DP2D2), Rp. 49.137.000,- BAST No. 42/CV.EBP-PB/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
28.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/164-SPK/BM-2016/PUD	49.137.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Beringin-Sungai Rangit Jaya (P. Lada) (Dana DP2D2), Rp. 49.137.000,- BAST No. 38/CV.EBP-PB/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
29.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/156-SPK/BM-2016/PUD	48.785.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Meden (Kumai) (Dana DP2D2), Rp. 48.785.000,-, BAST No. 353/BPC-P.BUN/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
30.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/157-SPK/BM-2016/PUD	48.290.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Martapada RT 12 Kelurahan Kumai Hilir + Jalan Keramat Kelurahan Kumai Hilir + Jalan Berlian (Kumai) (Dana DP2D2), Rp. 48.290.000,-, BAST No. 429/BPC-P.BUN/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
31.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/152-SPK/BM-2016/PUD	48.785.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Sp. Salip - Sungai Dau (Aruta) (Dana DP2D2), Rp. 48.785.000,-, BAST No. 191/PCD.P.BUN/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
32.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/136-SP/BM-2016/PUD	205.026.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 12, Rp.. 205.026.000,- BAST No. 08/CV.KPK/XII/2016, Tgl. 20 Desember 2016
33.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/138-SP/BM-2016/PUD	198.793.760,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 14, Rp. 198.793.760,-, BAST No. 23/CV.KBMK/XII/2016, Tgl. 20 Des 2016
34.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	11/11/2016	600/139-SP/BM-2016/PUD	205.964.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 15, Rp. 205.964.000,-
35.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/141-SP/BM-2016/PUD	205.975.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 17, Rp. 205.975.000,- BAST No. 200/CV.TKDK-PRY/XII/2016, Tgl. 20 Desember 2016
36.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/142-SP/BM-2016/PUD	201.322.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 18, Rp. 201.322.000,-, BAST No. 133/ARG-PB/XII/2016, Tgl. 20 Des 2016
37.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/145-SP/BM-2016/PUD	241.719.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 21, Rp. 241.719.000,- BAST No. 483/BPC-P.BUN/XII/2016, Tgl. 20 Des 2016

38.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/146-SP/BM-2016/PUD	241.527.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 22, Rp. 241.527.000,- BAST No. 524/BNP-P.BUN/XII/2016, Tgl. 20 Des 2016
39.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/135-SP/BM-2016/PUD	98.494.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 23, Rp. 98.494.000,- BAST No. 299/BPC-P.BUN/XII/2016, Tgl. 20 Des 2016
40.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/166-SPK/BM-2016/PUD	48.862.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Bhayangkara (Arsel) (Dana DP2D2), Rp. 48.862.000,-
41.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/167-SPK/BM-2016/PUD	48.862.000,00	Perencanaan Teknis Jalan H.M. Idris - Al Huda (Kumai) (Dana DP2D2) Rp. 48.862.000,-
42.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/155-SPK/BM-2016/PUD	48.895.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Makarti Jaya-Sp. Suka Jaya (Kolam) (Dana DP2D2), Rp. 48.895.000,-
43.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/151-SPK/BM-2106/PUD	34.375.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Type Box Culvert Jalan Sidorejo - Kumpai Batu Bawah (Arsel) + Jembatan Type Box Culvert pada ruas Jl. Mihau (Arsel) + Jembatan Type Box Culvert pada ruas Jalan Sungai Bengkoang-Sido Mulyo-Semanggang (P. Banteng)
44.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	30/11/2016	600/137-SP/BM-2016/PUD	203.929.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 13, Rp. 203.929.000,-
45.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	556.424.400,00	Pekerjaan Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 3) (Kumai)
46.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.581.091.568,00	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap III (Arsel)
47.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	23.599.400,00	Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap III (Arsel)
48.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Jembatan Cable Stayed</i>)	-	-	796.633.200,00	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap III (Arsel)
49.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	596.169.000,00	Pekerjaan Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei. Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei. Kakap Tahap 3) (Kumai)
50.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis</i>)	-	-	4.800.000,00	Perencanaan Teknis Pembuatan Jembatan Layanan Usaha Tani DIR Sulung Kec. Arut Selatan
51.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	834.636.600,00	Pekerjaan Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 3) (Kumai)
52.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	94.397.600,00	Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap III
53.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	605.441.232,00	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap III (Arsel)
54.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Teknis</i>)	-	-	59.442.000,00	Pekerjaan Pengawasan Teknis Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 3) (Kumai)
55.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Teknis</i>)	-	-	6.300.000,00	Pengawasan Teknis Pembuatan Jembatan Layanan Usaha Tani DIR Sulung Kec. Arut Selatan
56.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	27.698.000,00	Pengawasan Teknis Peningkatan Pelayanan PDAM Kel. Pangkut, Kec. Arut Selatan
57.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	49.390.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Struktur Jalan Iskandar + Jalan Pasir Panjang - Kumai
58.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	49.390.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Struktur Jalan Sagu Suka Mulya - Suka Makmur - Ipuh Bangun Jaya - Palih Baru - Batas Kenawan

59.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	49.390.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Struktur Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama + Jalan Sumber Mukti - Batas Sukamara
60.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	49.142.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Struktur Jalan Sp. Dinamika - Pangkalan Banteng + Jalan DPRD Kumai
61.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	49.093.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Struktur Jalan Umpang - Pandu Sanjaya + Jalan Logging Pangkalan Tiga
62.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	49.225.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Struktur Jalan Purbasari - Pangkalan Durin - Sungai Rangit Jaya
63.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis</i>)	-	-	49.142.500,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Struktur Jalan Mulya Jadi - Sungai Pulau - Batas Sungai Bedaun (Pangkalan Banteng)
64.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	49.648.500,00	Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Sp. Peyombaan - Pandau (Aruta)
65.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	49.648.500,00	Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Pangkut - Kerabu (Aruta)
66.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	49.648.500,00	Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Sp. Penyombaan - Sambi (Aruta)
67.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	49.648.500,00	Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Kerabu - Penyombaan (Aruta)
68.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	49.648.500,00	Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Pandau - Riam - Panahan (Aruta)
69.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	35.717.000,00	Pengawasan Teknis Peningkatan Pelayanan PDAM Kel. Baru, Kec. Arut Selatan
70.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	34.792.000,00	Pengawasan Teknis Peningkatan Pelayanan PDAM Desa Sei Pakit Kec. Pangkalan Banteng
71.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	600.000.000,00	Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 4 (Arsei)
72.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 4</i>)	-	-	17.991.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 4
73.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Teknis Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 4) (Kumai)</i>)	-	-	12.000.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 4) (Kumai)
74.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	597.711.000,00	Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 4) (Kumai)
75.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	1.920.000.000,00	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 4 (Arsei)
76.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Teknis Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 4) (Kumai)</i>)	-	-	48.000.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 4) (Kumai)
77.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	767.062.450,00	Pekerjaan Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 4) (Kumai)

78.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 4</i>)	-	-	71.964.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 4
79.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	480.000.000,00	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 4 (Arsel)
80.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis</i>)	-	-	98.100.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ahmad Wongso - Jalan Pramuka + Jalan Sp. Kadipi Atas - Makarti Jaya
81.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis</i>)	-	-	98.000.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kumai / Gerilya - Sungai Tendang + Jalan Samari - Stadion - Pinang Merah
82.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	98.800.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan A. Yani Karang Mulya (Pangkalan Banteng) + Jalan Km. 53 - Sungai Bengkoang
83.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	82.214.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Penyombaan - Sambi -Sp. Salip + Jalan Pangkalan Tiga - Batas Sungai Bengkoang (GSDI)
84.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	229.122.550,00	Pekerjaan Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei. Kakap Tahap 4) (Kumai)
85.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	398.474.000,00	Pekerjaan Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 4) (Kumai)
86.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Jembatan</i>)	-	-	630.580.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 1 (Arsel)
87.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5</i>)	-	-	23.529.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5
88.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Thp. I</i>)	-	-	25.047.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap I
89.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Jembatan Baja</i>)	-	-	585.940.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5 (Arsel)
90.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	756.696.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 1 (Arsel)
91.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Thp. I</i>)	-	-	100.188.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap I
92.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	468.752.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5 (Arsel)
93.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5</i>)	-	-	94.116.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5
94.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Perwira + Jalan P. Antasari + Jalan Rangga Santrek + Jalan PRA. Kusumayudha</i>)	-	-	36.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Perwira + Jalan P. Antasari + Jalan Rangga Santrek + Jalan PRA. Kusumayudha
95.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis</i>)	-	-	98.947.200,00	Perencanaan Teknis Jalan Diponegoro + Jalan Pakunegara + Jalan Iskandar
96.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis</i>)	-	-	98.956.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Sp. Natai Raya - Pelabuhan RoRo (Tempenek) + Jalan Natai Raya - Batas Sungai tendang - Batas Natai Raya
97.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan</i>)	-	-	23.778.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Samari - Stadion - Pinang Merah

	Samari - Stadion - Pinang Merah)				
98.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	-	-	10.500.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Pasir Panjang - Kumai
99.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	-	-	1.765.624.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap I
100.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	-	-	703.128.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5 (Arsel)
101.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	-	600/275-SP/CK-2019/PUPR	8.271.421.000,00	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pangkalan Bun Park
102.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Perencanaan Teknis)	-	-	49.594.600,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Bundaran Misbar Kec. Arsel
103.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Perencanaan Teknis)	-	-	98.032.000,00	Pekerjaan Perencanaan IPAL Kec. Arut Selatan Dan Kec. Arut Utara
104.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	05/02/2019	600/273-SP/CK-2019/PUPR	9.789.698.000,00	Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Stadion Sport Center Pangkalan Bun
105.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Jembatan Type Cable Stayed)	-	-	1.171.880.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5 (Arsel)
106.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	-	-	99.000.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Arsip Dan Mushola
107.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Gg. Purali RT. 10, Kel. Madurejo, Kec. Arsel)	-	-	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Gg. Purali RT. 10, Kel. Madurejo, Kec. Arsel
108.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Samping Masjid Miftahul Hidayah, Desa Bumi Harjo, Kec. Kumai)	-	-	3.800.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Samping Masjid Miftahul Hidayah, Desa Bumi Harjo, Kec. Kumai
109.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Perencanaan Teknis Penataan Estetika Jalan Pangeran Antasari, Kec. Arsel)	-	-	44.879.400,05	Perencanaan Teknis Penataan Estetika Jalan Pangeran Antasari, Kec. Arsel
110.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 15 Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel)	-	-	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 15 Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel
111.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 32 Kel. Baru, Kec. Arsel)	-	-	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 32 Kel. Baru, Kec. Arsel
112.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	-	-	3.316.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 24 Dan RT. 25, Kel. Madurejo, Kec. Arsel
113.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	-	-	5.500.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Perum. Graha Mas Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel
114.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	-	-	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 16 Kel. Madurejo, Kec. Arsel
115.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	-	-	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Akasia Permai Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel
116.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	-	-	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Beringin Rindang Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel
117.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	-	-	2.960.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Melati, Desa Batu Belaman, Kec. Kumai
118.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	-	-	4.700.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Sehati, Gg. Kelapa, Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai

119.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai</i>)	-	-	9.636.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai
120.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	24.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Salak Desa Karang Mulya Kec. Pangkalan Banteng
121.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	27.000.000,00	Perencanaan Teknis Jembatan Triple Box Culvert Sungai Boyun 1
122.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Rumbia RT. 17 Perbatasan Kel. Raja dan Kel. Sidorejo, Kec. Arsel</i>)	-	-	7.705.770,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Rumbia RT. 17 Perbatasan Kel. Raja dan Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
123.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Sangalang RT. 19 Kel. Sidorejo Kec. Arsel</i>)	-	-	4.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Sangalang RT. 19 Kel. Sidorejo Kec. Arsel
124.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Alpukat RT. 02 Kel. Madurejo, Kec. Arsel</i>)	-	-	3.400.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Alpukat RT. 02 Kel. Madurejo, Kec. Arsel
125.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Sidomulyo, Kec. P. Banteng</i>)	-	-	4.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Sidomulyo, Kec. P. Banteng
126.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Uka 3 RT. 10 Kel. Madurejo, Kec. Arsel
127.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gg. Mangga Kel. Madurejo, Kec. Arsel</i>)	-	-	3.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gg. Mangga RT. 20 Kel. Madurejo, Kec. Arsel
128.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kancil RT. 25 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel</i>)	-	-	3.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kancil RT. 25 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
129.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Apomala RT. 15 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel</i>)	-	-	3.900.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Apomala RT. 15 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
130.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	4.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sepakat Dusun Karang Anyar Kel. Mendawai, Kec. Arsel
131.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	4.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Penghubung RT. 07 Desa Mulya Jadi, Kec. P. Banteng
132.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel</i>)	-	-	3.200.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
133.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 20 Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel
134.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.238.230,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Graha Asri Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel
135.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Bhayangkara RT. 07 Pasir Panjang, Kec. Arsel

136.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Gaharu Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel
137.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Menuju Kantor Desa Sei Tendang, Kec. Kumai</i>)	-	-	2.610.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Menuju Kantor Desa Sei Tendang, Kec. Kumai
138.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pasir Putih RT. 10 Desa Kapitan, Kec. Kumai
139.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	4.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Samari II Desa Pasir Panjang Kec. Arsel
140.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	4.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Asmar Ujung Kel. Madurejo Kec. Arsel
141.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.800.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Bata RT. 11 Menuju MTSN Korindo Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
142.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.600.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Jeruk Kel. Madurejo, Kec. Arse
143.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kecambah Kel. Baru, Kec. Arsel
144.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kepiting I Kel. Baru, Kec. Arsel
145.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	4.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Matao RT. 16 Belakang SMP 2 Kel. Madurejo, Kec. Arsel
146.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.600.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Mufakat RT. 14 Kel. Madurejo, Kec. Arsel
147.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Palapa RT. 09 Kel. Madurejo, Kec. Arsel
148.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.200.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Piranha Kel. Baru Kec. Arsel
149.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Rinjani Kel. Madurejo, Kec. Arsel
150.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	4.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Jelawat RT. 34 Kel. Baru, Kec. Arsel
151.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Ketapang Kencana RT. 10 Kec. Madurejo, Kec. Arsel
152.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	1.600.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Mangga RT. 20 Kel. Madurejo, Kec. Arsel
153.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Padat Karya Gg. Kemiri RT. 03 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan</i>)	-	-	2.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Padat Karya Gg. Kemiri RT. 03 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan
154.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.200.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pesantren Kel. Mendawai Seberang Kec. Arsel
155.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Ratu Mangku Gg. Nangka Kec. Arsel
156.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.778.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Mendawai Seberang, Kec. Arsel
157.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.778.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Raja Seberang, Kec. Arsel

158.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Damai 1 RT. 09, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel</i>)	-	-	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Damai 1 RT. 09, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
159.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Menuju SMK 1 Kec. Kotawaringin Lama</i>)	-	-	5.500.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Menuju SMK 1 Kec. Kotawaringin Lama
160.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Jaringan Perpipaan Desa Pangkalan Satu Kec. Kumai</i>)	-	-	40.000.000,00	Perencanaan Jaringan Perpipaan Desa Pangkalan Satu Kec. Kumai
161.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pekerjaan Perencanaan Teknis Penataan Kawasan RTH Lapangan Termili Kel. Raja, Kec. Arsel</i>)	-	-	3.982.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Penataan Kawasan RTH Lapangan Termili Kel. Raja, Kec. Arsel
162.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.320.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 10, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
163.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Gg. Mentawa Kel. Raja, Kec. Arsel</i>)	-	-	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Gg. Mentawa Kel. Raja, Kec. Arsel
164.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Cilik Riwt 1 RT. 14 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
165.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Jendral Sudirman RT. 15, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
166.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 06, Kel. Raja, Kec. Arsel
167.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Terong RT. 19, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
168.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Gg. Bekicot Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
169.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Gg. Rusa 4 Dan Rusa 5 RT. 27, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel</i>)	-	-	2.711.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Gg. Rusa 4 Dan Rusa 5 RT. 27, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
170.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Perluasan Jaringan Perpipaan Desa Amin Jaya, Kec. P. Banteng</i>)	-	-	59.110.000,00	Perencanaan Perluasan Jaringan Perpipaan Desa Amin Jaya, Kec. P. Banteng
171.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Toilet Umum Pangkalan Bun Park</i>)	-	-	11.275.000,00	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Toilet Umum Pangkalan Bun Park
172.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Lingkungan IPLT</i>)	-	-	8.360.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Lingkungan IPLT
173.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pekerjaan Perencanaan Teknis Penataan Kawasan TPU SKIP (Kristen Dan Muslim) Dan Bangunan Pelengkap</i>)	-	-	3.503.500,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Penataan Kawasan TPU SKIP (Kristen Dan Muslim) Dan Bangunan Pelengkap

174.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Gapura Selamat Datang Kota Manis Pangkalan Bun Kec. Arsel</i>)	-	-	3.965.500,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Gapura Selamat Datang Kota Manis Pangkalan Bun Kec. Arsel
175.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kel. Raja, Kec. Arsel</i>)	-	-	3.300.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kel. Raja, Kec. Arsel
176.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Lapangan Sampuraga Lama</i>)	-	-	39.699.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Lapangan Sampuraga Lama
177.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pekerjaan Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Sungai Buun Pangkalan Bun</i>)	-	-	19.800.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Sungai Buun Pangkalan Bun
178.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.800.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kel. Madurejo, Kec. Arsel
179.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.800.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
180.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.800.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kel. Mendawai, Kec. Arsel
181.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.800.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Lingkungan Jl. P. Bendahara Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
182.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.800.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai
183.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Gedung Bangunan</i>)	-	-	2.870.000.000,00	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Sport Center Dan Fasilitas Penunjang
184.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Teknis Pembangunan GOR Sport Center</i>)	-	-	118.934.200,00	Pengawasan Teknis Pembangunan GOR Sport Center
185.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 2 Kec. Arut Selatan</i>)	-	-	55.490.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 2 Kec. Arut Selatan
186.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	1.346.259.900,00	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pangkalan Bun Park
187.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan Pangkalan Bun Park</i>)	-	-	186.120.000,00	Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan Pangkalan Bun Park
188.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	5.942.280.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 6 Kec. Arut Selatan (Paket 2)
189.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Teknis Pembangunan GOR Sport Center</i>)	-	-	475.736.800,00	Pengawasan Teknis Pembangunan GOR Sport Center
190.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	791.446.493,92	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pangkalan Bun Park
191.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	9.057.720.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 6 Kec. Arut Selatan (Paket 1)
192.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Bangunan Olah Raga</i>)	-	-	8.130.000.000,00	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Sport Center Dan Fasilitas Penunjang
193.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.350.000.000,00	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung serbaguna Sport center dan fasilitas penunjang

194.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	516.720.000,00	Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 6 Kec. Arut Selatan
195.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.349.826.606,08	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pangkalan Bun Park
196.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	1.180.129.000,00	Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 2 Kec. Arut Selatan
197.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	446.380.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 6 Kec. Arut Selatan
198.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	25/01/2021	600/079-SPK/BM-2021/PUPR	6.511.628,00	Perencanaan Teknis Jalan Tempayang - Sumber mukti Kec. Kotawaringin Lama
199.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	18/02/2021	600/66-SPK/CK-2021/PUPR	3.256.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jl. Akhmad RT.15 Kel. Sidorejo Kec. Arsel
200.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	13/08/2021	600/149-SPK/BM-2021/PUPR	40.080.700,00	Perencanaan Teknis Jalan Negara KM. 53 - Sungai Bengkuang
201.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	08/05/2021	600/150-SPK/BM-2021/PUPR	40.084.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Baru - Pangkalan Bungur
202.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	08/05/2021	600/151-SPK/BM-2021/PUPR	39.968.500,00	Perencanaan Teknis Jalan Tanjung Terantang - Tanjung Putri
203.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	08/05/2021	600/152-SPK/BM-2021/PUPR	39.952.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Teluk Bogam - Keraya - Sebuai Timur - Sebuai - Batas Tanjung Putri
204.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	08/05/2021	600/153-SPK/BM-2021/PUPR	39.924.500,00	Perencanaan Teknis Jalan Sp. Sagu Suka Mulya - Suka Makmur - Ipuh Bangun Jaya - Palih Baru - Batas Kenawan
205.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	06/07/2021	600/031-SP/BM-2021/PUPR	27.615.500,00	Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 3 = 27.615.500,00
206.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	20/05/2021	600/030-SP/BM-2021/PUPR	83.569.750,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 7 = 83.569.750
207.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	23/02/2021	600/4-SP/CK-2021/PUPR	10.428.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Lama Pangkalan Bun Park
208.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	19/01/2021	600/37-SP/CK-2021/PUPR	4.505.786.998,92	Lanjutan Pembangunan Pangkalan Bun Park = 4.327.784.998,92 + Pengawasan Teknis = 178.002.000
209.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	21/10/2021	600/160-SPK/BM-2021/PUPR	99.178.750,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 1 = 99.178.750
210.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	21/10/2021	600/162-SPK/BM-2021/PUPR	19.077.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 2 Pek. Tipe Box Culvert Jalan Desa Natai Baru Menuju Desa Kadipi Atas Kec. Arsel = 19.077.000
211.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	21/10/2021	600/162-SPK/BM-2021/PUPR	20.000.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 2 Pek. Pembangunan Box Culvert Desa Melawen (Pangkalan Lada) = 20.000.000
212.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	21/10/2021	600/162-SPK/BM-2021/PUPR	20.000.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 2 Pek. Jembatan Sungai Boyun (Arut Utara) = 20.000.000
213.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	21/10/2021	600/162-SPK/BM-2021/PUPR	20.000.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 2 Pek. Jembatan Sungai Kakap (Kumai) = 20.000.000
214.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	21/10/2021	600/162-SPK/BM-2021/PUPR	20.000.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 2 Pek. Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 4 (Arut Selatan) = 20.000.000
215.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	21/10/2021	600/154-SPK/BM-2021/PUPR	99.495.000,00	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 1
216.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	21/10/2021	600/155-SPK/BM-2021/PUPR	99.495.000,00	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 2
217.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	21/10/2021	600/156-SPK/BM-2021/PUPR	99.495.000,00	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 3

218.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	21/10/2021	600/157-SPK/BM-2021/PUPR	99.495.000,00	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 4
219.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	21/10/2021	600/158-SPK/BM-2021/PUPR	99.261.800,00	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 5
220.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	21/10/2021	600/159-SPK/BM-2021/PUPR	99.471.900,00	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 6
221.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	21/10/2021	600/160-SPK/BM-2021/PUPR	98.340.000,00	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 7
222.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	23/06/2021	600/016-SP/BM-2021/PUPR	697.800.000,00	Pembangunan Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 3 = 697.800.000 - Pemancangan Tiang Pancang Baja
223.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	20/05/2021	600/017-SP/BM-2021/PUPR	2.038.780.000,00	Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 7 = 2.038.780.000 - Pemancangan Tiang Pancang Baja
224.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	25/10/2021	600/6-SPK/CK-2021/PUPR	25.630.000,00	Perencanaan Teknis Penataan Lapangan Sepak Bola Standar Nasional Sport Center
225.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	25/10/2021	600/5-SPK/CK-2021/PUPR	24.035.000,00	Perencanaan Teknis Penataan RTH eks Pasar Kampung Baru
226.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	26/10/2021	600/70-SPK/SDA-2021/PUPR	34.056.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Kanal Banjir
227.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	18/02/2021	600/38-SP/CK-2021/PUPR	19.964.060.000,00	Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Sport Center dan Fasilitas Penunjang = 19.211.000.000 + Pengawasan Teknis = 753.060.000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				2.137.666,67	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.137.666,67	Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar Makam (2) Giri Loyo Desa Purbasari Kec. Pangkalan Lada
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				75.839.500,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Pembangunan Pos Pantau (Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama)</i>)	-	-	2.717.000,00	Perencanaan Pembangunan Pos Pantau (Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama)
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Pengawasan Pos Pantau (Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama)</i>)	-	-	2.722.500,00	Pengawasan Pos Pantau (Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama)
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran</i>)	-	-	70.400.000,00	pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran/belanja pembangunan pekerjaan pembangunan pos pantau jalan pangkalanbun - kotawaringin lama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah				389.121.892,00	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	4.319.892,00	Perencanaan Pembangunan Menara Pantau Pengadaan Nomor : 24.04.09.03.2020.000023
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	8.437.000,00	Perencanaan Pembangunan Gedung Sayap Kiri/Kanan (Lanjutan)
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.981.000,00	Perencanaan Pembangunan Garasi dan Cuci Mobil
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	29/10/2021	008/16.4/PA.BPBD.IV.3/X/2021	44.800.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Arga Mulya
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	29/10/2021	008/16.4/PA.BPBD.IV.3/X/2021	30.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Sidomulyo 2
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	29/10/2021	008/16.5/PA.BPBD.IV.3/X/2021	32.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Keraya I
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	29/10/2021	008/16.5/PA.BPBD.IV.3/X/2021	42.492.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Sebuai
8	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	29/10/2021	008/16.3/PA.BPBD.IV.3/X/2021	38.723.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Tanjung Terantang III
9	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	29/10/2021	008/16.3/PA.BPBD.IV.3/X/2021	36.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Tanjung Terantang I

10	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	29/10/2021	008/16.1/PA.BPBD.IV.3/X/2021	22.466.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Primer I Desa Kumpai Batu Bawah
11	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	29/10/2021	008/16.1/PA.BPBD.IV.3/X/2021	24.640.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Bedara Desa Kumpai Batu Bawah
12	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	29/10/2021	008/16.1/PA.BPBD.IV.3/X/2021	27.650.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kumpai Batu Bawah-Kumpai Batu Atas
13	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	29/10/2021	008/16.2/PA.BPBD.IV.3/X/2021	39.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Hijau
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	29/10/2021	008/16.2/PA.BPBD.IV.3/X/2021	35.613.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Deraman Desa Riam
Dinas Sosial				10.373.000,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	15/04/2021	760/729/Dinsos.I/2021	10.373.000,00	Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan
Dinas Lingkungan Hidup				1.815.893.558,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	08/04/2011	600/508-SPK/PUD	66.826.100,00	Penataan Taman Pertigaan Jl. H.M.Rafii - Pasir Panjang - Kumpai Batu Atas (Persentase 90 %)
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	14/08/2011	600/505-SPP/PUD	297.010.800,00	Penataan Bundaran Sport Center, Kec. Arsel (Persentase 42 %)
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	07/02/2012	600/47-SP/TRKP-2012 /PUD	200.439.211,00	Penataan Bundaran Sport Center Tahap II (Persentase 45 %)
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	07/02/2012	600/42-SP/TRKP-2012 /PUD	319.693.048,00	Penataan Taman Kawasan Bundaran Kumai (Persentase 35,64 %)
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	07/12/2012	600/46-SP/TRKP-2012 /pud	115.058.942,00	Penataan Taman Kawasan Bundaran GM. Arsyad (Persentase 52,72 %)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	07/02/2012	600/48-SP/TRKP/2012 /PUD	150.249.724,00	Penataan Taman Kawasan Bundaran SMA 3, Kelurahan Madurejo (Persentase 35,42 %)
7.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	07/02/2012	600/49-SP/TRKP-2012 /PUD	200.348.733,00	Penataan Plankson Jalan Menuju Soprt Center (Persentase 90 %)
8.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	24/04/2014	600/21-SPK/TRKP-20 14/PUD	197.928.000,00	Lanjutan Penataan Bundaran Kumai Kec. Kumai Rp. 194.040.000,00, BA. Penyerahan Pertama Pek. No. 033/SDP-PB/III/2014, Tgl. 13 Ags 2014, CV. SAKA DUTA PERSADA + Pengawasan Teknis Rp. 3.888.000, CV. PRIMA CIPTA DESIGN (Persentase 64,36 %)
9.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	14/05/2014	600/23-SPK/TRKP-20 14/PUD	197.818.000,00	Lanjutan Penataan Taman Kawasan Bundaran GM. Arsyad Kec. Arut Selatan, Rp. 193.930.000,00, BA. Penyerahan Pertama Pek. No. 13/MP-KM/III/2014, Tgl. 14 Ags 2014, CV. MAWARNA PERDANA + Pengawasan Teknis Rp. 3.888.000, CV. PRIMA CIPTA DESIGN (Persentase 82,5)
10.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	70.521.000,00	Perencanaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Kab. Kotawaringin Barat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				48.675.000,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	48.675.000,00	Perencanaan Teknis
Dinas Perhubungan				70.706.500,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	21/01/2016	15/KPA-LLAJ/2016	6.457.000,00	Perencanaan Teknis Pengadaan Rambu Tiang F Tahun 2016
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis</i>)	-	-	2.589.500,00	2.09.2.09.01.17.02 : Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 5.2.3.24.01 : Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor,Perencanaan teknis peningkatan gedung kantor balai PKB pada Dinas Perhubungan Kab. Ktw. Barat TA. 2020 Pengadaan Nomor : 24.04.06.01.2020.000015

3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis</i>)	17/03/2020	550/06/DPHB-Pras	4.389.000,00	Perencanaan teknis pembangunan halte MTSN Kumai
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis</i>)	-	-	1.424.500,00	2.09.2.09.01.17.02 : Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 5.2.3.24.19 : Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Pelabuhan, Perencanaan teknis rehab WC pelabuhan penyeberangan kumai pada Dinas Perhubungan Kab. Ktw. Barat TA. 2020 Pengadaan Nomor : 24.04.06.01.2020.000029
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Rehab WC pelabuhan Penyeberangan kumai</i>)	-	-	49.769.000,00	2.09.2.09.01.17.02 : Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 5.2.3.24.19 : Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Pelabuhan, Belanja modal rehab WC pelabuhan penyeberangan kumai pada Dinas Perhubungan Kab. Ktw. Barat TA. 2020 Pengadaan Nomor : 24.04.06.01.2020.000031
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan teknis</i>)	-	-	1.226.500,00	2.09.2.09.01.17.02 : Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 5.2.3.24.19 : Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Pelabuhan, Pengawasan teknis rehab WC pelabuhan penyeberangan kumai pada Dinas Perhubungan Kab. Ktw. Barat TA. 2020 Pengadaan Nomor : 24.04.06.01.2020.000036
7.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	15/04/2021	551/45/DISHUB-PRAS	4.851.000,00	Perencanaan Pembangunan Halte SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				254.243.000,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Tahap I</i>)	-	-	7.436.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Tahap 1
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pembangunan Gedung Kantor Tahap I</i>)	-	-	66.594.000,00	Uang Muka 30 % Pembangunan Gedung Kantor Tahab I
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Bangunan Gedung Kantor</i>)	-	-	99.891.000,00	Termin 75% Pembangunan Gedung Kantor Tahap. I
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I</i>)	-	-	10.428.000,00	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Tahab. I
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Termin 100% Pembanguan Gedung Kantor Tahap I</i>)	-	-	55.495.000,00	Termin 100 % Pembangunan Gedung Kantor Tahab. I
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap 2</i>)	-	-	14.399.000,00	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tahab 2
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				42.438.000,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	42.438.000,00	Perencanaan Revitalisasi Pasar Cempaka Kumai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				2.970.000,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	2.970.000,00	2.12.2.12.01.02.23 : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor; 5.2.3.24.01 : Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Pengadaan Nomor : 24.04.21.02.2020.000016
Dinas Kepemudaan dan Olahraga				409.167.000,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Percanaan Rehabilitasi Aula Kantor Th 2020</i>)	-	-	3.982.000,00	Percanaan Rehabilitasi Aula Kantor Th 2020
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Pengawasan Rehabilitasi Aula Kantor Dispora Th 2020</i>)	-	-	5.995.000,00	Pengawasan Rehabilitasi Aula Kantor Dispora Th 2020

3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Rehabilitasi pembangunan aula kantor Dispora th 2020</i>)	-	-	189.753.000,00	Rehabilitasi pembangunan aula kantor Dispora th 2020
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	05/10/2021	SPK No. 05/Keg.Ukp.Dispora/2021	6.715.000,00	Perencanaan Rehabilitasi Aula Kantor Th 2021 (Tahap2)
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	07/12/2021	20/Keg.Ukp.Dispora/2021	195.000.000,00	Rehap Aula Dispora Tahun 2021 Tahap 2
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	07/12/2021	17/KEG.UKP.DISPORA/2021	7.722.000,00	Pengawasan Rehap Aula Kantor Dispora Tahap 2 Th 2021
Dinas Pariwisata				10.612.000,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	15/03/2017	930/PPHP-DISPAR/5/III/2017	3.000.000,00	Perencanaan Rehab Jembatan,pergola,mainan,KM,Shelter Tj.Harapan Lanjutan Plaza Kuliner Gazebo Sebuai Timur (Perencanaan Shelter Tj. Harapan)
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	27/03/2020	930/PPHP-DISPAR/02.1/III/2020	1.628.000,00	Perencanaan pembangunan tempat pembuangan sampah (Keraya)
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	04/09/2020	930/PPHP-DISPAR/03.2/IV/2020	5.984.000,00	Perencanaan pembuatan jalur pejalan kaki/ pedestrian (Kubu)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				164.271.560,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	02/11/2015	-	49.940.000,00	Perencanaan Teknis Rehab Berat Pembangunan Kantor Distanak Gedung 1
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	02/11/2015	-	24.860.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jut 2016
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	08/07/2015	-	56.892.000,00	Perencanaan Teknis Balai Benih Hortikultura
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	19/08/2017	-	3.500.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Usaha Teni Rt 1 Kel Mendawai Seberang (PT Mega Surya)
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	19/12/2017	-	1.823.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Ulin Di RT. 8 Kel. Candi (PT. Mega Surya)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	12/03/2017	-	5.100.000,00	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Usaha Tani Rt 1 Kel Mendawai Seberang (CV. Tika Kreatif Desain Konsultan)
7.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	12/03/2017	-	2.720.000,00	Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Kayu Ulin Rt 8 Kel. Candi (CV. Tika Kreatif Desain Konsultan)
8.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	03/11/2020	-	1.600.500,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar Bpp Kotawaringin Lama Oleh PT. Mega Surya Konsultan
9.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	03/11/2020	-	2.860.000,00	Perencanaan Teknis Rehab Sedang Berat Kantor PP Kotawaringin Lama Oleh PT. Mega Surya Konsultan
10.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	21/03/2020	-	8.800.000,00	Perencanaan Teknis Rehab Sedang Berat BPP Pangkalan Banteng Oleh PT. Mega Surya Konsultan
11.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>tambah daya</i>)	-	-	6.176.060,00	Tambah Daya Kwh Kantor BPP Pangkalan Banteng
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				9.427.000,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	15/09/2014	UKP.1430/632/EX/2014	9.427.000,00	Perencanaan Teknis Rumah Potong Unggas (RPU) PT. Megasurya Konsultan
Sekretariat Daerah				9.239.148.804,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	26/05/2015	03/Keg.Pmb.TPU/kesra//2015	3.600.000,00	Perencanaan teknis Pembangunan pagar Makam gg. Mawar RT.10 Kel. Candi Kec. Kumai
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	26/05/2015	03/Keg.Pmb.TPU/kesra//2015	3.600.000,00	Perencanaan teknis pemagaran makam desa bumiharjo kec kumai
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	26/05/2015	03/Keg.Pmb.TPU/kesra//2015	3.600.000,00	Perencanaan Teknis Penataan kawasan makam muslim RT 02 Sei tendang kec Kumai
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	79.640.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Aula Kantor Bupati

5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Perencanaan Teknis</i>)	-	-	5.448.000,00	Perencanaan teknis rehab asrama di Jalan Temenggung Jayakarta Palangka raya
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	3.792.000,00	Perencanaan Rehab Asrama Mahasiswa di Jalan Semeru Palangka Raya
7.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	15.555.833,33	Perencanaan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU di Kecamatan Kotawaringin Lama
8.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	7.775.166,67	Perencanaan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU di Kecamatan Kumai
9.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	9.542.500,00	Perencanaan Teknis Pengadaan tiang ornamen tiang Tangkai 2 Lanjutan Lampu PJU ready For Smart Lengkap dan Lampu Ready For Smart PJU Tiang oktagon Bunsaran Sport Center
10.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	7.720.166,67	Perencanaan Teknis Pengadaan dan Pemasangan lampu PJU di Jalan Pariwisata Desa Simpang Barambai
11.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	4.257.000,00	Perencanaan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU LED Ready For Smart di sekitaran segitiga Bundaran Pancasila dan Bundaran Pangkalan Lima
12.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	6.568.833,33	Perencanaan Teknis Pengadaan dan Pemasangan PJU di 6 Kecamatan
13.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	4.581.500,00	Perencanaan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU LED Ready For Smart di Area Pangkalan Bun Park
14.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Aula Kantor Bupati</i>)	-	-	1.316.100.000,00	Pembangunan Aula
15.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Gedung balai</i>)	-	-	346.500.000,00	Pembangunan Gedung Balai di Area Rumah Jabatan Bupati
16.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	449.365.000,00	Pembangunan Bangunan Penunjang Rumah Jabatan Bupati
17.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Aula Kantor Bupati</i>)	-	-	793.000.000,00	Pembayaran termin 100% atas Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Bupati (Tahap I)
18.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	-	98.175.000,00	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Aula Kantor Bupati (Tahap I)
19.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	01/06/2021	027/SPK.02/Konsul/BU.III/2021	6.664.218,00	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan Balai Rumah Jabatann Bupati (Lanjutan)
20.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	01/06/2021	027/SPK.02/Konsul/BU.III/2021	29.449.818,00	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Bangunan Penunjang Rumah Jabatan Bupati (Lanjutan)
21.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	01/06/2021	027/SPK.02/Konsul/BU.III/2021	34.647.195,00	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Lingkungan Rumah Jabatan Bupati
22.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	01/06/2021	027/SPK.02/Konsul/BU.III/2021	20.648.769,00	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Masjid Rumah Jabatan Bupati
23.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	-	027/SPK.03/Konsul/BU.III/2021	23.980.000,00	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Penataan Halaman dan Taman Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat
24.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	04/12/2021	027/SP.01/Fsk/BU.III/2021	677.670.000,00	Uang Muka 30% dari Nilai Surat Perjanjian (SP) atas Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Bupati Kab. Kotawaringin Barat Tahap II TA 2021
25.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	28/04/2021	027/SP.03/Fsk/BU.III/2021	38.056.659,08	Pembayaran Uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan balai rumah jabatan Bupati (Lanjutan)
26.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	28/04/2021	027/SP.03/Fsk/BU.III/2021	168.690.612,60	Uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan penunjang Rumah Jabatan Bupati (lanjutan)

27.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	28/04/2021	027/SP.03/Fsk/BU.III/2021	194.348.250,60	Pembayaran uang muka 20% pekerjaan jalan lingkungan rumah jabatan Bupati
28.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	28/04/2021	027/SP.03/Fsk/BU.III/2021	118.274.157,72	Pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan masjid rumah jabatan
29.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	06/02/2021	027/SP.04/FSK/BU.III/2021	206.085.000,00	Penataan Halaman dan Taman di Rumah Jabatan Bupati
30.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	06/02/2021	027/SP.04/Fsk/BU.III/2021	206.085.000,00	Pembayaran 60% atas Pekerjaan Penataan Halaman dan Taman Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Barat TA. 2021
31.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	04/12/2021	027/SPK.04/Konsul/BU.III/2021	90.750.000,00	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Aula Kantor Bupati Koawaringin Barat Tahap II TA. 2021
32.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	04/12/2021	027/SP.01/Fsk/BU.III/2021	1.581.230.000,00	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat Tahap II TA. 2021
33.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	28/04/2021	027/SP.06/Konsul/BU.III/2021	8.316.000,00	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan teknis pembangunan balai rumah jabatan Bupati (Lanjutan)
34.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	28/04/2021	027/SP.06/Konsul/BU.III/2021	33.264.000,00	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan teknis pembangunan bangunan penunjang rumah jabatan Bupati (Lanjutan)
35.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	28/04/2021	027/SP.06/Konsul/BU.III/2021	38.461.500,00	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan teknis pembangunan jalan lingkungan rumah jabatan Bupati
36.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	28/04/2021	027/SP.06/Konsul/BU.III/2021	23.908.500,00	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan teknis pembangunan masjid rumah jabatan Bupati
37.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	28/04/2021	027/SP.03/Fsk/BU.III/2021	152.226.636,34	Pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan balai rumah jabatan Bupati (Lanjutan)
38.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	28/04/2021	027/SP.03/Fsk/BU.III/2021	674.762.450,40	Pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan bangunan penunjang rumah jabatan Bupati (Lanjutan)
39.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	28/04/2021	027/SP.03/Fsk/BU.III/2021	777.393.002,38	Pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan jalan lingkungan rumah jabatan Bupati
40.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	28/04/2021	027/SP.03/Fsk/BU.III/2021	473.096.630,88	Pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan masjid rumah jabatan Bupati
41.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	06/02/2021	027/SPK.07/Konsul/BU.III/2021	27.500.000,00	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan teknis penataan halaman dan tamann rumah jabatan Bupati Kotawaringin Barat TA 2021
42.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	10/08/2021	027/SP.04/Fsk/BU.III/2021	274.780.000,00	Pembayaran 100% atas pekerjaan penataan halaman dan taman rumah jabatan Bupati Kotawaringin barata TA 2021
43.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	21/10/2021	027/SPK.08/Konsul/BU.III/2021	3.795.000,00	Pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan teknis pembangunan pagar rumah jabatan Bupati Kotawaringin Barat TA 2021
44.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	11/03/2021	027/SPK.09/Konsul/BU.III/2021	6.556.000,00	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pagar rumah jabatan Bupati Kotawaringin Barat TA 2021
45.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	11/03/2021	027/SPK.06/Fsk/BU.III/2021	189.688.404,00	Pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan pagar rumah jabatan bupati kotawaringin barat TA 2021
Sekretariat DPRD				9.427.000,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	03/03/2021	19/PA-SETWAN/2021	9.427.000,00	Jasa Perencanaan Interior Rehab Ruang Komisi Dprd (Komisi B & Komisi C) No Bast Hasil Perkerjaan : 175.050 / 04 / Bast / Iv / 2021 Waktu Pelaksanaan : 3 - 17 Maret 2021
Kecamatan Arut Selatan				835.926.000,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	08/11/2015	027/58/PA-AS/III/2015	3.949.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Kelurahan Raja Seberang TA. 2015

2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	08/11/2015	027/58/PA-AS/VII/2015	59.818.500,00	Uang muka Termin 30 % Pembangunan gedung balai pertemuan Kelurahan Raja Seberang TA. 2015
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	08/11/2015	027/58/PA-AS/VII/2015	139.576.500,00	Pembayaran 100% pembangun gedung balai pertemuan kelurahan raja seberang TA. 2015
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	08/11/2015	027/58/PA-AS/VII/2015	5.929.000,00	Pengawasan Teknis Pembangunan gedung balai pertemuan gedung kelurahan raja seberang TA. 2015
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	08/11/2015	027/37/PA-AS/VII/2015	3.960.000,00	Perencanaan teknis pembangunan gedung kantor kelurahan mendawai seberang TA. 2015
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	08/11/2015	027/37/PA-AS/VII/2015	59.757.000,00	Uang muka termin 30 % pembangunan gedung kantor kelurahan mendawai seberang TA.2015
7.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	08/11/2015	027/37/PA-AS/VII/2015	139.433.000,00	Pembayaran 100 % Pembangunan gedung kantor kelurahan mendawai seberang
8.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	08/11/2015	027/37/PA-AS/VII/2015	5.929.000,00	Pengawasan teknis pembangunan gedung kantor kelurahan mendawai seberang TA. 2015
9.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	22/08/2016	050/458/VIII/AS/2016	5.841.000,00	Perencanaan teknis pembangunan balai pertemuan kelurahan raja seberang (Tahap II) TA. 2016
10.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	22/08/2016	050/457/VIII/AS/2016	5.852.000,00	Perencanaan teknis pembangunan kantor kelurahan mendawai seberang (Tahap II) TA. 2016
11.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	29/09/2016	640/466/IX/AS/2016	109.479.700,00	Pembangunan gedung balai pertemuan kelurahan raja seberang (Tahap II) TA. 2016
12.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	29/09/2016	640/466/IX/AS/2016	199.039.000,00	Pembangunan kantor kelurahan mendawai seberang (Tahap II) TA. 2016
13.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	29/09/2016	640/466/IX/AS/2016	89.574.300,00	Pembangunan balai pertemuan kelurahan raja seberang (Tahap II) TA. 2016
14.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	29/09/2016	760/467/IX/AS/2016	3.905.000,00	Pengawasan teknis pembangunan kantor kelurahan mendawai seberang (Tahap II) TA. 2016
15.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	29/09/2016	760/468/IX/AS/2016	3.883.000,00	Pengawasan teknis pembangunan kantor kelurahan raja seberang (Tahap II) TA. 2016
Kecamatan Arut Utara				2.100.000,00	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>)	31/12/2013	-	2.100.000,00	Perencanaan Teknis
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)				136.615.094.529,36	

